

LAPORAN KEUANGAN AUDITED SEMESTER II TA 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Akuntansi dan Pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2026
Direktur Jenderal Perikanan

Tangkap.



Lotharia Latif

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	3
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	67
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	114
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	172
F. Pengungkapan Penting Lainnya	177
VI. Lampiran dan Daftar	245



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2026
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap,

Lotharia Latif

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.130.545.512.488.

Realisasi Belanja Negara 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.727.261.946.882.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.050.238.048.499 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp708.296.507.600; Aset Tetap (netto) sebesar Rp5.378.359.626.595; Properti Investasi Rp193.692.938.755 Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp 2.855.976.110; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp769.912.162.828.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp369.281.675.719 dan Rp6.680.956.372.780.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.120.112.696.364 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp936.832.134.438 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 183.280.561.926, Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing Rp3.220.295.949 dan Rp186.500.857.875 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp186.500.857.875.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp5.883.172.592.765 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp186.500.857.875, kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp2.055.017.018) dan Transaksi antar entitas senilai Rp613.337.939.158, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp6.680.956.372.780.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DITJEN PERIKANAN TANGKAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Uraian	Catatan	2025				2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	REALISASI
A. Pendapatan Negara Dan Hibah		0,	0,	0,	0	0,
I. Pendapatan Perpajakan		0,	0,	0,	0	0,
1. Pajak Dalam Negeri		0,	0,	0,	0	0,
2. Pajak Perdagangan Internasional		0,	0,	0,	0	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.273.494.061.000,	1.130.545.512.488,	(142.948.548.512,)	88,78	1.053.010.386.957,
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.1.1	1.200.478.382.000,	1.026.499.638.986,	(173.978.743.014,)	85,51	951.819.466.723,
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0,	0,	0,	0	0,
3. Pendapatan BLU		0,	0,	0,	0	0,
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	73.015.679.000,	104.045.873.502,	31.030.194.502,	142,5	101.190.920.234,
III. Pendapatan Hibah		0,	0,	0,	0	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.273.494.061.000,	1.130.545.512.488,	(142.948.548.512,)	88,78	1.053.010.386.957,
B. Belanja Negara	B.2	0,	0,	0,	0	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat		2.664.335.557.000,	1.727.261.946.882,	(937.073.610.118,)	64,83	860.627.463.236,
1. Belanja Pegawai	B.2.1	247.371.621.000,	242.049.672.937,	(5.321.948.063,)	97,85	229.794.101.063,
2. Belanja Barang	B.2.2	1.871.462.328.000,	1.456.594.809.717,	(414.867.518.283,)	77,83	574.745.291.645,
3. Belanja Modal	B.2.3	545.501.608.000,	28.617.464.228,	(516.884.143.772,)	5,25	56.088.070.528,
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0,	0,	0,	0	0,
5. Belanja Subsidi		0,	0,	0,	0	0,
6. Belanja Hibah		0,	0,	0,	0	0,
7. Belanja Bantuan Sosial		0,	0,	0,	0	0,
8. Belanja Lain-lain		0,	0,	0,	0	0,
II. Transfer ke Daerah		0,	0,	0,	0	0,
1. Dana Bagi Hasil		0,	0,	0,	0	0,
2. Dana Alokasi Umum		0,	0,	0,	0	0,
3. Dana Transfer Khusus		0,	0,	0,	0	0,
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0,	0,	0,	0	0,
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0,	0,	0,	0	0,
c. Hibah Kepada Daerah		0,	0,	0,	0	0,
4. Dana Otonomi Khusus		0,	0,	0,	0	0,
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta		0,	0,	0,	0	0,
6. Dana Desa		0,	0,	0,	0	0,
7. Insentif Fiskal		0,	0,	0,	0	0,
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		2.664.335.557.000,	1.727.261.946.882,	(937.073.610.118,)	64,83	860.627.463.236,
C. PEMBIAYAAN		0,	0,	0,	0	0,

NERACA

DITJEN PERIKANAN TANGKAP
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,	2.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	444.068.949,	306.932.062
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.7	21.172.817.728,	20.895.800.631
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	29.684.374.952,	29.827.727.397
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(29.179.785.773,)	(29.407.169.181)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		504.589.179,	420.558.216
Persediaan	C.1.8	686.175.031.744,	44.913.827.294
JUMLAH ASET LANCAR		708.296.507.600,	66.539.118.203
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	3.619.813.948.424,	3.635.961.793.591
Peralatan dan Mesin	C.2.2	790.297.101.650,	747.538.103.773
Gedung dan Bangunan	C.2.3	822.890.971.980,	787.698.310.066
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	2.850.074.983.943,	2.867.865.609.468
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	19.680.845.884,	23.821.507.884
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	29.329.639.808,	143.588.893.165
AKUMULASI PENYUSUTAN		(2.753.727.865.094,)	(2.578.908.847.631)
JUMLAH ASET TETAP		5.378.359.626.595,	5.627.565.370.316
Properti Investasi	C.3		
Properti Investasi	C.3.1	215.291.136.399,	187.429.347.232
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	(21.621.384.923,)	(17.127.800.683)
JUMLAH Properti Investasi		193.669.751.476,	170.301.546.549
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.4		
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.4.1	2.855.976.110,	2.855.976.110
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.2	(2.855.976.110,)	(14.279.881)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)		0,	2.841.696.229
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0,	2.841.696.229
ASET LAINNYA	C.5		
Aset Tak Berwujud	C.5.1	5.812.070.382,	6.306.617.132
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.5.2	719.527.816.579,	5.472.213.465
Aset Lain-lain	C.5.3	177.531.048.845,	154.494.387.263
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.5.4	(132.958.772.978,)	(134.937.729.356)
JUMLAH ASET LAINNYA		769.912.162.828,	31.335.488.504
JUMLAH ASET		7.050.238.048.499,	5.898.583.219.801
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.6		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.2	353.914.326.962,	7.713.337.556
Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.3	15.367.348.757,	7.695.289.480

Uang Muka dari KPPN	C.6.1	0,	2.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		369.281.675.719,	15.410.627.036
JUMLAH KEWAJIBAN		369.281.675.719,	15.410.627.036
EKUITAS			
EKUITAS	C.7		
Ekuitas	C.7	6.680.956.372.780,	5.883.172.592.765
JUMLAH EKUITAS		6.680.956.372.780,	5.883.172.592.765
JUMLAH EKUITAS		6.680.956.372.780,	5.883.172.592.765
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.050.238.048.499,	5.898.583.219.801

LAPORAN OPERASIONAL

DITJEN PERIKANAN TANGKAP
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL		0,	0,
PENDAPATAN OPERASIONAL	D	0,	0,
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0,	0,
Pendapatan Pajak Penghasilan		0,	0,
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0,	0,
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0,	0,
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0,	0,
Pendapatan Cukai		0,	0,
Pendapatan Pajak Lainnya		0,	0,
Pendapatan Bea Masuk		0,	0,
Pendapatan Bea Keluar		0,	0,
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0,	0,
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1	0,	0,
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1.1	1.023.503.649.076,	954.494.968.076,
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)		0,	0,
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		96.609.047.288,	92.533.670.275,
Pendapatan Badan Layanan Umum		0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.2	1.120.112.696.364,	1.047.028.638.351,
PENDAPATAN HIBAH		0,	0,
Pendapatan Hibah		0,	0,
Jumlah Pendapatan Hibah		0,	0,
Jumlah Pendapatan		1.120.112.696.364,	1.047.028.638.351,
BEBAN OPERASIONAL		0,	0,
Beban Pegawai	D.2	241.901.369.598,	230.018.070.782,
Beban Persediaan	D.3	1.973.570.682,	8.219.548.806,
Beban Barang dan Jasa	D.4	254.016.198.118,	294.028.620.691,
Beban Pemeliharaan	D.5	36.351.410.511,	43.793.249.955,
Beban Perjalanan Dinas	D.6	60.161.083.374,	162.445.383.793,
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.7	109.816.091.605,	121.974.977.373,
Beban Pembayaran Bunga Utang		0,	0,
Beban Subsidi		0,	0,
Beban Hibah		0,	0,
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	230.084.155.402,	230.972.040.573,
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	2.528.255.148,	143.265.849,
Beban Transfer ke Daerah		0,	0,
Beban Lain-Lain		0,	0,
JUMLAH BEBAN		936.832.134.438,	1.091.595.157.822,
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.11	183.280.561.926,	(44.566.519.471,)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,	0,

Surplus/Defisit Pelepasan Aset		1.094.498.162,	(17.684.104.493,)
Pendapatan Pelepasan Aset		2.356.521.700,	2.212.203.768,
Beban Pelepasan Aset		1.262.023.538,	19.896.308.261,
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,	0,
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,	0,
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,	0,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.125.797.787,	60.400.384.127,
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.137.137.787,	103.185.244.615,
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.340.000,	42.784.860.488,
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.220.295.949,	42.716.279.634,
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		186.500.857.875,	(1.850.239.837,)
POS LUAR BIASA		0,	0,
Beban Luar Biasa		0,	0,
POS LUAR BIASA		0,	0,
SURPLUS/DEFISIT - LO		186.500.857.875,	(1.850.239.837,)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DITJEN PERIKANAN TANGKAP LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	5.883.172.592.765,	5.802.866.832.042,
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	186.500.857.875,	(1.850.239.837,)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(2.055.017.018,)	(36.181.455.622,)
PENYESUAIAN NILAI ASET		0,	0,
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.1	1,	42.787.497.856,
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.2	0,	0,
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0,	0,
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	(2.250.543.656,)	(80.960.612.579,)
LAIN-LAIN	E.5	195.526.637,	1.991.659.101,
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	613.337.939.158,	118.337.456.182,
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		797.783.780.015,	80.305.760.723,
EKUITAS AKHIR	E.7	6.680.956.372.780,	5.883.172.592.765,

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

Profil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang melimpah serta menjadi salah satu pilar dalam ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi ini menjadi salah satu modal utama untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu penguatan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan serta optimalisasi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan pendekatan ekonomi biru (blue economy). Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan program ekonomi biru yang diterapkan oleh KKP, DJPT mengampu salah satu program prioritas KKP yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem dan sumber daya ikan serta sekaligus

mendorong peningkatan ekonomi di sektor kelautan perikanan dengan cara optimalisasi potensi perikanan nasional dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Kebijakan PIT juga merupakan suatu langkah nyata dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional

berbasis maritim sebagaimana tertuang pada agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selain dukungan terhadap program prioritas KKP, DJPT terus melaksanakan programstrategis lainnya dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, peningkatan infrastruktur industri perikanan tangkap, produktivitas nelayan, serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap pada tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi

Visi DJPT tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang maju dan berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera untuk mewujudkan Indonesia majuyang berdaulat, mandiri dan berkperdibadian berdasarkan gotong royong

Misi

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
- c. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;

- d. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini

diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.

A.2. Produk Hukum Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri

No.	Tanggal Penetapan	Tentang
1.	6 Januari	Tim Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penangkapan Ikan

2.	20 Januari	Tim Penguji Teknis pada Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
3.	20 Januari	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4.	20 Januari	Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
5.	24 Februari	Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Mesin Kapal Penangkap Ikan (Juknis BP Mesin)
6.	24 Februari	Tim Pelaksana Hibah GEF – 6
7.	24 Februari	Satgas SPIP di Lingkungan DJPT Tahun 2025
8.	12 Maret	Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Alat Penangkapan Ikan (Juknis BP API)
9.	12 Maret	Pin Up pada Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10.	13 Maret	Indikator Kinerja Utama DJPT
11.	13 Maret	Tim Kinerja DJPT
12.	14 April	Tim Zona Integritas
13.	14 April	Tim Penanganan Benturan Kepentingan DJPT
14.	14 April	UPG UPT Lingkup DJPT
15.	14 April	UPG DJPT
16.	14 April	Pengarusutamaan Gender (PUG)
17.	20 Mei	Tim Penanganan Pengaduan

A.3. Kerjasama Ditjen Perikanan Tangkap

N O	MITRA KERJA SAMA	JUDUL	RUANG LINGKUP
1	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sinergi Program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional di	pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi terkait dengan lokasi desa sasaran dukungan program Kalaju dan Kalamo serta lokasi BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
			sinergi pelaksanaan program Kalaju dan Kalamo serta Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
			penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di lokasi Kalaju dan Kalamo;
			pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lokasi Kalaju dan Kalamo

		Desa dan Daerah Tertinggal	
2	Yayasan IPNLF Indonesia (YII)	Peningkatan Peran Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam Mewujudkan Praktik Perikanan yang Berkelanjutan	dukungan pengumpulan data dan informasi perikanan tangkap;
			dukungan pengembangan teknologi untuk pemantauan penangkapan ikan, ketertelusuran, dan penanganan hasil tangkapan kualitas ikan;
			dukungan terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals 14 (SDGs 14);
			dukungan pemantauan dan perbaikan hak-hak tenaga kerja dalam perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Indonesia;
			dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Indonesia; dan
			dukungan kepada delegasi Indonesia pada pertemuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.
3	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Dukungan Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan	Program Perikanan Kakap Kerapu Laut Dalam di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
			program perikanan tuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan 713,714, dan 715
4	PT Moores Rowland dba Starling Resources	Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan	pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Provinsi Lampung;
			pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat
			penguatan kebijakan pengelolaan perikanan rajungan.
5	Yayasan WWF Indonesia	Pengelolaan Penangkapan Ikan Terukur dan Berkelanjutan melalui Pendekatan Ekosistem dan Perbaikan Perikanan Tangkap	dukungan implementasi RPP dan pelaksanaan program perbaikan perikanan tangkap untuk komoditas tuna, cakalang, tongkol, ikan karang, sidat, udang dan kepiting bakau
			dukungan pelaksanaan program perikanan tangkap melalui pendekatan EAFM
			dukungan implementasi BMP untuk perikanan tangkap skala kecil
6	Yayasan MDPI	Peningkatan Peran Nelayan Kecil dalam	Penguatan Pengumpulan Data
			Penguatan Kelembagaan dan Korporasi Nelayan

		Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dengan Memanfaatkan Peluang Pasar	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Keterlusuran
			Pelaksanaan Harvest Strategy Tuna di WPPNRI 713-715
			Penguatan Akses Pasar Internasional bagi Produk Indonesia yang Berasal dari Nelayan Kecil
7	BPJS Ketenagakerjaan	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja di Sektor Perikanan Tangkap	Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi awak kapal, nelayan, dan tenaga kerja lainnya di sektor perikanan tangkap melalui program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua
			Sosialisasi bersama;
			Pertukaran data dan informasi.
8	Asosiasi Perikanan Pole & Line Dan Handline Indonesia (Ap2hi)	Sinergi Pengelolaan Perikanan Tuna Huhate, Pancing Ulur Dan Pancing Tonda	a. dukungan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui kegiatan pendataan, penguatan kelembagaan, perumusan, dan strategi komunikasi kebijakan pengelolaan perikanan tuna; b. pengembangan sistem pendataan dan ketelusuran berbasis elektronik; c. penerapan standardisasi dan sertifikasi perikanan tuna; d. perlindungan dan pemberdayaan nelayan tuna dan awak kapal perikanan tuna; dan e. dukungan pelaksanaan perizinan berusaha dan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT;
9	PT Pertamina Patra Niaga	Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Sentra/Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan	Identifikasi, evaluasi, dan implementasi terhadap:
			kebutuhan penyaluran bahan bakar minyak;
			jenis lembaga penyalur bahan bakar minyak; dan
			calon mitra usaha lembaga penyalur bahan bakar minyak; di Sentra/Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.
10	Yayasan Pesisir Lestari	Dukungan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya	dukungan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan (RPP) gurita;
			dukungan terhadap pemberdayaan nelayan;

		Kelautan dan Perikanan secara Kolaboratif dan Partisipatif	dukungan terhadap program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP) gurita; dan penguatan dalam koordinasi pengumpulan data perikanan skala kecil.
11	Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara	Dukungan Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan	Dukungan peningkatan data perikanan, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional; Dukungan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan perikanan regional, yaitu G16, Forum Negara Pantai dan Regional Fisheries Regional Organization (RFMO) yang relevan; Dukungan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang perikanan tangkap; dan Penguatan kemitraan dengan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pengelolaan di bidang perikanan tangkap
12	Konservasi Indonesia	Sinergi Tata Kelola Ketenagakerjaan Bidang Perikanan Tangkap	Dukungan pendataan perikanan tangkap komoditas ikan pelagis penting di WPPNRI 572; Dukungan kajian stok perikanan pelagis penting di WPPNRI 572 dan penghitungan kuota sumber daya ikan; dan Dukungan perencanaan dan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di WPPNRI 572.
13	PT Jaring Aruna	Dukungan Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab	program perikanan kakap dan kerapu laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) prioritas; program perikanan tuna di WPPNRI 713, 714, dan 715; dan program perikanan pesisir di WPPNRI 714 dan 715.
14	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal	Sinergi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan Pendataan Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Pangkalan	a. program magang mahasiswa; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building); c. penyebaran ilmu pengetahuan dan publikasi ilmiah; d. pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap; dan

		Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	e. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai perikanan tangkap.
15	Kementerian Ketenagakerjaan (Ditjen Binapenta)	Sinergi Tata Kelola Ketenagakerjaan Bidang Perikanan Tangkap	penguatan kelembagaan perekrutan awak kapal perikanan untuk penempatan di dalam dan luar negeri; sosialisasi dan edukasi terkait perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri; koordinasi penggunaan tenaga kerja asing pada kapal perikanan; dan pertukaran data dan informasi terkait perekrutan dan penempatan tenaga kerja di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.
16	Kementerian Ketenagakerjaan (Ditjen Binwasker)	Pembinaan dan Pengawasan Bersama serta Penegakan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Awak Kapal	pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan pada kapal perikanan; dan pelaksanaan pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3.
17	FPIK Universitas Padjadjaran	Sinergi pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan pendataan produksi perikanan tangkap di pelabuhan pangkalan melalui tridarma perguruan tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka kegiatan ilmiah bersama pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
18	FPIK Universitas	Dukungan Penangkapan	a. implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

	s Jenderal Soedirman	Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
19	FIKP Universitas Hasanuddin	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
20	FPIK Universitas Halu Oleo	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
21	FPIK Universitas Diponegoro	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
22	FPIK Universitas Brawijaya	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
23	Institut Teknologi Kelautan Buton	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap

		melalui Dharma Perguruan Tinggi Tri	pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
24	FKP Universitas Syiah Kuala	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi Tri	penyelenggaraan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka kegiatan ilmiah bersama pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
25	FPIK Institut Pertanian Bogor	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi Tri	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka kegiatan ilmiah bersama pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
26	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal	Sinergi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan Pendataan Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Pangkalan Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	a. program magang mahasiswa; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building); c. penyebaran ilmu pengetahuan dan publikasi ilmiah; d. pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap; dan e. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai perikanan tangkap.

A.4. Jumlah Entitas Pelaporan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

No	Kd	Entitas	Jenis Kewenangan				Juml
			KP	KD	DK	TP	Sat
KANTOR PUSAT (KP)							
1	03	SEKRETARIAT DIT. JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1				1
KANTOR DAERAH (KD)							
2	03	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN		1			1
9	03	PPN AMBON		1			1

4	03	PPN BRONDONG		1			1
5	03	PPN KARANGANTU		1			1
6	03	PPN KEJAWANAN		1			1
7	03	PPN KWANDANG		1			1
8	03	PPN PEKALONGAN		1			1
9	03	PPN PELABUHAN RATU		1			1
10	03	PPN PEMANGKAT		1			1
11	03	PPN PENGAMBENGAN		1			1
12	03	PPN PRIGI		1			1
13	03	PPN SIBOLGA		1			1
14	03	PPN SUNGAILIAT		1			1
15	03	PPN TANJUNG PANDAN		1			1
16	03	PPN TERNATE		1			1
17	03	PPN TUAL		1			1
18	03	PPP TELUK BATANG		1			1
19	03	PPS BELAWAN		1			1
20	03	PPS BITUNG		1			1
21	03	PPS BUNGUS		1			1
22	03	PPS CILACAP		1			1
23	03	PPS KENDARI		1			1
24	03	PPS NIZAM ZACHMAN		1			1
DEKONSENTRASI (DK)							
25	03	DKP PROV. BANTEN				1	1
26	03	DKP PROV. BALI				1	1
27	03	DKP PROV. BENGKULU				1	2
28	03	DKP PROV. DKI JAKARTA				1	2
29	03	DKP PROV. JAMBI				1	1
30	03	DKP PROV. JAWA BARAT				1	2
31	03	DKP PROV. JAWA TENGAH				1	2
32	03	DKP PROV. JAWA TIMUR				1	2
33	03	DKP PROV. KALIMANTAN BARAT				1	2
34	03	DKP PROV. KALIMANTAN TENGAH				1	1
35	03	DKP PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				1	1
36	03	DKP PROV. KEPULAUAN RIAUE				1	2
37	03	DKP PROV. LAMPUNG				1	2

38	03	DKP PROV. MALUKU				1	2
39	03	DKP PROV. NUSA TENGGARA BARAT				1	2
40	03	DKP PROV. NUSA TENGGARA TIMUR				1	1
41	03	DKP PROV. RIAU				1	2
42	03	DKP PROV. SULAWESI BARAT				1	1
43	03	DKP PROV. SULAWESI TENGAH				1	2
44	03	DKP PROV. SULAWESI TENGGARA				1	2
45	03	DKP PROV. SULAWESI UTARA				1	2
46	03	DKP PROV. SUMATERA BARAT				1	2
47	03	DKP PROV. SUMATERA SELATAN				1	1
48	03	DKP PROV. SUMATERA UTARA				1	2
49	03	DKP PROV. YOGYAKARTA				1	1
			1	23	0	25	49

Pendekatan

Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akuntansi

A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 7 entitas.

<i>Basis Akuntansi</i>	A.3 Basis Akuntansi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------

Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.664.335.557.000. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang disebabkan adanya efisiensi, realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan dan relaksasi anggaran. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PENDAPATAN NEGARA	1.273.494.061.000	1.273.494.061.000
Jumlah Pendapatan	1.273.494.061.000	1.273.494.061.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	206.783.053.000	247.371.621.000
BELANJA BARANG	500.777.886.000	1.871.462.328.000
BELANJA MODAL	552.693.636.000	545.501.608.000
Jumlah Belanja	1.260.254.575.000	2.664.335.557.000

Realisasi

Pendapatan Rp

1.130.545.512.48

8

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.130.545.512.488 atau mencapai 88,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.273.494.061.000. Pendapatan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri dari Pendapatan fungsional SDA, fungsional non SDA, Pendapatan Umum dan Pendapatan Non Anggaran sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

URAIAN	ANGGARAN AWAL	REALISASI	%
SDA	3.500.000.000.000	636.893.353.269	18.20%
Non-SDA	69.732.159.000	92.201.479.900	132.22%
Umum	0	5.479.855.890	#DIV/0!
Non Anggaran	0	3.509.584.444	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan	3.573.988.325.000	738.084.273.503	20.68

B.1.1 Pendapatan SDA

Pendapatan Sumber daya alam terdiri dari tiga jenis Pendapatan. yaitu *pertama* penerimaan pungutan pengusaha perikanan yang terdiri atas pungutan perusahaan perikanan bagi izin usaha perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat. baru atau perpanjangan. pungutan perusahaan perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan Perikanan. *Kedua* penerimaan Pungutan Pengusaha Perikanan yang terdiri atas pungutan perusahaan perikanan bagi izin usaha perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan. pungutan perusahaan perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan perairan darat. baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan Perikanan. *Ketiga* Pendapatan pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan. Jenis penerimaan SDA Perikanan kami jelaskan pada table berikut ini:

PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM (Pendapatan Perikanan)	
421521. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	
A. Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) Baru atau Perubahan	
B. Izin Usaha Perikanan Untuk Alokasi Kapal Penangkap Ikan. Alokasi Kapal Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan Baru atau Perubahan dengan Alat Penangkapan Ikan	
C. Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing Baru atau Perpanjangan	
D. Kapal Pengangkut Ikan Tunggal	
421531. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	
A. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Atas Izin Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan Baru atau Perpanjangan	
421522. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Budidaya	
A. Izin Kapal pengangkut perairan darat	

Akun	Satker	Total
421521. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	31.172.208.000

Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Total		31.172.208.000
421522. Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	111.765.000
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Total		111.765.000
421531. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	995.215.665.986
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan Total		995.215.665.986

Satker	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
421521. Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap				
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	41.594.325.393	31.172.208.000	-10.422.117.393	-25,06%
421522. Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	153.870.000	111.765.000	-42.105.000	-27,36%
421531. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan				
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	910.080.518.821	995.215.665.986	85.135.147.165	9,35%

Realisasi Penerimaan PNBPN SDA Perikanan periode Desember TA.2025 adalah sebesar Rp1.026.499.638.986.- yang terdiri dari Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Perikanan Tangkap sebesar Rp31.172.208.000.- dari Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Perikanan Budidaya Rp111.765.000.- dan Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar Rp995.215.665.986.- Penerimaan SDA pada TA 2025 belum memenuhi target

yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya target PNBP yang telah ditetapkan. Adapun Rincian PNBP SDA adalah sebagai berikut;

Row Labels	Count of Jumlah/Izin Kapal	Sum of Setoran
421521	2.895	31.172.208.000
5 s.d 60 GT	267	919.800.000
PPPKA REGULER	267	919.800.000
Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan	182	529.500.000
Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan (WPPNRI)	58	271.500.000
Kapal Pengangkut Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan	27	118.800.000
60 s.d 1000 GT	405	11.897.000.000
PPPKA REGULER	405	11.897.000.000
Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan	71	1.302.200.000
Kapal Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan (WPPNRI)	294	9.365.850.000
Kapal Pengangkut Ikan di Laut Lepas	19	648.150.000
Kapal Pengangkut Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan	16	276.000.000
Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Hidup dari Check Point ke Negara Tujuan (Berbendera Asing)	5	304.800.000
diatas 1000 GT	1	691.400.000
PPPKA REGULER	1	691.400.000
Kapal Pengangkut Ikan Sewa untuk Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan (Berbendera Asing)	1	691.400.000
Tidak ada data	2.222	17.664.008.000
PPP REGULER	2.186	17.592.008.000
SIUP	2.186	17.592.008.000
SPP-SIPR	36	72.000.000
Rumpon	36	72.000.000
421522	56	111.765.000
5 s.d 60 GT	31	27.375.000
PPPKA REGULER	31	27.375.000
Kapal Pengangkut Ikan Hidup Antar Tempat Pembudidayaan Ikan	30	26.100.000
Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari Tempat Pembudidayaan / Pelabuhan Check Point ke Negara Tujuan Ekspor	1	1.275.000
60 s.d 1000 GT	13	57.390.000
PPPKA REGULER	13	57.390.000
Kapal Pengangkut Ikan Hidup Antar Tempat Pembudidayaan Ikan	11	42.690.000

Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari Tempat Pembudidayaan / Pelabuhan Check Point ke Negara Tujuan Ekspor	2	14.700.000
Tidak ada data	12	27.000.000
PPP REGULER	12	27.000.000
SIUP	12	27.000.000
421531	249.934	995.215.665.986
5 s.d 60 GT	160.708	232.770.541.493
PHP	160.708	232.770.541.493
Bagan berperahu teri atau bagan apung teri	16	21.978.700
Bouke ami	605	2.456.896.468
Bubu	79	14.361.250
Huhate	4.290	4.593.833.208
Jala jatuh berkapal	19.824	87.110.528.337
Jaring hela ikan berkantong	15.065	5.731.792.338
Jaring insang hanyut	12.837	12.102.550.327
Jaring insang tetap	430	1.014.230.656
Jaring Tarik Berkantong	27.300	29.534.069.284
Pancing cumi	1.310	6.296.186.503
Pancing ulur	3.963	2.351.650.260
Pancing ulur tuna	16.558	30.973.698.527
Pengangkut	586	730.409.239
Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	6.468	2.507.328.231
Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	40.870	31.704.888.662
Pukat cincin teri dengan satu kapal	49	162.869.780
Rawai dasar	4.342	7.700.004.185
Rawai Tuna	6.116	7.763.265.538
60 s.d 1000 GT	89.226	762.445.124.493
PHP	89.226	762.445.124.493
Bouke ami	122	1.058.157.852
Huhate	145	1.535.988.870
Jala jatuh berkapal	3.739	45.604.621.868
Jaring hela ikan berkantong	2.622	2.385.183.540
Jaring hela udang berkantong	921	20.801.140.458
Jaring insang hanyut	8.047	65.701.750.793
Jaring insang tetap	250	1.703.956.728
Jaring Tarik Berkantong	27.090	113.785.652.053
JARING TARIK BERKANTONG (FREEZER)	1	10.000.000
Pancing berjoran	1	360.000
Pancing cumi	3.340	36.389.882.991
Pancing ulur	42	571.109.428
Pancing ulur tuna	433	3.765.333.877
Pengangkut	138	2.368.252.370
Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	12.554	195.821.690.016

Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	20.524	203.043.511.446
Pukat cincin teri dengan satu kapal	508	2.608.523.169
Pukat labuh	150	2.190.022.770
Rawai dasar	3.850	21.979.983.301
Rawai Tuna	4.749	41.120.002.963
Grand Total	252.885	1.026.499.638.986

B.1.2 Pendapatan Non-SDA

Pendapatan Non-Sumber daya alam terdiri dari pendapatan yang berasal dari tugas dan fungsi utama Pelabuhan, pendapatan umum, dan pendapatan non anggran.

B.1.2.1 Pendapatan Fungsional Non-SDA

Pendapatan fungsional Non-SDA merupakan pendapatan atas tugas dan fungsi Pelabuhan perikanan yang dapat digunakan Kembali untuk meningkatkan PNBP pada Pelabuhan Perikanan di masing-masing UPT. Adapun jenis-jenis pendapatan fungsional Non-SDA Adalah sebagai berikut:

PENERIMAAN IMBAL JASA PELABUHAN
425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
A. Penggunaan tanah dan/atau bangunan
1. tanah di kawasan pelabuhan perikanan
a. penggunaan tanah dalam rangka tusi pelabuhan perikanan
b. pemeliharaan prasarana
2. tanah yang dipakai di kawasan pelabuhan perikanan
a. penjemuran
b. penumpukan barang
c. bangunan di kawasan pelabuhan perikanan
d. ruangan di dalam gedung pemasaran
e. asrama
f. ruang rapat
g. ruang kelas
h. ruang pertemuan/aula
i. ruang pameran
j. bak semen untuk pembenihan

k. bak semen back yard
l. kolam untuk pameran
m. kolam untuk pembudidayaan
n. rumah susun nelayan
B. Penggunaan Peralatan dan Mesin
1. Jasa Pengadaan Es
2. Penggunaan ruang pendingin. freezer. cold storage
a. freezer
b. cold storage
c. chest freezer
d. plugging container
3. Penggunaan peralatan Pelabuhan Perikanan
a. tangki BBM
b. tangki Air
4. Penggunaan Peralatan Pengembangan Penangkapan Ikan
5. Penggunaan Peralatan Pengolahan
6. Penggunaan Peralatan Riset
7. Penggunaan Peralatan Multimedia
8. Penggunaan Peralatan Permesinan
9. Penggunaan Transportasi
a. kapal
b. kendaraan
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	16.275.000		-	-100,00%
BBPPI	16.275.000		-	-100,00%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	136.080.000	77.080.000	-	-43,36%
BBPPI	136.080.000	77.080.000	-	-43,36%
Pendapatan Jasa Lainnya	2.493.288		-	-100,00%
PPN PRIGI	2.493.288		-	-100,00%
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	78.317.237.295	73.157.106.604	-	-6,59%
PPN AMBON	903.117.885	2.185.958.454	1.282.840.569	142,05%
PPN BRONDONG	1.671.687.974	1.845.715.597	174.027.623	10,41%
PPN KARANGANTU	422.805.296	404.362.851	-	-4,36%

PPN KEJAWANAN	9.405.732.205	8.161.543.952	1.244.188.253	-13,23%
PPN KWANDANG	236.531.867	306.671.658	70.139.791	29,65%
PPN PEKALONGAN	980.714.759	833.397.455	147.317.304	-15,02%
PPN PELABUHAN RATU	1.227.118.253	1.297.831.753	70.713.500	5,76%
PPN PEMANGKAT	959.979.434	898.780.941	61.198.493	-6,37%
PPN PENGAMBENGAN	552.074.191	543.721.094	8.353.097	-1,51%
PPN PRIGI	975.901.701	856.436.489	119.465.212	-12,24%
PPN SIBOLGA	1.977.471.700	1.501.761.358	475.710.342	-24,06%
PPN SUNGAILIAT	581.669.660	469.264.256	112.405.404	-19,32%
PPN TANJUNG PANDAN	1.344.636.583	1.526.219.281	181.582.698	13,50%
PPN TELUK BATANG	153.003.220	159.204.469	6.201.249	4,05%
PPN TERNATE	1.534.094.638	1.442.022.416	92.072.222	-6,00%
PPN TUAL	608.336.038	441.810.516	166.525.522	-27,37%
PPS BELAWAN	976.943.925	874.419.450	102.524.475	-10,49%
PPS BITUNG	3.398.776.914	3.799.942.530	401.165.616	11,80%
PPS BUNGUS	2.095.920.482	1.590.724.535	505.195.947	-24,10%
PPS CILACAP	4.414.718.699	4.147.203.477	267.515.222	-6,06%
PPS KENDARI	4.547.084.465	4.922.842.885	375.758.420	8,26%
PPS NIZAM ZAHMAN	39.348.917.406	34.947.271.187	4.401.646.219	-11,19%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	13.725.887.605	9.837.521.737	3.888.365.868	-28,33%
BBPPI	92.710.000	56.647.230	36.062.770	-38,90%
PPN AMBON	492.314.263	463.819.353	28.494.910	-5,79%
PPN BRONDONG	897.276.847	610.531.649	286.745.198	-31,96%
PPN KARANGANTU	1.059.498.774	871.569.347	187.929.427	-17,74%
PPN KEJAWANAN	472.189.472	51.753.878	420.435.594	-89,04%
PPN KWANDANG	896.264.233	968.684.123	72.419.890	8,08%
PPN PEKALONGAN	4.875.000	29.423.968	24.548.968	503,57%
PPN PELABUHAN RATU	430.634.097	185.466.375	245.167.722	-56,93%
PPN PEMANGKAT	33.921.711	63.865.836	29.944.125	88,27%
PPN PENGAMBENGAN	590.995.348	118.704.125	472.291.223	-79,91%
PPN PRIGI	868.582.869	661.593.686	206.989.183	-23,83%
PPN SIBOLGA	588.739.862	487.852.948	100.886.914	-17,14%
PPN SUNGAILIAT	195.568.900	226.675.602	31.106.702	15,91%
PPN TANJUNG PANDAN	593.374.419	686.841.419	93.467.000	15,75%
PPN TELUK BATANG	101.099.433	156.501.699	55.402.266	54,80%
PPN TERNATE	1.197.554.775	1.248.676.061	51.121.286	4,27%
PPN TUAL	128.425.000	68.103.230	60.321.770	-46,97%
PPS BELAWAN	211.037.920	382.637.313	171.599.393	81,31%
PPS BITUNG	452.236.668	363.587.588	88.649.080	-19,60%

PPS BUNGUS	512.538.513	168.731.045	-	-67,08%
PPS CILACAP	1.494.414.742	734.709.481	-	-50,84%
PPS KENDARI	2.105.230.471	995.421.109	-	-52,72%
PPS NIZAM ZAHMAN	306.404.288	235.724.672	-	-23,07%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	6.000.000	15.540.000	9.540.000	159,00%
BBPPI	6.000.000	15.540.000	9.540.000	159,00%
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan		39.547.522	39.547.522	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN		39.547.522	39.547.522	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		100.105.550	100.105.550	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU		56.726.000	56.726.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT		43.379.550	43.379.550	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.265.158.834	18.145.445.105	14.880.286.271	455,73%
BBPPI	284.460	-	-	-100,00%
PPN AMBON	33.416.304	607.148.910	573.732.606	1716,92%
PPN BRONDONG	4.320.732	400.518.244	396.197.512	9169,68%
PPN KARANGANTU	96.698.268	145.525.049	48.826.781	50,49%
PPN KEJAWANAN	1.772.076.521	2.218.571.400	446.494.879	25,20%
PPN KWANDANG	3.800.228	6.850.000	3.049.772	80,25%
PPN PEKALONGAN	5.894.098	-	-	-100,00%
PPN PELABUHAN RATU	53.192.737	965.386.313	912.193.576	1714,88%
PPN PEMANGKAT	3.788.400	2.039.345	-	-46,17%
PPN PENGAMBENGAN	21.249.157	47.223.772	25.974.615	122,24%
PPN PRIGI	123.205.518	306.210.387	183.004.869	148,54%
PPN SIBOLGA	38.292.876	898.812.000	860.519.124	2247,20%
PPN SUNGAILIAT	33.738.899	330.828.875	297.089.976	880,56%
PPN TANJUNG PANDAN	13.380.048	-	-	-100,00%
PPN TELUK BATANG	17.074.955	-	-	-100,00%
PPN TERNATE	29.087.481	1.053.033.455	1.023.945.974	3520,23%
PPN TUAL	12.357.817	397.269.500	384.911.683	3114,72%
PPS BELAWAN	2.729.904	1.277.766.600	1.275.036.696	46706,28%
PPS BITUNG	40.986.498	686.437.000	645.450.502	1574,79%
PPS BUNGUS	19.532.255	16.761.000	-	-14,19%
PPS CILACAP	432.072.391	2.763.280.738	2.331.208.347	539,54%
PPS KENDARI	507.979.287	1.416.287.264	908.307.977	178,81%
SEKRETARIAT DJPT		4.605.495.253	4.605.495.253	#DIV/0!
Grand Total	95.469.132.022	101.372.346.518	5.903.214.496	6,18%

1. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi merupakan pendapatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pada Ditjen Perikanan Tangkap beraal dari BBPI atas konsultasi dan bimbingan teknis dalam bidang

- pengembangan penangkapan ikan. Namun pada TA 2025 tidak ada pendapatan karena tidak ada permintaan BIMTEK dari Universitas dan instansi terkait sebagai salah satu dampak dari efisiensi anggaran.
2. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya merupakan pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan. antara lain berupa pungutan dari penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Ditjen Perikanan Tangkap pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan berupa pengujian mesin kapal dan alat tangkap yang terdapat pada satker BBPI Semarang. Pada TA 2025 mengalami penurunan yang disebabkan oleh efisiensi anggaran.
 3. Pendapatan Jasa Lainnya merupakan penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada TA 2025 tidak terdapat pendapatan atas jasa lainnya.
 4. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan merupakan Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan terdapat pada 22 pelabuhan Unit Pelayanan Teknis. Jika dibandingkan dengan TA 2024 secara umum mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan atas penggunaan Listrik, pada PPS Nizam Zachman dan PPN Kejawan terdapat penurunan yang signifikan karena pada TA 2024 terdapat pembayaran piutang atas PT HOI, Perindo dan beberapa debitur lainnya. Namun berdasarkan table diatas terdapat kenaikan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan pada PPN Ambon yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan dan aktivitas kapal perikanan.
 5. Pendapatan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi. merupakan pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam UndangUndang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini terdapat pada 23 pelabuhan Unit Pelaksana Teknis. Jika dibandingkan dengan TA 2024 mengalami. penurunan yang disebabkan oleh telah habisnya masa kontrak penggunaan tanah dan bangunan sehingga menimbulkan pendapatan atas kontrak penggunaan sarana dan prasarana yang baru serta adanya peralihan dari mekanisme

- penggunaan dengan tarif PP No. 85 Tahun 2021 menjadi tarif pemanfaatan sesuai dengan PP 28
6. Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya merupakan pendapatan atas Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya terdapat pada satu satker yaitu Balai Besar Penangkapan Ikan. yang berasal dari kerjasama alih teknologi hasil riset.
 7. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya merupakan Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbangan peralatan nautika. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya terdapat pada satu satker yaitu Balai Besar Penangkapan Ikan, yang berasal dari pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan yang berubah menjadi akun Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya per April 2025.
 8. Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pendapatan sewa atas penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan sewa atas jaringan stasiun pengisian bahan bakar solar pada PPN Kejawatanan.
 9. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin, merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pendapatan tersebut hanya ada pada satker berikut:
 - a. PPN Pelabuhanratu merupakan pendapatan yang berasal dari sewa cold storage;
 - b. Pada satker Sekretariat merupakan pendatan yang berasal dari sewa cold storage dan genset pada SKPT Natuna.
 10. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah. gedung. dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan yang berasal dari sewa rumah dinas dan sewa asset yang berasal dari property investasi atau asset lainnya sesuai dengan ketentuan PP Nomo 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada Tahun 2025 pendapatan sewa Gedung dan bangunan mengalami kenaikan dari Tahun 2024 yang disebabkan oleh adanya perpindahan mengenai tarif dari PP 27 tahun 2014 ke PP Nomor 28 Tahun 2020.

B.1.2.2 Pendapatan Umum

Penerimaan Umum per satker adalah sebagai berikut ini:

Row Labels	Sum of SETORAN PER AKUN
PPS Nizam Zachman	152.929.000
425122	140.529.000
PEMINDAHTANGANAN BMN	140.529.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	140.529.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	140.529.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	140.529.000
Hasil Bersih Lelang - RL-422/07.02/2025/01 - Tgl 12 Aug 2025 - Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta - Lelang - PL Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E.	50.000.000
HBL - RL-27/07.02/2025/01 - Tgl 21 Jan 2025 - Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta - Non Eksekusi BMN - PL : Rino Priyanto, S.E., M.M. NIP 197508031996021001	3.950.000
HBL - RL-332/07.02/2025/01 - Tgl 08 Jul 2025 - Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta - Lelang - PL : Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. NIP 198707072008121002	17.990.000
HBL- RL-135/07.02/2025/01 - Tgl 18 Mar 2025 - Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta - Lelang - PL : Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. NIP 198707072008121002	8.000.000
HBL- RL-255/07.02/2025/01 - Tgl 28 May 2025 - Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta - Lelang - PL : Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. NIP 198707072008121002	60.589.000
425129	12.400.000
PEMINDAHTANGANAN BMN	12.400.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.400.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.400.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.400.000
HBL - RL-122 - Tgl 10 Mar 2025 - Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta - Lelang - PL Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. NIP 198707072008121002"	12.400.000
PPS Kendari	52.170.199
425122	52.170.199
PEMINDAHTANGANAN BMN	52.170.199
Penjualan Peralatan dan Mesin	52.170.199
Penjualan Peralatan dan Mesin	52.170.199
Penjualan Peralatan dan Mesin	52.170.199
Hasil bersih lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari RL-198/15.05/2025-01 tanggal 18 November 2025	28.697.000
Hasil bersih lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari RL-23/15.05/2025-01 tanggal 18 Februari 2025	1.251.859
Hasil bersih lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari RL-49/15.05/2025-01 tanggal 22 April 2025	22.221.340
PPS Cilacap	5.711.859
425122	5.711.859
PEMINDAHTANGANAN BMN	5.711.859
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.711.859
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.711.859

Penjualan Peralatan dan Mesin	5.711.859
Hasil Bersih Lelang Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap RL-170/0906/2025-01	5.711.859
PPS Bungus	237.791.200
425122	237.791.200
PEMINDAHTANGANAN BMN	237.791.200
Penjualan Peralatan dan Mesin	237.791.200
Penjualan Peralatan dan Mesin	237.791.200
Penjualan Peralatan dan Mesin	237.791.200
HBL Lelang BMN pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus RL 64/03.01/2025-01 tgl 6/5/25	15.471.200
HBL Lelang Non Eksekusi Wajib BMN pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus RL 26/03.01/2025-01 tgl 19/02/25	222.320.000
PPS Belawan	344.329.681
425122	344.329.681
PEMINDAHTANGANAN BMN	344.329.681
Penjualan Peralatan dan Mesin	344.329.681
Penjualan Peralatan dan Mesin	344.329.681
Penjualan Peralatan dan Mesin	344.329.681
Hasil Bersih Lelang RL 50 Tanggal 05/02/2025	22.886.697
HBL ARIF AMIRUDDIN RL 235 TGL 27 MEI 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	76.980.000
HBL CECEP TARYANA RL 235 TGL 27 MEI 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	79.180.000
HBL RL 317 TGL 8 JULI 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	35.413.966
HBL RL 391 TGL 01 AGUSTUS 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA BELAWAN	40.740.450
RL 549 TGL 13/10/2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan PL FERY ALBERTO MARPAUNG	28.971.000
RL 575 TGL 27/10/2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA BELAWAN PL FERY ALBERTO MARPAUNG	60.157.568
PPP Teluk Batang	20.835.500
425129	20.835.500
PEMINDAHTANGANAN BMN	20.835.500
Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.835.500
Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.835.500
Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.835.500
Hasil Bersih Lelang RL 203/11.01/2025-01 Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	1.387.500
Hasil Bersih Lelang RL 304/11.01/2025-01 Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	19.448.000
PPN Ternate	1.020.587
425122	1.020.587
PEMINDAHTANGANAN BMN	1.020.587
Penjualan Peralatan dan Mesin	1.020.587
Penjualan Peralatan dan Mesin	1.020.587
Penjualan Peralatan dan Mesin	1.020.587
Hasil Bersih Lelang Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate RL No. 103/16.04/2025-1	1.020.587
PPN Tanjung Pandan	3.725.564
425129	3.725.564
PEMINDAHTANGANAN BMN	3.725.564
Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.725.564
Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.725.564
Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.725.564

HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung pandan RL 124/04.04/2025-01 tanggal 29 Juli 2025 Kode Lot G43E0D an TJHAIJ SUSANTO	1.312.000
HBL atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan RL 188/04.04/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Kode Lot PU0SAX an FAJARUDDIN ASH SHIDDIQ	2.413.564
PPN Prigi	453.158.592
425122	453.158.592
PEMINDAHTANGANAN BMN	453.158.592
Penjualan Peralatan dan Mesin	453.158.592
Penjualan Peralatan dan Mesin	453.158.592
Penjualan Peralatan dan Mesin	453.158.592
HBL RL 242/10.03/2025-01 tgl 12 Juni 2025 PL Feri Suryanto	4.244.288
HBL RL 347/10.03/2025-01 tgl 5 Agustus 2025 Ditjen PerikananTangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi PL Afifah R an Hendra Dharmawan	126.262.105
HBL RL 347/10.03/2025-01 tgl 5 Agustus 2025 Ditjen PerikananTangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi PL Afifah R an Kuncoro Arief W	282.075.809
HBL RL 680 PPN Prigi PL Halim Tgl 3/12/2025	40.576.390
PPN Pengambengan	117.736.000
425122	117.736.000
PEMINDAHTANGANAN BMN	117.736.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	117.736.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	117.736.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	117.736.000
HBL RL-50/14.02/2025-01 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	117.736.000
PPN Pemangkat	126.380.000
425122	126.380.000
PEMINDAHTANGANAN BMN	126.380.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	126.380.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	126.380.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	126.380.000
(blank)	126.380.000
PPN Pelabuhan Ratu	2.403.000
425129	2.403.000
PEMINDAHTANGANAN BMN	2.403.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.403.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.403.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.403.000
HBL RL 1028/08.03/2025-01 VILJCI	2.403.000
PPN Pekalongan	385.528.914
425122	385.528.914
PEMINDAHTANGANAN BMN	385.528.914
Penjualan Peralatan dan Mesin	385.528.914
Penjualan Peralatan dan Mesin	385.528.914
Penjualan Peralatan dan Mesin	385.528.914
Hasil Bersih Lelang atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN (BB) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Nomor Risalah Lelang 15/0903/2025-1 tanggal 04 Februari 2025	180.329.000
Hasil Bersih Lelang atas Lelang Non Eksekusi Wajib BMN (BB) Pelabuhan Perikanan Pekalongan Nomor Risalah Lelang 156/0903/2025-1 tanggal 08 Oktober 2025	205.199.914
PPN Kejawan	5.154.936
425122	5.154.936
PEMINDAHTANGANAN BMN	5.154.936

Penjualan Peralatan dan Mesin	5.154.936
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.154.936
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.154.936
(blank)	5.154.936
PPN Karangantu	198.979.000
425122	198.979.000
PEMINDAHTANGANAN BMN	198.979.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	198.979.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	198.979.000
Penjualan Peralatan dan Mesin	198.979.000
Hasil Bersih Lelang atas Lelang Noneksekusi Wajib BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu RL254/06.01/2025-01 Tgl. 30 September 2025 PL. April Mopsan Hutabarat, S.E.	191.152.000
Hasil Bersih Lelang atas Lelang Noneksekusi Wajib BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu RL255/06.01/2025-01 Tgl. 30 September 2025 PL. April Mopsan Hutabarat, S.E.	7.827.000
PPN Brondong	34.463.328
425122	34.463.328
PEMINDAHTANGANAN BMN	34.463.328
Penjualan Peralatan dan Mesin	34.463.328
Penjualan Peralatan dan Mesin	34.463.328
Penjualan Peralatan dan Mesin	34.463.328
1085 HBL	26.412.000
1086 HBL	4.337.238
946 2025	2.465.060
HBL 82	1.249.030
PPN Ambon	57.765.800
425122	57.765.800
PEMINDAHTANGANAN BMN	57.765.800
Penjualan Peralatan dan Mesin	57.765.800
Penjualan Peralatan dan Mesin	57.765.800
Penjualan Peralatan dan Mesin	57.765.800
Hasil BERSih Lelang Risalah Nomor 107/17.01/2025 - 1 tanggal 16 September 2025	44.739.200
Hasil Bersih Lelang Risalah Nomor 94/17.01/2025 - 1 tanggal 15 Agustus 2025	13.026.600
BBPI	12.081.060
425122	12.081.060
PEMINDAHTANGANAN BMN	12.081.060
Penjualan Peralatan dan Mesin	12.081.060
Penjualan Peralatan dan Mesin	12.081.060
Penjualan Peralatan dan Mesin	12.081.060
HBL RL-702/09.01/2025-01 26.11.25	12.081.060
Grand Total	2.212.164.220

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/Penu runan	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	50.081.824	39.364.064	-10.717.760	-21,40%
PPN BRONDONG	156.517		-156.517	-100,00%
PPN PELABUHAN RATU	11.000.999	2.403.000	-8.597.999	-78,16%

PPN TANJUNG PANDAN		3.725.564	3.725.564	#DIV/0!
PPN TELUK BATANG	2.089.308	20.835.500	18.746.192	897,24%
PPS NIZAM ZAHMAN	36.835.000	12.400.000	24.435.000	-66,34%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.145.402.944	2.317.157.636	171.754.692	8,01%
BBPPI	293.628.170	12.081.060	281.547.110	-95,89%
PPN AMBON	3.344.580	57.765.800	54.421.220	1627,15%
PPN BRONDONG	46.477.000	34.463.328	12.013.672	-25,85%
PPN KARANGANTU	402.612.000	198.979.000	203.633.000	-50,58%
PPN KEJAWANAN	34.427.700	5.154.936	29.272.764	-85,03%
PPN KWANDANG	25.000.000		25.000.000	-100,00%
PPN PEKALONGAN	343.306.990	385.528.914	42.221.924	12,30%
PPN PEMANGKAT	5.661.700	126.380.000	120.718.300	2132,19%
PPN PENGAMBENGAN		117.736.000	117.736.000	#DIV/0!
PPN PRIGI	82.406.500	453.158.592	370.752.092	449,91%
PPN SUNGAILIAT	88.200.000		88.200.000	-100,00%
PPN TERNATE		1.020.587	1.020.587	#DIV/0!
PPN TUAL	81.515.000		81.515.000	-100,00%
PPS BELAWAN	282.769.000	344.329.681	61.560.681	21,77%
PPS BUNGUS		237.791.200	237.791.200	#DIV/0!
PPS CILACAP	41.728.750	5.711.859	36.016.891	-86,31%
PPS KENDARI	394.743	52.170.199	51.775.456	13116,24%
PPS NIZAM ZAHMAN	64.708.813	140.529.000	75.820.187	117,17%
SEKRETARIAT DJPT	349.221.998	144.357.480	204.864.518	-58,66%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.719.000		16.719.000	-100,00%
PPN PEKALONGAN	16.719.000		16.719.000	-100,00%
Grand Total	2.212.203.768	2.356.521.700	144.317.932	6,52%

1. Pendaptan Pemindahtanganan BMN Lainnya pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
 - a. Pada PPS Nizam Zachman merupakan atas lelang Satu Paket Bongkaran terdiri dari ACP; Spandek Atap; WF 300.150,6,5,9; CNP; dan Wins Besi 32mm dengan berat keseluruhan 7.600 kg
2. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdapat pada 10 satker dengan rincian sebagai berikut;

- a. Pada PPN Brondong merupakan Lelang atas satu pake barang inventarisasi berupa Stan Preassure Gauge dengan risalah Lelang Nomor 82/10.01/2025-01 tanggal 12 Februari 2025;
- b. Pada PPN Pekalongan merupakan Lelang atas Suction Drager dengan risalah Lelang Nomor 15/09.03/2025-1
- c. Pada PPN Pemangkat merupakan atas Lelang peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Barang	Risalah Lelang	Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	53/11.02/2025-01	27.155.000,00
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	53/11.02/2025-01	35.359.000,00
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	54/11.02/2025-01	27.035.000,00
4	Pick Up	54/11.02/2025-01	28.540.000,00
5	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	54/11.02/2025-01	6.665.000,00
6	Sepeda Motor	54/11.02/2025-01	1.626.000,00
Total			126.380.000,00

- d. Pada PPN Pengambengan merupakan Lelang atas Suction Drager dengan Risalah Lelang Nomor 957/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025 50/14.02/2025-01;
- e. Pada PPN Prigi merupakan Lelang atas 3 kendaraan berupa atu station wagon, dua truck & attachment dengan risalah lelang nomor 242/10.03/2025-01;
- f. Pada PPS Belawan merupakan satu paket peralatan mesin dengan risalah Lelang nomor 50/02.01/2025-01
- g. Pada PPS Bungus merupakan Lelang atas 1 paket srcap Toyota kijang komando, 1 paket scrap kijang Toyota pick up, 1 unit mitsubushi microbus, 1 nissan terano, 1 ford ranger, 1 toyota kijang, 1 isuzu box berefrigasi, dan 1 yamaha RX King risalah Lelang nomor 26/03.01/2025-01;
- h. Pada PPS Kendari dengan risalah Lelang nomor 23/15.05/2025-01
- i. Pada BBPI merupakan lelang atas 1 buag mobil jeep, 5 buah mobil mini bus dan lima buah sepeda motor dengan risalah lelang Nomor 76/09.01/2024-01, 1 kapal visual mini dan printer dengan risalah lelang Nomor 316/09.01/2024-01
- j. Pada PPN Brondong merupakan lelang atas 1 paket peralatan mesin kondisi rusak berat dengan risalah lelang Nomor 357/10.07/2024-01 dan

lelang Steam Pressure Gauge dengan risalah lelang Nomor 368/10-01/2024-01

- k. Pada PPN Karangantu merupakan lelang atas 1 peralatan mesin dengan risalah lelang Nomor 80/06.01/2024-01
- l. Pada PPN Pemangkat merupakan atas lelang tiga buah kendaraan bermotor
- m. Pada PPN Tual merupakan lelang atas dua kendaraan roda empat
- n. Pada PPS Belawan merupakan atas satu unit kendaraan roda dua dan satu unit kendaraan roda empat dengan risalah lelang Nomor 246/03.04/2024-01 dan tiga kendaraan bermotor dan dua paket scrap/limbah padat/besi tua Nomor dengan risalah lelang 787/02.01/2024-01
- o. Pada PPS Kendari 23/15.05/2025-1 merupakan Lelang atas 1 paket Barang Milik Negara
- p. Pada PPS Nizam Zachman merupakan lelang atas Toyota Innova, minibus Suzuki X-over dengan risalah lelang nomor 135/07. 0212025-01, 1 paket BMN peralatan dan mesin dengan risalah Lelang nomor 27/07.02/2025-01 satu paket BMN berupa 50 unit peralatan mesin berupa meja besi dengan risalah lelang nomor 1244/26/2023
- q. Pada Sekretariat merupakan lelang atas satu kendaraan roda empat dengan risalah lelang sebagai berikut;

Uraian	No. Risalah Lelang	Nilai
avanza	67/07.02/2025-01	22.230.000
scrap brondong	46/03.01/2025-01	3.700.000
ford everest	27/08.03/2025-01	50.775.000
scrap kendari	40/15.05/2025-01	167.500
scrap malang	185/10.05/2025-01	2.772.000
scrap ternate	31/16.04/2025-01	600.000
scrap pekalongan	3/09.03/2025-01	49.500
scrap lamongan	272/10.01/2025-01	220.000
scrap cilacap	53/09.06/2025-01	2.485.000
bongkaran morotai	2/16.04/2025-01	3.675.000

- 3. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan Pendapatan atas Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada TA 2025 Ditjen Perikanan Tangkap tidak memiliki pendapatan tersebut.

B.1.2.3 Pendapatan Non Anggaran

Pendapatan Non Anggaran per satker adalah sebagai berikut ini:

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	57.088.585	27.000.000	-30.088.585	-52,71%
PPN KWANDANG	87.985		-87.985	-100,00%
PPS NIZAM ZAHMAN	30.000.000		-30.000.000	-100,00%
SEKRETARIAT DJPT	27.000.600	27.000.000	-600	0,00%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.757.651.271	38.231.457	-1.719.419.814	-97,82%
BBPPI		55.105	55.105	#DIV/0!
PPN AMBON	672.000		-672.000	-100,00%
PPN KEJAWANAN		35.409	35.409	#DIV/0!
PPN KWANDANG	50.797.752		-50.797.752	-100,00%
PPN SIBOLGA	2.782.168		-2.782.168	-100,00%
PPN SUNGAILIAT	833.420		-833.420	-100,00%
PPN TERNATE	2.223.267	356.295	-1.866.972	-83,97%
PPN TUAL	12.067.510		-12.067.510	-100,00%
PPS BITUNG		1.349.000	1.349.000	#DIV/0!
PPS KENDARI	1.438.380	90.000	-1.348.380	-93,74%
PPS NIZAM ZAHMAN	981.685	13.970.000	12.988.315	1323,06%
SEKRETARIAT DJPT	1.685.855.089	22.375.648	-1.663.479.441	-98,67%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	1.000.000	39.760.092	38.760.092	3876,01%
PPS BITUNG	1.000.000	39.760.092	38.760.092	3876,01%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.		5.500.000	5.500.000	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU		5.500.000	5.500.000	#DIV/0!
Grand Total	1.815.739.856	110.491.549	-1.705.248.307	-93,91%

1. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap merupakan pendapatan yang berasal dari dari pembayaran cicilan Piutang Bendahara. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada PPS Bitung. yang merupakan pengembalian atas kelalaian bendahara
2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah merupakan pendapatan atas pekerjaan pemerintah berupa keterlamabatan pekerjaan. Pada periode 31 Desember 2025 pada Ditjen Perikanan Tangkap
 - a. Pada PPS Nizam Zachman pendapatan denda berasal dari denda keterlambatan pekerjaan command center;

- b. Pada Sekretariat pendapatan denda berasal dari denda Perbaikan Kapal Perikanan dan temuan BPK No. 5/LHP/XVII/01/2018 Denda Keterlambatan Pengadaan Kapal Tahun TA. 2016 a.n. PT. Yasa Ayu Abadi
3. Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu merupakan pendapatan yang timbul atas kelebihan belanja pegawai tahun anggaran yg lalu seperti kelebihan pembayaran tunjangan dan uang makan
4. Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu merupakan pendapatan atas belanja barang seperti listrik dan air Desember TA 2024 yang dibayar pada TA 2025 dan temuan BPK atas belanja barang berupa perjalanan dinas luar negeri.
5. Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu merupakan pendapatan yang diterima atas temuan pengembalian belanja modal berupa kekurangan volume pada PPS Nizam Zachman.
6. Pendapatan Anggaran Lain-lain Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan pendapatan atas setoran temuan Inspektorat V.
7. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain merupakan pendapatan atas Ganti rugi kehilangan motor pada PPN Pelabuhanratu.

Belanja Rp

1.727.444.605.69

4

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 31 Desember 2024 dan 2025 adalah sebesar Rp860.627.463.236 dan Rp1.727.444.605.694 Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2025

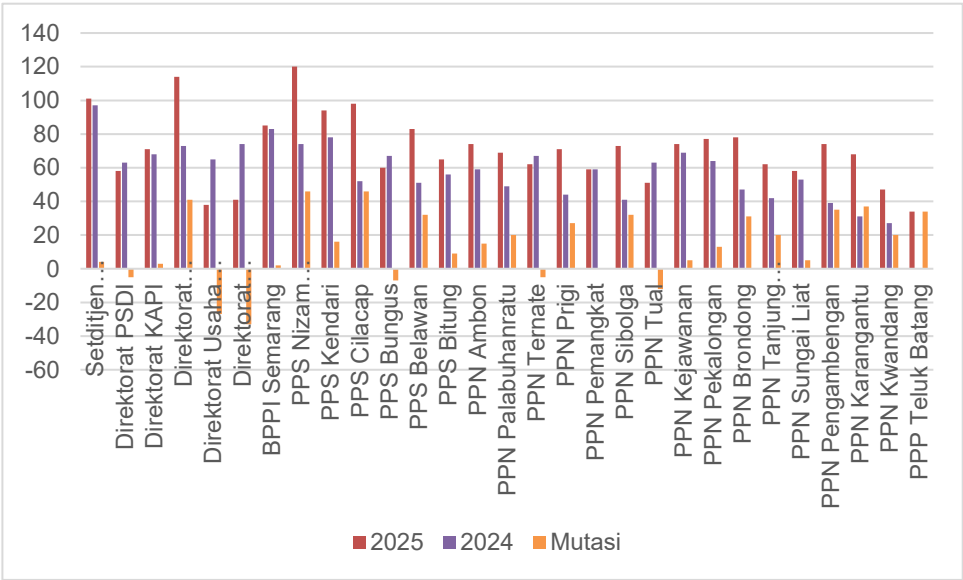
Akun	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Pegawai	229.794.101.063	242.049.672.937	12.255.571.874	5,33%
Belanja Barang	574.745.291.645	1.456.709.369.679	870.718.605.425	151,50%
Belanja Modal	56.088.070.528	28.617.464.228	-27.470.606.300	-48,98%
Grand Total	860.627.463.236	1.716.131.034.235	855.503.570.999	99,40%

Belanja
Pegawai Rp
242.049.672.93
7

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp242.049.672.937 dan Rp229.794.101.063. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,33 persen dari TA 2024.

Kenaikan/Penurunan Pegawai TA 2025 dan 2024



Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai.

TA 2024 dan TA 2025

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Gaji Pokok PNS	64.350.113.200	64.022.943.846	- 327.169.354	-0,51%
BBPPI	3.611.064.500	3.549.303.100	- 61.761.400	-1,71%
PPN AMBON	2.008.211.800	1.942.670.560	- 65.541.240	-3,26%
PPN BRONDONG	2.353.081.200	2.350.201.020	- 2.880.180	-0,12%
PPN KARANGANTU	1.117.988.500	1.172.167.960	54.179.460	4,85%
PPN KEJAWANAN	2.227.353.300	2.269.985.900	42.632.600	1,91%
PPN KWANDANG	735.047.100	828.020.920	92.973.820	12,65%
PPN PEKALONGAN	2.157.885.400	2.552.088.540	394.203.140	18,27%
PPN PELABUHAN RATU	2.804.958.000	2.754.363.760	- 50.594.240	-1,80%
PPN PEMANGKAT	1.344.958.400	1.381.612.760	36.654.360	2,73%

PPN PENGAMBENGAN	1.670.873.400	1.792.680.480	121.807.080	7,29%
PPN PRIGI	2.823.550.500	2.619.525.040	- 204.025.460	-7,23%
PPN SIBOLGA	2.083.442.700	2.138.826.040	55.383.340	2,66%
PPN SUNGAILIAT	1.265.397.900	1.162.537.620	- 102.860.280	-8,13%
PPN TANJUNG PANDAN	1.277.208.800	1.458.707.940	181.499.140	14,21%
PPN TELUK BATANG	673.739.200	656.783.920	- 16.955.280	-2,52%
PPN TERNATE	1.687.044.000	1.631.209.440	- 55.834.560	-3,31%
PPN TUAL	1.342.072.700	1.435.677.680	93.604.980	6,97%
PPS BELAWAN	2.668.096.200	2.530.855.660	- 137.240.540	-5,14%
PPS BITUNG	1.702.837.500	1.593.783.520	- 109.053.980	-6,40%
PPS BUNGUS	2.289.850.000	1.972.756.040	- 317.093.960	- 13,85%
PPS CILACAP	3.073.405.400	3.125.679.480	52.274.080	1,70%
PPS KENDARI	3.519.796.400	3.511.591.860	- 8.204.540	-0,23%
PPS NIZAM ZAHMAN	2.564.320.000	2.702.350.340	138.030.340	5,38%
SEKRETARIAT DJPT	17.347.930.300	16.889.564.266	- 458.366.034	-2,64%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	889.094	878.906	- 10.188	-1,15%
BBPPI	58.149	52.371	- 5.778	-9,94%
PPN AMBON	30.204	27.619	- 2.585	-8,56%
PPN BRONDONG	33.780	32.416	- 1.364	-4,04%
PPN KARANGANTU	16.440	17.427	987	6,00%
PPN KEJAWANAN	33.631	33.242	- 389	-1,16%
PPN KWANDANG	10.412	10.722	310	2,98%
PPN PEKALONGAN	28.824	40.121	11.297	39,19%
PPN PELABUHAN RATU	35.202	36.762	1.560	4,43%
PPN PEMANGKAT	21.896	19.175	- 2.721	- 12,43%
PPN PENGAMBENGAN	23.686	25.604	1.918	8,10%
PPN PRIGI	40.868	37.722	- 3.146	-7,70%
PPN SIBOLGA	28.884	30.361	1.477	5,11%
PPN SUNGAILIAT	19.987	18.447	- 1.540	-7,71%
PPN TANJUNG PANDAN	18.109	19.493	1.384	7,64%
PPN TELUK BATANG	9.486	8.167	- 1.319	- 13,90%
PPN TERNATE	26.839	24.804	- 2.035	-7,58%
PPN TUAL	20.103	20.187	84	0,42%
PPS BELAWAN	36.262	36.093	- 169	-0,47%
PPS BITUNG	28.838	23.770	- 5.068	- 17,57%
PPS BUNGUS	33.345	23.219	- 10.126	- 30,37%
PPS CILACAP	37.620	37.485	- 135	-0,36%
PPS KENDARI	44.937	44.325	- 612	-1,36%
PPS NIZAM ZAHMAN	37.971	37.136	- 835	-2,20%
SEKRETARIAT DJPT	213.621	222.238	8.617	4,03%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5.005.297.970	4.970.320.525	- 34.977.445	-0,70%
BBPPI	260.759.730	262.671.010	1.911.280	0,73%
PPN AMBON	159.841.910	147.951.510	- 11.890.400	-7,44%
PPN BRONDONG	211.106.830	207.278.422	- 3.828.408	-1,81%
PPN KARANGANTU	86.617.170	93.904.922	7.287.752	8,41%
PPN KEJAWANAN	192.499.820	193.593.082	1.093.262	0,57%

PPN KWANDANG	63.348.330	70.419.604	7.071.274	11,16%
PPN PEKALONGAN	175.189.810	212.433.500	37.243.690	21,26%
PPN PELABUHAN RATU	205.734.800	216.660.642	10.925.842	5,31%
PPN PEMANGKAT	125.734.270	120.875.930	- 4.858.340	-3,86%
PPN PENGAMBENGAN	132.655.530	140.035.910	7.380.380	5,56%
PPN PRIGI	218.250.380	208.903.480	- 9.346.900	-4,28%
PPN SIBOLGA	150.949.740	145.670.642	- 5.279.098	-3,50%
PPN SUNGAILIAT	90.803.480	84.149.780	- 6.653.700	-7,33%
PPN TANJUNG PANDAN	106.036.850	121.834.194	15.797.344	14,90%
PPN TELUK BATANG	54.222.660	53.664.232	- 558.428	-1,03%
PPN TERNATE	119.373.430	118.974.654	- 398.776	-0,33%
PPN TUAL	91.693.950	94.142.070	2.448.120	2,67%
PPS BELAWAN	187.659.300	183.379.484	- 4.279.816	-2,28%
PPS BITUNG	134.881.260	120.091.545	- 14.789.715	- 10,96%
PPS BUNGUS	173.296.970	150.475.290	- 22.821.680	- 13,17%
PPS CILACAP	258.741.930	253.897.784	- 4.844.146	-1,87%
PPS KENDARI	294.693.800	288.126.818	- 6.566.982	-2,23%
PPS NIZAM ZAHMAN	218.562.990	219.172.630	609.640	0,28%
SEKRETARIAT DJPT	1.292.643.030	1.262.013.390	- 30.629.640	-2,37%
Belanja Tunj. Anak PNS	1.536.330.682	1.517.675.712	- 18.654.970	-1,21%
BBPPI	88.456.596	88.609.310	152.714	0,17%
PPN AMBON	58.240.482	53.866.808	- 4.373.674	-7,51%
PPN BRONDONG	64.088.562	60.286.585	- 3.801.977	-5,93%
PPN KARANGANTU	29.697.048	31.723.840	2.026.792	6,82%
PPN KEJAWANAN	57.986.178	57.572.062	- 414.116	-0,71%
PPN KWANDANG	16.566.858	18.806.348	2.239.490	13,52%
PPN PEKALONGAN	47.949.228	59.040.042	11.090.814	23,13%
PPN PELABUHAN RATU	78.893.578	73.432.807	- 5.460.771	-6,92%
PPN PEMANGKAT	41.853.658	40.425.126	- 1.428.532	-3,41%
PPN PENGAMBENGAN	39.343.718	39.116.638	- 227.080	-0,58%
PPN PRIGI	59.681.948	55.999.432	- 3.682.516	-6,17%
PPN SIBOLGA	45.108.252	46.161.917	1.053.665	2,34%
PPN SUNGAILIAT	26.907.980	25.054.044	- 1.853.936	-6,89%
PPN TANJUNG PANDAN	32.474.674	35.784.758	3.310.084	10,19%
PPN TELUK BATANG	17.657.772	18.408.549	750.777	4,25%
PPN TERNATE	36.511.752	37.194.187	682.435	1,87%
PPN TUAL	29.788.180	32.960.182	3.172.002	10,65%
PPS BELAWAN	60.835.482	55.204.628	- 5.630.854	-9,26%
PPS BITUNG	47.164.510	39.835.728	- 7.328.782	- 15,54%
PPS BUNGUS	51.519.868	46.903.030	- 4.616.838	-8,96%
PPS CILACAP	80.406.066	79.028.505	- 1.377.561	-1,71%
PPS KENDARI	94.760.738	90.379.172	- 4.381.566	-4,62%
PPS NIZAM ZAHMAN	63.532.514	65.644.832	2.112.318	3,32%
SEKRETARIAT DJPT	366.905.040	366.237.182	- 667.858	-0,18%
Belanja Tunj. Struktural PNS	881.329.480	858.720.000	- 22.609.480	-2,57%
BBPPI	33.885.000	7.560.000	- 26.325.000	- 77,69%

PPN AMBON	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN BRONDONG	25.200.000	27.720.000	2.520.000	10,00%
PPN KARANGANTU	20.580.000	20.580.000	-	0,00%
PPN KEJAWANAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN KWANDANG	20.580.000	20.580.000	-	0,00%
PPN PEKALONGAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PELABUHAN RATU	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PEMANGKAT	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PENGAMBENGAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PRIGI	25.200.000	23.940.000	- 1.260.000	-5,00%
PPN SIBOLGA	25.200.000	22.060.000	- 3.140.000	- 12,46%
PPN SUNGAILIAT	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN TANJUNG PANDAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN TELUK BATANG	12.600.000	12.600.000	-	0,00%
PPN TERNATE	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN TUAL	25.200.000	16.380.000	- 8.820.000	- 35,00%
PPS BELAWAN	35.910.000	35.910.000	-	0,00%
PPS BITUNG	35.910.000	33.120.000	- 2.790.000	-7,77%
PPS BUNGUS	34.290.000	30.510.000	- 3.780.000	- 11,02%
PPS CILACAP	35.910.000	35.910.000	-	0,00%
PPS KENDARI	38.610.000	35.910.000	- 2.700.000	-6,99%
PPS NIZAM ZAHMAN	35.910.000	35.145.000	- 765.000	-2,13%
SEKRETARIAT DJPT	249.544.480	273.995.000	24.450.520	9,80%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.479.297.000	6.627.369.800	148.072.800	2,29%
BBPPI	613.790.000	633.957.000	20.167.000	3,29%
PPN AMBON	106.730.000	113.970.000	7.240.000	6,78%
PPN BRONDONG	232.798.000	267.540.000	34.742.000	14,92%
PPN KARANGANTU	120.500.000	124.920.000	4.420.000	3,67%
PPN KEJAWANAN	176.038.000	183.850.000	7.812.000	4,44%
PPN KWANDANG	95.730.000	89.380.000	- 6.350.000	-6,63%
PPN PEKALONGAN	174.044.000	196.874.000	22.830.000	13,12%
PPN PELABUHAN RATU	177.120.000	168.220.000	- 8.900.000	-5,02%
PPN PEMANGKAT	99.976.000	82.060.000	- 17.916.000	- 17,92%
PPN PENGAMBENGAN	244.270.000	250.800.000	6.530.000	2,67%
PPN PRIGI	253.222.000	250.674.000	- 2.548.000	-1,01%
PPN SIBOLGA	148.626.000	152.769.100	4.143.100	2,79%
PPN SUNGAILIAT	154.760.000	143.120.000	- 11.640.000	-7,52%
PPN TANJUNG PANDAN	90.980.000	117.860.000	26.880.000	29,54%
PPN TELUK BATANG	41.280.000	38.180.000	- 3.100.000	-7,51%
PPN TERNATE	130.342.000	133.050.000	2.708.000	2,08%
PPN TUAL	147.804.000	140.564.000	- 7.240.000	-4,90%
PPS BELAWAN	191.300.000	205.860.000	14.560.000	7,61%
PPS BITUNG	172.699.000	175.244.000	2.545.000	1,47%
PPS BUNGUS	183.640.000	151.050.000	- 32.590.000	- 17,75%
PPS CILACAP	303.800.000	313.420.000	9.620.000	3,17%
PPS KENDARI	262.380.000	248.750.000	- 13.630.000	-5,19%

PPS NIZAM ZAHMAN	200.679.000	246.944.000	46.265.000	23,05%
SEKRETARIAT DJPT	2.156.789.000	2.198.313.700	41.524.700	1,93%
Belanja Tunj. PPh PNS	623.704.833	682.676.779	58.971.946	9,46%
BBPPI	40.878.841	42.651.596	1.772.755	4,34%
PPN AMBON	11.986.029	12.237.028	250.999	2,09%
PPN BRONDONG	21.163.704	20.616.504	- 547.200	-2,59%
PPN KARANGANTU	9.480.410	9.009.136	- 471.274	-4,97%
PPN KEJAWANAN	16.069.896	16.637.418	567.522	3,53%
PPN KWANDANG	4.030.977	4.482.266	451.289	11,20%
PPN PEKALONGAN	15.052.146	19.574.599	4.522.453	30,05%
PPN PELABUHAN RATU	21.245.830	22.769.817	1.523.987	7,17%
PPN PEMANGKAT	10.721.686	10.202.975	- 518.711	-4,84%
PPN PENGAMBENGAN	12.829.913	14.611.217	1.781.304	13,88%
PPN PRIGI	21.642.084	21.884.454	242.370	1,12%
PPN SIBOLGA	15.105.822	16.083.220	977.398	6,47%
PPN SUNGAILIAT	12.264.478	10.767.597	- 1.496.881	- 12,21%
PPN TANJUNG PANDAN	9.189.577	11.442.875	2.253.298	24,52%
PPN TELUK BATANG	14.228.882	53.379.831	39.150.949	275,15 %
PPN TERNATE	15.103.226	13.920.517	- 1.182.709	-7,83%
PPN TUAL	10.954.184	12.776.535	1.822.351	16,64%
PPS BELAWAN	23.632.435	23.784.112	151.677	0,64%
PPS BITUNG	14.091.848	14.181.960	90.112	0,64%
PPS BUNGUS	21.239.150	20.149.333	- 1.089.817	-5,13%
PPS CILACAP	31.542.800	30.664.421	- 878.379	-2,78%
PPS KENDARI	34.938.899	34.985.246	46.347	0,13%
PPS NIZAM ZAHMAN	25.458.741	31.942.787	6.484.046	25,47%
SEKRETARIAT DJPT	210.853.275	213.921.335	3.068.060	1,46%
Belanja Tunj. Beras PNS	3.641.639.700	3.587.578.170	- 54.061.530	-1,48%
BBPPI	205.021.020	202.269.060	- 2.751.960	-1,34%
PPN AMBON	132.021.660	121.013.820	- 11.007.840	-8,34%
PPN BRONDONG	149.040.360	147.591.960	- 1.448.400	-0,97%
PPN KARANGANTU	68.799.000	73.578.720	4.779.720	6,95%
PPN KEJAWANAN	141.581.100	142.739.820	1.158.720	0,82%
PPN KWANDANG	47.652.360	54.170.160	6.517.800	13,68%
PPN PEKALONGAN	123.331.260	150.199.080	26.867.820	21,79%
PPN PELABUHAN RATU	155.630.580	151.140.540	- 4.490.040	-2,89%
PPN PEMANGKAT	95.449.560	92.407.920	- 3.041.640	-3,19%
PPN PENGAMBENGAN	99.287.820	101.460.420	2.172.600	2,19%
PPN PRIGI	149.619.720	139.770.600	- 9.849.120	-6,58%
PPN SIBOLGA	113.626.980	112.323.420	- 1.303.560	-1,15%
PPN SUNGAILIAT	71.333.700	65.250.420	- 6.083.280	-8,53%
PPN TANJUNG PANDAN	78.792.960	88.642.080	9.849.120	12,50%
PPN TELUK BATANG	42.148.440	41.786.340	- 362.100	-0,86%
PPN TERNATE	91.538.880	90.959.520	- 579.360	-0,63%
PPN TUAL	75.027.120	77.923.920	2.896.800	3,86%
PPS BELAWAN	144.984.840	135.135.720	- 9.849.120	-6,79%
PPS BITUNG	111.888.900	95.847.870	- 16.041.030	- 14,34%

PPS BUNGUS	120.289.620	104.791.740	-	15.497.880	-	12,88%
PPS CILACAP	178.732.560	177.935.940	-	796.620	-	-0,45%
PPS KENDARI	200.748.240	197.996.280	-	2.751.960	-	-1,37%
PPS NIZAM ZAHMAN	149.836.980	153.457.980		3.621.000		2,42%
SEKRETARIAT DJPT	895.256.040	869.184.840	-	26.071.200	-	-2,91%
Belanja Uang Makan PNS	7.561.886.700	9.185.670.000		1.623.783.300		21,47%
BBPPI	400.001.000	508.426.000		108.425.000		27,11%
PPN AMBON	293.506.000	320.818.000		27.312.000		9,31%
PPN BRONDONG	326.101.700	368.313.000		42.211.300		12,94%
PPN KARANGANTU	136.554.000	193.001.000		56.447.000		41,34%
PPN KEJAWANAN	320.715.000	364.363.000		43.648.000		13,61%
PPN KWANDANG	97.908.000	135.207.000		37.299.000		38,10%
PPN PEKALONGAN	263.323.000	415.293.000		151.970.000		57,71%
PPN PELABUHAN RATU	377.576.000	373.405.000	-	4.171.000	-	-1,10%
PPN PEMANGKAT	203.206.000	227.579.000		24.373.000		11,99%
PPN PENGAMBENGAN	241.399.000	282.231.000		40.832.000		16,91%
PPN PRIGI	370.663.000	394.794.000		24.131.000		6,51%
PPN SIBOLGA	303.773.000	309.926.000		6.153.000		2,03%
PPN SUNGAILIAT	188.325.000	186.486.000	-	1.839.000	-	-0,98%
PPN TANJUNG PANDAN	171.515.000	224.040.000		52.525.000		30,62%
PPN TELUK BATANG	92.505.000	103.998.000		11.493.000		12,42%
PPN TERNATE	243.178.000	246.298.000		3.120.000		1,28%
PPN TUAL	176.944.000	230.737.000		53.793.000		30,40%
PPS BELAWAN	352.469.000	373.689.000		21.220.000		6,02%
PPS BITUNG	210.722.000	262.668.000		51.946.000		24,65%
PPS BUNGUS	289.782.000	261.537.000	-	28.245.000	-	-9,75%
PPS CILACAP	438.886.000	469.111.000		30.225.000		6,89%
PPS KENDARI	428.435.000	512.800.000		84.365.000		19,69%
PPS NIZAM ZAHMAN	277.477.000	465.446.000		187.969.000		67,74%
SEKRETARIAT DJPT	1.356.923.000	1.955.504.000		598.581.000		44,11%
Belanja Tunjangan Umum PNS	1.387.474.950	1.350.089.650	-	37.385.300	-	-2,69%
BBPPI	35.865.000	32.635.000	-	3.230.000	-	-9,01%
PPN AMBON	65.390.000	58.590.000	-	6.800.000	-	-10,40%
PPN BRONDONG	40.995.000	36.910.000	-	4.085.000	-	-9,96%
PPN KARANGANTU	17.685.000	19.539.900		1.854.900		10,49%
PPN KEJAWANAN	60.165.000	59.450.000	-	715.000	-	-1,19%
PPN KWANDANG	6.260.000	15.100.000		8.840.000		141,21%
PPN PEKALONGAN	52.705.000	68.530.000		15.825.000		30,03%
PPN PELABUHAN RATU	74.835.000	74.860.000		25.000		0,03%
PPN PEMANGKAT	33.940.000	39.400.000		5.460.000		16,09%
PPN PENGAMBENGAN	17.575.000	23.125.000		5.550.000		31,58%
PPN PRIGI	57.585.000	50.415.000	-	7.170.000	-	-12,45%
PPN SIBOLGA	44.975.000	45.610.000		635.000		1,41%
PPN SUNGAILIAT	13.415.000	10.119.950	-	3.295.050	-	-24,56%
PPN TANJUNG PANDAN	30.870.000	33.134.900		2.264.900		7,34%
PPN TELUK BATANG	13.065.000	14.175.000		1.110.000		8,50%

PPN TERNATE	42.230.000	40.850.000	- 1.380.000	-3,27%
PPN TUAL	26.250.000	32.755.000	6.505.000	24,78%
PPS BELAWAN	80.425.000	69.270.000	- 11.155.000	- 13,87%
PPS BITUNG	33.330.000	29.390.000	- 3.940.000	- 11,82%
PPS BUNGUS	58.950.000	50.135.000	- 8.815.000	- 14,95%
PPS CILACAP	69.840.000	69.205.000	- 635.000	-0,91%
PPS KENDARI	94.205.000	100.455.000	6.250.000	6,63%
PPS NIZAM ZAHMAN	68.610.000	78.274.900	9.664.900	14,09%
SEKRETARIAT DJPT	348.309.950	298.160.000	- 50.149.950	- 14,40%
Belanja Gaji Pokok PPPK	18.234.830.000	21.613.085.504	3.378.255.504	18,53%
BBPPI	240.916.000	377.481.800	136.565.800	56,69%
PPN AMBON	731.556.800	889.439.500	157.882.700	21,58%
PPN BRONDONG	787.681.200	891.481.400	103.800.200	13,18%
PPN KARANGANTU	680.270.000	912.784.000	232.514.000	34,18%
PPN KEJAWANAN	766.602.600	838.560.100	71.957.500	9,39%
PPN KWANDANG	572.959.900	660.068.000	87.108.100	15,20%
PPN PEKALONGAN	760.447.900	786.055.500	25.607.600	3,37%
PPN PELABUHAN RATU	413.669.800	492.420.700	78.750.900	19,04%
PPN PEMANGKAT	693.912.800	793.585.500	99.672.700	14,36%
PPN PENGAMBENGAN	706.846.800	871.391.400	164.544.600	23,28%
PPN PRIGI	617.683.400	695.865.800	78.182.400	12,66%
PPN SIBOLGA	760.272.800	880.987.100	120.714.300	15,88%
PPN SUNGAILIAT	709.319.600	886.396.900	177.077.300	24,96%
PPN TANJUNG PANDAN	825.123.800	907.306.100	82.182.300	9,96%
PPN TELUK BATANG	543.197.800	618.313.900	75.116.100	13,83%
PPN TERNATE	635.866.000	764.250.300	128.384.300	20,19%
PPN TUAL	548.994.400	597.708.800	48.714.400	8,87%
PPS BELAWAN	825.562.600	955.633.800	130.071.200	15,76%
PPS BITUNG	700.189.200	817.797.000	117.607.800	16,80%
PPS BUNGUS	684.296.400	792.280.500	107.984.100	15,78%
PPS CILACAP	882.811.800	1.027.322.400	144.510.600	16,37%
PPS KENDARI	578.722.800	700.836.700	122.113.900	21,10%
PPS NIZAM ZAHMAN	1.310.716.800	1.625.368.400	314.651.600	24,01%
SEKRETARIAT DJPT	2.257.208.800	2.829.749.904	572.541.104	25,37%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	390.964	423.425	32.461	8,30%
BBPPI	5.268	7.731	2.463	46,75%
PPN AMBON	14.476	17.923	3.447	23,81%
PPN BRONDONG	18.054	17.135	- 919	-5,09%
PPN KARANGANTU	12.725	17.780	5.055	39,72%
PPN KEJAWANAN	15.034	16.222	1.188	7,90%
PPN KWANDANG	10.099	11.049	950	9,41%
PPN PEKALONGAN	17.871	15.319	- 2.552	- 14,28%
PPN PELABUHAN RATU	9.717	10.615	898	9,24%
PPN PEMANGKAT	15.497	15.438	- 59	-0,38%
PPN PENGAMBENGAN	17.008	17.907	899	5,29%
PPN PRIGI	14.959	16.330	1.371	9,17%

PPN SIBOLGA	14.936	15.483	547	3,66%	
PPN SUNGAILIAT	11.681	16.470	4.789	41,00%	
PPN TANJUNG PANDAN	19.328	19.511	183	0,95%	
PPN TELUK BATANG	10.598	12.763	2.165	20,43%	
PPN TERNATE	14.238	14.773	535	3,76%	
PPN TUAL	11.069	15.016	3.947	35,66%	
PPS BELAWAN	17.144	17.395	251	1,46%	
PPS BITUNG	15.244	17.368	2.124	13,93%	
PPS BUNGUS	15.510	15.127	-	383	-2,47%
PPS CILACAP	18.721	19.362	641	3,42%	
PPS KENDARI	12.151	12.074	-	77	-0,63%
PPS NIZAM ZAHMAN	29.016	29.929	913	3,15%	
SEKRETARIAT DJPT	50.620	54.705	4.085	8,07%	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.175.894.390	1.481.374.720	305.480.330	25,98%	
BBPPI	16.816.720	26.585.210	9.768.490	58,09%	
PPN AMBON	40.675.200	48.250.090	7.574.890	18,62%	
PPN BRONDONG	44.775.460	63.464.270	18.688.810	41,74%	
PPN KARANGANTU	37.355.300	55.785.500	18.430.200	49,34%	
PPN KEJAWANAN	51.005.120	63.051.040	12.045.920	23,62%	
PPN KWANDANG	40.463.310	49.385.790	8.922.480	22,05%	
PPN PEKALONGAN	61.069.330	74.280.560	13.211.230	21,63%	
PPN PELABUHAN RATU	17.117.380	25.694.600	8.577.220	50,11%	
PPN PEMANGKAT	51.637.060	61.269.730	9.632.670	18,65%	
PPN PENGAMBENGAN	45.778.060	59.906.540	14.128.480	30,86%	
PPN PRIGI	35.219.200	40.099.470	4.880.270	13,86%	
PPN SIBOLGA	48.813.640	59.278.110	10.464.470	21,44%	
PPN SUNGAILIAT	48.564.340	65.209.060	16.644.720	34,27%	
PPN TANJUNG PANDAN	33.945.150	41.997.320	8.052.170	23,72%	
PPN TELUK BATANG	38.885.760	43.301.590	4.415.830	11,36%	
PPN TERNATE	46.948.340	51.245.970	4.297.630	9,15%	
PPN TUAL	30.558.990	32.541.070	1.982.080	6,49%	
PPS BELAWAN	57.267.160	71.463.280	14.196.120	24,79%	
PPS BITUNG	35.485.000	43.946.820	8.461.820	23,85%	
PPS BUNGUS	49.509.620	57.914.900	8.405.280	16,98%	
PPS CILACAP	68.812.340	80.204.760	11.392.420	16,56%	
PPS KENDARI	32.655.480	49.729.510	17.074.030	52,29%	
PPS NIZAM ZAHMAN	96.431.260	121.730.380	25.299.120	26,24%	
SEKRETARIAT DJPT	146.105.170	195.039.150	48.933.980	33,49%	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	354.186.132	453.405.102	99.218.970	28,01%	
BBPPI	5.829.680	8.675.448	2.845.768	48,82%	
PPN AMBON	13.857.980	15.385.298	1.527.318	11,02%	
PPN BRONDONG	14.492.156	17.502.214	3.010.058	20,77%	
PPN KARANGANTU	10.878.872	17.296.116	6.417.244	58,99%	
PPN KEJAWANAN	14.347.154	17.324.968	2.977.814	20,76%	
PPN KWANDANG	7.382.490	10.247.504	2.865.014	38,81%	
PPN PEKALONGAN	21.677.774	23.435.246	1.757.472	8,11%	
PPN PELABUHAN RATU	5.693.656	8.838.112	3.144.456	55,23%	

PPN PEMANGKAT	16.641.768	20.425.272	3.783.504	22,73%
PPN PENGAMBENGAN	17.159.150	21.250.006	4.090.856	23,84%
PPN PRIGI	12.570.712	14.259.112	1.688.400	13,43%
PPN SIBOLGA	14.336.784	18.827.920	4.491.136	31,33%
PPN SUNGAILIAT	10.609.876	16.807.532	6.197.656	58,41%
PPN TANJUNG PANDAN	10.496.508	13.909.252	3.412.744	32,51%
PPN TELUK BATANG	10.881.064	13.143.256	2.262.192	20,79%
PPN TERNATE	13.323.676	15.833.076	2.509.400	18,83%
PPN TUAL	7.956.770	8.080.524	123.754	1,56%
PPS BELAWAN	15.467.442	18.957.644	3.490.202	22,56%
PPS BITUNG	10.584.212	14.977.788	4.393.576	41,51%
PPS BUNGUS	12.434.882	14.343.636	1.908.754	15,35%
PPS CILACAP	21.269.254	25.904.018	4.634.764	21,79%
PPS KENDARI	7.367.408	12.517.158	5.149.750	69,90%
PPS NIZAM ZAHMAN	34.146.358	43.631.346	9.484.988	27,78%
SEKRETARIAT DJPT	44.780.506	61.832.656	17.052.150	38,08%
Belanja Tunjangan Struktural PPPK		16.500.000	16.500.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT		16.500.000	16.500.000	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.661.493.000	2.744.433.800	82.940.800	3,12%
BBPPI	36.740.000	41.600.000	4.860.000	13,23%
PPN AMBON	108.800.000	125.900.000	17.100.000	15,72%
PPN BRONDONG	111.200.000	115.520.000	4.320.000	3,88%
PPN KARANGANTU	98.720.000	104.881.800	6.161.800	6,24%
PPN KEJAWANAN	113.000.000	116.540.000	3.540.000	3,13%
PPN KWANDANG	82.040.000	77.720.000	- 4.320.000	-5,27%
PPN PEKALONGAN	110.480.000	108.980.000	- 1.500.000	-1,36%
PPN PELABUHAN RATU	61.844.000	65.408.000	3.564.000	5,76%
PPN PEMANGKAT	90.560.000	91.760.000	1.200.000	1,33%
PPN PENGAMBENGAN	96.130.000	101.170.000	5.040.000	5,24%
PPN PRIGI	84.440.000	87.860.000	3.420.000	4,05%
PPN SIBOLGA	107.960.000	113.000.000	5.040.000	4,67%
PPN SUNGAILIAT	102.080.000	105.880.000	3.800.000	3,72%
PPN TANJUNG PANDAN	126.360.000	124.560.000	- 1.800.000	-1,42%
PPN TELUK BATANG	74.360.000	77.780.000	3.420.000	4,60%
PPN TERNATE	91.160.000	92.780.000	1.620.000	1,78%
PPN TUAL	79.980.000	75.600.000	- 4.380.000	-5,48%
PPS BELAWAN	113.400.000	118.440.000	5.040.000	4,44%
PPS BITUNG	101.675.000	108.380.000	6.705.000	6,59%
PPS BUNGUS	99.330.000	104.370.000	5.040.000	5,07%
PPS CILACAP	130.410.000	132.440.000	2.030.000	1,56%
PPS KENDARI	88.760.000	86.420.000	- 2.340.000	-2,64%
PPS NIZAM ZAHMAN	186.384.000	195.464.000	9.080.000	4,87%
SEKRETARIAT DJPT	365.680.000	371.980.000	6.300.000	1,72%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.178.997.600	1.469.474.220	290.476.620	24,64%
BBPPI	16.366.920	25.926.360	9.559.440	58,41%
PPN AMBON	44.610.720	52.214.820	7.604.100	17,05%
PPN BRONDONG	49.535.280	60.615.540	11.080.260	22,37%

PPN KARANGANTU	38.672.280	58.008.420	19.336.140	50,00%
PPN KEJAWANAN	49.897.380	58.080.840	8.183.460	16,40%
PPN KWANDANG	33.168.360	41.496.660	8.328.300	25,11%
PPN PEKALONGAN	61.629.420	67.205.760	5.576.340	9,05%
PPN PELABUHAN RATU	20.712.120	29.619.780	8.907.660	43,01%
PPN PEMANGKAT	52.866.600	63.005.400	10.138.800	19,18%
PPN PENGAMBENGAN	52.504.500	65.684.940	13.180.440	25,10%
PPN PRIGI	41.279.400	46.783.320	5.503.920	13,33%
PPN SIBOLGA	49.462.860	60.977.640	11.514.780	23,28%
PPN SUNGAILIAT	43.307.160	60.253.440	16.946.280	39,13%
PPN TANJUNG PANDAN	40.337.940	49.607.700	9.269.760	22,98%
PPN TELUK BATANG	37.948.080	43.596.840	5.648.760	14,89%
PPN TERNATE	44.755.560	52.721.760	7.966.200	17,80%
PPN TUAL	31.937.220	34.182.240	2.245.020	7,03%
PPS BELAWAN	55.690.980	66.771.240	11.080.260	19,90%
PPS BITUNG	38.744.700	49.824.960	11.080.260	28,60%
PPS BUNGUS	44.972.820	50.259.480	5.286.660	11,76%
PPS CILACAP	64.671.060	78.068.760	13.397.700	20,72%
PPS KENDARI	29.764.620	44.755.560	14.990.940	50,36%
PPS NIZAM ZAHMAN	99.287.820	126.807.420	27.519.600	27,72%
SEKRETARIAT DJPT	136.873.800	183.005.340	46.131.540	33,70%
Belanja Uang Makan PPPK	3.031.840.800	4.291.411.000	1.259.570.200	41,54%
BBPPI	36.298.000	77.058.000	40.760.000	112,29%
PPN AMBON	122.611.000	184.227.000	61.616.000	50,25%
PPN BRONDONG	109.955.550	179.238.000	69.282.450	63,01%
PPN KARANGANTU	108.107.000	191.446.000	83.339.000	77,09%
PPN KEJAWANAN	142.003.000	168.631.000	26.628.000	18,75%
PPN KWANDANG	87.691.250	132.919.000	45.227.750	51,58%
PPN PEKALONGAN	109.906.000	161.583.000	51.677.000	47,02%
PPN PELABUHAN RATU	79.231.000	85.005.000	5.774.000	7,29%
PPN PEMANGKAT	134.978.000	166.328.000	31.350.000	23,23%
PPN PENGAMBENGAN	132.630.000	174.273.000	41.643.000	31,40%
PPN PRIGI	119.705.000	143.129.000	23.424.000	19,57%
PPN SIBOLGA	150.265.000	183.259.000	32.994.000	21,96%
PPN SUNGAILIAT	143.810.000	192.820.000	49.010.000	34,08%
PPN TANJUNG PANDAN	125.480.000	175.409.000	49.929.000	39,79%
PPN TELUK BATANG	103.417.000	122.987.000	19.570.000	18,92%
PPN TERNATE	119.134.000	158.156.000	39.022.000	32,75%
PPN TUAL	94.826.000	124.202.000	29.376.000	30,98%
PPS BELAWAN	158.751.000	198.341.000	39.590.000	24,94%
PPS BITUNG	123.177.000	166.565.000	43.388.000	35,22%
PPS BUNGUS	123.809.000	151.562.000	27.753.000	22,42%
PPS CILACAP	172.041.000	215.022.000	42.981.000	24,98%
PPS KENDARI	102.947.000	141.284.000	38.337.000	37,24%
PPS NIZAM ZAHMAN	203.172.000	391.549.000	188.377.000	92,72%
SEKRETARIAT DJPT	227.896.000	406.418.000	178.522.000	78,33%
Belanja Tunjangan Umum PPPK		154.530.000	154.530.000	#DIV/0!

BBPPI		6.540.000	6.540.000	#DIV/0!
PPN BRONDONG		4.875.000	4.875.000	#DIV/0!
PPN KARANGANTU		12.495.000	12.495.000	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN		3.240.000	3.240.000	#DIV/0!
PPN KWANDANG		7.095.000	7.095.000	#DIV/0!
PPN PEKALONGAN		2.685.000	2.685.000	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU		3.780.000	3.780.000	#DIV/0!
PPN PEMANGKAT		5.970.000	5.970.000	#DIV/0!
PPN PENGAMBENGAN		8.655.000	8.655.000	#DIV/0!
PPN PRIGI		3.750.000	3.750.000	#DIV/0!
PPN SIBOLGA		5.925.000	5.925.000	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT		9.765.000	9.765.000	#DIV/0!
PPN TANJUNG PANDAN		6.480.000	6.480.000	#DIV/0!
PPN TELUK BATANG		3.240.000	3.240.000	#DIV/0!
PPN TERNATE		7.080.000	7.080.000	#DIV/0!
PPS BELAWAN		5.955.000	5.955.000	#DIV/0!
PPS BITUNG		5.400.000	5.400.000	#DIV/0!
PPS CILACAP		9.060.000	9.060.000	#DIV/0!
PPS KENDARI		9.735.000	9.735.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT		32.805.000	32.805.000	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	969.623.000	954.649.000	- 14.974.000	-1,54%
BBPPI	75.130.000	28.815.000	- 46.315.000	- 61,65%
PPN AMBON	25.320.000		- 25.320.000	- 100,00 %
PPN BRONDONG	30.741.000	96.698.000	65.957.000	214,56 %
PPN KARANGANTU	37.223.000	30.234.000	- 6.989.000	- 18,78%
PPN KEJAWANAN	49.653.000	4.981.000	- 44.672.000	- 89,97%
PPN KWANDANG	28.980.000	23.864.000	- 5.116.000	- 17,65%
PPN PEKALONGAN	75.302.000	88.407.000	13.105.000	17,40%
PPN PELABUHAN RATU	7.481.000	3.575.000	- 3.906.000	- 52,21%
PPN PEMANGKAT	51.957.000	15.186.000	- 36.771.000	- 70,77%
PPN PENGAMBENGAN	15.114.000		- 15.114.000	- 100,00 %
PPN PRIGI	23.789.000	11.324.000	- 12.465.000	- 52,40%
PPN SIBOLGA	27.504.000	37.013.000	9.509.000	34,57%
PPN SUNGAILIAT	8.727.000	1.128.000	- 7.599.000	- 87,07%
PPN TANJUNG PANDAN	35.210.000	2.065.000	- 33.145.000	- 94,14%
PPN TELUK BATANG	13.494.000	6.177.000	- 7.317.000	- 54,22%
PPN TERNATE	60.098.000	62.111.000	2.013.000	3,35%
PPS BELAWAN	51.318.000	79.666.000	28.348.000	55,24%
PPS BITUNG	66.227.000	51.436.000	- 14.791.000	- 22,33%
PPS BUNGUS		38.227.000	38.227.000	#DIV/0!
PPS CILACAP	12.503.000	18.978.000	6.475.000	51,79%
PPS KENDARI	149.967.000	158.870.000	8.903.000	5,94%
PPS NIZAM ZAHMAN	123.885.000	195.894.000	72.009.000	58,13%
Belanja Uang Lembur PPPK	601.775.000	694.532.000	92.757.000	15,41%

BBPPI	9.257.000	7.256.000	-	2.001.000	- 21,62%
PPN AMBON	47.814.000		-	47.814.000	- 100,00%
PPN BRONDONG	27.129.000	99.971.000		72.842.000	268,50%
PPN KARANGANTU	21.978.000	31.783.000		9.805.000	44,61%
PPN KEJAWANAN	11.602.000	4.975.000	-	6.627.000	- 57,12%
PPN KWANDANG	41.845.000	41.464.000	-	381.000	-0,91%
PPN PEKALONGAN	22.237.000	31.182.000		8.945.000	40,23%
PPN PELABUHAN RATU	3.065.000		-	3.065.000	- 100,00%
PPN PEMANGKAT	36.830.000	12.960.000	-	23.870.000	- 64,81%
PPN PENGAMBENGAN	10.499.000		-	10.499.000	- 100,00%
PPN PRIGI	9.237.000	6.747.000	-	2.490.000	- 26,96%
PPN SIBOLGA		19.060.000		19.060.000	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT	9.573.000	1.362.000	-	8.211.000	- 85,77%
PPN TANJUNG PANDAN	29.996.000	7.174.000	-	22.822.000	- 76,08%
PPN TELUK BATANG	11.940.000	8.293.000	-	3.647.000	- 30,54%
PPN TERNATE	46.015.000	40.393.000	-	5.622.000	- 12,22%
PPS BELAWAN	30.414.000	79.406.000		48.992.000	161,08%
PPS BITUNG	52.815.000	26.317.000	-	26.498.000	- 50,17%
PPS BUNGUS		25.329.000		25.329.000	#DIV/0!
PPS KENDARI	38.843.000	50.077.000		11.234.000	28,92%
PPS NIZAM ZAHMAN	140.686.000	200.783.000		60.097.000	42,72%
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	85.601.709.228	86.504.040.768		902.331.540	1,05%
BBPPI	5.549.539.298	5.385.479.793	-	164.059.505	-2,96%
PPN AMBON	2.450.062.842	2.402.677.858	-	47.384.984	-1,93%
PPN BRONDONG	2.922.006.322	3.081.671.940		159.665.618	5,46%
PPN KARANGANTU	1.515.268.511	1.610.998.545		95.730.034	6,32%
PPN KEJAWANAN	2.757.596.231	2.932.224.799		174.628.568	6,33%
PPN KWANDANG	1.162.719.245	1.255.826.718		93.107.473	8,01%
PPN PEKALONGAN	2.746.314.910	3.192.794.575		446.479.665	16,26%
PPN PELABUHAN RATU	2.974.641.177	3.327.790.135		353.148.958	11,87%
PPN PEMANGKAT	1.723.910.706	1.758.922.781		35.012.075	2,03%
PPN PENGAMBENGAN	2.404.582.175	2.524.361.512		119.779.337	4,98%
PPN PRIGI	3.336.458.165	3.147.399.862	-	189.058.303	-5,67%
PPN SIBOLGA	2.436.270.495	2.492.466.832		56.196.337	2,31%
PPN SUNGAILIAT	1.742.948.950	1.582.809.379	-	160.139.571	-9,19%
PPN TANJUNG PANDAN	1.659.201.363	1.938.301.599		279.100.236	16,82%
PPN TELUK BATANG	871.390.171	800.046.406	-	71.343.765	-8,19%
PPN TERNATE	2.103.497.486	2.104.179.192		681.706	0,03%
PPN TUAL	1.793.596.100	1.837.850.060		44.253.960	2,47%
PPS BELAWAN	3.468.292.246	3.364.490.935	-	103.801.311	-2,99%
PPS BITUNG	2.391.709.591	2.387.039.569	-	4.670.022	-0,20%
PPS BUNGUS	2.932.533.344	2.522.147.560	-	410.385.784	- 13,99%
PPS CILACAP	3.871.525.873	3.987.052.212		115.526.339	2,98%

PPS KENDARI	4.230.395.883	4.294.098.985	63.703.102	1,51%
PPS NIZAM ZAHMAN	3.334.894.071	3.617.947.657	283.053.586	8,49%
SEKRETARIAT DJPT	25.222.354.073	24.955.461.864	- 266.892.209	-1,06%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24.515.397.340	28.867.890.010	4.352.492.670	17,75%
BBPPI	326.489.518	506.535.365	180.045.847	55,15%
PPN AMBON	998.738.884	1.198.698.900	199.960.016	20,02%
PPN BRONDONG	1.063.643.313	1.179.461.300	115.817.987	10,89%
PPN KARANGANTU	913.074.708	1.207.733.973	294.659.265	32,27%
PPN KEJAWANAN	1.020.231.678	1.079.098.522	58.866.844	5,77%
PPN KWANDANG	757.062.311	872.510.665	115.448.354	15,25%
PPN PEKALONGAN	1.020.029.495	1.056.395.570	36.366.075	3,57%
PPN PELABUHAN RATU	525.837.110	704.764.399	178.927.289	34,03%
PPN PEMANGKAT	892.710.974	1.005.134.811	112.423.837	12,59%
PPN PENGAMBENGAN	933.103.703	1.141.642.674	208.538.971	22,35%
PPN PRIGI	807.271.794	901.504.750	94.232.956	11,67%
PPN SIBOLGA	998.255.404	1.160.551.870	162.296.466	16,26%
PPN SUNGAILIAT	948.207.555	1.175.794.040	227.586.485	24,00%
PPN TANJUNG PANDAN	1.112.009.457	1.226.935.831	114.926.374	10,34%
PPN TELUK BATANG	704.145.042	800.388.686	96.243.644	13,67%
PPN TERNATE	834.696.456	1.012.099.098	177.402.642	21,25%
PPN TUAL	734.865.751	791.678.340	56.812.589	7,73%
PPS BELAWAN	1.121.517.703	1.281.068.580	159.550.877	14,23%
PPS BITUNG	932.673.313	1.085.299.196	152.625.883	16,36%
PPS BUNGUS	923.440.415	1.062.744.701	139.304.286	15,09%
PPS CILACAP	1.196.039.975	1.373.724.077	177.684.102	14,86%
PPS KENDARI	806.702.512	943.879.865	137.177.353	17,00%
PPS NIZAM ZAHMAN	1.772.481.883	2.147.258.476	374.776.593	21,14%
SEKRETARIAT DJPT	3.172.168.386	3.952.986.321	780.817.935	24,61%
Grand Total	229.794.101.063	242.049.672.937	12.255.571.874	5,33%

Nama Akun	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Gaji Pokok PNS	64.350.113.200	64.022.943.846	- 327.169.354	-0,51%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	889.094	878.906	- 10.188	-1,15%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5.005.297.970	4.970.320.525	- 34.977.445	-0,70%
Belanja Tunj. Anak PNS	1.536.330.682	1.517.675.712	- 18.654.970	-1,21%
Belanja Tunj. Struktural PNS	881.329.480	858.720.000	- 22.609.480	-2,57%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.479.297.000	6.627.369.800	148.072.800	2,29%
Belanja Tunj. PPh PNS	623.704.833	682.676.779	58.971.946	9,46%
Belanja Tunj. Beras PNS	3.641.639.700	3.587.578.170	- 54.061.530	-1,48%
Belanja Uang Makan PNS	7.561.886.700	9.185.670.000	1.623.783.300	21,47%
Belanja Tunjangan Umum PNS	1.387.474.950	1.350.089.650	- 37.385.300	-2,69%
Belanja Gaji Pokok PPPK	18.234.830.000	21.613.085.504	3.378.255.504	18,53%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	390.964	423.425	32.461	8,30%

Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.175.894.390	1.481.374.720	305.480.330	25,98%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	354.186.132	453.405.102	99.218.970	28,01%
Belanja Tunjangan Struktural PPPK		16.500.000	16.500.000	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.661.493.000	2.744.433.800	82.940.800	3,12%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.178.997.600	1.469.474.220	290.476.620	24,64%
Belanja Uang Makan PPPK	3.031.840.800	4.291.411.000	1.259.570.200	41,54%
Belanja Tunjangan Umum PPPK		154.530.000	154.530.000	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	969.623.000	954.649.000	- 14.974.000	-1,54%
Belanja Uang Lembur PPPK	601.775.000	694.532.000	92.757.000	15,41%
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	85.601.709.228	86.504.040.768	902.331.540	1,05%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24.515.397.340	28.867.890.010	4.352.492.670	17,75%
Total	229.794.101.063	242.049.672.937	12.255.571.874	5,33%

Jumlah pegawai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 404 pegawai, sehingga apabila jika dibandingkan dengan TA 2024 terdapat kenaikan belanja pegawai sebanyak 5,33 persen yang disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan penerimaan PPPK baru. Pada TA 2025 terdapat pegawai mutasi dan pensiun sebanyak 404 orang dan penerimaan PPPK sebanyak 55 orang, tetapi terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada belanja pegawai PPPK yang disebabkan oleh penerimaan PPPK pada TA 2025 sebagian besar gaji dan tunjangan dibayarkan pada TA 2025.

Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Rp

1.456.709.369.67

9

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp580.294.122.668 dan Rp1.456.709.369.679 Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 151,50 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang.

TA 2024 dan TA 2025

Uraian	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Barang Operasional	51.482.621.242	36.945.858.387	- 14.536.762.855	-28,24%
Belanja Barang Non Operasional	60.480.501.484	16.820.215.213	- 43.660.286.271	-72,19%
Belanja Barang Persediaan	7.951.699.376	3.547.368.352	- 4.404.331.024	-55,39%

Belanja Jasa	146.223.069.009	185.062.869.579	38.839.800.570	26,56%
Belanja Pemeliharaan	43.660.257.399	36.234.582.719	- 7.425.674.680	-17,01%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	156.074.269.676	57.661.044.841	- 98.413.224.835	-63,06%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.287.830.036	2.730.045.953	- 3.557.784.083	-56,58%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	100.472.044.423	1.106.461.912.026	1.005.989.867.603	1001,26%
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	2.112.999.000		- 2.112.999.000	-100,00%
Grand Total	574.745.291.645	1.445.463.897.070	870.718.605.425	151,50%

Nama Akun	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Keperluan Perkantoran	41.309.069.721	29.786.896.843	- 11.522.172.878	-27,89%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	732.700.818	85.183.380	- 647.517.438	-88,37%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	97.965.784	39.122.997	- 58.842.787	-60,06%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	4.259.594.880	3.553.432.000	- 706.162.880	-16,58%
Belanja Barang Operasional Lainnya	5.083.290.039	3.481.223.167	- 1.602.066.872	-31,52%
Belanja Bahan	51.942.907.272	15.038.393.578	- 36.904.513.694	-71,05%
Belanja Honor Output Kegiatan	6.397.820.500	552.130.000	- 5.845.690.500	-91,37%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.139.773.712	1.103.556.415	- 1.036.217.297	-48,43%
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		110.162.820	110.162.820	#DIV/0!
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel		15.972.400	15.972.400	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.829.780.671	3.422.964.002	- 4.406.816.669	-56,28%
Belanja Barang Persediaan bahan baku	86.684.000	97.291.200	10.607.200	12,24%
Belanja Barang Persediaan Lainnya	35.234.705	27.113.150	- 8.121.555	-23,05%
Belanja Langganan Listrik	18.568.797.523	16.240.504.268	- 2.328.293.255	-12,54%
Belanja Langganan Telepon	1.269.450.479	1.030.542.527	- 238.907.952	-18,82%
Belanja Langganan Air	3.377.914.446	2.865.998.972	- 511.915.474	-15,15%
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.369.148.674	4.497.401.769	1.128.253.095	33,49%
Belanja Jasa Pos dan Giro	-		-	#DIV/0!
Belanja Jasa Konsultan	8.799.793.520	37.171.152.855	28.371.359.335	322,415%
Belanja Sewa	11.677.885.560	4.912.751.791	- 6.765.133.769	-57,93%
Belanja Jasa Profesi	3.407.423.933	1.799.111.000	- 1.608.312.933	-47,20%
Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain		3.341.520.000	3.341.520.000	#DIV/0!
Belanja Jasa Lainnya	95.752.654.874	124.334.799.044	28.582.144.170	29,85%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.759.076.327	18.523.918.770	235.157.557	-1,25%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	992.332.738	676.835.648	315.497.090	-31,79%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.129.918.239	9.962.383.923	7.167.534.316	-41,84%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.949.264.297	3.317.372.604	1.368.108.307	70,19%
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.422.494.332	1.402.462.975	20.031.357	-1,41%
Belanja Pemeliharaan Irigasi	594.739.586	283.619.159	311.120.427	-52,31%
Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.786.941.880	2.037.524.640	749.417.240	-26,89%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		24.965.000	24.965.000	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Lainnya	25.490.000	5.500.000	19.990.000	-78,42%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.070.859.753	42.239.816.234	59.831.043.519	-58,62%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.876.067.646	704.360.895	1.171.706.751	-62,46%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.751.589.827	7.566.581.945	12.185.007.882	-61,69%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.375.752.450	7.150.285.767	25.225.466.683	-77,91%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3.710.406.644	2.730.045.953	980.360.691	-26,42%
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2.577.423.392		2.577.423.392	-100,00%
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	54.872.107.523	336.189.680.804	281.317.573.281	512,68%
Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	38.700.000.000	344.180.075.943	305.480.075.943	789,35%
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		426.092.155.279	426.092.155.279	#DIV/0!
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	6.899.936.900		6.899.936.900	-100,00%
Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.112.999.000		2.112.999.000	-100,00%
Total	574.745.291.645	1.456.709.369.679	870.718.605.425	151,50%

1. Pada belanja barang operasional terdapat penurunan senilai 28,24% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2025. hal tersebut karena;
 - a. Terdapat penurunan pada belanja honor operasional karena terpangkasnya anggaran pada Dinas Kelautan dan Provinsi

- b. Terdapat penurunan bahan karena blokir efisiensi;
 - c. pada belanja pos surat dinas sebagian besar satker mengalami penurunan seiring dengan proses digitalisasi. Belanja pos surat dinas pada beberapa satker hanya digunakan untuk mengirimkan dokumen hard file dalam rangka tertib administrasi;
 - d. sempat diberlakukannya pengaturan *Work From Office* 4 hari dan *Work From Anywhere* 1 hari.
2. Pada belanja barang non operasional terdapat kenaikan senilai 55,39% yang disebabkan oleh efisiensi anggaran;
 3. Pada Belanja Barang Persediaan terdapat kenaikan senilai 6.68% yang disebabkan oleh efisiensi anggaran;
 4. Pada belanja jasa terdapat kenaikan sebesar 26,56% jika dibandingkan dengan belanja jasa pada TA 2024. hal tersebut disebabkan oleh perekrutan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan kegiatan prioritas Kampung Nelayan Merah Putih dan berbagai kegiatan yang biayai oleh Pinjaman dan hibah luar negeri
 5. Pada belanja pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 17,01% yang disesuaikan dengan rencana pemeliharaan aset pada Ditjen Perikanan Tangkap sebagaimana tertuang dalam RK-BMN.
 6. Pada Belanja Perjalanan Dalam Negeri terdapat penurunan sebesar 63,06% apabila dibandingkan dengan belanja perjalanan TA 2024 yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran;
 7. Belanja Perjalanan Luar Negeri Pada belanja perjalanan luar negeri mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak dari adanya adanya efisiensi anggaran;
 8. Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Pada belanja untuk diserahkan kepada Masyarakat juga mengalami kenaikan yang signifikan karena adanya kegiatan Prioritas Presiden berupa Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada 65 lokasi tahap pertama dan 35 lokasi pada tahap kedua.

Belanja Modal
Rp
 28.617.464.228

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp28.617.464.228 dan Rp56.088.070.528. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 48,98 persen dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal.

TA 2024 dan TA 2025

Uraian	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Modal Tanah	49.867.279		- 49.867.279	- 100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.005.389.216	24.832.633.712	- 11.172.755.504	-31,03%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.112.497.643	2.277.313.177	- 11.835.184.466	-83,86%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.098.157.030	1.507.517.339	- 3.590.639.691	-70,43%
Belanja Modal Lainnya	822.159.360		- 822.159.360	- 100,00%
Grand Total	56.088.070.528	28.617.464.228	- 27.470.606.300	-48,98%

1. Belanja modal tanah merupakan Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian. balik nama. pengosongan. penimbunan. perataan. pematangan tanah. pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual). Pada TA 2025 tidak terdapat belanja modal tanah pada Ditjen Perikanan Tangkap;
2. Belanja modal peralatan mesin lainnya merupakan belanja atas pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja peralatan dan mesin terdapat penurunan yang signifikan karena efisiensi anggaran. Pada TA 2025 realisasi belanja peralatan dan mesin hanya terdapat pada 23 satker UPT dan 1 satker pusat
3. Belanja modal Gedung dan bangunan merupakan belanja atas Gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan Gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Belanja peralatan dan mesin terdapat penurunan yang signifikan karena efisiensi anggaran. Pada TA 2025 realisasi belanja peralatan dan mesin hanya terdapat pada PPS Nizam Zachman;

4. Belanja Modal Jalan & Jembatan. Irigasi dan Jaringan merupakan belanja atas Jalan & Jembatan. Irigasi dan Jaringan secara kontraktual sampai dengan Gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi. termasuk biaya pengurusan IMB. notaris dan pajak (kontraktual). Pada Ditjen Perikanan Tangkap belanja modal JIJ merupakan belanja atas lahan parkir dan pembuatan atau perbaikan dermaga.
5. Belanja modal lainnya digunakan atas Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi dan jaringan. Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Pada TA 2025 tidak terdapat belanja modal tanah pada Ditjen Perikanan Tangkap;

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos Neraca Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

*Aset Lancar
Rp708.296.507.600*

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp708.296.507.600 dan Rp66.539.118.203. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.000.000.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp 0*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp444.068.949 dan Rp306.932.062. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara atas pengembalian pajak kegiatan GEF dan saldo kas hibah GEF SDI. Adapun dokumen kelengkapan pengesahan dan rekening koran atas kas hibah terlampir pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan.

Proyek GEF (*Global Environment Facility*) merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF-US GEF *Agency*. Program ini merupakan bagian dari program perikanan global yang disebut CFI (*Coastal Fisheries Initiative*) yang mencakup 3 wilayah geografi, yaitu Amerika Latin, Afrika Barat dan Indonesia. Dengan demikian, program ini memberi kesempatan kepada setiap negara di wilayah ini untuk saling berbagi pengetahuan, inovasi, pengalaman, dan pembelajaran dalam pengelolaan perikanan pantai.

Dukungan pendanaan program ini diperoleh dari GEF (*Global Environment Facility*) yaitu lembaga donor multilateral yang memberikan hibah dan dana bersyarat kepada negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi untuk proyek-proyek dan aktivitas yang bertujuan melindungi lingkungan global. Hibah GEF-6 CFI untuk Indonesia ini diawali dengan penandatanganan *Grant Agreement* antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF-US GEF *Agency* pada tanggal 23 Desember 2019 serta telah didaftarkan sebagai Hibah Langsung Barang dan Jasa ke Kementerian Keuangan, dengan nomor register No. 2QTS8A9A.

Dalam struktur pelaksanaan hibah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, cq. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap bertindak sebagai *Executing Agency*, sedangkan WWF GEF *Agency* merupakan *Implementing Agency*. Dalam dokumen *Grant Agreement* kegiatan GEF ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025.

Poyek Hibah ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Implementasi EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) di Indonesia Timur (Area Manajemen Perikanan (FMA) 715, 717 & 718), dimana dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi atas 3 komponen, yaitu :

1. Komponen A : Penerapan EAFM pada FMA 715,717 & 718,
2. Komponen B : Penerapan Proyek Perbaikan Perikanan pada FMA 715,717,718; dan
3. Komponen D : Penerapan pengelolaan pengetahuan, Pengawasan dan Evaluasi perikanan pesisir yang berkelanjutan pada FMA 715, 717, 718.

Sisa pada saldo rekening koran untuk pendapatan hibah yang belum disahkan pada TA.2025 adalah sebesar Rp.444.068.000,-, sehingga sisa hibah tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pada triwulan I tahun 2026. Adapun rencana kegiatan yang akan di biayai dengan menggunakan tersebut adalah Adalah sebagai berikut:

DESEMBER	Lokasi	PIC	Tanggal	Anggaran
Knowledge Exchange – Coastal State Allianc	Denpasar, Bali	PMU	29 Jan -01 Februari 2026	Rp41.832.000
Knowledge Exchange – IOTC	Perth-Australia	PMU	02-08 Februari 2026	Rp277.961.000
Knowledge Exchange - Penyusunan Laporan Hibah Luar Negeri	Bogor	PMU	28-30 Januari 2026	Rp53.400.000
Knowledge Exchange - Penyusunan Laporan Hibah Luar Negeri	Bogor	PMU	03-06 Februari 2026	Rp70.875.000
TOTAL				Rp444.068.000

Piutang Bukan Pajak Rp 29.684.374.952 **C.1.4 Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp29.684.374.952 dan Rp 29.827.727.397.

1. Piutang PNBPN

Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum dilakukannya pembayaran melebihi waktu jatuh tempo pembayaran. Adapun Piutang PNBPN periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp22.278.134.649 dan Rp22.669.504.139 dengan rincian sebagai berikut;

Nama Satker	2024	2025	Kenaikan Penurunan	%
PPNBrondong		1.498.836	1.498.836	#DIV/0!
PPNKejawanan	7.543.913.324	7.254.197.570	289.715.754	-3,84%
PPNKwandang	19.459.538	26.351.910	6.892.372	35,42%
PPNPelabuhan Ratu		22.031.672	22.031.672	#DIV/0!
PPNPengembangan	82.578.057	42.699.263	39.878.794	-48,29%
PPS Bitung	7.332.900	2.801.400	4.531.500	-61,80%
PPS Kendari	185.823.887	182.223.609	3.600.278	-1,94%
PPS Nizam Zachman	158.344.506	97.925.289	60.419.217	-38,16%
Sesditjen Perikanan Tangkap	14.672.051.927	14.648.405.100	23.646.827	-0,16%
Grand Total	22.669.504.139	22.278.134.649	391.369.490	-1,73%

Nama Satker	Status	Sum of Saldo Piutang	Sum of Penyisihan
PPN Brondong	Lancar	1.498.836	7.495
PPN Kejawanan	Lancar	1.193.335	5.967
	Macet	7.253.004.235	7.253.004.235
PPN Kwandang	Lancar	22.422.935	112.114
	Macet	3.928.975	3.928.975
PPN Pelabuhanratu	Lancar	22.031.672	110.157
PPN Pengembangan	Kurang Lancar	42.699.263	4.269.929
PPS Bitung	Macet	2.801.400	2.801.400
PPS Kendari	Lancar	99.691.994	498.459
	Macet	82.531.615	82.531.615
PPS Brizam Zachman	Macet	97.925.289	97.925.289

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	Macet	14.648.405.100	14.648.405.100
Grand Total		22.278.134.649	22.093.600.735

a. PPN Brondong

Saldo piutang PNBPN Brondong merupakan piutang yang berasal dari sewa lahan Gedung dan bangunan

b. PPN Kejawan

Saldo Piutang Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.254.197.570,- sedangkan pada 31 Desember 2024 Piutang Bukan Pajak tercatat sebesar Rp7.543.913.324,- Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan masih berjalan namun belum diselesaikan pembayarannya pada saat jatuh tempo. Piutang Bukan Pajak pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2025 berupa biaya tambat labuh, kebersihan kolam, pemeliharaan dan kebersihan Kawasan dari 1 pengguna jasa atas nama PT. Hacienda Ocean Industries yang penagihan piutangnya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 2 (dua) kali. Pelimpahan piutang pertama sesuai surat nomor: SP3N-376/PUPNC.13.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan outstanding tagihan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.254.197.570,- dan pelimpahan piutang kedua sesuai surat nomor: SP3N01/PUPNC.13.06/2019 tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp2.155.730.804,- telah lunas sesuai surat dari Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN nomor: SPPN-52/PUPNC.13.06/2024 tanggal 19 Desember 2024, secara terperinci piutang PNBPN atas nama PT.Hacienda Ocean Industries dijelaskan pada bagian pengungkapanpengungkapan lainnya. Selanjutnya terdapat 1 piutang lainnya berupa tagihan Listrik dari 1 pengguna jasa atas nama PT. Hasil Laut Anugrah sebesar Rp1.193.335,-

yang telah lunas pada tanggal 8 Januari 2026 dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) 39088490011HSON4.

c. PPN Kwandang

Piutang PNBPN pada PPN Kwandang merupakan piutang yang timbul atas penggunaan sarana dan prasarana dan air yang sudah jatuh tempo per 31 Desember 2025 tapi belum dilakukan pembayaran.

Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
Akbar sampara	LANCAR	540.000	2.700
Fernandito Matawang	LANCAR	280.320	1.402
friska margareta	LANCAR	12.000	60
Iqrimawati	LANCAR	12.000	60
Iwan	LANCAR	52.000	260
Koperasi Lamahu Jaya	MACET	3.928.975	3.928.975
Mus	LANCAR	100.000	500
rosma	LANCAR	3.402.270	17.011
RUSBAN	LANCAR	15.131.345	75.656
SANAIN	LANCAR	626.000	3.130
saronde	LANCAR	2.150.000	10.750
simin	LANCAR	117.000	585
Total		26.351.910	4.041.089

d. PPN Pelabuhanratu

Piutang PNBPN pada PPN Pelabuhanratu merupakan piutang yang berasal dari tagihan Listrik yang belum dibayar per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut;

Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
Juli	LANCAR	157.037	785
Abdul Syukur	LANCAR	20.564	103
Ade Rizal	LANCAR	348.247	1.741
Ade Tarini	LANCAR	61.693	308
Ade Tirta	LANCAR	7.478	37
Adyaska	LANCAR	11.217	56
Agus Ahmad	LANCAR	57.954	290
Agus Sopian	LANCAR	506.630	2.533
Agus Suryani	LANCAR	222.468	1.112
Ahmad	LANCAR	29.912	150
Ahmad Bustomi/Aang	LANCAR	18.695	93
Ali Nurjaman	LANCAR	502.891	2.514
Andi Firman	LANCAR	80.388	402
Andi Hidayat	LANCAR	18.695	93
Angga Permana Hasan	LANCAR	439.329	2.197

Anna Yulia	LANCAR	106.561	533
Annisa Fitri	LANCAR	203.774	1.019
Aprista Yanin Aniandita, S.St.Pi	LANCAR	338.376	1.692
Aprizon	LANCAR	377.636	1.888
Apudin/Kanda	LANCAR	93.474	467
Asep Saepuloh	LANCAR	48.607	243
Asep Suhendi	LANCAR	123.386	617
Astri	LANCAR	256.119	1.281
Bagoes Cahjadi, AM.d	LANCAR	168.253	841
BAKRI	LANCAR	7.478	37
Deden Rusyana	LANCAR	506.630	2.533
Dewi Lestari	LANCAR	46.737	234
E. Kosasih	LANCAR	112.542	563
Eden Y	LANCAR	1.246.945	6.235
Eli Suryati	LANCAR	487.262	2.436
Epen Supendi	LANCAR	78.145	391
Euis Mintarsih	LANCAR	194.426	972
Fery	LANCAR	56.084	280
H. Jujun	LANCAR	84.500	423
H. Makmur	LANCAR	306.595	1.533
H. Pendi Supendi	LANCAR	18.695	93
H. Supanda	LANCAR	67.301	337
H. UU Sukanta	LANCAR	110.299	551
H. Uyak	LANCAR	104.466	522
H. Yadi	LANCAR	99.083	495
Hendra Lesmana	LANCAR	45.167	226
Hermawan	LANCAR	32.678	163
Idah/Azis	LANCAR	11.217	56
Im Masitoh	LANCAR	431.851	2.159
Ijad	LANCAR	685.428	3.427
Indriyani	LANCAR	181.340	907
Ino Sasmita	LANCAR	82.407	412
Ius	LANCAR	332.282	1.661
Iwan	LANCAR	63.562	318
Iwan Ridwan, S.St.Pi	LANCAR	312.204	1.561
Jayadi	LANCAR	13.086	65
Junaedi/Jepri	LANCAR	78.518	393
Junaedi/Mandor	LANCAR	56.084	280
Karyo	LANCAR	626.277	3.131
Kasturi	LANCAR	91.605	458
Koneli	LANCAR	297.248	1.486
Kopkar Mina Nusantara	LANCAR	13.086	65
Koti Rosmiati	LANCAR	218.730	1.094
Lilis	LANCAR	46.737	234
Mayang Nurwiwenty, S.St.Pi	LANCAR	386.983	1.935
Muhamad Alief, S.T	LANCAR	304.726	1.524

Mulyadi	LANCAR	161.523	808
Nopiyantisari	LANCAR	598.235	2.991
Nur Arifin	LANCAR	14.956	75
Nyai Nurhayati	LANCAR	194.426	972
Resty Febriyanti	LANCAR	211.252	1.056
Retno Dwi Utari, S.St.Pi	LANCAR	370.158	1.851
Ricki Septiyadi Pardi	LANCAR	519.716	2.599
Rina Marlina, S.Pi	LANCAR	185.079	925
Saen Suhendi	LANCAR	14.956	75
Saepul Alam	LANCAR	162.645	813
Saepul Bahri	LANCAR	288.536	1.443
Saepul Catu	LANCAR	372.027	1.860
Sarwono, A.Pi	LANCAR	82.257	411
Sheilla Nadia Astiana, A.Md	LANCAR	334.637	1.673
Sinly Agustine Ibrahim	LANCAR	211.252	1.056
Sita	LANCAR	216.860	1.084
Siti Masitoh	LANCAR	11.217	56
SPBN PT JAR ENERGY TERBARUKAN	LANCAR	74.779	374
Suansih	LANCAR	29.912	150
Sumarni	LANCAR	34.323	172
Suryati	LANCAR	35.520	178
Sutinah	LANCAR	889.874	4.449
T. Alfilia Azani S.Sos	LANCAR	196.296	981
Teten	LANCAR	52.346	262
Tini	LANCAR	590.757	2.954
Titin Kartini	LANCAR	170.123	851
Tusnadi	LANCAR	41.129	206
Uce	LANCAR	1.869	9
Ujang Ismail	LANCAR	115.908	580
Untung	LANCAR	2.188.753	10.944
UPTD TPI PALABUHANRATU	LANCAR	547.759	2.739
Usman Gunawan	LANCAR	128.844	644
Warnali	LANCAR	41.129	206
Wawan Setiawan	LANCAR	95.344	477
Yadi	LANCAR	203.774	1.019
Yandi Sutiana	LANCAR	289.770	1.449
Yoyo Sugiarto	LANCAR	35.520	178
Yuli Setiawan	LANCAR	177.601	888
Yusuf/Ali	LANCAR	102.822	514
Total		22.031.672	110.157

e. PPN Pengambengan

Piutang PNPB PPN Pengambengan merupakan piutang yang tercatat pada Desember 2024 atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam.

Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Pen
Berkah Rahayu (Agus)	KURANG LANCAR	3.664.625	
Bintang Baru ((Sodikin)	KURANG LANCAR	6.196.550	
Bintang Dirham	KURANG LANCAR	3.554.465	
Bintang Renjani (Sakirin)	KURANG LANCAR	27.800	
Haikal Istambul (Marjuki)	KURANG LANCAR	1	
Pratiwi (H. Yahya)	KURANG LANCAR	313.750	
Sinar Bahari (Ahmad Nuriyadi)	KURANG LANCAR	525.000	
Sinar Berlian	KURANG LANCAR	1.483.745	
Sinar Intan (Raden Abu Supian)	KURANG LANCAR	4.953.985	
Sinar Mutiara (Raden Abu Supian)	KURANG LANCAR	5.359.710	
Sinar Permata (Raden Andi Suyanto)	KURANG LANCAR	3.119.020	
Sinar Samudra	KURANG LANCAR	245.249	
Sinar/Cahaya Krantil (Ahmad Sopyan Habibi)	KURANG LANCAR	1.873.425	
Sumber Tenang	KURANG LANCAR	11.381.938	
Total		42.699.263	

f. PPS Bitung

Piutang pada PPS Bitung merupakan piutang atas jasa kebersihan Kawasan yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayarkan. Piutang tersebut berasal dari Dinas Perikanan Kota Bitung.

g. PPS Kendari

Piutang pada PPS Kendari merupakan sisa piutang atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah dilimpahkan ke PUPN dan baru dicatat sebagai piutang pada TA 2025, piutang pada PP Untia, Piutang Jasa Tambat Labuh dan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI.

Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
Abd Raup	MACET	16.913.587	16.913.587
Arif King Rizki Mainaki	LANCAR	11.318.780	56.594
	MACET	9.729.780	9.729.780
CV. BUMI CELEBES	MACET	11.509.294	11.509.294
CV. MENTARI INDONESIA	MACET	36.474.918	36.474.918
Edi	LANCAR	829.232	4.146
Fa. Sanu	LANCAR	19.678.031	98.390

	MACET	3.597.020	3.597.020
Koperasi Gerbas Samudera	LANCAR	81.600	408
Koperasi Pusat Perikanan Indonesia	MACET	4.307.016	4.307.016
Koperasi Ta"Awun Al Amin	LANCAR	8.329.414	41.647
PT. Andika	LANCAR	3.822.432	19.112
PT. Edco Putra Jaya	LANCAR	9.921.968	49.610
PT. Harapan Mujur Samudera	LANCAR	33.121.940	165.610
PT. Kelola Mina Laut	LANCAR	10.824.462	54.122
Rifai	LANCAR	809.891	4.049
Roni Irawan Palesang	LANCAR	954.244	4.771
Total		187.826.409	88.632.874

h. Piutang pada PPS Nizam Zachman

Saldo piutang per 31 Desember 2023 pada PPS Nizam Zachman Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang tersebut merupakan piutang atas Jasa Pelabuhan Perikanan berupa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam dan jasa kebersihan.

Debitur	Total Piutang per 31 Des 2025	Ket
Darsono	2.726.698	LHA Itjen 2022
Djie Kang Liong	4.979.176	LHA Itjen 2022
Katjo Suhaimi Salim	10.587.617	LHP BPK 2021
Tjian Tui	44.142	LHA Itjen 2022
Verawati	5.346.561	LHA Itjen 2022
PT. Indo Maguro Tunas Unggul	53.241.095	LHP BPK 2021 dan Non Tambat
PT. Bosco	18.000.000	Piutang Non Tambat 2021
PT. Lautan Bahasi Sejahtera (LBS)	3.000.000	Piutang Non Tambat 2021
	97.925.289	

i. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo awal Piutang PNBPN TA. 2025 pada laporan keuangan tercatat sebesar Rp14.672.051.927 yaitu terdiri dari piutang selisih/pokok dari temuan BPK RI No. 39/LHP/XVII/11/2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBPN TA. 2011 s.d Mei 2013 sebesar Rp14.648.405.100 dan temuan BPK RI atas selisih PIPP Tahun 2024 sebesar

Rp23.646.827. Namun demikian, terdapat juga piutang yang belum tercatat di laporan keuangan yaitu dari piutang denda dari temuan BPK RI No. 39/LHP/XVII/11/2013 sebesar Rp15.887.837.779.

Pada tahun 2025 terdapat pembayaran piutang sebesar Rp23.646.827 atas temuan BPK RI atas selisih PIPP Tahun 2024, dengan rincian yaitu Rp20.774.042 a.n. Jangka Mas - 1 dengan NTPN 3386A61QVD5JH007, Rp990.000 a.n. BAHANA CITRA SENTOSA dengan NTPN 1321061QVD5P133A, dan Rp1.882.785 a.n. ELIT NELAYAN dengan NTPN 6E6EA6U8F7O148T5. Sementara itu tidak ada pembayaran piutang dari temuan BPK RI No. 39/LHP/XVII/11/2013 pada tahun 2025 baik selisih/pokok maupun denda. Saldo akhir pada laporan keuangan adalah sebesar Rp14.648.405.100 sementara saldo piutang yang belum tercatat pada laporan keuangan adalah Rp15.887.837.779.

2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang masih terhutang oleh pihak lain setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersumber dari tunggakan dan/atau denda yang diberikan oleh pemerintah diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Fungsional Lainnya di lingkup Direkrotar Jenderal Perikanan Tangkap. Piutang Lainnya periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp7.406.240.303 dan Rp7.158.223.258 dengan rincian sebagai berikut;

Nama Satker	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
BBPPI	19.945.881	4.839.034	15.106.847	312,19%
PPN AMBON	850.730	327.200	523.530	160,00%
PPN BRONDONG	328.102.300	325.915.750	2.186.550	0,67%
PPN KWANDANG	1.658.212	446.315	1.211.897	271,53%
PPN PEKALONGAN	825.018	660.605	164.413	24,89%

PPN PELABUHAN RATU	521.400	148.000	373.400	252,30%
PPN PENGAMBENGAN	4.010.233	2.042.032	1.968.201	96,38%
PPN SUNGAILIAT	1.295.183		1.295.183	#DIV/0!
PPN TERNATE	2.150.451	749.402	1.401.049	186,96%
PPN SIBOLGA	52.500		52.500	#DIV/0!
PPS BELAWAN	469.483		469.483	#DIV/0!
PPS CILACAP	228.000		228.000	#DIV/0!
PPS KENDARI	3.127.172	1.858.168	1.269.004	68,29%
PPS NIZAM ZAHMAN	2.957.070	35.794.406	-32.837.336	-91,74%
PPS BITUNG	17.000.000		17.000.000	#DIV/0!
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	537.727.080	537.727.080	0	0,00%
SEKRETARIAT DJPT	6.485.319.590	6.247.715.266	237.604.324	3,80%
Grand Total	7.406.240.303	7.158.223.258	248.017.045	3,46%

- a. Piutang Lainnya pada PPN Brondong merupakan piutang atas kapal keruk yang telah diserahkan ke PUPN seniali Rp325.600.000 dan Rp315.750 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran tukin dan uang makan Desember 2025 yang disetor pada kas negara pada Januari 2026;
- b. Piutang pada DKP Nusa Tenggara Barat merupakan piutang yang timbul atas pekerjaan kapal yang tidak selesai pada TA 2014. Atas piutang tersebut telah dilakukan reviu oleh Insektorat Jenderal dan sedang dilakukan pembahasan dengan Direktorat APK dan DJKN;
- c. Piutang lainnya pada PPS Bitung merupakan pengembalian belanja atas pekerjaan *outsourcing* tenaga keamanan dan kebersihan;
- d. Piutang lainnya pada Sekretariat DJPT merupakan piutang yang berasal dari temuan BP dan Itjen dengan rincian sebagai berikut;

Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
CV. SUMBER PRATAMA	Macet	1.407.826.752	1.439.008.570
CV. Indomalut Fiberboat Tabamarine	Macet	435.420.000	435.420.000
PT. Anang Craftindo Group	Macet	588.574.400	588.574.400
Temuan atas DKP Tambrau	Macet	3.015.000	3.015.000
CV. Karya Bahari	Macet	103.624.449	103.624.449
CV. Mega Karya Utama	Macet	238.285.891	260.375.000
PT. Yasa Ayu	Macet	536.930.578	548.001.686

PT. Bantar Indah Perkasa	Macet	2.753.331.310	2.753.331.310
Temuan Ir V atas Pegawai Dit. KAPI	Lancar	35.000.000	175.000
PT Putra Unggul	Macet	154.193.010	154.193.010
GEF	Lancar	229.118.200	#REF!
Total		6.485.319.590	6.285.718.425

- e. Adapun piutang lainnya pada beberapa satker lainnya merupakan kelebihan belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bulan Desember TA 2025.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Rp (29.179.785.773)

C.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp (29.407.169.181) dan Rp(29.179.785.773), yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur

Row Labels	2024	2025
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	6.995.495.133	7.086.137.026
BBPPI	24.195	99.728
PPN AMBON	1.636	4.253
PPN BRONDONG	325.601.579	325.612.512
PPN KWANDANG	2.232	8.291
PPN PEKALONGAN	3.303	4.125
PPN PELABUHAN RATU	740	2.607
PPN PENGAMBENGAN	10.210	20.051
PPN SUNGAILIAT		6.476
PPN SIBOLGA		262
PPN TERNATE	3.747	10.752
PPS BELAWAN		1.110
PPS CILACAP		1.140
PPS KENDARI	9.201	15.636
PPS NIZAM ZAHMAN	178.972	14.786
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	537.727.080	537.727.080
SEKRETARIAT DJPT	6.131.932.238	-6.222.521.980
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang PNPB	- 22.411.674.048	- 22.093.648.747

PPN BRONDONG		7.495
PPN KEJAWANAN	7.543.913.324	7.253.010.202
PPN KWANDANG	97.298	4.041.089
PPN PELABUHAN RATU		110.157
PPN PENGAMBENGAN	8.303.118	4.317.941
PPS BITUNG	2.824.058	2.801.400
PPS KENDARI	49.668.410	83.030.074
PPS NIZAM ZAHMAN	158.344.506	97.925.289
SEKRETARIAT DJPT	- 14.648.523.334	- 14.648.405.100
Grand Total	- 29.407.169.181	- 29.179.785.773

*Belanja Dibayar di Muka
Rp 0*

C.1.6 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 251.925.635. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp18.551.346.307*

C.1.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 20.895.800.631 dan Rp 21.172.817.728 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2025

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
PPN AMBON	3.232.401	15.674.405	12.442.004	384,92%
PPN BRONDONG	6.381.843	15.847.151	9.465.308	148,32%
PPN KEJAWANAN	951.013.641	888.364.525	-62.649.116	-6,59%
PPN KWANDANG	1.034.450	901.200	-133.250	-12,88%
PPN PEKALONGAN	273.136.408	473.860.560	200.724.152	73,49%
PPN PELABUHAN RATU	38.079.430	83.278.565	45.199.135	118,70%
PPN PEMANGKAT	1.244.853		-1.244.853	-100,00%
PPN PENGAMBENGAN	4.345.130	3.501.925	-843.205	-19,41%

PPN PRIGI	27.993.385	41.081.627	13.088.242	46,75%
PPN SIBOLGA	127.082.810	253.116.316	126.033.506	99,17%
PPN SUNGAILIAT	1.256.250	590.500	-665.750	-53,00%
PPN TANJUNG PANDAN	1.040.135	995.575	-44.560	-4,28%
PPN TERNATE	28.438.050	1.146.100	-27.291.950	-95,97%
PPN TUAL		34.388.615	34.388.615	#DIV/0!
PPS BELAWAN	20.380.797	6.757.800	-13.622.997	-66,84%
PPS BITUNG	13.118.286	10.663.530	-2.454.756	-18,71%
PPS BUNGUS	103.533.967	7.197.100	-96.336.867	-93,05%
PPS CILACAP	260.240.666	282.315.776	22.075.110	8,48%
PPS KENDARI	10.754.685	8.622.407	-2.132.278	-19,83%
PPS NIZAM ZAHMAN	15.557.982.617	18.551.346.307	2.993.363.690	19,24%
SEKRETARIAT DJPT	3.465.510.827	493.167.744	-2.972.343.083	-85,77%
Grand Total	20.895.800.631	21.172.817.728	-2.356.162.968	-11,28%

Pendapatan yang Masih harus Diterima pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan yang timbul atas keberadaan kapal di kolam Pelabuhan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum keluar dari kolam Pelabuhan dan hasil bongkar kapal yang belum dapat terkonfirmasi dengan rincian sebagai berikut;

1. PYMHD pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap merupakan PYMHD yang berasal LPM yang belum terkonfirmasi sampai dengan periode 31 Desember 2024 yang berasal dari 173 kapal dengan nilai Rp3.465.510.827.
2. PYMHD Tahun 2025 pada PPS Nizam Zachman terdiri dari Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam atas kapal perikanan dan non-perikanan (SPOB) yang masih berada di kolam Pelabuhan per 31 Desember 2025 dan diperhitungkan potensi penerimaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 serta rekomendasi atas temuan BPK dalam LHP BPK RI nomor 15b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait dengan perhitungan PYMHD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terhadap 25 kapal dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KKP TA 2022 dengan nilai temuan sebesar Rp3.606.961.957,00 telah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pemilik/pengurus kapal sehingga terdapat progres tindak lanjut nilai PYMHD menjadi senilai Rp2.863.153.140,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Sebanyak 4 Kapal masih berada di Kolam Pelabuhan dan kapal dalam kondisi rusak serta tidak layak melaut dengan potensi PYMHD sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp2.560.896.967,00;

- Sebanyak 5 Kapal keluar kolam Pelabuhan tanpa lapor dan menerbitkan SPB dan diketahui kapal-kapal tersebut keluar saat sea trial menggunakan SKPSPB lalu tidak kembali lagi ke kolam Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta dan berada di PP. Muara Angke sejak tanggal 2 Juni 2020, sehingga diperhitungkan potensi PYMHD atas 5 kapal tersebut sampai dengan penerbitan SKPSPB tanggal 31 Mei 2020 senilai Rp264.071.076;
- Terhadap 16 kapal yang telah menerbitkan SPB di tahun 2021 yang seharusnya tidak berada di kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta namun terdapat dalam absensi kapal per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Sebanyak 3 Kapal berada di PP. Muara Angke dibuktikan dengan STBLK Kedatangan di PP. Muara Angke dan pemilik kapal menyatakan pada 31 Desember 2021 tidak berada di kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sehingga tidak terdapat nilai PYMHD
 - Sebanyak 2 Kapal menyatakan berada di Fishing Ground dan tidak berada dalam kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada 31 Desember 2021 sehingga tidak terdapat nilai PYMHD
 - Sebanyak 1 Kapal (Tri Wijaya Makmur) menyatakan telat melaporkan kedatangan kapal sehingga kapal sehingga kapal terdata dalam absensi pada akhir tahun 2021 namun pemilik kapal sudah melaporkan kedatangan sebenarnya dan menyelesaikan seluruh pembayaran sehingga tidak terdapat lagi potensi PYMHD pada 31 Desember 2025 atas aktivitas tersebut
 - Sebanyak 9 Kapal memberikan klarifikasi bahwa kapal mereka memang berada di kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada akhir tahun 2021 untuk keperluan tertentu selama beberapa hari namun tidak melaporkan kedatangan maupun kepergian kapal dari kolam sehingga terdapat potensi PYMHD senilai Rp3.129.300,00
 - Sebanyak 1 Kapal (Sungai Rokan 12) masih belum memberikan konfirmasi terkait dengan keberadaan kapalnya pada akhir tahun 2021 akan tetapi berdasarkan dokumen STBLKK

tahun 2022 di PPS Nizam Zachman Jakarta diketahui kapal tersebut menerbitkan SPB dari PP. Muara Angke ke Fishing Ground pada tanggal 22 Desember 2021 sehingga potensi PYMHD kapal tersebut sementara dihitung sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 (1 hari sebelum SPB) senilai Rp35.055.797,00 namun nilai tersebut masih dapat berubah berdasarkan dengan konfirmasi/klarifikasi dari pemilik kapal yang akan ditindaklanjuti di Tahun 2026.

- b. Sebanyak 594 Kapal Perikanan berada di kolam Pelabuhan per 31 Desember 2025 dengan nilai PYMHD atas Jasa Tambat Labuh sebesar Rp14.132.784.592 dan Jasa Kebersihan Kolam sebesar Rp1.364.928.295 dengan keterangan khusus atas beberapa kapal terdapat perubahan nilai atas 9 kapal yaitu :
- 1 Kapal (Trio Cahaya Makmur) terdapat pembayaran di Tahun 2025 yang belum diperhitungkan dalam perhitungan PYMHD Unaudited atas pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp21.454.080, sehingga nilai PYMHD kapal tersebut yang sebelumnya Rp73.313.280 menjadi Rp51.859.200,00;
 - 1 Kapal (Harmonis) berganti nama dan selar menjadi Usaha Jaya 89 dan kapal tersebut sudah menerbitkan SPB dan keluar kolam Pelabuhan pada 8 Februari 2025 serta telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sehingga PYMHD kapal tersebut yang sebelumnya Rp25.833.000 menjadi Rp0;
 - 1 Kapal (Muncul Lestari Jaya) diketahui tenggelam pada tanggal 9 Juli 2025 dan dipindahkan keluar kolam pelabuhan pada tanggal 11 Juli 2025 namun belum menyelesaikan pembayaran sehingga nilai PYMHD kapal tersebut yang sebelumnya diperhitungkan sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp161.369.892 berubah menjadi Rp148.633.632,00;
 - 3 Kapal sudah keluar kolam Pelabuhan tanpa menerbitkan SPB yaitu Makin Jaya, Jaya Sukses Kapalindo 18 dan Samuel 1 yang terdeteksi berada di Pelabuhan lain. PYMHD sebelumnya dihitung sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp192.525.585 berubah menjadi Rp22.575.850 karena PYMHD dihitung ulang dengan titik akhir tagihan sampai dengan kapal tersebut berlabuh di Pelabuhan lain

- 3 Kapal sudah keluar kolam Pelabuhan tanpa menerbitkan SPB namun belum dapat ditemukan keberadaan kapalnya yaitu Timur Jaya – 2, Utama 8 dan Gabungan Jaya Abadi dan masih dalam proses penelusuran serta proses konfirmasi kepada pemilik kapal terkait sehingga PYMHD yang tercatat masih menggunakan tanggal akhir per 31 Desember 2025 sampai dengan diketahui tanggal aktual kapal keluar kolam Pelabuhan
- Sebanyak 7 Kapal non Perikanan (SPOB) memiliki PYMHD atas Jasa Tambat Labuh senilai Rp140.489.680;
- Sebanyak 8 Kapal non Perikanan (SPOB) memiliki PYMHD atas Jasa Kebersihan Kolam senilai Rp49.990.600.
- Dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KKP TA 2022, terdapat 54 kapal yang diidentifikasi sebagai kapal mangkrak / dalam kondisi rusak / tidak beroperasi dengan beberapa kondisi sebagai berikut :
 - Sebanyak 13 Kapal telah diperhitungkan dan tercatat dalam PYMHD per 31 Desember 2025 (594 Kapal);
 - Sebanyak 3 Kapal telah termasuk dalam temuan BPK pada poin 1 dan potensi PYMHD telah diperhitungkan pada poin 1;
 - Sebanyak 6 Kapal telah keluar kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya;
 - Sebanyak 1 Kapal merupakan kapal tanpa identitas yang kemudian diketahui kapal tersebut merupakan kapal sitaan dari Kejaksaan RI;
 - Sebanyak 3 Kapal tidak memiliki identitas dan tidak diketahui pemiliknya. Telah dilakukan pengumuman untuk pemilik kapal melaporkan kepemilikan kapal tersebut namun tidak terdapat pemilik yang melaporkan kepemilikan kapal-kapal tersebut. Tindak lanjut yang akan dilakukan PPS Nizam Zachman adalah mengatur kapal-kapal tersebut agar tidak mengganggu operasional kolam Pelabuhan sesuai dengan Petunjuk Teknis Dirjen Perikanan Tangkap nomor 49 Tahun 2024;
 - Sebanyak 6 Kapal tidak dapat dihitung potensi PYMHDnya karena kekurangan data ukuran kapal yaitu Length Overall (LoA);

- Sebanyak 22 Kapal terdapat data ukuran kapal namun tidak ditemukan dokumen STBLK Kedatangannya karena kapal-kapal tersebut masuk ke kolam Pelabuhan pada saat pengelolaan Tambat dan Labuh masih dikelola oleh PT. Perikanan Indonesia. Potensi PYMHD atas kapal-kapal tersebut diperhitungkan sejak 15 Oktober 2019 saat peralihan pengelolaan Tambat Labuh dari PT. Perikanan Indonesia ke PPS Nizam Zachman Jakarta yang dijelaskan lebih lanjut dalam pengungkapan lainnya.

Terhadap 594 kapal perikanan, 8 kapal non perikanan, serta temuan PYMHD pada LHP BPK RI atas LK KKP TA 2022 dapat dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut :

No	Jumlah Kapal	Nilai PYMHD	Keterangan
1	4	2.560.896.967	PYMHD LHP BPK RI LK TA 2022 (Bagian hasil konfirmasi temuan senilai Rp3.606.961.957 yang masih berada di Kolam Pelabuhan)
2	5	264.071.076	PYMHD LHP BPK RI LK TA 2022 (Bagian hasil konfirmasi temuan senilai Rp3.606.961.957 yang sudah tidak berada di Kolam Pelabuhan)
3	16	38.185.097	PYMHD LHP BPK RI LK TA 2022 (Bagian hasil temuan senilai Rp3.606.961.957 atas kapal SPB yang terdapat dalam absensi kolam akhir tahun 2021 dan telah dilakukan konfirmasi dengan pemilik kapal kecuali 1 Kapal (Sungai Rokan 12) yang belum memberikan konfirmasi/klarifikasi)
4	594	15.497.712.888	PYMHD Kapal Perikanan yang dihitung per 31 Desember 2025 berdasarkan dokumen kedatangan kapal dan belum ada dokumen SPB yang didukung dengan dokumentasi kapal
5	8	190.480.280	PYMHD Kapal Non Perikanan (SPOB) yang berasal dari tagihan bulan Desember 2025 (Tambat SPOB berdasarkan penjualan SPOB dan Kebersihan Kolam SPOB)
Total	627	18.551.346.308	

3. Adapun PYMHD pada satker UPT lain merupakan kapal yang belum beroperasi dan masih tambat di kolam Pelabuhan per

31 Desember 2025, Listrik dan air atas penggunaan Desember yang jatuh tempo pada Januari 2025.

Persediaan
Rp686.175.031.744

C.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp44.913.827.294 dan Rp597.904.420.652 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2025

Uraian Akun	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	140.202.000		140.202.000	-100,00%
Bahan untuk Pemeliharaan	51.251.472	22.325.754	28.925.718	-56,44%
Barang Konsumsi	762.055.614	2.244.451.236	1.482.395.622	194,53%
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		15.785.867.000	15.785.867.000	#DIV/0!
Persediaan Dalam Proses		668.122.387.754	668.122.387.754	#DIV/0!
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	43.960.318.208		43.960.318.208	-100,00%
Grand Total	44.913.827.294	668.122.387.754	623.208.560.460	1387,57%

1. Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat, merupakan persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Pada TA 2025 atas persediaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahab kepada Pemerintah Daerah terkait dan telah dilakukan penghapusan.
2. Bahan untuk Pemeliharaan, merupakan persediaan bahan untuk operasional berupa Bahan untuk Pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Pada Ditjen Perikanan tangkap persediaan berupa, sapu, alat pel,

bahan kimia untuk pemersih, pengahrum ruangan dll. Pada TA 2025 jumlah persediaan untuk pemeliharaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh efisiensi anggaran.

3. Barang Konsumsi, merupakan persediaan bahan untuk kegiatan operasional satker berupa Barang Konsumsi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN, misalnya : ATK, buku nikah, plat nomor, dll. Pada Ditjen Perikanan Tangkap berupa, ATK, Meterai, karcis pas masuk, dan bahan cetakan lainnya. Pada TA Jumlah persediaan barang konsumsi mengalami penurunan yang disebabkan oleh efisiensi anggaran
4. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, merupakan Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Pada Ditjen Perikanan tangkap persediaan atas peralatan danmesin untuk diserahkan ke Masyarakat berupa Gudang beku, mesin kapal dan alat tangkap ikan. Pada TA 2025 mengalami peningkatan yang signifikan karena da program prioritas presiden Kampung Nelayan Merah Putih.
5. Persediaan Dalam Proses, merupakan persediaan berupa barang dalam proses produksi untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Pada Ditjen Perikanan Tangkap berupa bangunan atas program Kampung Nelayan Merah Putih yang sampai dengan 31 Desember masih dalam proses Pembangunan.
6. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat, merupakan, Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Pada TA 2025 atas persediaan tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Maluku.

*Aset Tetap Rp
5.377.616.123.968*

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp5.627.434.899.566 dan Rp5.377.616.123.968 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan opreasional

entitas. Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp
3.619.813.948.424

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp3.635.961.793.591 dan Rp3.619.813.948.424.

Rincian Transaksi Tanah TA 2025

Uraian Transaksi	Sum of RPHREAL
Perubahan BMN Ke PI	-16.147.845.167
Reklasifikasi Keluar	- 1.775.871.000
Reklasifikasi Masuk	1.775.871.000
Total	-16.147.845.167

- Reklasifikasi dari tanah bangunan rumah negara menjadi tanah untuk jalan kompleks pada BBPI;
- Koreksi berkruang perubahan kuantitas pada PPN Pekalongan;
- Reklasifikasi dari tanah ke Properti Investasi pada PPS Cilacap.

Peralatan dan Mesin Rp
790.279.812.650

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp747.538.103.773 dan Rp790.279.812.650. Adapun rincian mutasi pada TA 2024 adalah sebagai berikut;

Rincian Transaksi Peralatan dan Mesin TA 2025

Row Labels	Sum of RPHREAL
Hibah Keluar	377.639.200
Koreksi Pencatatan	74.400.270
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	92.561.645
Likuidasi Keluar	1.796.371.500
Likuidasi Masuk	1.796.371.500
Pembelian	20.388.183.580
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	302.107.790

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	20.943.484.029
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.142.342.342
Perolehan Lainnya	38.772.380.019
Reklasifikasi Keluar	144.295.130
Reklasifikasi Masuk	178.995.130
Transfer Keluar	6.457.947.813
Transfer Masuk	6.694.854.813
Total	42.573.658.877

Uraian	Sum of RPHREAL
Hibah Keluar	377.639.200
PROV. BENGKULU TP	49.930.000
PROV. JAWA TENGAH TP	162.120.000
PROV. SUMATERA BARAT TP	165.589.200
Koreksi Pencatatan	74.400.270
PPN PENGAMBENGAN	2.949.270
PPN TERNATE	12.500.000
PPN TUAL	58.951.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	92.561.645
PPN PRIGI	28.744.000
SEKRETARIAT DJPT	63.817.645
Likuidasi Keluar	1.796.371.500
PROV. SUMATERA UTARA	1.796.371.500
Likuidasi Masuk	1.796.371.500
PROV. SUMATERA UTARA TP	1.796.371.500
Pembelian	20.388.183.580
BBPPI	84.400.000
PPN AMBON	1.044.473.449
PPN BRONDONG	458.799.999
PPN KARANGANTU	208.378.067
PPN KEJAWANAN	765.770.393
PPN KWANDANG	205.074.818
PPN PEKALONGAN	195.452.501
PPN PELABUHAN RATU	391.107.742
PPN PEMANGKAT	137.183.001
PPN PENGAMBENGAN	94.679.670
PPN PRIGI	666.024.004
PPN SIBOLGA	548.101.145
PPN SUNGAILIAT	61.709.997
PPN TANJUNG PANDAN	635.661.200
PPN TELUK BATANG	40.381.800
PPN TERNATE	392.387.116
PPN TUAL	728.224.180
PPS BELAWAN	301.824.000
PPS BITUNG	895.422.329

PPS BUNGUS	416.103.440
PPS CILACAP	1.216.473.311
PPS KENDARI	789.546.053
PPS NIZAM ZAHMAN	3.060.568.686
SEKRETARIAT DJPT	7.050.436.679
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	302.107.790
PPS BITUNG	80.000.000
PPS NIZAM ZAHMAN	222.107.790
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 20.943.484.029
BBPPI	2.177.162.870
PPN AMBON	4.998.753.766
PPN BRONDONG	2.479.588.374
PPN KARANGANTU	1.118.285.300
PPN KEJAWANAN	354.383.060
PPN PELABUHAN RATU	12.325.000
PPN PEMANGKAT	33.077.520
PPN PRIGI	204.111.613
PPN SIBOLGA	342.501.500
PPN TANJUNG PANDAN	533.910.333
PPN TELUK BATANG	920.597.200
PPN TERNATE	1.167.499.300
PPS BELAWAN	155.000.000
PPS BITUNG	1.073.327.792
PPS NIZAM ZAHMAN	2.344.478.500
PROV. JAMBI TP	711.895.000
PROV. RIAU TP	34.950.000
SEKRETARIAT DJPT	2.281.636.901
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.142.342.342
SEKRETARIAT DJPT	4.142.342.342
Perolehan Lainnya	38.772.380.019
PPN PENGAMBENGAN	2.949.270
SEKRETARIAT DJPT	38.769.430.749
Reklasifikasi Keluar	144.295.130
BBPPI	27.925.000
PPN TELUK BATANG	31.556.400
PPN TERNATE	10.000.000
PPS CILACAP	74.813.730
Reklasifikasi Masuk	178.995.130
BBPPI	27.925.000
PPN PRIGI	34.700.000
PPN TELUK BATANG	31.556.400
PPN TERNATE	10.000.000
PPS CILACAP	74.813.730
Transfer Keluar	6.457.947.813
PPN KARANGANTU	1.026.173.300

PPN PELABUHAN RATU	190.000.000
PPS CILACAP	321.250.000
PPS KENDARI	3.005.048.100
SEKRETARIAT DJPT	1.915.476.413
Transfer Masuk	6.694.854.813
PPN AMBON	209.220.000
PPN BRONDONG	884.738.300
PPN KEJAWANAN	53.348.060
PPN KWANDANG	11.330.000
PPN PEKALONGAN	1.478.389.252
PPN SIBOLGA	11.330.000
PPN TANJUNG PANDAN	32.566.401
PPN TERNATE	11.330.000
PPN TUAL	11.330.000
PPS BUNGUS	11.330.000
PPS CILACAP	11.330.000
PPS KENDARI	11.330.000
PPS NIZAM ZAHMAN	38.602.700
SEKRETARIAT DJPT	3.918.680.100
Grand Total	42.573.658.877

Gedung Bangunan Rp
822.262.807.980

C.2.3 Gedung Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp787.698.310.066 dan Rp822.262.807.980 adapun rincian mutas Gedung dan bangunan pada Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 adalah sebagai berikut:

Row Labels	Sum of Nilai
Hibah Keluar	193.140.000
PROV. DKI TP	193.140.000
Koreksi Pencatatan	5.957.749.438
PPN AMBON	107.245.000
PPN PELABUHAN RATU	516.771.000
PPN PENGAMBENGAN	1.341.316.840
PPN SUNGAILIAT	8.880.000
PPN TERNATE	80.023.000
PPS KENDARI	2.652.147.000
SEKRETARIAT DJPT	1.251.366.598
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	6.641.000
PPS KENDARI	6.641.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	3.720.768.769
PPN AMBON	107.245.000

PPN PELABUHAN RATU	1.219.592.500
PPN PENGAMBENGAN	1.162.378.115
PPN PRIGI	25.060.200
PPN SUNGAILIAT	9.917.000
SEKRETARIAT DJPT	1.196.575.954
Koreksi Susulan	24.985.000
PPN BRONDONG	24.985.000
Pembatalan Penghapusan	29.436.000
PPN TERNATE	29.436.000
Pembelian	1.144.000.000
SEKRETARIAT DJPT	1.144.000.000
Pengembangan Melalui KDP	1.458.162.000
PPN AMBON	308.904.000
PPN BRONDONG	199.917.000
PPN PEMANGKAT	230.017.000
PPN PENGAMBENGAN	49.917.000
PPN TELUK BATANG	159.643.000
PPS BELAWAN	308.390.000
PPS CILACAP	201.374.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	39.027.600
PPS NIZAM ZAHMAN	39.027.600
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	538.412.000
PPN SUNGAILIAT	450.815.000
PPN TANJUNG PANDAN	7.574.000
PPN TERNATE	80.023.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 13.958.370.288
PPN AMBON	760.360.240
PPN KEJAWANAN	307.961.000
PPN PENGAMBENGAN	- 12.296.179.947
PPN TERNATE	29.436.000
SEKRETARIAT DJPT	564.433.101
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	668.854.377
PPN KEJAWANAN	668.854.377
Perolehan Lainnya	56.786.386.114
PPN AMBON	628.164.000
PPN BRONDONG	410.000.000
PPN PELABUHAN RATU	324.000.000
PPN TERNATE	30.000.000
PPN TUAL	350.000.000
PPS KENDARI	2.684.327.000
SEKRETARIAT DJPT	52.359.895.114
Perubahan BMN Ke PI	- 13.883.014.354
PPN AMBON	4.624.603.000
PPN KARANGANTU	591.874.354
PPN PELABUHAN RATU	1.844.841.000
PPN PRIGI	688.359.000

PPS CILACAP	6.133.337.000
Perubahan PI ke BMN	2.169.070.354
PPN KARANGANTU	591.874.354
PPN PRIGI	464.256.000
PROV. LAMPUNG TP	1.112.940.000
Reklasifikasi Keluar	- 26.375.300.323
BBPPI	1.005.634.000
PPN AMBON	327.832.000
PPN KARANGANTU	1.056.918.920
PPN KEJAWANAN	440.983.000
PPN KWANDANG	205.156.000
PPN PEKALONGAN	1.004.188.000
PPN PEMANGKAT	312.286.000
PPN PRIGI	1.725.909.000
PPN SIBOLGA	2.149.215.000
PPN SUNGAILIAT	926.600.000
PPN TANJUNG PANDAN	408.975.000
PPN TELUK BATANG	354.521.000
PPN TERNATE	1.373.605.000
PPN TUAL	5.681.697.460
PPS BELAWAN	2.502.345.000
PPS BITUNG	3.711.212.028
PPS CILACAP	1.195.978.000
SEKRETARIAT DJPT	1.992.244.915
Reklasifikasi Masuk	26.494.700.323
BBPPI	1.005.634.000
PPN AMBON	327.832.000
PPN BRONDONG	132.280.000
PPN KARANGANTU	1.056.918.920
PPN KEJAWANAN	440.983.000
PPN PEKALONGAN	1.004.188.000
PPN PEMANGKAT	312.286.000
PPN PRIGI	1.691.209.000
PPN SIBOLGA	2.376.191.000
PPN SUNGAILIAT	926.600.000
PPN TANJUNG PANDAN	408.975.000
PPN TELUK BATANG	354.521.000
PPN TERNATE	1.373.605.000
PPN TUAL	5.681.697.460
PPS BELAWAN	2.502.345.000
PPS BITUNG	3.711.212.028
PPS CILACAP	1.195.978.000
SEKRETARIAT DJPT	1.992.244.915
Saldo Awal	2.243.502.400
SEKRETARIAT DJPT	2.243.502.400
Transfer Keluar	5.827.952.840

PPS KENDARI	374.610.000
SEKRETARIAT DJPT	5.453.342.840
Transfer Masuk	6.077.525.220
PPN AMBON	42.625.000
PPN BRONDONG	217.463.800
PPN KEJAWANAN	1.206.981.000
PPN PEKALONGAN	1.485.072.200
PPN PELABUHAN RATU	516.771.000
PPN PENGAMBENGAN	1.341.316.840
PPN TANJUNG PANDAN	230.414.000
PPS CILACAP	198.933.000
PPS NIZAM ZAHMAN	463.338.380
SEKRETARIAT DJPT	374.610.000
Grand Total	35.192.661.914

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp
2.849.967.320.943*

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.867.865.609.468 dan Rp2.849.967.320.943 Adapun mutasi transaksi atas Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 adalah d sebagai berikut:

UR_TRN	Nama Satker	Total
Internal Transfer Keluar	SEKRETARIAT DJPT	7.046.611.064
Internal Transfer Masuk	SEKRETARIAT DJPT	7.046.611.064
Koreksi Pencatatan	PPN PRIGI	11.407.000
	PPN TERNATE	19.259.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	PPN PRIGI	102.663.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	PPN PENGAMBENGAN	199.092.360
	PPN PRIGI	114.070.000
Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	PPN BRONDONG	-
	PPN KARANGANTU	-
	SEKRETARIAT DJPT	-
Pembelian	SEKRETARIAT DJPT	991.000.000
Pengembangan Melalui KDP	PPN BRONDONG	238.301.400
	PPN PELABUHAN RATU	69.804.939
	PPN TANJUNG PANDAN	318.393.900
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	PPN TERNATE	19.259.000
Penghapusan	PPN AMBON	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	PPN AMBON	89.364.000

	PPN PELABUHAN RATU	324.702.000
	PPN PENGAMBENGAN	- 42.878.771.031
	PROV. JAMBI TP	194.873.850
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	PPN KEJAWANAN	965.746.400
Perolehan Lainnya	PPN AMBON	107.663.000
	PPN TUAL	150.000.000
	SEKRETARIAT DJPT	19.032.704.800
Reklasifikasi Masuk	PPN KWANDANG	205.156.000
Saldo Awal	PPS BITUNG	8.250.000
	SEKRETARIAT DJPT	1.818.470.600
Transfer Keluar	SEKRETARIAT DJPT	1.258.589.078
Transfer Masuk	PPN KEJAWANAN	206.071.000
	PPN PRIGI	11.407.000
	PPN SUNGAILIAT	1.592.501.957
	PPS NIZAM ZAHMAN	1.041.111.078
Grand Total		- 17.790.625.525

Aset Tetap Lainnya
Rp19.680.845.884

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp23.821.507.884 dan Rp19.680.845.884 dengan rincian mutase sebagai berikut:

Row Labels	Sum of RPH_ASET
Aset Tetap Lainnya	77.560.000
Internal Transfer Keluar	486.654.000
SEKRETARIAT DJPT	486.654.000
Internal Transfer Masuk	486.654.000
SEKRETARIAT DJPT	486.654.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	77.560.000
SEKRETARIAT DJPT	77.560.000
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	- 1.137.855.033
SEKRETARIAT DJPT	- 1.137.855.033
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.137.855.033
SEKRETARIAT DJPT	1.137.855.033
Aset Tetap Renovasi	- 4.218.222.000
Internal Transfer Keluar	226.410.000
SEKRETARIAT DJPT	226.410.000
Internal Transfer Masuk	226.410.000
SEKRETARIAT DJPT	226.410.000
Koreksi Pencatatan	- 4.218.222.000
SEKRETARIAT DJPT	- 4.218.222.000
Grand Total	- 4.140.662.000

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap digunakan.

Aset Tetap Renovasi

Aset Tetap Renovasi kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik entitas akuntansi, namun digunakan dalam kegiatan operasional entitas akuntansi yang melakukan renovasi.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp
29.329.639.808*

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp143.523.541.915 dan Rp29.329.639.808. saldo KDP pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang berasal dari pembelian pada TA 2025 pada Direktorat Kepelabuhanan berupa Pembangunan pada satker UPT dan gtransfer masuk dari biro umum atas Pembangunan SKPT menggunakan hibah JICA, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Tanggal Perolehan	Nama Barang	Total	Uraian
Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	2025	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	23.088.000	Nilai perencanaan atas rencana pekerjaan pembangunan Gedung Administrasi dan Pagar Keliling;
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	2024	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	65.351.250	Berupa perencanaan gerbang masuk
Satker Khusus PP Untia	2024	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	251.812.000	Transfer dari Dit KP, berupa pembangunan pada PP Untia, Akan dilakukan Inventarisasi selanjutnya dikapitalisasi
	2024	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	255.792.000	

	2024	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	101.064.000	
Saumlaki skpt	2024	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	28.174.832.558	Pekerjaan Konstruksi PP SKPT Saumlaki. Akan dilakukan Inventarisasi selanjutnya dikapitalisasi
	2024	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	457.700.000	
			29.329.639.808	

Berdasarkan data periode 31 Desember 2025, terdapat beberapa aset yang masih diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada sejumlah satuan kerja. Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan kode barang 20257010101003, tercatat nilai sebesar Rp23.088.000 yang merupakan nilai perencanaan atas pekerjaan pembangunan Gedung Administrasi dan pagar keliling. Selanjutnya, pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dengan kode barang 20247010101003, tercatat nilai sebesar Rp65.351.250 yang merupakan perencanaan pembangunan gerbang masuk kawasan PPS Nizam Zachman. Pada Satker Khusus PP Untia dengan kode barang 20247010101003, terdapat nilai sebesar Rp251.812.000 yang berasal dari transaksi transfer dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, berupa rehabilitasi bangunan kantor pada PP Untia. Selain itu, pada tahun 2024 juga terdapat tambahan nilai sebesar Rp255.792.000 yang masih dalam kategori Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan. Di samping itu, terdapat pula aset dengan kode barang 7010101004 yang diklasifikasikan sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp101.064.000. Pada SKPT Saumlaki dengan kode barang 7010101003, tercatat nilai sebesar Rp28.174.832.558 yang merupakan pekerjaan konstruksi PP SKPT Saumlaki. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat tambahan nilai sebesar Rp457.700.000 yang juga termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dan rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah melakukan inventarisasi secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian antara data dalam dokumen perencanaan dengan kondisi aktual di lapangan. Selanjutnya, akan dilakukan proses verifikasi dan penelusuran dokumen pendukung untuk memastikan keabsahan dan akuntabilitas nilai yang tercatat. Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi dasar dalam proses kapitalisasi aset serta penyesuaian pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C.3 Properti Investasi

Dalam rangka terciptanya ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, transparan, dan efektif khususnya terkait pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta ketertiban penatausahaan atas BMN yang dilakukan pemanfaatan dan memenuhi kriteria properti investasi, maka seluruh satuan kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melakukan inventarisasi atas properti investasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor NOMOR B.971/MEN-SJ/PL.730/XII/2024 tentang Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Melalui Pemanfaatan Barang Milik Negara Dan Tata Cara Penatausahaannya Dalam Properti Investasi

C.3.1 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. properti investasi pperiode 31 Desember 2024 dan 2025 adalah Rp187.429.347.232 dan Rp215.291.136.399 Berikut merupakan daftar properti investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap;

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
PPN AMBON		4.624.603.000	4.624.603.000	#DIV/0!
PPN BRONDONG	4.808.138.400	4.808.138.400	-	0,00%
PPN KARANGANTU	1.005.189.354	1.005.189.354	-	0,00%
PPN KEJAWANAN	80.406.465.920	80.406.465.920	-	0,00%
PPN KWANDANG	670.746.000	670.746.000	-	0,00%
PPN PELABUHAN RATU	22.607.317.000	24.452.158.000	1.844.841.000	8,16%
PPN PEMANGKAT	4.512.070.000	4.512.070.000	-	0,00%
PPN PENGAMBENGAN	2.854.077.081	2.854.077.081	-	0,00%
PPN PRIGI	3.954.323.000	4.178.426.000	224.103.000	5,67%
PPN SIBOLGA	968.037.000	968.037.000	-	0,00%
PPN SUNGAILIAT	5.693.423.200	5.693.423.200	-	0,00%

PPN TANJUNG PANDAN	469.873.000	469.873.000	-	0,00%
PPN TELUK BATANG	1.882.188.710	1.882.188.710	-	0,00%
PPN TERNATE	190.875.000	190.875.000	-	0,00%
PPS BELAWAN	1.151.453.000	1.151.453.000	-	0,00%
PPS BITUNG	3.662.934.000	3.662.934.000	-	0,00%
PPS BUNGUS	969.595.000	969.595.000	-	0,00%
PPS CILACAP	2.828.072.000	25.109.254.167	22.281.182.167	787,86%
PPS KENDARI	31.279.851.427	31.279.851.427	-	0,00%
PPS NIZAM ZAHMAN	14.088.113.795	14.088.113.795	-	0,00%
PROV. LAMPUNG TP	1.112.940.000		1.112.940.000	100,00%
SEKRETARIAT DJPT	2.313.664.345	2.313.664.345	-	0,00%
Grand Total	187.429.347.232	215.291.136.399	27.861.789.167	14,87%

Penambahan Properti Investasi pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan hasil pengalihan klasifikasi aset dari BMN yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap menjadi Properti Investasi, sesuai dengan fakta pemanfaatannya untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau peningkatan nilai. Proses ini didukung oleh penelaahan dokumen kepemilikan, berita acara serah terima, serta bukti pemanfaatan aset oleh pihak lain maupun skema kerja sama yang telah berjalan. Selain itu, deklasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan metode pengukuran dan penyajian dalam laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam rangka tertib administrasi, perubahan tersebut dituangkan dalam dokumen perubahan data BMN serta dilakukan pembaruan pada aplikasi pengelolaan BMN. Berdasarkan hasil verifikasi, dilakukan penyesuaian klasifikasi, nilai tercatat, dan penyajian dalam laporan keuangan sesuai periode pelaporan. Untuk memastikan keberlanjutan pengakuan, akan dilakukan pemantauan berkala atas pemanfaatan aset guna memastikan kesesuaiannya dengan kriteria Properti Investasi. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan penggunaan, maka penyesuaian pencatatan akan dilakukan kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung oleh dokumen yang sah.

Penambahan Properti Investasi pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana

tercantum dalam lampiran dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17. Hal ini dikarenakan aset tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memiliki potensi peningkatan nilai, serta tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional utama, sehingga layak diklasifikasikan sebagai Properti Investasi,

Penambahan Properti Investasi pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana tercantum dalam lampiran dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 Properti Investasi. Hal ini dikarenakan aset tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memiliki potensi kenaikan nilai, serta tidak digunakan secara langsung dalam mendukung tugas dan fungsi operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian dalam pencatatan BMN melalui proses reklasifikasi dari aset tetap menjadi Properti Investasi agar penyajian dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan kondisi pemanfaatan aset yang sebenarnya.

*Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi
(Rp21.621.384.923)*

C.3.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi adalah total alokasi sistematis dari biaya perolehan bangunan yang diakui sebagai beban selama masa manfaatnya. Dalam akuntansi, akun ini berfungsi sebagai akun kontra aset yang mengurangi nilai tercatat properti investasi di neraca agar mencerminkan penurunan kapasitas atau nilai manfaat ekonomi aset tersebut seiring waktu. Akumulasi penyusutan properti investasi periode 31 Desember 2024 dan 2025 adalah (Rp17.127.800.683) dan

(Rp21.621.384.923). Berikut rincian akumulasi penyustan properti investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap;

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
PPN AMBON	-	688.867.141	688.867.141	#DIV/0!
PPN BRONDONG	786.550.926	887.645.810	101.094.884	12,85%
PPN KARANGANTU	128.519.917	153.677.102	25.157.185	19,57%
PPN KEJAWANAN	1.151.005.282	1.351.484.345	200.479.063	17,42%
PPN KWANDANG	98.846.776	112.967.744	14.120.968	14,29%
PPN PELABUHAN RATU	1.831.512.666	2.365.843.786	534.331.120	29,17%
PPN PEMANGKAT	501.236.548	544.437.346	43.200.798	8,62%
PPN PENGAMBENGAN	189.476.187	246.779.433	57.303.246	30,24%
PPN PRIGI	634.874.837	782.626.342	147.751.505	23,27%
PPN SIBOLGA	186.588.887	209.915.697	23.326.810	12,50%
PPN SUNGAILIAT	1.021.306.366	1.177.146.796	155.840.430	15,26%
PPN TANJUNG PANDAN	85.431.458	97.635.952	12.204.494	14,29%
PPN TELUK BATANG	414.518.134	469.818.217	55.300.083	13,34%
PPN TERNATE	33.290.985	37.175.143	3.884.158	11,67%
PPS BELAWAN	190.553.794	215.482.458	24.928.664	13,08%
PPS BITUNG	561.087.284	648.432.591	87.345.307	15,57%
PPS BUNGUS	153.073.605	176.875.891	23.802.286	15,55%
PPS CILACAP	642.630.878	2.084.951.586	1.442.320.708	224,44%
PPS KENDARI	5.105.021.768	5.736.876.612	631.854.844	12,38%
PPS NIZAM ZAHMAN	2.898.789.456	3.286.912.370	388.122.914	13,39%
PROV. LAMPUNG TP	214.026.926	-	214.026.926	- 100,00%
SEKRETARIAT DJPT	299.458.003	345.832.561	46.374.558	15,49%
Grand Total	17.127.800.683	21.621.384.923	4.493.584.240	26,24%

Piutang Jangka Panjang
Rp 2.841.696.229

C.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 2.841.696.229 dan Rp 2.841.696.229.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA yang terdapat pada Sekretariat itjen Perikanan Tangkap yang merupakan piutang yang timbul atas tugas belajar Saudara Gilar.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)*

C.4.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp 0

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Kanwil disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Jangka Panjang Rp
(2.855.976.110)*

C.4.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp(14.279.881) dan Rp(2.855.976.110).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Aset Lainnya Rp
769.912.162.828*

C.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp31.335.488.504 dan Rp769.912.162.828.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak Berwujud
Rp5.812.070.382*

C.5.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp6.321.982.132 dan Rp5.812.070.38.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik seperti software, lisensi, hasil kajian serta aset tak berwujud lainnya.

Row Labels	Sum of RPH_ASET
Aset Tak Berwujud Lainnya	494.546.750
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	494.546.750
BBPPI	494.546.750

*Dana yang dibatasi
penggunaannya Rp
719.527.816.579*

C.5.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatas penggunaannya merupakan akun yang digunakan untuk menampung dana sisa pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran, yang akan diserahkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. Berikut rincian RPATA pada Ditjen Perikanan Tangkap per 31 Desember 2025:

Nama Satker	Nama Supplier	Saldo
PPN PENGAMBENGAN	PT. AYUMA USAHA SEJAHTERA	73.762.074
SEKRETARIAT DJPT	PT WIRA KARSA KONSTRUKSI	13.040.246.400
SEKRETARIAT DJPT	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	117.885.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. ASTRA INTERNATIONAL ISUZU TBK	38.864.000.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. RONI MARINE	6.391.212.000
SEKRETARIAT DJPT	PT TOLERANSI ACEH	9.425.858.600
SEKRETARIAT DJPT	PT WAHANA KRIDA KONSOLINDO	117.130.800
SEKRETARIAT DJPT	CV. RONI MARINE	1.740.583.000
PPN SIBOLGA	PT. WIRA LESTARI SENTOSA	25.189.197
SEKRETARIAT DJPT	CV DUNIA TEKNIK CONSULT	113.526.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. SUCOFINDO	119.220.600
SEKRETARIAT DJPT	CV. RAFFAN DESIGN	162.328.000
PPN KARANGANTU	CV. PUTRI NAWA	205.733.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA	11.577.300.000

SEKRETARIAT DJPT	PT TIRAI MEGAH UTAMA	13.415.611.800
SEKRETARIAT DJPT	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	49.292.843.000
SEKRETARIAT DJPT	PT PUTRA KAHU PERKASA	117.691.800
SEKRETARIAT DJPT	PT ARDIANA DWI YASA CONSULTANT	39.701.600
SEKRETARIAT DJPT	PT. NILA NASRA NINA	3.546.402.800
SEKRETARIAT DJPT	PT. PINBUK KONSULINDO	666.666.000
SEKRETARIAT DJPT	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI	21.943.392.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. BHARATA MAHAKARYA CONSULTANT	119.173.800
SEKRETARIAT DJPT	CV. INTISHAR KARYA	117.157.200
SEKRETARIAT DJPT	CV.ZENITH ENGINEERING CONSULTANT	118.218.600
PPN TERNATE	ADNAN PONTOH	3.562.723
SEKRETARIAT DJPT	PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA	12.969.795.000
SEKRETARIAT DJPT	CV.RIZKY UTAMA CONSULTANT	118.714.200
PPN SUNGAILIAT	PT. CERAH SINERGI SEJAHTERA	150.588.238
SEKRETARIAT DJPT	PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA	118.158.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA	11.821.500.000
PPN PENGAMBENGAN	PT. AYUMA USAHA SEJAHTERA	61.468.395
SEKRETARIAT DJPT	CV. SUBANG RAYA KONSULTAN	112.653.600
SEKRETARIAT DJPT	PT. BRETO INOVASI INDONESIA	436.150.000
PPS BITUNG	PT. DELAPAN SATU OUTSOURCHINDO	8.141.411
SEKRETARIAT DJPT	CV. PILLAR PERSADA SELATAN	116.248.200
SEKRETARIAT DJPT	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	55.164.000.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. BLAMBANGAN BAHARI SHIPYARD	1.536.000.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. PRAMA KARYA NUSANTARA	115.132.200
SEKRETARIAT DJPT	CV DOME CONSULTANT	118.038.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	716.283.000
SEKRETARIAT DJPT	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	4.026.580.860
SEKRETARIAT DJPT	PT. IDEAWARNA KONSULTAN NUSANTARA	117.099.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	33.032.026.000
SEKRETARIAT DJPT	PT BARUGA BULAENG INDOTAMA	110.941.800
SEKRETARIAT DJPT	CV. CITRA NUSA KONSULINDO	118.938.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. BUMI DELTA HATTEN	17.656.630.200
SEKRETARIAT DJPT	DELTA MARATAMA GLOBALINDO	112.024.800
SEKRETARIAT DJPT	CV RESKINDO WASA	110.755.200
SEKRETARIAT DJPT	CV. AUFARI DWICIPTA UTAMA	110.924.400
PPS CILACAP	CV. CHIPSET BERKAH MANDIRI	28.471.500

SEKRETARIAT DJPT	CV. MASAJI 18	118.821.600
PPS NIZAM ZAHMAN	PT. MITRA BARU BERSIH	253.746.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. BUANA KAMILA PUTRA	3.779.333.000
SEKRETARIAT DJPT	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP	18.681.584.400
SEKRETARIAT DJPT	PT. PILAREMPAT CONSULTAN	118.122.600
SEKRETARIAT DJPT	CV. AUZORA MANDIRI CONSULTANT	113.576.400
SEKRETARIAT DJPT	CV JUANG KARYA KONSOLINDO	118.707.600
SEKRETARIAT DJPT	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP	18.894.090.598
PPN PEKALONGAN	PT. WARD SERVIS INDONESIA	74.429.737
SEKRETARIAT DJPT	PT. TAMACOOOL SUKSES PERKASA	5.017.200.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. ARION ADONAY CONSULTANT	119.603.400
PPN TERNATE	PT. GARDA TIMUR PRKASA	47.988.859
SEKRETARIAT DJPT	PT KARSA PRABALA	15.172.455.600
PPN TERNATE	ABDUL RAHMAN	1.400.000
PPN KWANDANG	CV. CAHAYA NUHA	162.862.500
SEKRETARIAT DJPT	CV RUANG KOTA	116.041.200
SEKRETARIAT DJPT	PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	37.185.600
SEKRETARIAT DJPT	CV. YUSATA TEKNIKA	111.588.600
PPN PRIGI	PT. JAYA KUSUMA ARUM	48.515.000
PPN TERNATE	SUDIRMAN HI ABDULLAH	1.400.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. NAURAH DINAMIKA NUSANTARA	29.861.247.599
SEKRETARIAT DJPT	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	22.193.860.400
SEKRETARIAT DJPT	CV. AJIZTAMA RAYA CONSULTAN	118.071.600
SEKRETARIAT DJPT	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	157.419.000
SEKRETARIAT DJPT	PT DUTA TUNGGAL JAYA	13.874.371.200
SEKRETARIAT DJPT	CV. MITRA RANCANG CONSULINDO	195.598.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. POLO CONSULTANT	117.815.400
SEKRETARIAT DJPT	CV. KETNA WIRANDANI	189.575.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	13.921.498.200
SEKRETARIAT DJPT	PT. AISHA BANGUN RAYA	12.992.223.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. CLARA BENEFICIA	7.078.592.999
SEKRETARIAT DJPT	CV. GEOSENTRIS NUSANTARA	115.473.600
SEKRETARIAT DJPT	PT. BULUSARAUNG UTAMA NUSANTARA	3.219.000.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. SIAGANG BERSAMA MACHINERY	8.035.000.000
PPN KARANGANTU	CV. FARELINDO GRAHA UTAMA	113.900.000
PPN TELUK BATANG	PT. ARIEF PRATAMA PUTRA	26.708.088
PPN KARANGANTU	CV. SAEFUL RAHAYU	217.915.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. WIDYA AIKA BERKARYA	109.138.800

SEKRETARIAT DJPT	PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA	116.505.600
SEKRETARIAT DJPT	CV. NUSAKON	117.816.600
SEKRETARIAT DJPT	CV. KINTAN MAHARDHIKA	117.832.800
SEKRETARIAT DJPT	PT. INDOPENTA BUMI PERMAI,	17.954.996.400
PPN KARANGANTU	CV. NURCAHYA KARYA ABADI	236.390.000
SEKRETARIAT DJPT	DINAMIKA CONSULTANT CV	115.515.000
PPN KWANDANG	CV. NUSANTARA COORPORATION	12.115.880
PPN KARANGANTU	PT. GARDA BANGSA SECURINDO	5.546.200
PPN KWANDANG	PT. GARUDA SEKURITI PERKASA GORONTALO	33.442.273
PPN PEKALONGAN	PT. ADHIKARI KARYA BATANG	392.815.000
PPS BITUNG	PT. DELAPAN SATU OUTSOURCHINDO	11.643.695
SEKRETARIAT DJPT	PT. SUCOFINDO	116.742.600
SEKRETARIAT DJPT	CENDANA INDAH CV	6.151.446.599
PPN TERNATE	NUNUNG YAMIN, SH	1.400.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. TAMACOOOL SUKSES PERKASA	12.293.250.000
PPN TERNATE	PT. GARDA TIMUR PRKASA	47.839.344
SEKRETARIAT DJPT	PT. VIOLA CIPTA MAHAKARYA	22.207.871.804
PPN PELABUHAN RATU	PT. GARDA SATRIA WICAKSANA	84.666.813
PPN KARANGANTU	PT. GARDA BANGSA SECURINDO	30.815.250
SEKRETARIAT DJPT	LENERA DESIGN KONSULTANT	118.428.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. UTA ENGINEERING CONSULTANT	108.730.800
SEKRETARIAT DJPT	PT. SPATIUM ARTEM CONSULTANTS	117.036.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. KAINAYA KARYA KONSULTAN	118.274.400
PPN TERNATE	SYARIF KAHFIE B. LESTALUHU	3.562.725
PPN TERNATE	HIJRIANA H DJALIL	3.562.723
SEKRETARIAT DJPT	CV. CAHAYA KURNIA ENGINEERING	114.222.600
SEKRETARIAT DJPT	CV. RAVENTAMA	114.147.000
PPN KARANGANTU	PT. GARDA BANGSA SECURINDO	75.161.711
PPN TERNATE	IRFANDI SIOKONA	3.562.725
SEKRETARIAT DJPT	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	21.438.294.600
SEKRETARIAT DJPT	CV. KOSONG TIGA BELAS CONSULTANT	118.201.800
SEKRETARIAT DJPT	PT. PURA AGRO MANDIRI	5.866.000.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. TRISAR PUTRI SEJAHTERA	7.668.000.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. TRIMAKO ABDI KONSULINDO	179.781.000
PPN PRIGI	PT. SINAWANG INDAH BERSERI	25.900.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. MULTICON ENGINEERING	114.842.310
PPN KWANDANG	CV. NARUTO	100.750.500
PPN TERNATE	MUH.FIKSAN GOGASA	3.562.725

PPN TERNATE	ERNAWATI H. ARIF	3.562.725
SEKRETARIAT DJPT	PT. ARTAMAKMUR PERMAI	16.774.592.400
SEKRETARIAT DJPT	CV. ARCHIGO CONSULTAN	116.428.200
SEKRETARIAT DJPT	PT. MARINDO UTAMA PENATA KAWASAN	117.816.600
SEKRETARIAT DJPT	TIRTHA WANDHIRA UTAMA PT	13.557.875.400
SEKRETARIAT DJPT	PT. INTI BERLIAN NUSANTARA	11.969.088.000
SEKRETARIAT DJPT	CV PELITA BUANA	194.065.000
PPN PENGAMBENGAN	CV.SEGARA SUJAYA	129.511.470
SEKRETARIAT DJPT	PT. MULTI CITRA GRAHA	116.990.400
PPN KWANDANG	CV ARSY ENGINEERING CONSULTANT	19.619.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	195.436.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK	21.959.718.200
SEKRETARIAT DJPT	CV. DWI MUSTIKA	8.585.000.000
SEKRETARIAT DJPT	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI	14.727.436.800
SEKRETARIAT DJPT	CV. BALAKOSA CONSULTANT	119.563.200
SEKRETARIAT DJPT	PT HARDJA MOEKTI CONSULTANT	118.489.200
SEKRETARIAT DJPT	CV. SAGARA GIRI REJEKI	115.911.600
PPN SIBOLGA	PT. WIRA LESTARI SENTOSA	30.227.036
PPN TERNATE	INDRI ARFIANI USMAN	1.400.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. ARIZ KARYA KONSULTAN	119.662.200
SEKRETARIAT DJPT	CV. PUTRA TUNGAL DESIGN	117.915.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. PURA AGRO MANDIRI	1.958.652.000
SEKRETARIAT DJPT	CV. SAHABAT ENGINEERING	113.974.800
SEKRETARIAT DJPT	PT. SUCOFINDO	119.047.200
SEKRETARIAT DJPT	PT. ASRIGUNA KREASI SAMAWA	116.211.000
PPN PEKALONGAN	PT. WARD SERVIS INDONESIA	98.407.069
SEKRETARIAT DJPT	PT. DS SOLUTIONS INTERNATIONAL	19.800.000.000
PPN PELABUHAN RATU	PT. GARDA SATRIA WICAKSANA	77.752.937
PPN AMBON	PT. CHARLYN JAYA	109.207.791
SEKRETARIAT DJPT	PT. TATA INDOKARYA KONSULTAN	192.310.000
PPN TELUK BATANG	PT. ARIEF PRATAMA PUTRA	42.296.296
SEKRETARIAT DJPT	CV APHAS KONSULTAN	192.511.000
SEKRETARIAT DJPT	PT. DS SOLUTIONS INTERNATIONAL	25.086.400.000
PPN PEKALONGAN	PT. ADHIKARI KARYA BATANG	322.346.000
Total		719.527.816.579

Aset Lain-lain Rp
177.531.048.845

C.5.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp154.479.022.263. dan Rp177.531.048.845.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Akun	Uraian	Jumlah
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	140.625.045.863,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-1.077.518.000,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.096.298.397,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-23.728.515.834,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.413.981.040,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-6.988.572.392,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	55.109.323.123,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-2.145.382.007,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-3.837.703.800,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-699.623.945,
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	13.869.341.400,
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-56.125.000,
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-49.500.000,
JUMLAH		177.531.048.845,

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi

C.5.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Aset Lainnya Rp
(132.958.772.978)*

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp(134.937.729.356) dan Rp(132.958.772.978).

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp369.281.675.719*

C.6 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp15.410.627.036 dan Rp369.281.675.719.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

*Uang Muka dari KPPN
Rp 0*

C.6.1 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp2.000.000 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan pada satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jakarta.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp273.382.338.945*

C.6.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp353.914.326.962 dan Rp7.713.337.556

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan). Utang Kepada pihak ketiga pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan RPATA, Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar dan Belanja Pegawai yang masih HarusDibayar dengan rincian sebagai berikut:

Row Labels	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja barang yang masih harus dibayar	89.676.634.146	1.938.147.098	10.810.558.803	84,80%
BBPPI	48.940.925	52.899.287	3.958.362	-8,09%
PPN AMBON	37.062.027	76.687.690	39.625.663	-106,92%
PPN BRONDONG	129.627.162	122.654.824	6.972.338	5,38%
PPN KARANGANTU	67.765.662	85.755.931	17.990.269	-26,55%
PPN KEJAWANAN	113.907.070	135.249.786	21.342.716	-18,74%
PPN KWANDANG	87.640.841	81.139.406	6.501.435	7,42%
PPN PEKALONGAN	19.111.788	17.892.445	1.219.343	6,38%
PPN PELABUHAN RATU	55.968.747	72.066.319	16.097.572	-28,76%
PPN PEMANGKAT	21.475.705	21.763.358	287.653	-1,34%
PPN PENGAMBENG AN	16.599.210	29.584.816	12.985.606	-78,23%
PPN PRIGI	55.898.205	50.992.466	4.905.739	8,78%
PPN SIBOLGA	51.334.988	108.057.641	56.722.653	-110,50%
PPN SUNGAILIAT	23.372.589	-	23.372.589	100,00%
PPN TANJUNG PANDAN	19.672.468	26.121.522	6.449.054	-32,78%
PPN TELUK BATANG	12.832.849	17.294.166	4.461.317	-34,76%
PPN TERNATE	98.586.404	2.697.262	95.889.142	97,26%
PPN TUAL	21.687.304	21.744.520	57.216	-0,26%
PPS BELAWAN	20.287.201	-	20.287.201	100,00%
PPS BITUNG	47.200.070	47.849.385	649.315	-1,38%
PPS BUNGUS	104.442.368	83.659.274	20.783.094	19,90%
PPS CILACAP	64.213.343	64.004.415	208.928	0,33%
PPS KENDARI	87.260.181	-	87.260.181	100,00%
PPS NIZAM ZAHMAN	156.050.100	476.242.228	320.192.128	-205,19%
SEKRETARIAT DJPT	88.315.696.939	343.790.357	87.971.906.582	25588,82 %
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	205.393.435	315.182.361	109.788.926	-53,45%
PPN KARANGANTU	-	23.370.000	23.370.000	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN	59.439.100	-	59.439.100	100,00%
PPN TERNATE	-	32.693.021	32.693.021	#DIV/0!
PPN TUAL	-	21.754.000	21.754.000	#DIV/0!
PPS BUNGUS	7.385.335	-	7.385.335	100,00%
PPS CILACAP	-	147.840	147.840	#DIV/0!
PPS NIZAM ZAHMAN	-	98.370.000	98.370.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT	138.569.000	138.847.500	278.500	-0,20%
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	264.032.299.381	5.460.008.097	254.924.732.992	97,90%
PPN AMBON	109.207.791	103.200.000	6.007.791	5,50%

PPN KARANGANTU	885.461.161	191.027.400	694.433.761	78,43%
PPN KEJAWANAN	-	275.250.352	275.250.352	#DIV/0!
PPN KWANDANG	328.790.153	48.453.565	280.336.588	85,26%
PPN PEKALONGAN	887.997.806	150.064.000	737.933.806	83,10%
PPN PELABUHAN RATU	162.419.750	152.402.697	10.017.053	6,17%
PPN PENGAMBENGAN	264.741.939	133.585.650	131.156.289	49,54%
PPN PRIGI	74.415.000	68.887.050	5.527.950	7,43%
PPN SIBOLGA	55.416.233	37.760.000	17.656.233	31,86%
PPN SUNGAILIAT	150.588.238	144.500.000	6.088.238	4,04%
PPN TELUK BATANG	69.004.384	76.942.154	7.937.770	-11,50%
PPN TERNATE	122.804.549	162.745.845	39.941.296	-32,52%
PPS BITUNG	19.785.106	148.969.904	129.184.798	-652,94%
PPS CILACAP	28.471.500	200.082.500	171.611.000	-602,75%
PPS NIZAM ZAHMAN	71.894.700	1.561.797.030	-	-2072,34%
SEKRETARIAT DJPT	260.801.301.071	2.004.339.950	258.796.961.121	12.911,832%
Grand Total	353.914.326.962	7.713.337.556	346.200.989.406	4.488,34%

Pendapatan Diterima di Muka Rp15.367.348.757

C.6.3 Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.300.289.974 dan Rp15.367.348.757.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Pendapatan Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi. Pada TA 2024 terdapat kenaikan Pendapatan Diterima Dimuka yang sangat signifikan, karena pada TA 2025 satker belum seluruhnya mengakui pendapatan diterima dimuka atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi yang dibayar dimuka. Adapaun rincian pendapatan diterima dimuka ada sebagai berikut:

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	5.552.683.421	2.788.590.136	-	-49,78%

PPN AMBON	789.311.068	347.009.575	442.301.493	-56,04%
PPN BRONDONG	51.156.553	21.560.102	29.596.451	-57,85%
PPN KARANGANTU	51.729.797	-	51.729.797	-100,00%
PPN KEJAWANAN	645.891.615	327.896.053	317.995.562	-49,23%
PPN KWANDANG	1.730.959	-	1.730.959	-100,00%
PPN PELABUHAN Ratu	159.133.987	104.434.301	54.699.686	-34,37%
PPN PEMANGKAT	3.530.327	12.512.576	8.982.249	254,43%
PPN PENGAMBENGAN	371.453.908	244.594.212	126.859.696	-34,15%
PPN PRIGI	71.868.434	47.485.870	24.382.564	-33,93%
PPN SIBOLGA	337.762.580	149.763.754	187.998.826	-55,66%
PPN SUNGAILIAT	114.396.832	46.916.899	67.479.933	-58,99%
PPN TANJUNG PANDAN	21.635.522	356.887.521	335.251.999	1549,54%
PPN TERNATE	229.775.773	92.348.106	137.427.667	-59,81%
PPN TUAL	126.135.410	922.750	125.212.660	-99,27%
PPS BELAWAN	263.313.212	81.947.551	181.365.661	-68,88%
PPS BITUNG	378.914.764	-	378.914.764	-100,00%
PPS BUNGUS	72.539.527	19.907.716	52.631.811	-72,56%
PPS CILACAP	686.314.117	165.785.899	520.528.218	-75,84%
PPS KENDARI	1.078.550.089	673.039.350	405.510.739	-37,60%
PPS NIZAM ZAHMAN	97.538.947	95.577.901	1.961.046	-2,01%
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	2.142.606.059	12.578.758.621	10.436.152.562	487,08%
PPN AMBON	-	417.499.517	417.499.517	#DIV/0!
PPN BRONDONG	-	343.664.515	343.664.515	#DIV/0!
PPN KARANGANTU	-	70.928.643	70.928.643	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN	1.365.682.173	2.452.569.787	1.086.887.614	79,59%
PPN KWANDANG	-	5.874.110	5.874.110	#DIV/0!
PPN PELABUHAN Ratu	-	852.647.133	852.647.133	#DIV/0!
PPN PEMANGKAT	-	783.280	783.280	#DIV/0!
PPN PENGAMBENGAN	12.194.206	20.199.678	8.005.472	65,65%
PPN PRIGI	61.380.003	247.694.071	186.314.068	303,54%
PPN SIBOLGA	-	807.955.424	807.955.424	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT	-	281.830.496	281.830.496	#DIV/0!
PPN TERNATE	-	845.774.549	845.774.549	#DIV/0!
PPN TUAL	-	351.696.634	351.696.634	#DIV/0!
PPS BELAWAN	-	1.241.102.970	1.241.102.970	#DIV/0!
PPS BITUNG	-	769.746.641	769.746.641	#DIV/0!
PPS BUNGUS	-	16.278.306	16.278.306	#DIV/0!
PPS CILACAP	295.276.065	2.634.913.166	2.339.637.101	792,36%
PPS KENDARI	408.073.612	1.217.599.701	809.526.089	198,38%
Grand Total	7.695.289.480	15.367.348.757	7.672.059.277	99,70%

Saldo Ekuitas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp5.883.172.592.765 dan Rp6.680.956.372.780.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Neraca Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Pendapatan PNB

Rp1.023.503.649.076

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp1.047.028.638.351 dan Rp1.023.503.649.076.

Pendapatan akrual pada Satker Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap berasal dari Pendapatan dari Pendapatan SDA, Pendapatan Fungsional Non SDA, Pendapatan umum dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan jenis pendapatan yang berasal dari pengembalian Beban pegawai, Beban barang dan Beban modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.1.1 Pendapatan SDA

Tabel pendapatan SDA

Nama Akun	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	41.585.077.902	31.172.208.000	-10.412.869.902	-25,04%
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	153.870.000	11.765.000	-142.105.000	-92,35%
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	912.756.020.174	992.219.676.076	79.463.655.902	8,71%
Total	954.494.968.076	1.023.403.649.076	68.908.681.000	7,22%

Pendapatan Sumber daya alam terdiri dari tiga jenis Pendapatan, yaitu pertama penerimaan pungutan pengusaha perikanan yang terdiri atas pungutan pengusaha perikanan bagi izin usaha perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan, pungutan pengusaha perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan Perikanan. Kedua

penerimaan pungutan pengusaha perikanan yang terdiri atas pungutan pengusaha perikanan bagi izin usaha perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan, pungutan pengusaha perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan perairan darat, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan Perikanan. Ketiga Pendapatan pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan. Pendapatan TA 2025 apabila kita bandingkan dengan target penerimaannya masih sangat jauh, tetapi jika kita bandingkan dengan TA 2025 terdapat kenaikan senilai Rp68.908.681.000 kemudian apabila kita bandingkan dengan LRA akan terdapat selisih yang disebabkan oleh jurnal manual atas PYMHD dan jurnal atas pembayaran piutang PNB. Penerimaan SDA pada TA 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya aktivitas penangkapan ikan dan minimnya pengawasan akibat dari efisiensi anggaran TA 2025.

D.1.2 Pendapatan PNB Lainya

Tabel pendapatan PNB Lainya

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.757.651.271	27.160.349	-1.730.490.922	-98,45%
BBPPI	-	55.105	55.105	#DIV/0!
PPN AMBON	672.000	-	-672.000	-100,00%
PPN KEJAWANAN	-	35.409	35.409	#DIV/0!
PPN KWANDANG	50.797.752	-	-50.797.752	-100,00%
PPN SIBOLGA	2.782.168	-	-2.782.168	-100,00%
PPN SUNGAILIAT	833.420	-	-833.420	-100,00%
PPN TERNATE	2.223.267	356.295	-1.866.972	-83,97%

PPN TUAL	12.067.510	-	-12.067.510	- 100,00 %
PPS BITUNG	-	1.349.000	1.349.000	#DIV/0!
PPS KENDARI	1.438.380	90.000	-1.348.380	- 93,74%
PPS NIZAM ZAHMAN	981.685	13.970.000	12.988.315	1323,0 6%
SEKRETARIAT DJPT	1.685.855.089	11.304.540	-1.674.550.549	- 99,33%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	136.080.000	77.080.000	-59.000.000	- 43,36%
BBPPI	136.080.000	77.080.000	-59.000.000	- 43,36%
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	73.938.733.004	73.432.746.544	-504.642.860	-0,68%
PPN AMBON	901.354.497	2.198.400.458	1.297.045.961	143,90 %
PPN BRONDONG	1.663.019.825	1.847.176.880	184.157.055	11,07%
PPN KARANGANTU	409.683.851	412.550.456	2.866.605	0,70%
PPN KEJAWANAN	7.664.278.686	7.780.589.287	116.310.601	1,52%
PPN KWANDANG	237.633.834	306.489.768	68.855.934	28,98%
PPN PEKALONGAN	1.127.306.012	1.034.121.607	-93.184.405	-8,27%
PPN PELABUHAN RATU	1.210.175.532	1.356.738.653	146.563.121	12,11%
PPN PEMANGKAT	948.792.066	895.157.062	-53.635.004	-5,65%
PPN PENGAMBENGAN	490.769.274	495.207.471	4.438.197	0,90%
PPN PRIGI	983.029.299	836.413.734	-146.615.565	- 14,91%
PPN SIBOLGA	1.991.946.638	1.631.787.094	-360.159.544	- 18,08%
PPN SUNGAILIAT	582.863.110	468.598.506	-114.264.604	- 19,60%
PPN TANJUNG PANDAN	1.345.626.228	1.476.933.627	131.307.399	9,76%
PPN TELUK BATANG	153.003.220	159.204.469	6.201.249	4,05%
PPN TERNATE	1.516.022.073	1.441.865.191	-74.156.882	-4,89%
PPN TUAL	576.983.922	496.259.637	-80.724.285	- 13,99%
PPS BELAWAN	991.752.173	860.840.629	-130.911.544	- 13,20%
PPS BITUNG	3.396.018.454	3.790.500.241	394.481.787	11,62%
PPS BUNGUS	1.900.375.984	1.494.387.668	-405.988.316	- 21,36%
PPS CILACAP	4.378.432.087	4.211.083.467	-167.348.620	-3,82%
PPS KENDARI	4.680.830.027	4.984.878.893	304.048.866	6,50%
PPS NIZAM ZAHMAN	36.788.836.212	35.253.561.746	-1.535.274.466	-4,17%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan	15.465.891.935	12.447.717.467	-3.018.174.468	- 19,52%

Prasarana sesuai dengan Tusi				
BBPPI	92.710.000	56.647.230	-36.062.770	- 38,90%
PPN AMBON	973.486.388	906.120.846	-67.365.542	-6,92%
PPN BRONDONG	956.359.702	649.630.961	-306.728.741	- 32,07%
PPN KARANGANTU	1.012.617.082	915.111.539	-97.505.543	-9,63%
PPN KEJAWANAN	897.052.327	398.339.235	-498.713.092	- 55,59%
PPN KWANDANG	899.670.746	977.356.094	77.685.348	8,63%
PPN PEKALONGAN	4.875.000	29.423.968	24.548.968	503,57 %
PPN PELABUHAN RATU	475.476.843	301.428.870	-174.047.973	- 36,60%
PPN PEMANGKAT	38.444.523	57.262.613	18.818.090	48,95%
PPN PENGAMBENGAN	357.531.476	253.355.445	-104.176.031	- 29,14%
PPN PRIGI	905.887.259	719.087.247	-186.800.012	- 20,62%
PPN SIBOLGA	1.126.388.886	671.859.544	-454.529.342	- 40,35%
PPN SUNGAILIAT	81.172.068	294.155.535	212.983.467	262,39 %
PPN TANJUNG PANDAN	571.738.897	400.830.514	-170.908.383	- 29,89%
PPN TELUK BATANG	101.099.433	156.501.699	55.402.266	54,80%
PPN TERNATE	984.062.652	1.358.969.003	374.906.351	38,10%
PPN TUAL	54.485.273	173.255.384	118.770.111	217,99 %
PPS BELAWAN	508.134.727	563.958.798	55.824.071	10,99%
PPS BITUNG	507.201.998	565.342.235	58.140.237	11,46%
PPS BUNGUS	586.052.482	221.362.856	-364.689.626	- 62,23%
PPS CILACAP	1.482.421.808	1.213.432.819	-268.988.989	- 18,15%
PPS KENDARI	2.529.159.891	1.330.133.985	-1.199.025.906	- 47,41%
PPS NIZAM ZAHMAN	319.862.474	234.151.047	-85.711.427	- 26,80%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	6.000.000	15.540.000	9.540.000	159,00 %
BBPPI	6.000.000	15.540.000	9.540.000	159,00 %
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	39.547.522	39.547.522	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN	-	39.547.522	39.547.522	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	47.166.648	47.166.648	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU	-	3.787.098	3.787.098	#DIV/0!

SEKRETARIAT DJPT	-	43.379.550	43.379.550	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.153.457.192	7.888.992.693	6.735.535.501	583,94 %
BBPPI	284.460	-	-284.460	- 100,00 %
PPN AMBON	33.416.304	189.649.393	156.233.089	467,54 %
PPN BRONDONG	4.320.732	56.853.729	52.532.997	1215,84 %
PPN KARANGANTU	96.698.268	74.596.406	-22.101.862	- 22,86 %
PPN KEJAWANAN	437.298.765	1.131.683.786	694.385.021	158,79 %
PPN KWANDANG	3.800.228	975.890	-2.824.338	- 74,32 %
PPN PEKALONGAN	5.894.098	-	-5.894.098	- 100,00 %
PPN PELABUHAN RATU	53.192.737	112.739.180	59.546.443	111,94 %
PPN PEMANGKAT	3.788.400	1.256.065	-2.532.335	- 66,84 %
PPN PENGAMBENGAN	9.054.951	39.218.300	30.163.349	333,11 %
PPN PRIGI	61.825.515	119.896.319	58.070.804	93,93 %
PPN SIBOLGA	38.292.876	90.856.576	52.563.700	137,27 %
PPN SUNGAILIAT	33.738.899	48.998.379	15.259.480	45,23 %
PPN TANJUNG PANDAN	13.380.048	-	-13.380.048	- 100,00 %
PPN TELUK BATANG	17.074.955	-	-17.074.955	- 100,00 %
PPN TERNATE	29.087.481	207.258.906	178.171.425	612,54 %
PPN TUAL	12.357.817	45.572.866	33.215.049	268,78 %
PPS BELAWAN	2.729.904	36.663.630	33.933.726	1243,04 %
PPS BITUNG	40.986.498	96.390.509	55.404.011	135,18 %
PPS BUNGUS	19.532.255	482.694	-19.049.561	- 97,53 %
PPS CILACAP	136.796.326	423.643.637	286.847.311	209,69 %
PPS KENDARI	99.905.675	606.761.175	506.855.500	507,33 %
SEKRETARIAT DJPT	-	4.605.495.253	4.605.495.253	#DIV/0!
Grand Total	92.457.813.402	93.975.867.223	1.519.481.421	1,64 %

1. Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan dan Informasi merupakan pendapatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pada Ditjen Perikanan Tangkap beraal dari BBPI atas konsultasi dan bimbingan teknis dalam

bidang pengembangan penangkapan ikan. Namun pada TA 2025 tidak ada pendapatan karena tidak ada permintaan BIMTEK dari Universitas dan instansi terkait sebagai salah satu dampak dari efisiensi anggaran.

2. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya merupakan pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan. antara lain berupa pungutan dari penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Ditjen Perikanan Tangkap pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan berupa pengujian mesin kapal dan alat tangkap yang terdapat pada satker BBPI Semarang. Pada TA 2025 mengalami penurunan yang disebabkan oleh efisiensi anggaran.
3. Pendapatan Jasa Lainnya merupakan penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada TA 2025 tidak terdapat pendapatan atas jasa lainnya.
4. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan merupakan Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan terdapat pada 22 pelabuhan Unit Pelayanan Teknis. Jika dibandingkan dengan TA 2024 secara umum mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan atas penggunaan Listrik, pada PPS Nizam Zachman dan PPN Kejawan terdapat penurunan yang signifikan karena pada TA 2024 terdapat pembayaran piutang atas PT HOI, Perindo dan beberapa debitur lainnya. Namun berdasarkan table diatas terdapat kenaikan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan pada PPN Ambon yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan dan aktivitas kapal perikanan.
5. Pendapatan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi. merupakan pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam UndangUndang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini terdapat pada 23 pelabuhan Unit Pelaksana Teknis. Jika dibandingkan dengan TA 2024 mengalami. penurunan yang disebabkan oleh telah habisnya masa kontrak penggunaan tanah dan bangunan sehingga menimbulkan pendapatan atas kontrak penggunaan sarana dan prasarana yang baru serta adanya

- peralihan dari mekanisme penggunaan dengan tarif PP No. 85 Tahun 2021 menjadi tarif pemanfaatan sesuai dengan PP 28
6. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya merupakan pendapatan atas Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya terdapat pada satu satker yaitu Balai Besar Penangkapan Ikan, yang berasal dari kerjasama alih teknologi hasil riset.
 7. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya merupakan Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbangan peralatan nautika. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya terdapat pada satu satker yaitu Balai Besar Penangkapan Ikan, yang berasal dari pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan yang berubah menjadi akun Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya per April 2025.
 8. Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pendapatan sewa atas penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan sewa atas jaringan stasiun pengisian bahan bakar solar pada PPN Kejawanan.
 9. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin, merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pendapatan tersebut hanya ada pada satker berikut:
 - a. PPN Pelabuhanratu merupakan pendapatan yang berasal dari sewa cold storage;
 - b. Pada satker Sekretariat merupakan pendatan yang berasal dari sewa cold storage dan genset pada SKPT Natuna.
 10. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan yang berasal dari sewa rumah dinas dan sewa asset yang berasal dari property investasi atau asset lainnya sesuai dengan ketentuan PP Nomo 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada Tahun 2025 pendapatan sewa Gedung dan bangunan mengalami kenaikan dari Tahun 2024 yang disebabkan oleh adanya perpindahan mengenai tarif dari PP 27 tahun 2014 ke PP Nomor 28 Tahun 2020

Beban Pegawai
Rp241.901.369.598

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp230.018.070.782 dan Rp241.901.369.598.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	64.350.245.200	64.022.811.846	-327.433.354	-0,51%
BBPPI	3.611.064.500	3.549.303.100	-61.761.400	-1,71%
PPN AMBON	2.008.211.800	1.942.670.560	-65.541.240	-3,26%
PPN BRONDONG	2.353.081.200	2.350.201.020	-2.880.180	-0,12%
PPN KARANGANTU	1.117.988.500	1.172.167.960	54.179.460	4,85%
PPN KEJAWANAN	2.227.353.300	2.269.985.900	42.632.600	1,91%
PPN KWANDANG	735.047.100	828.020.920	92.973.820	12,65%
PPN PEKALONGAN	2.157.885.400	2.552.088.540	394.203.140	18,27%
PPN PELABUHAN RATU	2.804.958.000	2.754.363.760	-50.594.240	-1,80%
PPN PEMANGKAT	1.344.958.400	1.381.612.760	36.654.360	2,73%
PPN PENGAMBENGAN	1.670.873.400	1.792.680.480	121.807.080	7,29%
PPN PRIGI	2.823.550.500	2.619.525.040	-204.025.460	-7,23%
PPN SIBOLGA	2.083.442.700	2.138.826.040	55.383.340	2,66%
PPN SUNGAILIAT	1.265.397.900	1.162.537.620	-102.860.280	-8,13%
PPN TANJUNG PANDAN	1.277.208.800	1.458.707.940	181.499.140	14,21%
PPN TELUK BATANG	673.739.200	656.783.920	-16.955.280	-2,52%
PPN TERNATE	1.687.044.000	1.631.209.440	-55.834.560	-3,31%
PPN TUAL	1.342.072.700	1.435.677.680	93.604.980	6,97%
PPS BELAWAN	2.668.096.200	2.530.855.660	-137.240.540	-5,14%

PPS BITUNG	1.702.837.500	1.593.783.520	- 109.053.980	-6,40%
PPS BUNGUS	2.289.850.000	1.972.756.040	- 317.093.960	-13,85%
PPS CILACAP	3.073.537.400	3.125.547.480	52.010.080	1,69%
PPS KENDARI	3.519.796.400	3.511.591.860	- 8.204.540	-0,23%
PPS NIZAM ZAHMAN	2.564.320.000	2.702.350.340	138.030.340	5,38%
SEKRETARIAT DJPT	17.347.930.300	16.889.564.266	- 458.366.034	-2,64%
Beban Gaji Pokok PPPK	18.234.830.000	21.613.085.504	3.378.255.504	18,53%
BBPPI	240.916.000	377.481.800	136.565.800	56,69%
PPN AMBON	731.556.800	889.439.500	157.882.700	21,58%
PPN BRONDONG	787.681.200	891.481.400	103.800.200	13,18%
PPN KARANGANTU	680.270.000	912.784.000	232.514.000	34,18%
PPN KEJAWANAN	766.602.600	838.560.100	71.957.500	9,39%
PPN KWANDANG	572.959.900	660.068.000	87.108.100	15,20%
PPN PEKALONGAN	760.447.900	786.055.500	25.607.600	3,37%
PPN PELABUHAN RATU	413.669.800	492.420.700	78.750.900	19,04%
PPN PEMANGKAT	693.912.800	793.585.500	99.672.700	14,36%
PPN PENGAMBENGAN	706.846.800	871.391.400	164.544.600	23,28%
PPN PRIGI	617.683.400	695.865.800	78.182.400	12,66%
PPN SIBOLGA	760.272.800	880.987.100	120.714.300	15,88%
PPN SUNGAILIAT	709.319.600	886.396.900	177.077.300	24,96%
PPN TANJUNG PANDAN	825.123.800	907.306.100	82.182.300	9,96%
PPN TELUK BATANG	543.197.800	618.313.900	75.116.100	13,83%
PPN TERNATE	635.866.000	764.250.300	128.384.300	20,19%
PPN TUAL	548.994.400	597.708.800	48.714.400	8,87%
PPS BELAWAN	825.562.600	955.633.800	130.071.200	15,76%
PPS BITUNG	700.189.200	817.797.000	117.607.800	16,80%
PPS BUNGUS	684.296.400	792.280.500	107.984.100	15,78%
PPS CILACAP	882.811.800	1.027.322.400	144.510.600	16,37%
PPS KENDARI	578.722.800	700.836.700	122.113.900	21,10%
PPS NIZAM ZAHMAN	1.310.716.800	1.625.368.400	314.651.600	24,01%
SEKRETARIAT DJPT	2.257.208.800	2.829.749.904	572.541.104	25,37%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	85.648.100.996	86.482.216.188	834.115.192	0,97%
BBPPI	5.551.714.064	5.385.157.637	- 166.556.427	-3,00%
PPN AMBON	2.450.220.442	2.402.211.950	- 48.008.492	-1,96%
PPN BRONDONG	2.924.938.372	3.081.226.940	156.288.568	5,34%
PPN KARANGANTU	1.515.268.511	1.610.998.545	95.730.034	6,32%
PPN KEJAWANAN	2.757.596.231	2.932.224.799	174.628.568	6,33%
PPN KWANDANG	1.162.560.323	1.255.384.320	92.823.997	7,98%
PPN PEKALONGAN	2.746.188.524	3.192.619.188	446.430.664	16,26%
PPN PELABUHAN RATU	2.976.758.749	3.327.611.035	350.852.286	11,79%
PPN PEMANGKAT	1.723.910.706	1.758.922.781	35.012.075	2,03%
PPN PENGAMBENGAN	2.404.519.289	2.524.006.557	119.487.268	4,97%
PPN PRIGI	3.336.458.165	3.147.399.862	- 189.058.303	-5,67%

PPN SIBOLGA	2.436.270.495	2.492.466.832	56.196.337	2,31%
PPN SUNGAILIAT	1.742.948.950	1.582.334.196	- 160.614.754	-9,22%
PPN TANJUNG PANDAN	1.659.601.977	1.938.301.599	278.699.622	16,79%
PPN TELUK BATANG	871.390.171	800.046.406	- 71.343.765	-8,19%
PPN TERNATE	2.127.729.172	2.079.254.729	- 48.474.443	-2,28%
PPN TUAL	1.793.596.100	1.837.850.060	44.253.960	2,47%
PPS BELAWAN	3.469.796.846	3.364.490.935	- 105.305.911	-3,03%
PPS BITUNG	2.391.709.591	2.387.039.569	- 4.670.022	-0,20%
PPS BUNGUS	2.934.037.944	2.529.532.895	- 404.505.049	-13,79%
PPS CILACAP	3.871.525.873	3.987.052.212	115.526.339	2,98%
PPS KENDARI	4.229.732.857	4.292.673.620	62.940.763	1,49%
PPS NIZAM ZAHMAN	3.334.894.071	3.617.947.657	283.053.586	8,49%
SEKRETARIAT DJPT	25.234.733.573	24.955.461.864	- 279.271.709	-1,11%
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24.523.758.495	28.916.405.224	4.392.646.729	17,91%
BBPPI	326.489.518	506.421.290	179.931.772	55,11%
PPN AMBON	998.807.384	1.198.314.078	199.506.694	19,97%
PPN BRONDONG	1.063.783.313	1.179.380.000	115.596.687	10,87%
PPN KARANGANTU	913.074.708	1.207.733.973	294.659.265	32,27%
PPN KEJAWANAN	1.020.231.678	1.137.799.472	117.567.794	11,52%
PPN KWANDANG	756.999.662	872.269.851	115.270.189	15,23%
PPN PEKALONGAN	1.019.984.967	1.056.263.939	36.278.972	3,56%
PPN PELABUHAN RATU	525.837.110	704.494.099	178.656.989	33,98%
PPN PEMANGKAT	892.710.974	1.005.134.811	112.423.837	12,59%
PPN PENGAMBENGAN	933.055.000	1.141.444.396	208.389.396	22,33%
PPN PRIGI	807.271.794	901.504.750	94.232.956	11,67%
PPN SIBOLGA	998.255.404	1.160.551.870	162.296.466	16,26%
PPN SUNGAILIAT	948.207.555	1.175.794.040	227.586.485	24,00%
PPN TANJUNG PANDAN	1.112.416.583	1.226.935.831	114.519.248	10,29%
PPN TELUK BATANG	704.145.042	800.388.686	96.243.644	13,67%
PPN TERNATE	842.583.389	1.003.633.089	161.049.700	19,11%
PPN TUAL	734.865.751	791.678.340	56.812.589	7,73%
PPS BELAWAN	1.121.517.703	1.281.068.580	159.550.877	14,23%
PPS BITUNG	932.673.313	1.085.299.196	152.625.883	16,36%
PPS BUNGUS	923.440.415	1.062.744.701	139.304.286	15,09%
PPS CILACAP	1.196.039.975	1.373.724.077	177.684.102	14,86%
PPS KENDARI	806.716.988	943.581.358	136.864.370	16,97%
PPS NIZAM ZAHMAN	1.772.481.883	2.147.258.476	374.776.593	21,14%
SEKRETARIAT DJPT	3.172.168.386	3.952.986.321	780.817.935	24,61%
Beban Pembulatan Gaji PNS	889.094	878.906	- 10.188	-1,15%
BBPPI	58.149	52.371	- 5.778	-9,94%
PPN AMBON	30.204	27.619	- 2.585	-8,56%

PPN BRONDONG	33.780	32.416	- 1.364	-4,04%
PPN KARANGANTU	16.440	17.427	987	6,00%
PPN KEJAWANAN	33.631	33.242	- 389	-1,16%
PPN KWANDANG	10.412	10.722	310	2,98%
PPN PEKALONGAN	28.824	40.121	11.297	39,19%
PPN PELABUHAN RATU	35.202	36.762	1.560	4,43%
PPN PEMANGKAT	21.896	19.175	- 2.721	-12,43%
PPN PENGAMBENGAN	23.686	25.604	1.918	8,10%
PPN PRIGI	40.868	37.722	- 3.146	-7,70%
PPN SIBOLGA	28.884	30.361	1.477	5,11%
PPN SUNGAILIAT	19.987	18.447	- 1.540	-7,71%
PPN TANJUNG PANDAN	18.109	19.493	1.384	7,64%
PPN TELUK BATANG	9.486	8.167	- 1.319	-13,90%
PPN TERNATE	26.839	24.804	- 2.035	-7,58%
PPN TUAL	20.103	20.187	84	0,42%
PPS BELAWAN	36.262	36.093	- 169	-0,47%
PPS BITUNG	28.838	23.770	- 5.068	-17,57%
PPS BUNGUS	33.345	23.219	- 10.126	-30,37%
PPS CILACAP	37.620	37.485	- 135	-0,36%
PPS KENDARI	44.937	44.325	- 612	-1,36%
PPS NIZAM ZAHMAN	37.971	37.136	- 835	-2,20%
SEKRETARIAT DJPT	213.621	222.238	8.617	4,03%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	390.964	423.425	32.461	8,30%
BBPPI	5.268	7.731	2.463	46,75%
PPN AMBON	14.476	17.923	3.447	23,81%
PPN BRONDONG	18.054	17.135	- 919	-5,09%
PPN KARANGANTU	12.725	17.780	5.055	39,72%
PPN KEJAWANAN	15.034	16.222	1.188	7,90%
PPN KWANDANG	10.099	11.049	950	9,41%
PPN PEKALONGAN	17.871	15.319	- 2.552	-14,28%
PPN PELABUHAN RATU	9.717	10.615	898	9,24%
PPN PEMANGKAT	15.497	15.438	- 59	-0,38%
PPN PENGAMBENGAN	17.008	17.907	899	5,29%
PPN PRIGI	14.959	16.330	1.371	9,17%
PPN SIBOLGA	14.936	15.483	547	3,66%
PPN SUNGAILIAT	11.681	16.470	4.789	41,00%
PPN TANJUNG PANDAN	19.328	19.511	183	0,95%
PPN TELUK BATANG	10.598	12.763	2.165	20,43%
PPN TERNATE	14.238	14.773	535	3,76%
PPN TUAL	11.069	15.016	3.947	35,66%

PPS BELAWAN	17.144	17.395	251	1,46%
PPS BITUNG	15.244	17.368	2.124	13,93%
PPS BUNGUS	15.510	15.127	- 383	-2,47%
PPS CILACAP	18.721	19.362	641	3,42%
PPS KENDARI	12.151	12.074	- 77	-0,63%
PPS NIZAM ZAHMAN	29.016	29.929	913	3,15%
SEKRETARIAT DJPT	50.620	54.705	4.085	8,07%
Beban Tunj. Anak PNS	1.536.333.322	1.517.673.072	- 18.660.250	-1,21%
BBPPI	88.456.596	88.609.310	152.714	0,17%
PPN AMBON	58.240.482	53.866.808	- 4.373.674	-7,51%
PPN BRONDONG	64.088.562	60.286.585	- 3.801.977	-5,93%
PPN KARANGANTU	29.697.048	31.723.840	2.026.792	6,82%
PPN KEJAWANAN	57.986.178	57.572.062	- 414.116	-0,71%
PPN KWANDANG	16.566.858	18.806.348	2.239.490	13,52%
PPN PEKALONGAN	47.949.228	59.040.042	11.090.814	23,13%
PPN PELABUHAN RATU	78.893.578	73.432.807	- 5.460.771	-6,92%
PPN PEMANGKAT	41.853.658	40.425.126	- 1.428.532	-3,41%
PPN PENGAMBENGAN	39.343.718	39.116.638	- 227.080	-0,58%
PPN PRIGI	59.681.948	55.999.432	- 3.682.516	-6,17%
PPN SIBOLGA	45.108.252	46.161.917	1.053.665	2,34%
PPN SUNGAILIAT	26.907.980	25.054.044	- 1.853.936	-6,89%
PPN TANJUNG PANDAN	32.474.674	35.784.758	3.310.084	10,19%
PPN TELUK BATANG	17.657.772	18.408.549	750.777	4,25%
PPN TERNATE	36.511.752	37.194.187	682.435	1,87%
PPN TUAL	29.788.180	32.960.182	3.172.002	10,65%
PPS BELAWAN	60.835.482	55.204.628	- 5.630.854	-9,26%
PPS BITUNG	47.164.510	39.835.728	- 7.328.782	-15,54%
PPS BUNGUS	51.519.868	46.903.030	- 4.616.838	-8,96%
PPS CILACAP	80.408.706	79.025.865	- 1.382.841	-1,72%
PPS KENDARI	94.760.738	90.379.172	- 4.381.566	-4,62%
PPS NIZAM ZAHMAN	63.532.514	65.644.832	2.112.318	3,32%
SEKRETARIAT DJPT	366.905.040	366.237.182	- 667.858	-0,18%
Beban Tunj. Beras PNS	3.641.639.700	3.587.578.170	- 54.061.530	-1,48%
BBPPI	205.021.020	202.269.060	- 2.751.960	-1,34%
PPN AMBON	132.021.660	121.013.820	- 11.007.840	-8,34%
PPN BRONDONG	149.040.360	147.591.960	- 1.448.400	-0,97%
PPN KARANGANTU	68.799.000	73.578.720	4.779.720	6,95%
PPN KEJAWANAN	141.581.100	142.739.820	1.158.720	0,82%
PPN KWANDANG	47.652.360	54.170.160	6.517.800	13,68%

PPN PEKALONGAN	123.331.260	150.199.080	26.867.820	21,79%
PPN PELABUHAN RATU	155.630.580	151.140.540	- 4.490.040	-2,89%
PPN PEMANGKAT	95.449.560	92.407.920	- 3.041.640	-3,19%
PPN PENGAMBENGAN	99.287.820	101.460.420	2.172.600	2,19%
PPN PRIGI	149.619.720	139.770.600	- 9.849.120	-6,58%
PPN SIBOLGA	113.626.980	112.323.420	- 1.303.560	-1,15%
PPN SUNGAILIAT	71.333.700	65.250.420	- 6.083.280	-8,53%
PPN TANJUNG PANDAN	78.792.960	88.642.080	9.849.120	12,50%
PPN TELUK BATANG	42.148.440	41.786.340	- 362.100	-0,86%
PPN TERNATE	91.538.880	90.959.520	- 579.360	-0,63%
PPN TUAL	75.027.120	77.923.920	2.896.800	3,86%
PPS BELAWAN	144.984.840	135.135.720	- 9.849.120	-6,79%
PPS BITUNG	111.888.900	95.847.870	- 16.041.030	-14,34%
PPS BUNGUS	120.289.620	104.791.740	- 15.497.880	-12,88%
PPS CILACAP	178.732.560	177.935.940	- 796.620	-0,45%
PPS KENDARI	200.748.240	197.996.280	- 2.751.960	-1,37%
PPS NIZAM ZAHMAN	149.836.980	153.457.980	3.621.000	2,42%
SEKRETARIAT DJPT	895.256.040	869.184.840	- 26.071.200	-2,91%
Beban Tunj. Fungsional PNS	6.493.997.000	6.627.369.800	133.372.800	2,05%
BBPPI	613.790.000	633.957.000	20.167.000	3,29%
PPN AMBON	106.730.000	113.970.000	7.240.000	6,78%
PPN BRONDONG	232.798.000	267.540.000	34.742.000	14,92%
PPN KARANGANTU	120.500.000	124.920.000	4.420.000	3,67%
PPN KEJAWANAN	176.038.000	183.850.000	7.812.000	4,44%
PPN KWANDANG	95.730.000	89.380.000	- 6.350.000	-6,63%
PPN PEKALONGAN	174.044.000	196.874.000	22.830.000	13,12%
PPN PELABUHAN RATU	177.120.000	168.220.000	- 8.900.000	-5,02%
PPN PEMANGKAT	99.976.000	82.060.000	- 17.916.000	-17,92%
PPN PENGAMBENGAN	244.270.000	250.800.000	6.530.000	2,67%
PPN PRIGI	253.222.000	250.674.000	- 2.548.000	-1,01%
PPN SIBOLGA	148.626.000	152.769.100	4.143.100	2,79%
PPN SUNGAILIAT	154.760.000	143.120.000	- 11.640.000	-7,52%
PPN TANJUNG PANDAN	90.980.000	117.860.000	26.880.000	29,54%
PPN TELUK BATANG	41.280.000	38.180.000	- 3.100.000	-7,51%
PPN TERNATE	130.342.000	133.050.000	2.708.000	2,08%
PPN TUAL	147.804.000	140.564.000	- 7.240.000	-4,90%
PPS BELAWAN	191.300.000	205.860.000	14.560.000	7,61%
PPS BITUNG	172.699.000	175.244.000	2.545.000	1,47%

PPS BUNGUS	183.640.000	151.050.000	- 32.590.000	-17,75%
PPS CILACAP	303.800.000	313.420.000	9.620.000	3,17%
PPS KENDARI	262.380.000	248.750.000	- 13.630.000	-5,19%
PPS NIZAM ZAHMAN	200.679.000	246.944.000	46.265.000	23,05%
SEKRETARIAT DJPT	2.171.489.000	2.198.313.700	26.824.700	1,24%
Beban Tunj. PPh PNS	623.704.833	682.676.779	58.971.946	9,46%
BBPPI	40.878.841	42.651.596	1.772.755	4,34%
PPN AMBON	11.986.029	12.237.028	250.999	2,09%
PPN BRONDONG	21.163.704	20.616.504	- 547.200	-2,59%
PPN KARANGANTU	9.480.410	9.009.136	- 471.274	-4,97%
PPN KEJAWANAN	16.069.896	16.637.418	567.522	3,53%
PPN KWANDANG	4.030.977	4.482.266	451.289	11,20%
PPN PEKALONGAN	15.052.146	19.574.599	4.522.453	30,05%
PPN PELABUHAN RATU	21.245.830	22.769.817	1.523.987	7,17%
PPN PEMANGKAT	10.721.686	10.202.975	- 518.711	-4,84%
PPN PENGAMBENGAN	12.829.913	14.611.217	1.781.304	13,88%
PPN PRIGI	21.642.084	21.884.454	242.370	1,12%
PPN SIBOLGA	15.105.822	16.083.220	977.398	6,47%
PPN SUNGAILIAT	12.264.478	10.767.597	- 1.496.881	-12,21%
PPN TANJUNG PANDAN	9.189.577	11.442.875	2.253.298	24,52%
PPN TELUK BATANG	14.228.882	53.379.831	39.150.949	275,15%
PPN TERNATE	15.103.226	13.920.517	- 1.182.709	-7,83%
PPN TUAL	10.954.184	12.776.535	1.822.351	16,64%
PPS BELAWAN	23.632.435	23.784.112	151.677	0,64%
PPS BITUNG	14.091.848	14.181.960	90.112	0,64%
PPS BUNGUS	21.239.150	20.149.333	- 1.089.817	-5,13%
PPS CILACAP	31.542.800	30.664.421	- 878.379	-2,78%
PPS KENDARI	34.938.899	34.985.246	46.347	0,13%
PPS NIZAM ZAHMAN	25.458.741	31.942.787	6.484.046	25,47%
SEKRETARIAT DJPT	210.853.275	213.921.335	3.068.060	1,46%
Beban Tunj. Struktural PNS	881.329.480	858.720.000	- 22.609.480	-2,57%
BBPPI	33.885.000	7.560.000	- 26.325.000	-77,69%
PPN AMBON	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN BRONDONG	25.200.000	27.720.000	2.520.000	10,00%
PPN KARANGANTU	20.580.000	20.580.000	-	0,00%
PPN KEJAWANAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN KWANDANG	20.580.000	20.580.000	-	0,00%
PPN PEKALONGAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PELABUHAN RATU	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PEMANGKAT	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PENGAMBENGAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN PRIGI	25.200.000	23.940.000	- 1.260.000	-5,00%

PPN SIBOLGA	25.200.000	22.060.000	- 3.140.000	-12,46%
PPN SUNGAILIAT	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN TANJUNG PANDAN	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN TELUK BATANG	12.600.000	12.600.000	-	0,00%
PPN TERNATE	25.200.000	25.200.000	-	0,00%
PPN TUAL	25.200.000	16.380.000	- 8.820.000	-35,00%
PPS BELAWAN	35.910.000	35.910.000	-	0,00%
PPS BITUNG	35.910.000	33.120.000	- 2.790.000	-7,77%
PPS BUNGUS	34.290.000	30.510.000	- 3.780.000	-11,02%
PPS CILACAP	35.910.000	35.910.000	-	0,00%
PPS KENDARI	38.610.000	35.910.000	- 2.700.000	-6,99%
PPS NIZAM ZAHMAN	35.910.000	35.145.000	- 765.000	-2,13%
SEKRETARIAT DJPT	249.544.480	273.995.000	24.450.520	9,80%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	5.005.311.170	4.970.307.325	- 35.003.845	-0,70%
BBPPI	260.759.730	262.671.010	1.911.280	0,73%
PPN AMBON	159.841.910	147.951.510	- 11.890.400	-7,44%
PPN BRONDONG	211.106.830	207.278.422	- 3.828.408	-1,81%
PPN KARANGANTU	86.617.170	93.904.922	7.287.752	8,41%
PPN KEJAWANAN	192.499.820	193.593.082	1.093.262	0,57%
PPN KWANDANG	63.348.330	70.419.604	7.071.274	11,16%
PPN PEKALONGAN	175.189.810	212.433.500	37.243.690	21,26%
PPN PELABUHAN RATU	205.734.800	216.660.642	10.925.842	5,31%
PPN PEMANGKAT	125.734.270	120.875.930	- 4.858.340	-3,86%
PPN PENGAMBENGAN	132.655.530	140.035.910	7.380.380	5,56%
PPN PRIGI	218.250.380	208.903.480	- 9.346.900	-4,28%
PPN SIBOLGA	150.949.740	145.670.642	- 5.279.098	-3,50%
PPN SUNGAILIAT	90.803.480	84.149.780	- 6.653.700	-7,33%
PPN TANJUNG PANDAN	106.036.850	121.834.194	15.797.344	14,90%
PPN TELUK BATANG	54.222.660	53.664.232	- 558.428	-1,03%
PPN TERNATE	119.373.430	118.974.654	- 398.776	-0,33%
PPN TUAL	91.693.950	94.142.070	2.448.120	2,67%
PPS BELAWAN	187.659.300	183.379.484	- 4.279.816	-2,28%
PPS BITUNG	134.881.260	120.091.545	- 14.789.715	-10,96%
PPS BUNGUS	173.296.970	150.475.290	- 22.821.680	-13,17%
PPS CILACAP	258.755.130	253.884.584	- 4.870.546	-1,88%
PPS KENDARI	294.693.800	288.126.818	- 6.566.982	-2,23%
PPS NIZAM ZAHMAN	218.562.990	219.172.630	609.640	0,28%
SEKRETARIAT DJPT	1.292.643.030	1.262.013.390	- 30.629.640	-2,37%

Beban Tunjangan Anak PPPK	354.186.132	453.405.102	99.218.970	28,01%
BBPPI	5.829.680	8.675.448	2.845.768	48,82%
PPN AMBON	13.857.980	15.385.298	1.527.318	11,02%
PPN BRONDONG	14.492.156	17.502.214	3.010.058	20,77%
PPN KARANGANTU	10.878.872	17.296.116	6.417.244	58,99%
PPN KEJAWANAN	14.347.154	17.324.968	2.977.814	20,76%
PPN KWANDANG	7.382.490	10.247.504	2.865.014	38,81%
PPN PEKALONGAN	21.677.774	23.435.246	1.757.472	8,11%
PPN PELABUHAN RATU	5.693.656	8.838.112	3.144.456	55,23%
PPN PEMANGKAT	16.641.768	20.425.272	3.783.504	22,73%
PPN PENGAMBENGAN	17.159.150	21.250.006	4.090.856	23,84%
PPN PRIGI	12.570.712	14.259.112	1.688.400	13,43%
PPN SIBOLGA	14.336.784	18.827.920	4.491.136	31,33%
PPN SUNGAILIAT	10.609.876	16.807.532	6.197.656	58,41%
PPN TANJUNG PANDAN	10.496.508	13.909.252	3.412.744	32,51%
PPN TELUK BATANG	10.881.064	13.143.256	2.262.192	20,79%
PPN TERNATE	13.323.676	15.833.076	2.509.400	18,83%
PPN TUAL	7.956.770	8.080.524	123.754	1,56%
PPS BELAWAN	15.467.442	18.957.644	3.490.202	22,56%
PPS BITUNG	10.584.212	14.977.788	4.393.576	41,51%
PPS BUNGUS	12.434.882	14.343.636	1.908.754	15,35%
PPS CILACAP	21.269.254	25.904.018	4.634.764	21,79%
PPS KENDARI	7.367.408	12.517.158	5.149.750	69,90%
PPS NIZAM ZAHMAN	34.146.358	43.631.346	9.484.988	27,78%
SEKRETARIAT DJPT	44.780.506	61.832.656	17.052.150	38,08%
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.178.997.600	1.469.474.220	290.476.620	24,64%
BBPPI	16.366.920	25.926.360	9.559.440	58,41%
PPN AMBON	44.610.720	52.214.820	7.604.100	17,05%
PPN BRONDONG	49.535.280	60.615.540	11.080.260	22,37%
PPN KARANGANTU	38.672.280	58.008.420	19.336.140	50,00%
PPN KEJAWANAN	49.897.380	58.080.840	8.183.460	16,40%
PPN KWANDANG	33.168.360	41.496.660	8.328.300	25,11%
PPN PEKALONGAN	61.629.420	67.205.760	5.576.340	9,05%
PPN PELABUHAN RATU	20.712.120	29.619.780	8.907.660	43,01%
PPN PEMANGKAT	52.866.600	63.005.400	10.138.800	19,18%
PPN PENGAMBENGAN	52.504.500	65.684.940	13.180.440	25,10%
PPN PRIGI	41.279.400	46.783.320	5.503.920	13,33%
PPN SIBOLGA	49.462.860	60.977.640	11.514.780	23,28%
PPN SUNGAILIAT	43.307.160	60.253.440	16.946.280	39,13%
PPN TANJUNG PANDAN	40.337.940	49.607.700	9.269.760	22,98%
PPN TELUK BATANG	37.948.080	43.596.840	5.648.760	14,89%
PPN TERNATE	44.755.560	52.721.760	7.966.200	17,80%
PPN TUAL	31.937.220	34.182.240	2.245.020	7,03%
PPS BELAWAN	55.690.980	66.771.240	11.080.260	19,90%
PPS BITUNG	38.744.700	49.824.960	11.080.260	28,60%

PPS BUNGUS	44.972.820	50.259.480	5.286.660	11,76%
PPS CILACAP	64.671.060	78.068.760	13.397.700	20,72%
PPS KENDARI	29.764.620	44.755.560	14.990.940	50,36%
PPS NIZAM ZAHMAN	99.287.820	126.807.420	27.519.600	27,72%
SEKRETARIAT DJPT	136.873.800	183.005.340	46.131.540	33,70%
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.661.493.000	2.744.433.800	82.940.800	3,12%
BBPPI	36.740.000	41.600.000	4.860.000	13,23%
PPN AMBON	108.800.000	125.900.000	17.100.000	15,72%
PPN BRONDONG	111.200.000	115.520.000	4.320.000	3,88%
PPN KARANGANTU	98.720.000	104.881.800	6.161.800	6,24%
PPN KEJAWANAN	113.000.000	116.540.000	3.540.000	3,13%
PPN KWANDANG	82.040.000	77.720.000	-4.320.000	-5,27%
PPN PEKALONGAN	110.480.000	108.980.000	-1.500.000	-1,36%
PPN PELABUHAN RATU	61.844.000	65.408.000	3.564.000	5,76%
PPN PEMANGKAT	90.560.000	91.760.000	1.200.000	1,33%
PPN PENGAMBENGAN	96.130.000	101.170.000	5.040.000	5,24%
PPN PRIGI	84.440.000	87.860.000	3.420.000	4,05%
PPN SIBOLGA	107.960.000	113.000.000	5.040.000	4,67%
PPN SUNGAILIAT	102.080.000	105.880.000	3.800.000	3,72%
PPN TANJUNG PANDAN	126.360.000	124.560.000	-1.800.000	-1,42%
PPN TELUK BATANG	74.360.000	77.780.000	3.420.000	4,60%
PPN TERNATE	91.160.000	92.780.000	1.620.000	1,78%
PPN TUAL	79.980.000	75.600.000	-4.380.000	-5,48%
PPS BELAWAN	113.400.000	118.440.000	5.040.000	4,44%
PPS BITUNG	101.675.000	108.380.000	6.705.000	6,59%
PPS BUNGUS	99.330.000	104.370.000	5.040.000	5,07%
PPS CILACAP	130.410.000	132.440.000	2.030.000	1,56%
PPS KENDARI	88.760.000	86.420.000	-2.340.000	-2,64%
PPS NIZAM ZAHMAN	186.384.000	195.464.000	9.080.000	4,87%
SEKRETARIAT DJPT	365.680.000	371.980.000	6.300.000	1,72%
Beban Tunjangan Struktural PPPK		16.500.000	16.500.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT		16.500.000	16.500.000	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.175.894.390	1.481.374.720	305.480.330	25,98%
BBPPI	16.816.720	26.585.210	9.768.490	58,09%
PPN AMBON	40.675.200	48.250.090	7.574.890	18,62%
PPN BRONDONG	44.775.460	63.464.270	18.688.810	41,74%
PPN KARANGANTU	37.355.300	55.785.500	18.430.200	49,34%
PPN KEJAWANAN	51.005.120	63.051.040	12.045.920	23,62%
PPN KWANDANG	40.463.310	49.385.790	8.922.480	22,05%
PPN PEKALONGAN	61.069.330	74.280.560	13.211.230	21,63%
PPN PELABUHAN RATU	17.117.380	25.694.600	8.577.220	50,11%
PPN PEMANGKAT	51.637.060	61.269.730	9.632.670	18,65%
PPN PENGAMBENGAN	45.778.060	59.906.540	14.128.480	30,86%

PPN PRIGI	35.219.200	40.099.470	4.880.270	13,86%
PPN SIBOLGA	48.813.640	59.278.110	10.464.470	21,44%
PPN SUNGAILIAT	48.564.340	65.209.060	16.644.720	34,27%
PPN TANJUNG PANDAN	33.945.150	41.997.320	8.052.170	23,72%
PPN TELUK BATANG	38.885.760	43.301.590	4.415.830	11,36%
PPN TERNATE	46.948.340	51.245.970	4.297.630	9,15%
PPN TUAL	30.558.990	32.541.070	1.982.080	6,49%
PPS BELAWAN	57.267.160	71.463.280	14.196.120	24,79%
PPS BITUNG	35.485.000	43.946.820	8.461.820	23,85%
PPS BUNGUS	49.509.620	57.914.900	8.405.280	16,98%
PPS CILACAP	68.812.340	80.204.760	11.392.420	16,56%
PPS KENDARI	32.655.480	49.729.510	17.074.030	52,29%
PPS NIZAM ZAHMAN	96.431.260	121.730.380	25.299.120	26,24%
SEKRETARIAT DJPT	146.105.170	195.039.150	48.933.980	33,49%
Beban Tunjangan Umum PNS	1.397.649.950	1.350.089.650	47.560.300	-3,40%
BBPPI	35.865.000	32.635.000	3.230.000	-9,01%
PPN AMBON	65.390.000	58.590.000	6.800.000	-10,40%
PPN BRONDONG	40.995.000	36.910.000	4.085.000	-9,96%
PPN KARANGANTU	17.685.000	19.539.900	1.854.900	10,49%
PPN KEJAWANAN	60.165.000	59.450.000	715.000	-1,19%
PPN KWANDANG	6.260.000	15.100.000	8.840.000	141,21%
PPN PEKALONGAN	52.705.000	68.530.000	15.825.000	30,03%
PPN PELABUHAN RATU	74.835.000	74.860.000	25.000	0,03%
PPN PEMANGKAT	33.940.000	39.400.000	5.460.000	16,09%
PPN PENGAMBENGAN	17.575.000	23.125.000	5.550.000	31,58%
PPN PRIGI	57.585.000	50.415.000	7.170.000	-12,45%
PPN SIBOLGA	44.975.000	45.610.000	635.000	1,41%
PPN SUNGAILIAT	13.415.000	10.119.950	3.295.050	-24,56%
PPN TANJUNG PANDAN	30.870.000	33.134.900	2.264.900	7,34%
PPN TELUK BATANG	13.065.000	14.175.000	1.110.000	8,50%
PPN TERNATE	42.230.000	40.850.000	1.380.000	-3,27%
PPN TUAL	26.250.000	32.755.000	6.505.000	24,78%
PPS BELAWAN	80.425.000	69.270.000	11.155.000	-13,87%
PPS BITUNG	33.330.000	29.390.000	3.940.000	-11,82%
PPS BUNGUS	58.950.000	50.135.000	8.815.000	-14,95%
PPS CILACAP	69.840.000	69.205.000	635.000	-0,91%
PPS KENDARI	94.205.000	100.455.000	6.250.000	6,63%
PPS NIZAM ZAHMAN	68.610.000	78.274.900	9.664.900	14,09%
SEKRETARIAT DJPT	358.484.950	298.160.000	60.324.950	-16,83%
Beban Tunjangan Umum PPPK		154.530.000	154.530.000	#DIV/0!
BBPPI		6.540.000	6.540.000	#DIV/0!

PPN BRONDONG		4.875.000	4.875.000	#DIV/0!
PPN KARANGANTU		12.495.000	12.495.000	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN		3.240.000	3.240.000	#DIV/0!
PPN KWANDANG		7.095.000	7.095.000	#DIV/0!
PPN PEKALONGAN		2.685.000	2.685.000	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU		3.780.000	3.780.000	#DIV/0!
PPN PEMANGKAT		5.970.000	5.970.000	#DIV/0!
PPN PENGAMBENGAN		8.655.000	8.655.000	#DIV/0!
PPN PRIGI		3.750.000	3.750.000	#DIV/0!
PPN SIBOLGA		5.925.000	5.925.000	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT		9.765.000	9.765.000	#DIV/0!
PPN TANJUNG PANDAN		6.480.000	6.480.000	#DIV/0!
PPN TELUK BATANG		3.240.000	3.240.000	#DIV/0!
PPN TERNATE		7.080.000	7.080.000	#DIV/0!
PPS BELAWAN		5.955.000	5.955.000	#DIV/0!
PPS BITUNG		5.400.000	5.400.000	#DIV/0!
PPS CILACAP		9.060.000	9.060.000	#DIV/0!
PPS KENDARI		9.735.000	9.735.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT		32.805.000	32.805.000	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	969.623.000	954.157.850	-	-1,59%
BBPPI	75.130.000	28.815.000	-	-61,65%
PPN AMBON	25.320.000		-	-100,00%
PPN BRONDONG	30.741.000	96.698.000	65.957.000	214,56%
PPN KARANGANTU	37.223.000	30.234.000	-	-18,78%
PPN KEJAWANAN	49.653.000	4.981.000	-	-89,97%
PPN KWANDANG	28.980.000	23.864.000	-	-17,65%
PPN PEKALONGAN	75.302.000	88.407.000	13.105.000	17,40%
PPN PELABUHAN RATU	7.481.000	3.575.000	-	-52,21%
PPN PEMANGKAT	51.957.000	15.186.000	-	-70,77%
PPN PENGAMBENGAN	15.114.000		-	-100,00%
PPN PRIGI	23.789.000	11.324.000	-	-52,40%
PPN SIBOLGA	27.504.000	37.013.000	9.509.000	34,57%
PPN SUNGAILIAT	8.727.000	1.128.000	-	-87,07%
PPN TANJUNG PANDAN	35.210.000	2.065.000	-	-94,14%
PPN TELUK BATANG	13.494.000	6.177.000	-	-54,22%
PPN TERNATE	60.098.000	62.111.000	2.013.000	3,35%
PPS BELAWAN	51.318.000	79.666.000	28.348.000	55,24%
PPS BITUNG	66.227.000	51.436.000	-	-22,33%
PPS BUNGUS		38.227.000	38.227.000	#DIV/0!
PPS CILACAP	12.503.000	18.978.000	6.475.000	51,79%
PPS KENDARI	149.967.000	158.870.000	8.903.000	5,94%

PPS NIZAM ZAHMAN	123.885.000	195.402.850	71.517.850	57,73%
Beban Uang Lembur PPPK	593.284.000	693.694.000	100.410.000	16,92%
BBPPI	9.257.000	7.256.000	- 2.001.000	-21,62%
PPN AMBON	47.814.000		- 47.814.000	-100,00%
PPN BRONDONG	27.129.000	99.971.000	72.842.000	268,50%
PPN KARANGANTU	21.978.000	31.783.000	9.805.000	44,61%
PPN KEJAWANAN	11.602.000	4.975.000	- 6.627.000	-57,12%
PPN KWANDANG	41.845.000	41.464.000	- 381.000	-0,91%
PPN PEKALONGAN	22.237.000	31.182.000	8.945.000	40,23%
PPN PELABUHAN RATU	3.065.000		- 3.065.000	-100,00%
PPN PEMANGKAT	36.830.000	12.960.000	- 23.870.000	-64,81%
PPN PENGAMBENGAN	10.499.000		- 10.499.000	-100,00%
PPN PRIGI	9.237.000	6.747.000	- 2.490.000	-26,96%
PPN SIBOLGA		19.060.000	19.060.000	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT	9.573.000	1.362.000	- 8.211.000	-85,77%
PPN TANJUNG PANDAN	29.996.000	7.174.000	- 22.822.000	-76,08%
PPN TELUK BATANG	11.940.000	8.293.000	- 3.647.000	-30,54%
PPN TERNATE	37.524.000	40.393.000	2.869.000	7,65%
PPS BELAWAN	30.414.000	79.406.000	48.992.000	161,08%
PPS BITUNG	52.815.000	26.317.000	- 26.498.000	-50,17%
PPS BUNGUS		25.329.000	25.329.000	#DIV/0!
PPS KENDARI	38.843.000	50.077.000	11.234.000	28,92%
PPS NIZAM ZAHMAN	140.686.000	199.945.000	59.259.000	42,12%
Beban Uang Makan PNS	7.659.812.706	9.096.168.117	1.436.355.411	18,75%
BBPPI	398.124.100	491.088.900	92.964.800	23,35%
PPN AMBON	293.506.000	320.818.000	27.312.000	9,31%
PPN BRONDONG	326.292.400	366.950.000	40.657.600	12,46%
PPN KARANGANTU	149.162.000	180.393.000	31.231.000	20,94%
PPN KEJAWANAN	320.715.000	365.101.150	44.386.150	13,84%
PPN KWANDANG	97.718.256	134.769.000	37.050.744	37,92%
PPN PEKALONGAN	263.175.000	414.775.000	151.600.000	57,60%
PPN PELABUHAN RATU	377.465.000	373.333.000	- 4.132.000	-1,09%
PPN PEMANGKAT	196.609.000	227.579.000	30.970.000	15,75%
PPN PENGAMBENGAN	241.787.000	279.058.000	37.271.000	15,41%
PPN PRIGI	370.663.000	394.794.000	24.131.000	6,51%
PPN SIBOLGA	303.773.000	309.926.000	6.153.000	2,03%
PPN SUNGAILIAT	188.325.000	186.486.000	- 1.839.000	-0,98%
PPN TANJUNG PANDAN	172.791.850	224.040.000	51.248.150	29,66%
PPN TELUK BATANG	92.505.000	103.998.000	11.493.000	12,42%
PPN TERNATE	226.304.000	245.133.000	18.829.000	8,32%
PPN TUAL	177.769.050	215.848.000	38.078.950	21,42%

PPS BELAWAN	353.941.850	373.219.517	19.277.667	5,45%
PPS BITUNG	210.722.000	262.668.000	51.946.000	24,65%
PPS BUNGUS	289.782.000	261.537.000	-	-9,75%
PPS CILACAP	438.886.000	468.883.000	29.997.000	6,83%
PPS KENDARI	429.325.500	512.063.050	82.737.550	19,27%
PPS NIZAM ZAHMAN	335.099.000	407.507.950	72.408.950	21,61%
SEKRETARIAT DJPT	1.405.371.700	1.976.199.550	570.827.850	40,62%
Beban Uang Makan PPPK	3.086.599.750	4.207.395.900	1.120.796.150	36,31%
BBPPI	36.298.000	74.885.450	38.587.450	106,31%
PPN AMBON	122.611.000	184.227.000	61.616.000	50,25%
PPN BRONDONG	109.745.100	178.625.000	68.879.900	62,76%
PPN KARANGANTU	118.869.000	180.684.000	61.815.000	52,00%
PPN KEJAWANAN	142.003.000	168.631.000	26.628.000	18,75%
PPN KWANDANG	87.656.250	132.382.000	44.725.750	51,02%
PPN PEKALONGAN	109.941.000	161.583.000	51.642.000	46,97%
PPN PELABUHAN RATU	79.231.000	85.005.000	5.774.000	7,29%
PPN PEMANGKAT	134.978.000	166.328.000	31.350.000	23,23%
PPN PENGAMBENGAN	132.842.000	173.989.000	41.147.000	30,97%
PPN PRIGI	119.705.000	143.129.000	23.424.000	19,57%
PPN SIBOLGA	150.265.000	183.259.000	32.994.000	21,96%
PPN SUNGAILIAT	143.810.000	192.820.000	49.010.000	34,08%
PPN TANJUNG PANDAN	125.981.200	175.409.000	49.427.800	39,23%
PPN TELUK BATANG	103.417.000	122.987.000	19.570.000	18,92%
PPN TERNATE	111.907.000	157.868.000	45.961.000	41,07%
PPN TUAL	93.836.300	117.337.000	23.500.700	25,04%
PPS BELAWAN	158.926.150	198.341.000	39.414.850	24,80%
PPS BITUNG	123.177.000	166.565.000	43.388.000	35,22%
PPS BUNGUS	123.809.000	151.562.000	27.753.000	22,42%
PPS CILACAP	172.041.000	215.022.000	42.981.000	24,98%
PPS KENDARI	103.403.950	140.617.650	37.213.700	35,99%
PPS NIZAM ZAHMAN	243.920.000	350.695.850	106.775.850	43,77%
SEKRETARIAT DJPT	238.226.800	385.443.950	147.217.150	61,80%
Grand Total	230.018.070.782	241.901.369.598	11.883.298.816	5,17%

Apabila jika dibandingkan dengan TA 2025 terdapat kenaikan Beban pegawai sebanyak 5,17 persen yang disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan penerimaan PPPK baru.

Beban Persediaan
Rp1.973.570.682

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp8.219.548.806 dan

Rp1.973.570.682 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Persediaan bahan baku	109.303.445	85.891.200	- 23.412.245	-21,42%
BBPPI	2.241.645		- 2.241.645	-100,00%
PPN KARANGANTU	87.032.000	85.891.200	- 1.140.800	-1,31%
PPN PELABUHAN RATU	18.764.550		- 18.764.550	-100,00%
PPN TELUK BATANG	300.000		- 300.000	-100,00%
PPS KENDARI	965.250		- 965.250	-100,00%
Beban Persediaan konsumsi	7.678.845.361	1.887.679.482	- 5.791.165.879	-75,42%
BBPPI	192.088.642	23.918.657	- 168.169.985	-87,55%
PPN AMBON	68.856.635	53.505.040	- 15.351.595	-22,30%
PPN BRONDONG	98.457.500	172.043.000	73.585.500	74,74%
PPN KARANGANTU	185.304.007	114.460.500	- 70.843.507	-38,23%
PPN KEJAWANAN	96.807.194	31.873.665	- 64.933.529	-67,08%
PPN KWANDANG	1.030.000	8.758.800	7.728.800	750,37%
PPN PEKALONGAN	121.757.250	110.229.600	- 11.527.650	-9,47%
PPN PELABUHAN RATU	134.444.569	36.705.760	- 97.738.809	-72,70%
PPN PEMANGKAT	85.247.200	24.594.500	- 60.652.700	-71,15%
PPN PENGAMBENGAN	103.362.780	35.882.100	- 67.480.680	-65,29%
PPN PRIGI	135.708.441	28.224.020	- 107.484.421	-79,20%
PPN SIBOLGA	113.212.405	31.933.250	- 81.279.155	-71,79%
PPN SUNGAILIAT	126.108.733	30.117.291	- 95.991.442	-76,12%
PPN TANJUNG PANDAN	42.184.730	48.743.600	6.558.870	15,55%
PPN TELUK BATANG	88.008.241	44.554.101	- 43.454.140	-49,38%
PPN TERNATE	167.710.193	57.014.416	- 110.695.777	-66,00%
PPN TUAL	27.246.000	34.205.000	6.959.000	25,54%
PPS BELAWAN	266.018.635	113.753.920	- 152.264.715	-57,24%
PPS BITUNG	238.763.945	165.370.566	- 73.393.379	-30,74%
PPS BUNGUS	288.956.255	60.170.645	- 228.785.610	-79,18%
PPS CILACAP	269.782.211	120.210.080	- 149.572.131	-55,44%
PPS KENDARI	300.161.375	133.810.205	- 166.351.170	-55,42%
PPS NIZAM ZAHMAN	499.766.269	204.242.788	- 295.523.481	-59,13%
PROV. SULAWESI TENGAH TP	1.000.000		- 1.000.000	-100,00%
SEKRETARIAT DJPT	4.026.862.151	203.357.978	- 3.823.504.173	-94,95%
Beban persediaan lainnya	431.400.000		- 431.400.000	-100,00%
SEKRETARIAT DJPT	431.400.000		- 431.400.000	-100,00%
Grand Total	8.219.548.806	1.973.570.682	- 6.245.978.124	-75,99%

1. Beban Persediaan Konsumsi merupakan penggunaan persediaan untuk pendukung kegiatan perkantoran. Terdapat penurunan penggunaan persediaan konsumsi yang disebabkan oleh menurunnya Beban persediaan pada TA 2025;
2. Beban Persediaan Bahan Baku merupakan penggunaan persediaan untuk bahan baku es dan bahan kimia untuk uji mutu ikan ;
3. Beban Persediaan Lainnya, tidak terdapat persediaan tersebut pada TA 2025.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp254.016.198.118*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp294.028.620.691 dan Rp254.016.198.118.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi Beban modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, telepon/internet, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat.

Beban Barang & Jasa

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bahan	32.914.055.272	15.038.393.578	- 17.875.661.694	-54,31%
BBPPI	301.207.232	103.385.243	- 197.821.989	-65,68%
KALTIMTP	62.567.800		- 62.567.800	100,00 %
PAPUA BARAT TP	83.189.000		- 83.189.000	100,00 %
PPN AMBON	306.631.746	49.244.768	- 257.386.978	-83,94%
PPN BRONDONG	376.047.300	71.254.000	- 304.793.300	-81,05%
PPN KARANGANTU	243.543.200	94.660.000	- 148.883.200	-61,13%
PPN KEJAWANAN	669.840.788	508.750.466	- 161.090.322	-24,05%
PPN KWANDANG	360.938.597	157.678.283	- 203.260.314	-56,31%
PPN PEKALONGAN	467.149.574	112.175.137	- 354.974.437	-75,99%
PPN PELABUHAN RATU	332.849.700	152.703.000	- 180.146.700	-54,12%
PPN PEMANGKAT	199.329.500	64.085.200	- 135.244.300	-67,85%

PPN PENGAMBENGAN	269.301.524	136.822.500	-	132.479.024	-49,19%
PPN PRIGI	299.752.917	94.201.988	-	205.550.929	-68,57%
PPN SIBOLGA	432.955.119	197.474.221	-	235.480.898	-54,39%
PPN SUNGAILIAT	180.506.705	51.326.130	-	129.180.575	-71,57%
PPN TANJUNG PANDAN	214.116.385	114.097.686	-	100.018.699	-46,71%
PPN TELUK BATANG	124.032.550	34.150.200	-	89.882.350	-72,47%
PPN TERNATE	257.397.616	75.554.600	-	181.843.016	-70,65%
PPN TUAL	48.028.900	48.363.000		334.100	0,70%
PPS BELAWAN	321.062.222	88.964.210	-	232.098.012	-72,29%
PPS BITUNG	499.567.000	257.611.815	-	241.955.185	-48,43%
PPS BUNGUS	315.225.930	100.031.300	-	215.194.630	-68,27%
PPS CILACAP	419.575.975	197.155.800	-	222.420.175	-53,01%
PPS KENDARI	376.297.990	149.663.900	-	226.634.090	-60,23%
PPS NIZAM ZAHMAN	841.559.219	265.242.758	-	576.316.461	-68,48%
PROV. BALI TP	31.221.200		-	31.221.200	100,00 %
PROV. BANTEN TP	46.793.000		-	46.793.000	100,00 %
PROV. BENGKULU TP	39.332.000		-	39.332.000	100,00 %
PROV. D.I. ACEH TP	44.259.000		-	44.259.000	100,00 %
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP	35.312.900		-	35.312.900	100,00 %
PROV. DKI TP	39.314.622		-	39.314.622	100,00 %
PROV. GORONTALO TP	43.406.800		-	43.406.800	100,00 %
PROV. JAMBI TP	39.228.000		-	39.228.000	100,00 %
PROV. JAWA BARAT TP	57.831.500		-	57.831.500	100,00 %
PROV. JAWA TENGAH TP	60.969.000		-	60.969.000	100,00 %
PROV. JAWA TIMUR TP	18.516.178		-	18.516.178	100,00 %
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	38.110.000		-	38.110.000	100,00 %
PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	10.779.000		-	10.779.000	100,00 %
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	48.595.500		-	48.595.500	100,00 %
PROV. LAMPUNG TP	80.321.000		-	80.321.000	100,00 %
PROV. MALUKU TP	53.340.000		-	53.340.000	100,00 %

PROV. MALUKU UTARA TP	81.438.000		-	81.438.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	23.987.000		-	23.987.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	118.064.000		-	118.064.000	- 100,00 %
PROV. PAPUA	43.932.000		-	43.932.000	- 100,00 %
PROV. RIAU TP	37.551.000		-	37.551.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI BARAT TP	41.477.000		-	41.477.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI SELATAN TP	93.786.800		-	93.786.800	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGAH TP	12.318.000		-	12.318.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	65.529.000		-	65.529.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI UTARA TP	59.586.000		-	59.586.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA BARAT TP	59.651.000		-	59.651.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA SELATAN TP	52.234.000		-	52.234.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA UTARA TP	28.563.000		-	28.563.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	23.379.338.283	11.913.797.373	-	11.465.540.910	-49,04%
#N/A	126.596.000		-	126.596.000	- 100,00 %
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.139.773.712	1.103.556.415	-	1.036.217.297	-48,43%
PPN AMBON	55.010.000		-	55.010.000	- 100,00 %
PPN BRONDONG	33.453.300		-	33.453.300	- 100,00 %
PPN KARANGANTU	2.280.000		-	2.280.000	- 100,00 %
PPN KEJAWANAN	115.977.258	34.025.202	-	81.952.056	-70,66%
PPN KWANDANG	130.712.256	10.000.000	-	120.712.256	-92,35%
PPN PEKALONGAN	1.975.214		-	1.975.214	- 100,00 %
PPN PELABUHAN RATU	220.014.438	107.104.895	-	112.909.543	-51,32%
PPN PENGAMBENGAN	130.981.900		-	130.981.900	- 100,00 %
PPN PRIGI	7.625.000	11.300.000		3.675.000	48,20%
PPN SIBOLGA	239.803.010	293.915.184		54.112.174	22,57%

PPN SUNGAILIAT	11.000.000	11.317.000	317.000	2,88%
PPN TANJUNG PANDAN	32.541.237	27.085.604	- 5.455.633	-16,77%
PPN TELUK BATANG	62.177.000	58.839.500	- 3.337.500	-5,37%
PPN TERNATE	58.104.000	9.663.600	- 48.440.400	-83,37%
PPN TUAL	6.560.000		- 6.560.000	100,00 %
PPS BITUNG	17.019.500		- 17.019.500	100,00 %
PPS CILACAP	157.440.000	163.952.904	6.512.904	4,14%
PPS KENDARI	301.008.700	108.488.600	- 192.520.100	-63,96%
SEKRETARIAT DJPT	556.090.899	267.863.926	- 288.226.973	-51,83%
Beban Barang Operasional Lainnya	5.083.290.039	3.074.148.611	- 2.009.141.428	-39,52%
BBPPI	124.578.500	122.771.850	- 1.806.650	-1,45%
PPN AMBON	130.728.000	59.214.281	- 71.513.719	-54,70%
PPN BRONDONG	182.259.110	141.285.000	- 40.974.110	-22,48%
PPN KARANGANTU	250.417.034	252.036.000	1.618.966	0,65%
PPN KEJAWANAN	157.474.431	107.360.050	- 50.114.381	-31,82%
PPN KWANDANG	224.459.033	159.524.298	- 64.934.735	-28,93%
PPN PEKALONGAN	173.899.200	77.321.300	- 96.577.900	-55,54%
PPN PELABUHAN RATU	117.140.000	80.550.150	- 36.589.850	-31,24%
PPN PEMANGKAT	112.977.600	69.217.000	- 43.760.600	-38,73%
PPN PENGAMBENGAN	178.202.000		- 178.202.000	100,00 %
PPN PRIGI	129.255.000	62.897.324	- 66.357.676	-51,34%
PPN SIBOLGA		7.209.500	7.209.500	#DIV/0!
PPN TANJUNG PANDAN	128.176.963	125.277.744	- 2.899.219	-2,26%
PPN TELUK BATANG	65.146.500	79.655.000	14.508.500	22,27%
PPN TERNATE	280.278.451	83.622.100	- 196.656.351	-70,16%
PPN TUAL	66.424.000	57.031.100	- 9.392.900	-14,14%
PPS BELAWAN	192.138.975	86.445.000	- 105.693.975	-55,01%
PPS BITUNG	117.950.800	183.317.970	65.367.170	55,42%
PPS BUNGUS	180.429.480	73.845.024	- 106.584.456	-59,07%
PPS CILACAP	184.794.500	60.621.520	- 124.172.980	-67,20%
PPS KENDARI	602.397.267	289.713.223	- 312.684.044	-51,91%
PPS NIZAM ZAHMAN	335.161.920	211.083.285	- 124.078.635	-37,02%
SEKRETARIAT DJPT	1.149.001.275	684.149.892	- 464.851.383	-40,46%
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	8.323.335	15.972.400	7.649.065	91,90%
PPN KEJAWANAN	8.323.335		- 8.323.335	100,00 %
PPS NIZAM ZAHMAN		15.972.400	15.972.400	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4.259.594.880	3.553.432.000	- 706.162.880	-16,58%
BBPPI	101.536.000	118.726.000	17.190.000	16,93%
KALTIMTP	46.800.000		- 46.800.000	100,00 %

PAPUA BARAT TP	23.700.000		-	23.700.000	- 100,00 %
PPN AMBON	102.232.000	84.040.000	-	18.192.000	-17,79%
PPN BRONDONG	108.252.000	119.520.000		11.268.000	10,41%
PPN KARANGANTU	104.232.000	92.232.000	-	12.000.000	-11,51%
PPN KEJAWANAN	92.693.880	130.149.000		37.455.120	40,41%
PPN KWANDANG	113.802.000	97.180.000	-	16.622.000	-14,61%
PPN PEKALONGAN	108.168.000	103.824.000	-	4.344.000	-4,02%
PPN PELABUHAN RATU	108.264.000	100.956.000	-	7.308.000	-6,75%
PPN PEMANGKAT	107.736.000	91.400.000	-	16.336.000	-15,16%
PPN PENGAMBENGAN	83.610.000	187.860.000		104.250.000	124,69 %
PPN PRIGI	105.960.000	113.730.000		7.770.000	7,33%
PPN SIBOLGA	98.712.000	113.280.000		14.568.000	14,76%
PPN SUNGAILIAT	74.634.000	85.020.000		10.386.000	13,92%
PPN TANJUNG PANDAN	107.808.000	104.040.000	-	3.768.000	-3,50%
PPN TELUK BATANG	95.604.000	76.860.000	-	18.744.000	-19,61%
PPN TERNATE	110.928.000	110.450.000	-	478.000	-0,43%
PPN TUAL	117.948.000	92.940.000	-	25.008.000	-21,20%
PPS BELAWAN	98.466.000	101.230.000		2.764.000	2,81%
PPS BITUNG	119.136.000	139.200.000		20.064.000	16,84%
PPS BUNGUS	75.600.000	112.714.000		37.114.000	49,09%
PPS CILACAP	101.280.000	194.040.000		92.760.000	91,59%
PPS KENDARI	124.572.000	150.696.000		26.124.000	20,97%
PPS NIZAM ZAHMAN	138.210.800	166.560.000		28.349.200	20,51%
PROV. BALI TP	15.336.000		-	15.336.000	- 100,00 %
PROV. BANTEN TP	18.000.000		-	18.000.000	- 100,00 %
PROV. BENGKULU TP	23.000.000		-	23.000.000	- 100,00 %
PROV. D.I. ACEH TP	36.504.000		-	36.504.000	- 100,00 %
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP	27.280.000		-	27.280.000	- 100,00 %
PROV. DKI TP	17.220.000		-	17.220.000	- 100,00 %
PROV. GORONTALO TP	21.000.000		-	21.000.000	- 100,00 %
PROV. JAMBI TP	33.000.000		-	33.000.000	- 100,00 %
PROV. JAWA BARAT TP	31.920.000		-	31.920.000	- 100,00 %
PROV. JAWA TENGAH TP	37.800.000		-	37.800.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	31.200.000		-	31.200.000	- 100,00 %

PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	18.300.000		-	18.300.000	- 100,00 %
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	34.500.000		-	34.500.000	- 100,00 %
PROV. LAMPUNG TP	21.700.000		-	21.700.000	- 100,00 %
PROV. MALUKU TP	23.700.000		-	23.700.000	- 100,00 %
PROV. MALUKU UTARA TP	17.700.000		-	17.700.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	34.200.000		-	34.200.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	17.700.000		-	17.700.000	- 100,00 %
PROV. PAPUA	30.600.000		-	30.600.000	- 100,00 %
PROV. RIAU TP	33.552.000		-	33.552.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI BARAT TP	20.840.000		-	20.840.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI SELATAN TP	30.000.000		-	30.000.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGAH TP	50.800.000		-	50.800.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	26.145.000		-	26.145.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI UTARA TP	16.200.000		-	16.200.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA BARAT TP	23.700.000		-	23.700.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA SELATAN TP	26.280.000		-	26.280.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA UTARA TP	18.620.000		-	18.620.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	957.015.200	866.785.000	-	90.230.200	-9,43%
#N/A	95.898.000		-	95.898.000	- 100,00 %
Beban Honor Output Kegiatan	6.397.820.500	552.130.000	-	5.845.690.500	-91,37%
BBPPI	12.600.000		-	12.600.000	- 100,00 %
KALTIMTP	66.300.000		-	66.300.000	- 100,00 %
PAPUA BARAT TP	42.650.000		-	42.650.000	- 100,00 %

PPN AMBON	11.000.000		-	11.000.000	- 100,00 %
PPN BRONDONG	12.500.000		-	12.500.000	- 100,00 %
PPN KARANGANTU	15.600.000		-	15.600.000	- 100,00 %
PPN KEJAWANAN	58.050.000	19.600.000	-	38.450.000	-66,24%
PPN KWANDANG	6.600.000		-	6.600.000	- 100,00 %
PPN PEKALONGAN	40.000.000		-	40.000.000	- 100,00 %
PPN PELABUHAN RATU	26.700.000		-	26.700.000	- 100,00 %
PPN PEMANGKAT	20.300.000		-	20.300.000	- 100,00 %
PPN PENGAMBENGAN	182.564.000	1.700.000	-	180.864.000	-99,07%
PPN PRIGI	18.764.000		-	18.764.000	- 100,00 %
PPN SIBOLGA	19.800.000	7.600.000	-	12.200.000	-61,62%
PPN SUNGAILIAT	12.900.000	680.000	-	12.220.000	-94,73%
PPN TANJUNG PANDAN	39.750.000	17.300.000	-	22.450.000	-56,48%
PPN TELUK BATANG	13.450.000	1.750.000	-	11.700.000	-86,99%
PPN TERNATE	4.300.000		-	4.300.000	- 100,00 %
PPN TUAL	6.000.000		-	6.000.000	- 100,00 %
PPS BELAWAN	22.077.500	1.450.000	-	20.627.500	-93,43%
PPS BITUNG	29.650.000		-	29.650.000	- 100,00 %
PPS BUNGUS	1.800.000	1.000.000	-	800.000	-44,44%
PPS CILACAP	162.390.000	17.520.000	-	144.870.000	-89,21%
PPS KENDARI	81.650.000	9.250.000	-	72.400.000	-88,67%
PPS NIZAM ZAHMAN	165.400.000	11.450.000	-	153.950.000	-93,08%
PROV. BALI TP	60.000.000		-	60.000.000	- 100,00 %
PROV. BANTEN TP	47.700.000		-	47.700.000	- 100,00 %
PROV. BENGKULU TP	65.350.000		-	65.350.000	- 100,00 %
PROV. D.I. ACEH TP	277.520.000		-	277.520.000	- 100,00 %
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP	35.000.000		-	35.000.000	- 100,00 %
PROV. DKI TP	45.600.000		-	45.600.000	- 100,00 %

PROV. GORONTALO TP	53.000.000		-	53.000.000	- 100,00 %
PROV. JAMBI TP	80.000.000		-	80.000.000	- 100,00 %
PROV. JAWA BARAT TP	288.000.000		-	288.000.000	- 100,00 %
PROV. JAWA TENGAH TP	482.300.000		-	482.300.000	- 100,00 %
PROV. JAWA TIMUR TP	275.025.000		-	275.025.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	104.500.000		-	104.500.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	74.000.000		-	74.000.000	- 100,00 %
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	37.400.000		-	37.400.000	- 100,00 %
PROV. LAMPUNG TP	123.800.000		-	123.800.000	- 100,00 %
PROV. MALUKU TP	90.950.000		-	90.950.000	- 100,00 %
PROV. MALUKU UTARA TP	68.550.000		-	68.550.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	93.200.000		-	93.200.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	292.300.000		-	292.300.000	- 100,00 %
PROV. PAPUA	114.000.000		-	114.000.000	- 100,00 %
PROV. RIAU TP	88.000.000		-	88.000.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI BARAT TP	51.800.000		-	51.800.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI SELATAN TP	322.500.000		-	322.500.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGAH TP	84.000.000		-	84.000.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	80.700.000		-	80.700.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI UTARA TP	156.450.000		-	156.450.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA BARAT TP	141.000.000		-	141.000.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA SELATAN TP	122.400.000		-	122.400.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA UTARA TP	265.800.000		-	265.800.000	- 100,00 %

SEKRETARIAT DJPT	1.083.080.000	462.830.000	- 620.250.000	-57,27%
#N/A	221.100.000		- 221.100.000	- 100,00 %
Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain		3.341.520.000	3.341.520.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT		3.341.520.000	3.341.520.000	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	8.662.231.270	29.662.722.945	21.000.491.675	242,44 %
PPN AMBON	24.950.000		- 24.950.000	- 100,00 %
PPN KEJAWANAN		16.638.900	16.638.900	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU	14.701.000		- 14.701.000	- 100,00 %
PPN PENGAMBENGAN		33.000.000	33.000.000	#DIV/0!
PPN SIBOLGA		35.682.000	35.682.000	#DIV/0!
PPN TANJUNG PANDAN	60.000.000		- 60.000.000	- 100,00 %
PPN TERNATE	33.577.500		- 33.577.500	- 100,00 %
PPS BELAWAN	99.803.009	41.192.000	- 58.611.009	-58,73%
PPS CILACAP	189.115.000	90.652.000	- 98.463.000	-52,07%
PPS KENDARI	24.860.000		- 24.860.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	8.215.224.761	29.643.179.845	21.427.955.084	260,83 %
Beban Jasa Lainnya	151.059.286.155	133.131.879.186	- 17.927.406.969	-11,87%
BBPPI	2.442.639.834	1.976.801.692	- 465.838.142	-19,07%
PPN AMBON	1.517.533.500	1.581.734.685	64.201.185	4,23%
PPN BRONDONG	150.437.000	1.039.974.666	889.537.666	591,30 %
PPN KARANGANTU	43.384.500	58.960.000	15.575.500	35,90%
PPN KEJAWANAN	2.991.134.917	3.121.785.496	130.650.579	4,37%
PPN KWANDANG	1.129.726.906	1.121.275.584	- 8.451.322	-0,75%
PPN PEKALONGAN	1.430.429.648	1.346.621.524	- 83.808.124	-5,86%
PPN PELABUHAN RATU	2.381.981.000	2.414.834.805	32.853.805	1,38%
PPN PEMANGKAT	928.255.764	1.206.003.056	277.747.292	29,92%
PPN PENGAMBENGAN	1.928.816.304	1.977.512.262	48.695.958	2,52%
PPN PRIGI	1.209.762.200	1.249.042.860	39.280.660	3,25%
PPN SIBOLGA	825.816.140	1.156.033.188	330.217.048	39,99%
PPN SUNGAILIAT	2.071.405.941	2.081.658.997	10.253.056	0,49%
PPN TANJUNG PANDAN	39.880.631	595.820.000	555.939.369	1394,01 %
PPN TELUK BATANG	1.013.940.815	1.187.761.314	173.820.499	17,14%
PPN TERNATE	1.736.644.999	1.991.232.812	254.587.813	14,66%
PPN TUAL	1.193.143.411	1.010.859.388	- 182.284.023	-15,28%
PPS BELAWAN	1.836.661.800	1.737.250.000	- 99.411.800	-5,41%
PPS BITUNG	2.884.856.466	2.837.089.452	- 47.767.014	-1,66%
PPS BUNGUS	2.161.908.803	1.821.419.745	- 340.489.058	-15,75%

PPS CILACAP	2.093.389.600	2.305.419.400	212.029.800	10,13%
PPS KENDARI	2.118.265.553	2.562.197.145	443.931.592	20,96%
PPS NIZAM ZAHMAN	3.339.915.352	1.186.077.994	- 2.153.837.358	-64,49%
SEKRETARIAT DJPT	113.589.355.071	95.564.513.121	- 18.024.841.950	-15,87%
Beban Jasa Profesi	3.407.423.933	1.799.111.000	- 1.608.312.933	-47,20%
BBPPI	84.180.000	23.100.000	- 61.080.000	-72,56%
KALTIMTP	20.600.000		- 20.600.000	- 100,00 %
PAPUA BARAT TP	10.300.000		- 10.300.000	- 100,00 %
PPN AMBON		1.800.000	1.800.000	#DIV/0!
PPN BRONDONG	5.400.000		- 5.400.000	- 100,00 %
PPN KARANGANTU	1.800.000		- 1.800.000	- 100,00 %
PPN KEJAWANAN		58.000.000	58.000.000	#DIV/0!
PPN KWANDANG	3.500.000	1.000.000	- 2.500.000	-71,43%
PPN PEKALONGAN	5.700.000		- 5.700.000	- 100,00 %
PPN PELABUHAN RATU	7.200.000		- 7.200.000	- 100,00 %
PPN PEMANGKAT	13.600.000	800.000	- 12.800.000	-94,12%
PPN PENGAMBENGAN	4.500.000	8.500.000	4.000.000	88,89%
PPN PRIGI	14.400.000	3.600.000	- 10.800.000	-75,00%
PPN SIBOLGA	9.700.000		- 9.700.000	- 100,00 %
PPN TANJUNG PANDAN	8.500.000	10.800.000	2.300.000	27,06%
PPN TELUK BATANG		900.000	900.000	#DIV/0!
PPN TERNATE		1.200.000	1.200.000	#DIV/0!
PPN TUAL	3.600.000		- 3.600.000	- 100,00 %
PPS BELAWAN	17.625.000	18.000.000	375.000	2,13%
PPS BITUNG	20.300.000	16.200.000	- 4.100.000	-20,20%
PPS BUNGUS	48.840.000		- 48.840.000	- 100,00 %
PPS CILACAP	50.000.000	8.700.000	- 41.300.000	-82,60%
PPS KENDARI	39.000.000	3.300.000	- 35.700.000	-91,54%
PPS NIZAM ZAHMAN	14.400.000	3.600.000	- 10.800.000	-75,00%
PROV. BALI TP	2.700.000		- 2.700.000	- 100,00 %
PROV. BENGKULU TP	8.000.000		- 8.000.000	- 100,00 %
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP	3.600.000		- 3.600.000	- 100,00 %
PROV. GORONTALO TP	3.730.000		- 3.730.000	- 100,00 %

PROV. JAMBI TP	1.800.000		-	1.800.000	100,00 %
PROV. JAWA BARAT TP	3.900.000		-	3.900.000	100,00 %
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	17.900.000		-	17.900.000	100,00 %
PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	8.900.000		-	8.900.000	100,00 %
PROV. LAMPUNG TP	26.600.000		-	26.600.000	100,00 %
PROV. MALUKU TP	11.500.000		-	11.500.000	100,00 %
PROV. MALUKU UTARA TP	10.400.000		-	10.400.000	100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	3.200.000		-	3.200.000	100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	21.000.000		-	21.000.000	100,00 %
PROV. PAPUA	8.100.000		-	8.100.000	100,00 %
PROV. RIAU TP	7.550.000		-	7.550.000	100,00 %
PROV. SULAWESI BARAT TP	8.600.000		-	8.600.000	100,00 %
PROV. SULAWESI SELATAN TP	17.400.000		-	17.400.000	100,00 %
PROV. SULAWESI TENGAH TP	4.650.000		-	4.650.000	100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	12.600.000		-	12.600.000	100,00 %
PROV. SULAWESI UTARA TP	19.500.000		-	19.500.000	100,00 %
PROV. SUMATERA BARAT TP	6.100.000		-	6.100.000	100,00 %
PROV. SUMATERA SELATAN TP	10.800.000		-	10.800.000	100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	2.805.348.933	1.639.611.000	-	1.165.737.933	-41,55%
#N/A	400.000		-	400.000	100,00 %
Beban Keperluan Perkantoran	41.337.470.995	30.428.326.566	-	10.909.144.429	-26,39%
BBPPI	1.416.518.466	1.014.587.943	-	401.930.523	-28,37%
PPN AMBON	869.788.687	588.398.232	-	281.390.455	-32,35%
PPN BRONDONG	2.711.522.974	1.482.618.825	-	1.228.904.149	-45,32%
PPN KARANGANTU	2.995.324.437	2.666.830.414	-	328.494.023	-10,97%
PPN KEJAWANAN	908.065.032	611.524.348	-	296.540.684	-32,66%

PPN KWANDANG	856.368.900	716.110.411	-	140.258.489	-16,38%
PPN PEKALONGAN	431.970.863	435.420.168		3.449.305	0,80%
PPN PELABUHAN RATU	914.574.109	700.356.480	-	214.217.629	-23,42%
PPN PEMANGKAT	823.098.532	444.743.500	-	378.355.032	-45,97%
PPN PENGAMBENGAN	920.319.594	808.151.634	-	112.167.960	-12,19%
PPN PRIGI	621.246.753	362.964.530	-	258.282.223	-41,57%
PPN SIBOLGA	1.067.781.359	502.787.548	-	564.993.811	-52,91%
PPN SUNGAILIAT	1.296.942.665	903.916.339	-	393.026.326	-30,30%
PPN TANJUNG PANDAN	1.395.937.992	471.096.254	-	924.841.738	-66,25%
PPN TELUK BATANG	556.456.080	400.202.580	-	156.253.500	-28,08%
PPN TERNATE	931.985.943	690.608.458	-	241.377.485	-25,90%
PPN TUAL	733.217.340	695.055.250	-	38.162.090	-5,20%
PPS BELAWAN	1.117.501.385	920.810.594	-	196.690.791	-17,60%
PPS BITUNG	1.123.125.866	859.545.799	-	263.580.067	-23,47%
PPS BUNGUS	323.562.783	108.689.279	-	214.873.504	-66,41%
PPS CILACAP	1.264.795.059	767.038.041	-	497.757.018	-39,35%
PPS KENDARI	1.190.900.239	745.554.993	-	445.345.246	-37,40%
PPS NIZAM ZAHMAN	7.955.830.299	8.236.073.023		280.242.724	3,52%
SEKRETARIAT DJPT	8.910.635.638	5.295.241.923	-	3.615.393.715	-40,57%
Beban Langganan Air	3.142.906.768	2.830.815.960	-	312.090.808	-9,93%
BBPPI	3.663.660	3.032.380	-	631.280	-17,23%
PPN BRONDONG	367.279.314	309.389.200	-	57.890.114	-15,76%
PPN KARANGANTU	175.512.000	171.808.000	-	3.704.000	-2,11%
PPN KEJAWANAN	902.747.570	915.411.640		12.664.070	1,40%
PPN KWANDANG	61.436.200	47.918.100	-	13.518.100	-22,00%
PPN PEKALONGAN	4.268.760	8.944.460		4.675.700	109,53 %
PPN PELABUHAN RATU	95.150.240	53.005.920	-	42.144.320	-44,29%
PPN PEMANGKAT	3.592.300	2.557.010	-	1.035.290	-28,82%
PPN PENGAMBENGAN	48.438.520	32.663.500	-	15.775.020	-32,57%
PPN PRIGI	91.438.730	128.252.050		36.813.320	40,26%
PPN SIBOLGA	547.169.530	356.422.290	-	190.747.240	-34,86%
PPN SUNGAILIAT	18.428.361	20.398.109		1.969.748	10,69%
PPN TUAL	5.796.000	24.310.430		18.514.430	319,43 %
PPS CILACAP	40.577.200	30.533.800	-	10.043.400	-24,75%
PPS NIZAM ZAHMAN	568.944.126	516.818.397	-	52.125.729	-9,16%
SEKRETARIAT DJPT	208.464.257	209.350.674		886.417	0,43%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.489.477.750	4.332.026.534		842.548.784	24,15%
PPN AMBON	109.541.523	115.126.414		5.584.891	5,10%
PPN BRONDONG	80.128.529	55.764.675	-	24.363.854	-30,41%
PPN KARANGANTU	71.342.069	72.711.495		1.369.426	1,92%
PPN KEJAWANAN	97.706.440	113.840.333		16.133.893	16,51%
PPN KWANDANG	6.000.000	4.254.500	-	1.745.500	-29,09%
PPN PEKALONGAN	9.400.164	138.987.721		129.587.557	1378,57 %
PPN PELABUHAN RATU	4.778.741	6.886.109		2.107.368	44,10%
PPN PEMANGKAT	49.173.880	51.225.741		2.051.861	4,17%

PPN SIBOLGA	98.266.888	95.360.527	-	2.906.361	-2,96%
PPN TANJUNG PANDAN	3.755.480	3.326.280	-	429.200	-11,43%
PPS BELAWAN	147.461.428	184.267.027		36.805.599	24,96%
PPS BITUNG	126.248.090	124.194.208	-	2.053.882	-1,63%
PPS BUNGUS		8.880.000		8.880.000	#DIV/0!
PPS CILACAP	408.404.967	372.685.088	-	35.719.879	-8,75%
PPS KENDARI	2.514.570	7.843.846		5.329.276	211,94%
PPS NIZAM ZAHMAN	2.274.754.981	2.950.183.170		675.428.189	29,69%
SEKRETARIAT DJPT		26.489.400		26.489.400	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	18.331.286.565	16.062.124.912	-	2.269.161.653	-12,38%
BBPPI	680.452.590	446.540.592	-	233.911.998	-34,38%
PPN AMBON	490.620.189	344.942.811	-	145.677.378	-29,69%
PPN BRONDONG	1.118.186.282	959.502.355	-	158.683.927	-14,19%
PPN KARANGANTU	800.500.024	717.764.134	-	82.735.890	-10,34%
PPN KEJAWANAN	739.107.085	652.889.316	-	86.217.769	-11,67%
PPN KWANDANG	817.159.056	900.674.406		83.515.350	10,22%
PPN PEKALONGAN	204.858.203	195.782.908	-	9.075.295	-4,43%
PPN PELABUHAN RATU	905.645.053	619.363.776	-	286.281.277	-31,61%
PPN PEMANGKAT	230.701.591	195.823.351	-	34.878.240	-15,12%
PPN PENGAMBENGAN	453.736.141	207.936.939	-	245.799.202	-54,17%
PPN PRIGI	590.838.869	581.125.637	-	9.713.232	-1,64%
PPN SIBOLGA	791.192.112	539.600.504	-	251.591.608	-31,80%
PPN SUNGAILIAT	434.253.063	350.153.866	-	84.099.197	-19,37%
PPN TANJUNG PANDAN	321.308.299	238.768.624	-	82.539.675	-25,69%
PPN TELUK BATANG	218.342.282	169.210.465	-	49.131.817	-22,50%
PPN TERNATE	1.193.270.181	1.279.868.937		86.598.756	7,26%
PPN TUAL	186.667.211	94.090.611	-	92.576.600	-49,59%
PPS BELAWAN	259.327.399	257.315.417	-	2.011.982	-0,78%
PPS BITUNG	528.882.186	397.532.941	-	131.349.245	-24,84%
PPS BUNGUS	1.102.240.908	1.006.956.110	-	95.284.798	-8,64%
PPS CILACAP	834.157.639	715.596.649	-	118.560.990	-14,21%
PPS KENDARI	1.507.428.814	1.199.750.099	-	307.678.715	-20,41%
PPS NIZAM ZAHMAN	1.621.777.746	1.294.211.435	-	327.566.311	-20,20%
SEKRETARIAT DJPT	2.300.633.642	2.696.723.029		396.089.387	17,22%
Beban Langganan Telepon	1.290.884.885	1.050.631.923	-	240.252.962	-18,61%
BBPPI	178.674.462	116.814.494	-	61.859.968	-34,62%
PPN AMBON	2.660.282	2.588.076	-	72.206	-2,71%
PPN BRONDONG	673.199	276.392	-	396.807	-58,94%
PPN KEJAWANAN	1.160.023	572.389	-	587.634	-50,66%
PPN KWANDANG	119.968.972	93.920.607	-	26.048.365	-21,71%
PPN PEKALONGAN	122.188.267	1.943.165	-	120.245.102	-98,41%
PPN PELABUHAN RATU	70.246.908	63.970.119	-	6.276.789	-8,94%
PPN PEMANGKAT	1.505.923	1.416.126	-	89.797	-5,96%
PPN PENGAMBENGAN	177.902.525	135.977.796	-	41.924.729	-23,57%
PPN PRIGI	6.583.470	2.180.984	-	4.402.486	-66,87%
PPN SIBOLGA	3.484.202	1.557.672	-	1.926.530	-55,29%

PPN SUNGAILIAT	152.496.170	100.346.077	-	52.150.093	-34,20%
PPN TANJUNG PANDAN	30.529.231	39.254.404		8.725.173	28,58%
PPN TELUK BATANG	54.021.857	40.927.820	-	13.094.037	-24,24%
PPN TERNATE	38.781.802	58.251.648		19.469.846	50,20%
PPS BELAWAN	440.276	510.180		69.904	15,88%
PPS BITUNG	614.537	709.401		94.864	15,44%
PPS BUNGUS	47.560.084	170.673.977		123.113.893	258,86%
PPS CILACAP	948.165	1.116.990		168.825	17,81%
PPS KENDARI	108.055.659	95.068.568	-	12.987.091	-12,02%
PPS NIZAM ZAHMAN	1.222.000	1.332.000		110.000	9,00%
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	7.104.000		-	7.104.000	100,00%
SEKRETARIAT DJPT	164.062.871	121.223.038	-	42.839.833	-26,11%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	732.700.818	85.183.380	-	647.517.438	-88,37%
PPN BRONDONG	14.833.840		-	14.833.840	100,00%
PPN KEJAWANAN	2.521.235		-	2.521.235	100,00%
PPN PRIGI	25.477.500		-	25.477.500	100,00%
PPN SIBOLGA	7.798.000		-	7.798.000	100,00%
PPN TELUK BATANG	109.892.000	35.688.000	-	74.204.000	-67,52%
PPN TERNATE	59.938.000		-	59.938.000	100,00%
PPN TUAL	53.501.000		-	53.501.000	100,00%
PPS BELAWAN	47.435.493	11.999.830	-	35.435.663	-74,70%
PPS BITUNG	94.617.000	1.248.000	-	93.369.000	-98,68%
PPS CILACAP	179.188.750	19.518.550	-	159.670.200	-89,11%
PPS NIZAM ZAHMAN	137.498.000	16.729.000	-	120.769.000	-87,83%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	97.508.254	39.122.997	-	58.385.257	-59,88%
BBPPI	2.620.655	3.495.490		874.835	33,38%
PPN AMBON	932.000		-	932.000	100,00%
PPN BRONDONG	899.900	340.660	-	559.240	-62,14%
PPN KARANGANTU	323.000	32.000	-	291.000	-90,09%
PPN KEJAWANAN	2.255.030	388.500	-	1.866.530	-82,77%
PPN PEKALONGAN	445.690		-	445.690	100,00%
PPN PELABUHAN RATU	736.000	464.000	-	272.000	-36,96%
PPN PEMANGKAT	386.000	132.000	-	254.000	-65,80%
PPN PENGAMBENGAN	1.771.756	2.148.400		376.644	21,26%
PPN PRIGI	1.987.999	1.175.000	-	812.999	-40,90%
PPN SIBOLGA	3.824.300	2.904.000	-	920.300	-24,06%

PPN SUNGAILIAT	5.802.480	1.363.400	-	4.439.080	-76,50%
PPN TANJUNG PANDAN	2.728.600		-	2.728.600	100,00%
PPN TELUK BATANG	2.494.600	1.672.200	-	822.400	-32,97%
PPN TERNATE	6.904.400	822.400	-	6.082.000	-88,09%
PPN TUAL	556.000		-	556.000	100,00%
PPS BELAWAN	4.779.770	1.249.700	-	3.530.070	-73,85%
PPS BITUNG	10.311.960	14.738.380		4.426.420	42,93%
PPS BUNGUS	633.800	827.500		193.700	30,56%
PPS CILACAP	821.650	993.500		171.850	20,92%
PPS KENDARI	7.553.782	4.974.107	-	2.579.675	-34,15%
SEKRETARIAT DJPT	38.738.882	1.401.760	-	37.337.122	-96,38%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		110.162.820		110.162.820	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN		29.734.000		29.734.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT		80.428.820		80.428.820	#DIV/0!
Beban Sewa	11.674.585.560	4.912.751.791	-	6.761.833.769	-57,92%
BBPPI	408.141.965	400.890.576	-	7.251.389	-1,78%
PPN AMBON	178.500.000		-	178.500.000	100,00%
PPN BRONDONG		56.000.000		56.000.000	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN	106.605.000	18.520.000	-	88.085.000	-82,63%
PPN KWANDANG	108.255.000	130.981.500		22.726.500	20,99%
PPN PEKALONGAN	16.150.000	2.760.000	-	13.390.000	-82,91%
PPN PEMANGKAT	72.705.000	50.566.000	-	22.139.000	-30,45%
PPN PENGAMBENGAN	134.370.000	222.555.000		88.185.000	65,63%
PPN PRIGI	68.350.000	5.210.204	-	63.139.796	-92,38%
PPN SIBOLGA	27.850.000	5.000.000	-	22.850.000	-82,05%
PPN TANJUNG PANDAN	1.260.000	1.050.000	-	210.000	-16,67%
PPN TELUK BATANG		33.200.000		33.200.000	#DIV/0!
PPN TERNATE	107.000.000	37.290.000	-	69.710.000	-65,15%
PPS BELAWAN	227.156.757	2.200.000	-	224.956.757	-99,03%
PPS BITUNG	2.500.000	24.650.000		22.150.000	886,00%
PPS BUNGUS	152.125.000		-	152.125.000	100,00%
PPS CILACAP	199.256.000		-	199.256.000	100,00%
PPS NIZAM ZAHMAN	341.126.000	289.800.000	-	51.326.000	-15,05%
PROV. JAWA TENGAH TP	5.000.000		-	5.000.000	100,00%
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	6.525.000		-	6.525.000	100,00%
PROV. LAMPUNG TP	8.000.000		-	8.000.000	100,00%

PROV. SULAWESI TENGGERA TP	8.000.000		-	8.000.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	9.495.709.838	3.632.078.511	-	5.863.631.327	-61,75%
Grand Total	294.028.620.691	254.016.198.118	-	42.904.607.673	-13,61%

1. Beban Keperluan Perkantoran merupakan beban atas keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan. Pada TA 2025 terdapat penurunan yang disebabkan oleh pengurangan Beban atas gaji PPNPN.
2. Beban Penambah Daya Tahan Tubuh, merupakan beban atas pengadaan bahan makanan/ minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai. Pada Ditjen perikanan tangkap Beban daya tahan tubuh berupa susu atau vitamin untuk pegawai nya melakukan dengan mekanisme *Shift* atau yang terpapar langsung dengan bahan kimia.
3. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, beban atas pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan beban atas pengiriman dokumen BAST atau asli dari pusat ke daerah atau dari daerah ke pusat. Pada beban surat dinas terdapat penurunan yang signifikan yang disebabkan oleh proses digitalisasi.
4. Beban Honor Operasional Satuan Kerja, merupakan beban atas honor kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBK (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
5. Beban Barang Operasional Lainnya, barang operasional yang tidak dapat ditampung dalam akun dalam kelompok Akun Beban Barang

Operasional dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.

6. Beban Bahan merupakan beban atas pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti, Konsumsi/bahan makanan, Dokumentasi, Biaya fotokop, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional dan tidak menghasilkan barang persediaan. Pada Ditjen Perikanan Tangkap beban bahan merupakan beban atas rapat, seminar kit kegiatan, foto copy, ATK kegiatan dll.
7. Beban Honor Output Kegiatan merupakan beban atas Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output kegiatan Ditjen Perikanan Tangkap. Pada Ditjen perikanan tangkap honor output kegiatan merupakan honor atas Pengelola Keuangan, dan honor PNBPN.
8. Beban Barang Non Operasional Lainnya merupakan beban atas pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional. Pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan Beban atas BBM mesin potong rumput
9. Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel, beban atas Beban Gedung dan bangunan dibawah kapitalisasi. Pada Ditjen Perikanan Tangkap berada pada PPN Tanjung Pandan dan PPN Kejawan.
10. Beban Langganan Listrik merupakan beban atas penggunaan Listrik untuk mendukung tugas dan operasional perkantoran.
11. Beban Langganan Telepon merupakan beban atas telepon dan internet untuk operasional perkantoran
12. Beban Langganan Air merupakan beban atas penggunaan air pada Unit Pelaksana Teknis
13. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya merupakan beban atas internet untuk mendukung operasional pemerintah
14. Beban Jasa Pos dan Giro merupakan beban atas pengiriman dokumen dari daerah ke pusat atau sebaliknya.
15. Beban Jasa Konsultan merupakan beban atas jasa konsultan perencanaan dan pengawasan Gedung dan bangunan. Pada TA 2025 terdapat kenaikan belanja konsultan yang disebabkan oleh realisasi belanja konsultan pada belanja yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

16. Beban Sewa merupakan sewa atas mobil dinas jabatan, mobil dinas opsional atau peralatan pendukung kegiatan
17. Beban Jasa Profesi merupakan beban atas honor narasumber atas suatu kegiatan yang berasal dari luar KKP.
18. Beban Jasa Lainnya merupakan beban atas Beban outsourcing.

Beban Pemeliharaan
Rp36.351.410.511

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp43.793.249.955 dan Rp36.351.410.511.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	48.520.450	9.457.200	- 39.063.250	-80,51%
PPN PRIGI		9.457.200	9.457.200	#DIV/0!
PPN TANJUNG PANDAN	48.520.450		- 48.520.450	-100,00%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.736.444.042	18.523.918.770	- 212.525.272	-1,13%
BBPPI	561.251.532	411.461.000	- 149.790.532	-26,69%
PPN AMBON	196.441.100	202.979.000	6.537.900	3,33%
PPN BRONDONG	151.872.720	393.217.750	241.345.030	158,91%
PPN KARANGANTU	579.423.973	560.695.000	- 18.728.973	-3,23%
PPN KEJAWANAN	160.011.000	339.283.000	179.272.000	112,04%
PPN KWANDANG	249.641.789	594.127.125	344.485.336	137,99%
PPN PEKALONGAN	158.107.000	366.044.724	207.937.724	131,52%
PPN PELABUHAN RATU	614.293.370	223.381.983	- 390.911.387	-63,64%
PPN PEMANGKAT	261.319.500	254.915.000	- 6.404.500	-2,45%
PPN PENGAMBENGAN	210.524.384	192.061.508	- 18.462.876	-8,77%
PPN PRIGI	538.422.200	333.603.000	- 204.819.200	-38,04%
PPN SIBOLGA	195.632.000	418.152.864	222.520.864	113,74%
PPN SUNGAILIAT	586.528.242	432.501.090	- 154.027.152	-26,26%
PPN TANJUNG PANDAN	1.094.823.567	519.901.715	- 574.921.852	-52,51%
PPN TELUK BATANG	302.930.110	290.726.830	- 12.203.280	-4,03%

PPN TERNATE	296.644.000	115.435.054	-	-61,09%
PPN TUAL	247.455.147	399.075.300	151.620.153	61,27%
PPS BELAWAN	803.658.424	361.154.000	-	-55,06%
PPS BITUNG	248.394.600	286.095.000	37.700.400	15,18%
PPS BUNGUS	74.887.260	155.619.028	80.731.768	107,80%
PPS CILACAP	463.674.000	723.424.000	259.750.000	56,02%
PPS KENDARI	120.043.262	1.495.227.800	1.375.184.538	1145,57%
PPS NIZAM ZAHMAN	1.132.332.072	261.184.900	-	-76,93%
SEKRETARIAT DJPT	9.488.132.790	9.193.652.099	-	-3,10%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	992.332.738	676.835.648	-	-31,79%
PPN PEKALONGAN	602.117.100	536.123.000	-	-10,96%
PPN SIBOLGA	114.976.261	24.819.428	-	-78,41%
PPN TELUK BATANG	60.961.850	43.048.220	-	-29,38%
PPS BELAWAN		13.045.000	13.045.000	#DIV/0!
PPS BUNGUS	131.053.527		-	-100,00%
PPS KENDARI	83.224.000	59.800.000	-	-28,15%
Beban Pemeliharaan Irigasi	594.739.586	283.619.159	-	-52,31%
PPN AMBON	34.999.750	29.018.409	-	-17,09%
PPN KEJAWANAN	24.675.000	24.835.000	160.000	0,65%
PPN PEKALONGAN	83.990.000	41.150.000	-	-51,01%
PPN PELABUHAN RATU	28.864.500	59.803.900	30.939.400	107,19%
PPN PENGAMBENGAN	10.874.998	17.963.000	7.088.002	65,18%
PPN PRIGI	72.246.800		-	-100,00%
PPN TANJUNG PANDAN	163.678.000		-	-100,00%
PPN TERNATE	24.499.794	10.000.000	-	-59,18%
PPS BELAWAN	57.491.000	60.349.850	2.858.850	4,97%
PPS BITUNG	13.778.000		-	-100,00%
PPS KENDARI	52.790.400	40.499.000	-	-23,28%
PPS NIZAM ZAHMAN	26.851.344		-	-100,00%
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.422.494.332	1.427.427.975	-	0,35%
PPN AMBON	55.408.000		-	-100,00%
PPN KARANGANTU	27.328.150	265.781.000	238.452.850	872,55%
PPN KWANDANG	48.291.075	11.546.000	-	-76,09%

PPN PEKALONGAN	64.810.000		-	-100,00%
PPN PELABUHAN RATU	143.383.500	66.362.500	-	-53,72%
PPN PEMANGKAT	274.030.312	18.039.000	-	-93,42%
PPN PENGAMBENGAN	3.245.015	20.817.750	17.572.735	541,53%
PPN PRIGI	61.127.000	20.866.000	-	-65,86%
PPN SIBOLGA	36.660.000	24.965.000	-	-31,90%
PPN SUNGAILIAT	138.343.375	189.950.000	51.606.625	37,30%
PPN TANJUNG PANDAN	18.470.000		-	-100,00%
PPN TELUK BATANG	152.557.818	199.884.065	47.326.247	31,02%
PPN TERNATE	65.460.687	405.902.660	340.441.973	520,07%
PPN TUAL	24.910.000	32.410.000	7.500.000	30,11%
PPS BELAWAN	49.897.000	49.848.000	-	-0,10%
PPS BITUNG	64.237.700	93.054.000	28.816.300	44,86%
PPS KENDARI	120.450.000	28.002.000	-	-76,75%
PPS NIZAM ZAHMAN	24.286.700		-	-100,00%
SEKRETARIAT DJPT	49.598.000		-	-100,00%
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.786.941.880	2.037.524.640	-	-26,89%
BBPPI	51.542.226		-	-100,00%
PPN AMBON	35.000.000	40.329.481	5.329.481	15,23%
PPN BRONDONG	96.569.334	249.942.088	153.372.754	158,82%
PPN KARANGANTU	242.351.672	324.882.984	82.531.312	34,05%
PPN KEJAWANAN	77.944.798	49.850.929	-	-36,04%
PPN KWANDANG	40.200.954	52.869.602	12.668.648	31,51%
PPN PEKALONGAN	109.839.650	28.452.953	-	-74,10%
PPN PELABUHAN RATU	126.444.841	48.453.260	-	-61,68%
PPN PEMANGKAT	262.505.769	39.659.500	-	-84,89%
PPN PENGAMBENGAN	78.236.084	78.478.096	242.012	0,31%
PPN PRIGI	162.793.215	83.257.660	-	-48,86%
PPN SIBOLGA	151.453.871	72.818.705	-	-51,92%
PPN SUNGAILIAT	159.595.690	78.198.250	-	-51,00%
PPN TANJUNG PANDAN	46.460.388	11.190.000	-	-75,91%
PPN TELUK BATANG	144.408.343	49.859.931	-	-65,47%
PPN TERNATE	49.983.375	95.887.364	45.903.989	91,84%
PPN TUAL	98.990.000	33.047.000	-	-66,62%

PPS BELAWAN	120.075.000	80.660.000	- 39.415.000	-32,83%
PPS BITUNG	82.731.500	32.267.600	- 50.463.900	-61,00%
PPS BUNGUS	244.365.880	49.124.126	- 195.241.754	-79,90%
PPS CILACAP	63.880.000	61.054.800	- 2.825.200	-4,42%
PPS KENDARI	184.235.090	280.518.900	96.283.810	52,26%
PPS NIZAM ZAHMAN	107.339.200	107.831.411	492.211	0,46%
SEKRETARIAT DJPT	49.995.000	88.890.000	38.895.000	77,80%
Beban Pemeliharaan Lainnya	25.490.000	5.500.000	- 19.990.000	-78,42%
PPS KENDARI	25.490.000	5.500.000	- 19.990.000	-78,42%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.133.968.239	9.963.568.249	- 7.170.399.990	-41,85%
BBPPI	501.342.224	381.586.353	- 119.755.871	-23,89%
PPN AMBON	273.098.326	90.618.014	- 182.480.312	-66,82%
PPN BRONDONG	311.269.887	544.062.769	232.792.882	74,79%
PPN KARANGANTU	696.379.395	322.635.814	- 373.743.581	-53,67%
PPN KEJAWANAN	232.574.731	373.216.711	140.641.980	60,47%
PPN KWANDANG	310.544.963	284.053.893	- 26.491.070	-8,53%
PPN PEKALONGAN	907.053.434	686.305.094	- 220.748.340	-24,34%
PPN PELABUHAN RATU	820.964.133	575.970.928	- 244.993.205	-29,84%
PPN PEMANGKAT	227.840.565	168.156.886	- 59.683.679	-26,20%
PPN PENGAMBENGAN	420.933.954	416.316.724	- 4.617.230	-1,10%
PPN PRIGI	450.738.874	328.676.603	- 122.062.271	-27,08%
PPN SIBOLGA	410.401.304	376.753.126	- 33.648.178	-8,20%
PPN SUNGAILIAT	438.481.867	264.709.195	- 173.772.672	-39,63%
PPN TANJUNG PANDAN	418.120.517	246.532.136	- 171.588.381	-41,04%
PPN TELUK BATANG	273.178.491	213.468.839	- 59.709.652	-21,86%
PPN TERNATE	302.042.825	303.357.997	1.315.172	0,44%
PPN TUAL	307.390.500	195.772.150	- 111.618.350	-36,31%
PPS BELAWAN	619.892.916	343.756.666	- 276.136.250	-44,55%
PPS BITUNG	490.280.323	388.119.100	- 102.161.223	-20,84%
PPS BUNGUS	397.542.551	507.050.542	109.507.991	27,55%
PPS CILACAP	659.122.300	424.353.904	- 234.768.396	-35,62%
PPS KENDARI	946.920.160	644.985.934	- 301.934.226	-31,89%
PPS NIZAM ZAHMAN	2.848.859.764	1.040.160.253	- 1.808.699.511	-63,49%

SEKRETARIAT DJPT	3.868.994.235	842.948.618	-	-78,21%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.949.264.297	3.317.372.604	1.368.108.307	70,19%
PPN TERNATE	141.056.450		-	-100,00%
PPN TUAL	48.158.000		-	-100,00%
PPS BITUNG	49.965.070	42.951.615	-	-14,04%
SEKRETARIAT DJPT	1.710.084.777	3.274.420.989	1.564.336.212	91,48%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	75.279.258	74.328.116	951.142	-1,26%
BBPPI	163.600		-	-100,00%
PPN KARANGANTU	59.500		-	-100,00%
PPN SIBOLGA	41.956.300	4.076.500	-	-90,28%
PPN SUNGAILIAT	2.239.980		-	-100,00%
PPN TUAL	1.997.500	630.000	-	-68,46%
PPS BELAWAN	1.338.350	6.286.300	4.947.950	369,71%
PPS BITUNG	19.184.928	60.260.316	41.075.388	214,10%
PPS CILACAP		1.675.000	1.675.000	#DIV/0!
PPS KENDARI	8.339.100	1.400.000	-	-83,21%
Beban Persediaan suku cadang	27.775.133	31.858.150	4.083.017	14,70%
BBPPI	266.424		-	-100,00%
PPN KARANGANTU	309.000		-	-100,00%
PPN TANJUNG PANDAN		4.745.000	4.745.000	#DIV/0!
PPN TELUK BATANG	27.199.709	27.113.150	-	-0,32%
Grand Total	43.793.249.955	36.351.410.511	7.441.839.444	-16,99%

1. Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan, merupakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Beban ekstrakomtabel tersebut terdapat pada PPN Prigi yang merupakan kapitalisasi atas dokumen perencanaan Gedung dan bangunan.
2. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan merupakan Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan Pemeliharaan/perawatan

halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan). Pada ditjen perikanan tangkap Beban pemeliharaan Gedung dan bangunan terdapat pada 23 satker UPT dan 1 satker pusat,

3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya merupakan pemeliharaan atas rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/ TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 6 satker yaitu, PPN Pekalongan, PPN Sibolga, PPN Sungailiat, PPP Teluk Batang, PPS Bungus dan PPS Kendari.
4. Beban Pemeliharaan Irigasi, merupakan pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Pada ditjen perikanan tangkap terdapat pada 12 satker yang berasal dari pemeliharaan jaringan air berupa pipa, pompa air, toilet dll.
5. Beban Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, merupakan pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan. Beban belanja tersebut terdapat 19 satker yang berasal dari pemeliharaan jalan kawasan Pelabuhan.
6. Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan, merupakan pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan. Pada Ditjen Perikanan Tangkap beban tersebut

berada pada seluruh satker lingkup UPT dan pusat yang berasal dari pemeliharaan CCTV.

7. Beban Pemeliharaan Mesin merupakan pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. Pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami kenaikan seiring bertambahnya masa manfaat peralatan dan mesin pada Ditjen Perikanan Tangkap.
8. Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan beban atas pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 5 satker, yaitu PPN Ternate, PPN Tual, PPS Bitung, PPS Kendari dan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.
9. Beban pemeliharaan lainnya, merupakan pengakuan beban atas pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sertajalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat. Beban ini hanya terdapat pada PPS Kendari yang berasal dari pemeliharaan *portal gate*.
10. Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan, merupakan penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai bahan pemeliharaan karena sifat dan jenis barang.
11. Beban Persediaan suku cadang, merupakan penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan suku cadang karena sifat dan jenis barang. Beban tersebut berasal dari penggunaan persediaan untuk peralatan bengkel.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp60.161.083.374

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp60.161.083.374 dan Rp162.445.383.793.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan adanya penghematan dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana karena suatu hal.

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	102.117.388.046	42.080.723.434	59.877.588.532	58,64%
BBPPI	1.889.937.381	126.416.401	1.763.520.980	93,31%
KALTIMTP	23.571.300		23.571.300	100,00 %
PAPUA BARAT TP	112.890.000		112.890.000	100,00 %
PPN AMBON	569.415.973	128.604.147	440.811.826	77,41%
PPN BRONDONG	563.223.596	178.034.051	385.189.545	68,39%
PPN KARANGANTU	569.625.355	131.816.874	437.808.481	76,86%
PPN KEJAWANAN	952.422.601	368.673.889	583.748.712	61,29%
PPN KWANDANG	484.276.991	28.333.152	455.943.839	94,15%
PPN PEKALONGAN	642.440.717	86.331.010	556.109.707	86,56%
PPN PELABUHAN RATU	465.285.088	80.718.866	384.566.222	82,65%
PPN PEMANGKAT	922.292.500	179.337.200	742.955.300	80,56%
PPN PENGAMBENGAN	1.493.554.675	256.349.407	1.237.205.268	82,84%
PPN PRIGI	475.496.724	55.264.657	420.232.067	88,38%
PPN SIBOLGA	930.425.054	409.666.761	520.758.293	55,97%
PPN SUNGAILIAT	368.795.344	164.477.741	204.317.603	55,40%
PPN TANJUNG PANDAN	580.947.156	33.704.725	547.242.431	94,20%
PPN TELUK BATANG	472.314.700	53.300.613	419.014.087	88,72%
PPN TERNATE	734.621.752	219.356.861	515.264.891	70,14%
PPN TUAL	710.709.001	69.218.210	641.490.791	90,26%
PPS BELAWAN	1.291.544.247	120.225.997	1.171.318.250	90,69%
PPS BITUNG	1.051.180.597	124.358.866	926.821.731	88,17%
PPS BUNGUS	1.072.445.937	319.869.703	752.576.234	70,17%
PPS CILACAP	1.325.669.451	316.780.903	1.008.888.548	76,10%
PPS KENDARI	1.475.598.343	223.380.258	1.252.218.085	84,86%

PPS NIZAM ZAHMAN	1.195.648.565	427.949.061	767.699.504	- 64,21%
PROV. BALI TP	83.285.776		83.285.776	- 100,00%
PROV. BANTEN TP	49.975.500		49.975.500	- 100,00%
PROV. BENGKULU TP	58.380.000		58.380.000	- 100,00%
PROV. D.I. ACEH TP	65.665.000		65.665.000	- 100,00%
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP	40.191.300		40.191.300	- 100,00%
PROV. DKI TP	8.806.364		8.806.364	- 100,00%
PROV. GORONTALO TP	90.190.000		90.190.000	- 100,00%
PROV. JAMBI TP	93.820.500		93.820.500	- 100,00%
PROV. JAWA BARAT TP	113.106.050		113.106.050	- 100,00%
PROV. JAWA TENGAH TP	112.116.500		112.116.500	- 100,00%
PROV. JAWA TIMUR TP	21.541.777		21.541.777	- 100,00%
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	237.253.385		237.253.385	- 100,00%
PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	129.633.480		129.633.480	- 100,00%
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	130.556.272		130.556.272	- 100,00%
PROV. LAMPUNG TP	165.833.700		165.833.700	- 100,00%
PROV. MALUKU TP	38.600.000		38.600.000	- 100,00%
PROV. MALUKU UTARA TP	59.000.000		59.000.000	- 100,00%
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	134.589.000		134.589.000	- 100,00%
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	153.800.000		153.800.000	- 100,00%
PROV. PAPUA	109.000.000		109.000.000	- 100,00%
PROV. RIAU TP	85.191.119		85.191.119	- 100,00%
PROV. SULAWESI BARAT TP	69.824.910		69.824.910	- 100,00%
PROV. SULAWESI SELATAN TP	91.345.000		91.345.000	- 100,00%

PROV. SULAWESI TENGAH TP	105.350.632		105.350.632	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	176.680.000		176.680.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI UTARA TP	57.704.350	11.100.000	46.604.350	- 80,76%
PROV. SUMATERA BARAT TP	123.701.745		123.701.745	- 100,00 %
PROV. SUMATERA SELATAN TP	28.282.900		28.282.900	- 100,00 %
PROV. SUMATERA UTARA TP	156.458.200		156.458.200	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	78.723.265.102	37.968.274.081	40.596.787.441	- 51,57%
#N/A	229.906.436		229.906.436	- 100,00 %
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3.738.243.724	2.659.131.333	-1.008.197.771	- 28,87%
PPN PEMANGKAT	26.477.600		26.477.600	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	3.711.766.124	2.659.131.333	-1.052.634.791	- 28,36%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.876.067.646	704.360.895	1.171.706.751	- 62,46%
BBPPI	98.567.000	14.095.000	84.472.000	- 85,70%
KALTIMTP	27.825.000		27.825.000	- 100,00 %
PAPUA BARAT TP	18.000.000		18.000.000	- 100,00 %
PPN AMBON	3.145.000		3.145.000	- 100,00 %
PPN BRONDONG	32.850.000	1.500.000	31.350.000	- 95,43%
PPN KARANGANTU	17.550.000	285.000	17.265.000	- 98,38%
PPN KEJAWANAN	28.500.000	10.755.000	17.745.000	- 62,26%
PPN KWANDANG	14.090.000	10.383.000	3.707.000	- 26,31%
PPN PEKALONGAN	4.000.000		4.000.000	- 100,00 %
PPN PEMANGKAT	99.950.000	18.025.000	81.925.000	- 81,97%
PPN PENGAMBENGAN		6.461.000	6.461.000	- #DIV/0!
PPN PRIGI	11.450.000		11.450.000	- 100,00 %
PPN SIBOLGA	42.000.000	13.500.000	28.500.000	- 67,86%
PPN SUNGAILIAT	6.300.000		6.300.000	- 100,00 %
PPN TANJUNG PANDAN	39.725.000	13.350.000	26.375.000	- 66,39%
PPN TELUK BATANG	2.850.000	150.000	2.700.000	- 94,74%
PPN TERNATE	4.800.000		4.800.000	- 100,00 %

PPN TUAL	26.081.000	7.170.000	18.911.000	- 72,51%
PPS BELAWAN	19.380.000	6.750.000	12.630.000	- 65,17%
PPS BITUNG	50.888.957	4.350.000	46.538.957	- 91,45%
PPS BUNGUS	34.295.000	7.520.000	26.775.000	- 78,07%
PPS CILACAP	9.785.000		9.785.000	- 100,00 %
PPS KENDARI	83.300.000	14.740.000	68.560.000	- 82,30%
PPS NIZAM ZAHMAN	109.750.000	59.130.000	50.620.000	- 46,12%
PROV. BALI TP	2.300.000		2.300.000	- 100,00 %
PROV. BANTEN TP	1.050.000		1.050.000	- 100,00 %
PROV. BENGKULU TP	15.350.000		15.350.000	- 100,00 %
PROV. DKI TP	22.200.000		22.200.000	- 100,00 %
PROV. GORONTALO TP	5.100.000		5.100.000	- 100,00 %
PROV. JAMBI TP	10.650.000		10.650.000	- 100,00 %
PROV. JAWA BARAT TP	5.400.000		5.400.000	- 100,00 %
PROV. JAWA TENGAH TP	30.525.000		30.525.000	- 100,00 %
PROV. JAWA TIMUR TP	4.500.000		4.500.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	9.500.000		9.500.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	2.880.000		2.880.000	- 100,00 %
PROV. KEPULAUAN RIAUP TP	8.250.000		8.250.000	- 100,00 %
PROV. MALUKU TP	5.800.000		5.800.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	1.800.000		1.800.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	7.200.000	2.000.000	5.200.000	- 72,22%
PROV. PAPUA	10.140.000		10.140.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI BARAT TP	10.500.000		10.500.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI SELATAN TP	10.500.000		10.500.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	21.550.000		21.550.000	- 100,00 %

PROV. SULAWESI UTARA TP	27.270.000		27.270.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA BARAT TP	3.000.000		3.000.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA SELATAN TP	11.200.000		11.200.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA UTARA TP	21.750.000		21.750.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	826.175.689	514.196.895	311.978.794	- 37,76%
#N/A	16.395.000		16.395.000	- 100,00 %
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2.577.423.392		2.577.423.392	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	2.577.423.392		2.577.423.392	- 100,00 %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.751.589.827	7.435.471.945	12.316.117.882	- 62,36%
BBPPI	13.953.120	4.000.000	9.953.120	- 71,33%
KALTIMTP	32.225.000		32.225.000	- 100,00 %
PAPUA BARAT TP	24.180.000		24.180.000	- 100,00 %
PPN AMBON	36.900.000	6.800.000	30.100.000	- 81,57%
PPN BRONDONG	37.950.000	6.000.000	31.950.000	- 84,19%
PPN KARANGANTU	60.050.000		60.050.000	- 100,00 %
PPN KEJAWANAN	18.875.000	2.500.000	16.375.000	- 86,75%
PPN KWANDANG	37.640.000		37.640.000	- 100,00 %
PPN PEKALONGAN	35.800.000		35.800.000	- 100,00 %
PPN PELABUHAN RATU	111.900.000		111.900.000	- 100,00 %
PPN PEMANGKAT	18.000.000		18.000.000	- 100,00 %
PPN PENGAMBENGAN	89.550.000	6.000.000	83.550.000	- 93,30%
PPN PRIGI	57.300.000	6.000.000	51.300.000	- 89,53%
PPN SIBOLGA	68.100.000	20.850.000	47.250.000	- 69,38%
PPN SUNGAILIAT	19.650.000		19.650.000	- 100,00 %
PPN TANJUNG PANDAN	17.700.000	27.620.000	9.920.000	- 56,05%
PPN TELUK BATANG	40.950.000	450.000	40.500.000	- 98,90%
PPN TERNATE	43.680.000	11.450.000	32.230.000	- 73,79%
PPN TUAL	6.000.000		6.000.000	- 100,00 %

PPS BELAWAN	64.750.000		64.750.000	- 100,00 %
PPS BITUNG	103.500.000		103.500.000	- 100,00 %
PPS BUNGUS	18.750.000		18.750.000	- 100,00 %
PPS CILACAP	54.909.000	3.325.000	51.584.000	- 93,94%
PPS KENDARI	254.110.000	81.600.000	172.510.000	- 67,89%
PPS NIZAM ZAHMAN	41.425.000	6.160.000	35.265.000	- 85,13%
PROV. BALI TP	19.620.000		19.620.000	- 100,00 %
PROV. BANTEN TP	26.250.000		26.250.000	- 100,00 %
PROV. BENGKULU TP	13.150.000		13.150.000	- 100,00 %
PROV. D.I. ACEH TP	35.900.000		35.900.000	- 100,00 %
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP	16.245.000		16.245.000	- 100,00 %
PROV. DKI TP	19.900.000		19.900.000	- 100,00 %
PROV. GORONTALO TP	10.500.000		10.500.000	- 100,00 %
PROV. JAMBI TP	3.000.000		3.000.000	- 100,00 %
PROV. JAWA BARAT TP	46.500.000		46.500.000	- 100,00 %
PROV. JAWA TENGAH TP	36.250.000		36.250.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	80.100.000		80.100.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	30.700.000		30.700.000	- 100,00 %
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	17.800.000		17.800.000	- 100,00 %
PROV. LAMPUNG TP	57.780.000		57.780.000	- 100,00 %
PROV. MALUKU TP	29.650.000		29.650.000	- 100,00 %
PROV. MALUKU UTARA TP	60.750.000		60.750.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	38.170.000		38.170.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	40.232.000		40.232.000	- 100,00 %
PROV. PAPUA	32.350.000		32.350.000	- 100,00 %

PROV. RIAU TP	33.210.000		33.210.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI BARAT TP	32.400.000		32.400.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI SELATAN TP	122.736.300		122.736.300	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGAH TP	30.530.000		30.530.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	50.050.000		50.050.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI UTARA TP	18.700.000		18.700.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA BARAT TP	36.450.000		36.450.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA SELATAN TP	6.000.000		6.000.000	- 100,00 %
PROV. SUMATERA UTARA TP	9.750.000		9.750.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	17.458.929.936	7.252.716.945	10.206.212.991	- 58,46%
#N/A	30.139.471		30.139.471	- 100,00 %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.384.671.158	7.281.395.767	25.103.275.391	- 77,52%
BBPPI	78.242.256	6.107.300	72.134.956	- 92,19%
KALTIMTP	61.606.324		61.606.324	- 100,00 %
PAPUA BARAT TP	117.100.000		117.100.000	- 100,00 %
PPN AMBON	646.616.000	75.069.281	571.546.719	- 88,39%
PPN BRONDONG	397.193.763	30.515.160	366.678.603	- 92,32%
PPN KARANGANTU	189.080.725	15.448.388	173.632.337	- 91,83%
PPN KEJAWANAN	92.050.327	23.063.178	68.987.149	- 74,95%
PPN KWANDANG	150.987.271	127.573.446	23.413.825	- 15,51%
PPN PEKALONGAN	126.402.653	7.945.000	118.457.653	- 93,71%
PPN PELABUHAN RATU	265.653.143	11.329.650	254.323.493	- 95,74%
PPN PEMANGKAT	305.249.100	14.152.600	291.096.500	- 95,36%
PPN PENGAMBENGAN	116.117.300	6.075.575	110.041.725	- 94,77%
PPN PRIGI	260.600.510	56.492.825	204.107.685	- 78,32%
PPN SIBOLGA	434.568.716	22.584.701	411.984.015	- 94,80%
PPN SUNGAILIAT	311.963.983	12.722.271	299.241.712	- 95,92%
PPN TANJUNG PANDAN	315.869.809	61.936.106	253.933.703	- 80,39%
PPN TELUK BATANG	250.928.000	28.178.687	222.749.313	- 88,77%
PPN TERNATE	289.008.631	39.310.789	249.697.842	- 86,40%

PPN TUAL	432.200.356	7.876.000	424.324.356	98,18%
PPS BELAWAN	263.800.679	17.492.635	246.308.044	93,37%
PPS BITUNG	664.152.257	50.150.704	614.001.553	92,45%
PPS BUNGUS	148.120.369	71.746.684	76.373.685	51,56%
PPS CILACAP	161.266.338	23.285.066	137.981.272	85,56%
PPS KENDARI	240.209.341	82.137.937	158.071.404	65,81%
PPS NIZAM ZAHMAN	80.894.527		80.894.527	100,00 %
PROV. BALI TP	22.203.180	8.183.199	14.019.981	63,14%
PROV. BANTEN TP	21.981.500	1.500.000	20.481.500	93,18%
PROV. BENGKULU TP	71.960.000		71.960.000	100,00 %
PROV. D.I. ACEH TP	106.255.000		106.255.000	100,00 %
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP	45.859.200	4.653.000	41.206.200	89,85%
PROV. DKI TP	41.855.159	3.530.000	38.325.159	91,57%
PROV. GORONTALO TP	127.701.000		127.701.000	100,00 %
PROV. JAMBI TP	45.291.000	6.488.900	38.802.100	85,67%
PROV. JAWA BARAT TP	109.096.900	2.426.000	106.670.900	97,78%
PROV. JAWA TENGAH TP	193.081.460	1.970.000	191.111.460	98,98%
PROV. JAWA TIMUR TP	13.638.215	2.845.500	10.792.715	79,14%
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	73.816.034		73.816.034	100,00 %
PROV. KALIMANTAN TENGAH TP	18.027.120	9.333.160	8.693.960	48,23%
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	65.298.638	7.021.797	58.276.841	89,25%
PROV. LAMPUNG TP	108.418.150	3.096.700	105.321.450	97,14%
PROV. MALUKU TP	138.312.000	6.800.000	131.512.000	95,08%
PROV. MALUKU UTARA TP	105.700.000		105.700.000	100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	62.233.000	4.800.000	57.433.000	92,29%
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	69.500.000	15.000.000	54.500.000	78,42%
PROV. PAPUA	59.392.000		59.392.000	100,00 %
PROV. RIAU TP	61.101.112	9.796.300	51.304.812	83,97%
PROV. SULAWESI BARAT TP	78.595.548	12.672.716	65.922.832	83,88%
PROV. SULAWESI SELATAN TP	55.280.700	11.698.000	43.582.700	78,84%
PROV. SULAWESI TENGAH TP	88.110.618	7.682.497	80.428.121	91,28%
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	124.691.000	5.300.000	119.391.000	95,75%

PROV. SULAWESI UTARA TP	29.868.400		29.868.400	- 100,00 %
PROV. SUMATERA BARAT TP	91.332.282	7.659.570	83.672.712	- 91,61%
PROV. SUMATERA SELATAN TP	70.376.214	2.700.000	67.676.214	- 96,16%
PROV. SUMATERA UTARA TP	147.812.000		147.812.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	23.570.334.310	6.341.497.519	17.228.836.791	- 73,10%
#N/A	167.667.040	13.546.926	154.120.114	- 91,92%
Grand Total	162.445.383.793	60.391.074.074	102.054.309.719	- 62,82%

*Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp109.816.091.605*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp121.974.977.373 dan Rp109.816.091.605.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat (nelayan untuk mendukung kesejahteraan nelayan.

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	24.250.537.950		24.250.537.950	- 100,00 %
PAPUA BARAT TP	485.600.000		485.600.000	- 100,00 %
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	288.599.000		288.599.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	23.476.338.950		23.476.338.950	- 100,00 %
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		884.672.250	884.672.250	#DIV/0 !
SEKRETARIAT DJPT		884.672.250	884.672.250	#DIV/0 !
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	6.899.936.900		6.899.936.900	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	6.899.936.900		6.899.936.900	- 100,00 %
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	6.005.510.563	11.676.028.542	5.670.517.979	94,42 %
SEKRETARIAT DJPT	6.005.510.563	11.676.028.542	5.670.517.979	94,42 %

Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	56.424.522.060	76.666.722.300	20.242.200.240	35,87 %
PROV. JAWA TENGAH TP	384.000.000		- 384.000.000	- 100,00 %
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	277.500.000		- 277.500.000	- 100,00 %
PROV. LAMPUNG TP	265.000.000		- 265.000.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI SELATAN TP	448.900.000		- 448.900.000	- 100,00 %
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	449.000.000		- 449.000.000	- 100,00 %
SEKRETARIAT DJPT	54.600.122.060	76.140.119.308	21.539.997.248	39,45 %
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	28.394.469.900	20.588.668.513	- 7.805.801.387	- 27,49 %
SEKRETARIAT DJPT	28.394.469.900	20.588.668.513	- 7.805.801.387	- 27,49 %
Grand Total	121.974.977.373	109.816.091.605	-12.158.885.768	- 9,97%

Beban Bantuan Sosial
Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp230.084.155.402

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 230.972.040.573 dan Rp230.074.542.029.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Properti Investasi	2.378.597.665	2.462.298.092	83.700.427	3,52%

Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	7.015.625	7.015.625	-	0,00%
Belanja Amortisasi Lisensi	19.800.000	9.900.000	-9.900.000	-50,00%
Belanja Amortisasi Software	112.388.625	72.717.375	-39.671.250	-35,30%
Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.769.333		-14.769.333	-100,00%
Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.112.813.801	20.414.477.884	1.301.664.083	6,81%
Belanja Penyusutan Irigasi	45.801.468.347	40.004.597.742	-5.796.870.605	-12,66%
Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	119.404.645.236	117.085.644.947	-2.319.000.289	-1,94%
Belanja Penyusutan Jaringan	5.986.573.604	6.298.559.583	311.985.979	5,21%
Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.255.034.227	2.177.731.889	922.697.662	73,52%
Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.878.934.110	41.551.212.265	4.672.278.155	12,67%
Grand Total	230.972.040.573	230.084.155.402	-887.885.171	-0,38%

Beban Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih

Rp2.527.016.583

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp143.265.849 dan Rp2.527.016.583.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Row Labels	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	180.738	3.654.198.268	-3.654.017.530	-100,00%
BBPPI	99.728	24.195	75.533	312,18%
PPN AMBON	4.253	1.636	2.617	159,96%
PPN BRONDONG	12.512	1.579	10.933	692,40%
PPN KWANDANG	8.291	2.232	6.059	271,46%
PPN PEKALONGAN	822	3.303	-2.481	-75,11%
PPN PELABUHAN RATU	1.867	740	1.127	152,30%
PPN PENGAMBENGAN	9.841	10.210	-369	-3,61%
PPN TERNATE	10.752	3.747	7.005	186,95%
PPS BELAWAN	2.347		2.347	#DIV/0!
PPN SIBOLGA	262		262	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT	6.476		6.476	#DIV/0!

PPS BUNGUS		-7.523	7.523	-100,00%
PPS CILACAP	1.140		1.140	#DIV/0!
PPS KENDARI	15.636	9.201	6.435	69,94%
PPS NIZAM ZAHMAN	14.786	178.972	-164.186	-91,74%
SEKRETARIAT DJPT	1.145.590	3.653.969.976	-3.652.824.386	-99,97%
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang PNB	-314.860.384	-3.510.932.419	3.196.072.035	-91,03%
PPN BRONDONG	7.495		7.495	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN	-290.903.122	-3.326.398.332	3.035.495.210	-91,25%
PPN KWANDANG	3.943.791	18.294	3.925.497	#####
PPN PELABUHAN RATU	110.157	-50.292	160.449	-319,03%
PPN PENGAMBENGAN	-3.985.177	-2.886.390	-1.098.787	38,07%
PPS BITUNG	-21.209	2.537.138	-2.558.347	-100,84%
PPS BUNGUS		-205.227.550	205.227.550	-100,00%
PPS KENDARI	33.533.652	37.950.206	-4.416.554	-11,64%
PPS NIZAM ZAHMAN	-57.427.737	-7.746.236	-49.681.501	641,36%
SEKRETARIAT DJPT	-118.234	-9.129.257	9.011.023	-98,70%
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang ? Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.841.696.229		2.841.696.229	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT	2.841.696.229		2.841.696.229	#DIV/0!
Grand Total	2.527.016.583	143.265.849	2.383.750.734	1663,87%

Surplus / Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.220.295.949

D.11 Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp42.716.279.634 dan Rp3.220.295.949.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Neraca Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

*Ekuitas Awal Rp
5.883.172.592.765*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp5.802.866.832.042 dan Rp5.883.172.592.765.

*Surplus/Defisit LO
Rp186.500.857.875*

E.2 Surplus/Defisit-LO

Nilai Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp(1.850.239.837) dan Rp186.500.857.875.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi Rp 0*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Koreksi yang
menambah/mengura
ngi ekuitas Aset
(Rp2.055.017.018)*

E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar (Rp36.181.455.622) dan (Rp2.055.017.018).

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp1*

E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp42.787.497.856 dan Rp1.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat koreksi saldo awal persediaan dan koreksi atas persediaan yang belum diproses menjadi persediaan jadi yang merupakan tranfer dari Biro Umum, Sekretariat Jenderal KKP.

*Selisih Revaluasi
Aset Rp 0*

E.4.2 Selisih Revaluasi Aset

Nilai Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp(2.250.543.656)*

E.4.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp(80.960.612.579) dan Rp(2.250.543.656).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Row Labels	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		494.546.750	494.546.750	#DIV/0!
BBPPI		494.546.750	494.546.750	#DIV/0!
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	77.075.318.969	1.755.996.906	-	-97,72%
PAPUA BARAT TP	242.161.475	-	242.161.475	-100,00%
PPN AMBON	6.801.305	9.806.125	16.607.430	-244,18%
PPN BRONDONG	14.615.359	107.146.800	121.762.159	-833,11%
PPN KARANGANTU	32.866.262	-	32.866.262	-100,00%
PPN KEJAWANAN	10.350.800	17.201.680	27.552.480	-266,19%
PPN KWANDANG	17.098.895	39.293.760	22.194.865	129,80%
PPN PEKALONGAN	133.118.000	-	133.118.000	-100,00%
PPN PELABUHAN RATU	-	563.815.315	563.815.315	#DIV/0!
PPN PENGAMBENGAN	-	20.169.683	20.169.683	#DIV/0!

PPN PRIGI	57.000.750	-	-	-126,86%
PPN SIBOLGA	419.956.100	-	-	-63,70%
PPN SUNGAILIAT	123.451.174	-	-	-97,16%
PPN TANJUNG PANDAN	265.859.944	-	-	-100,00%
PPN TELUK BATANG	46.470.970	-	-	-107,79%
PPN TERNATE	453.256.408	-	-	-100,00%
PPN TUAL	2.301.407	-	-	-100,00%
PPS BELAWAN	61.781.694	-	-	-100,00%
PPS BITUNG	251.469.230	-	-	-104,88%
PPS CILACAP		-	-	#DIV/0!
PPS KENDARI		-	-	#DIV/0!
PPS NIZAM ZAHMAN		-	-	#DIV/0!
PROV. BENGKULU TP		25.964.370	25.964.370	#DIV/0!
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	261.895.910	-	-	-100,00%
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	399.484.801	-	-	-100,00%
PROV. SUMATERA BARAT TP		82.794.600	82.794.600	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT	75.683.328.423	3.046.507.188	-	-95,97%
Grand Total	77.075.318.969	2.250.543.656	74.824.775.313	-97,08%

- a. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi, hanya terdapat pada BBPI Semarang yang berasal dari transaksi koreksi nilai berkurang atas hak paten berdasarkan penilaian KPKNL.
- b. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi terdapat pada beberapa satker dengan rincian sebagai berikut;
 - Bengkulu, merupakan hibah keluar atas pagar, CCTV, Portabel report link, TV Monitor, Hard Disk, kabel, data recorder, dan alat produksi perkinan lainnya
 - Sumatera Barat merupakan hibah keluar atas pagar dalam rangka mendukung PIT
 - Ambon merupakan koreksi nilai bertambah atas pagar dan Gedung bangunan
 - PPN Brondong merupakan reklasifikasi atas Gedung bangunan permanen
 - PPN Kejawanan merupakan penyelesaian KDP

- PPN Kwandang merupakan reklasifikasi masuk atas Gedung permanen lainnya
- PPN Pelabuhanratu merupakan koreksi pencatatan atas bangunan pabrik es
- PPN Pengambengan merupakan Koreksi pencatatan dan reklasifikasi atas rumah negara, bangunan TPI, pagar, bangunan parkir tertutup dll
- PPN Prigi merupakan koreksi pencatatan KDP dan reklasifikasi atas Gedung bangunan permanen
- PPN Sibolga merupakan reklasifikasi atas kendaraan bermotor dan pick up
- PPN Sungailiat merupakan reklasifikasi atas Gedung bangunan permanen
- PPP Teluk Batang merupakan reklasifikasi atas Gedung bangunan permanen
- PPS Bitung merupakan koreksi saldo awal atas Gedung dan bangunan rumah negara

*Koreksi Lain-lain
Rp195.526.637*

E.5 Koreksi Lain-lain

Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.991.659.101 dan Rp195.526.637.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas jurnal balik penyisihan piutang dan piutang yang migrasi dari modul GLP ke modul piutang.

Row Labels	2024	2025
Koreksi Lainnya	- 620.936.021	- 195.526.637
BBPPI	- 25.684	- 24.195
PAPUA BARAT TP	832.996.000	
PPN AMBON	- 2.766	- 1.636
PPN BRONDONG	- 89.917	314.171
PPN KEJAWANAN	1.342.260.583	
PPN KWANDANG		- 2.232
PPN PEKALONGAN	- 1.883	
PPN PELABUHAN RATU	- 10.773	
PPN PENGAMBENGAN	- 12.652	
PPN TANJUNG PANDAN	- 12.929	
PPN TERNATE	- 3.382	- 3.747

PPS BELAWAN	-	15.763	
PPS BITUNG	-	85.905	- 1.449
PPS KENDARI	-	128.135	- 3.210.488
PPS NIZAM ZAHMAN		236.499.221	- 178.972
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP		537.727.080	
PROV. SULAWESI TENGGARA TP		34.575.266	
PROV. SULAWESI UTARA TP		15.973.565	
SEKRETARIAT DJPT	-	3.620.577.947	- 192.418.089
Grand Total	-	620.936.021	- 195.526.637

Transaksi Antar
Entitas
Rp613.337.939.158

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp118.337.456.182 dan Rp613.337.939.158.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Row Labels	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.701.818.841.882	834.829.659.593	866.989.182.289	103,85%
Diterima dari Entitas Lain	-	-	77.535.125.531	-6,86%
Transfer Keluar	9.130.723.710	41.880.554.159	32.749.830.449	358,68%
Transfer Masuk	12.807.591.295	294.887.709.947	282.080.118.652	2202,44%
Pengesahan Hibah Langsung	38.387.742.179	82.936.538.758	44.548.796.579	116,05%
Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	-	574.489.000	574.489.000	#DIV/0!
Total	613.337.939.158	118.337.456.182	495.574.971.976	418,78%

Ekuitas Akhir
Rp6.680.956.372.780

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp5.883.172,592.765 dan Rp6.680.956.372.780.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Penjelasan atas pengungkapan lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak memiliki kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 Kualitas Data Keuangan dan Hasil Rekonsiliasi

Pada Direktorat Jenderaerak Perikanan Tangkap periode 31 Desember 2025 sudah tidak ada *to do list* dan Transaksi Dalam Konfirmasi yang perlu ditindaklanjuti.

F.3 Capaian Output per Fungsi

Kode		Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1		3	4	5	6	7	8	9
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan							
2337.ABR.002	Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	127.867.000	126.985.726	99,31%	6	6	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2337.ABR.003	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	83.520.000	82.956.410	99,33%	1	1,03	Rekomendasi Kebijakan	103,00%
2337.ABR.004	Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	2.060.062.000	1.432.723.299	69,55%	5	5	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	1.480.046.000	1.061.150.435	71,70%	1313	1987	Produk	151,33%
2337.ADC.001	Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	278.777.000	140.954.631	50,56%	4	4	Produk	100,00%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	1.150.447.000	1.149.554.268	99,92%	1114	1697	Orang	152,33%
2337.BKB.001	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	51.390.000	49.486.814	96,30%	25	39	laporan	156,00%
2337.PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	71.650.000	71.592.400	99,92%	800	1010	Produk	126,25%
2337.PDI.001	Awak kapal perikanan yang disertifikasi	122.332.000	122.309.981	99,98%	5000	7692	Orang	153,84%

2337.PDI.002	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	662.164.000	659.217.818	99,56%	30	31	Orang	103,33%
2337.QDC.001	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	73.297.000	72.908.296	99,47%	14000	14916	Orang	106,54%
2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	18.776.512.000	18.489.460.186	98,47%	13745	18058	Unit	131,38%
2337.QEG.003	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	303.297.741.000	175.230.947.895	57,78%	13220	12714	Unit	96,17%
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan							
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	236.719.000	231.241.358	97,69%	8	8	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2338.BGA.001	Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	1.122.700.000	1.018.340.978	90,70%	110	110	Lembaga	100,00%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	28.513.885.000	15.603.835.518	54,72%	30	30	Lembaga	100,00%
2338.BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	1.071.162.000	761.103.513	71,05%	150	150	Lembaga	100,00%
2338.PDI.001	Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	93.710.000	93.679.300	99,97%	30	30	Orang	100,00%
2338.PDI.002	Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	44.915.000	44.653.000	99,42%	50	50	Orang	100,00%
2338.QGA.001	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	140.110.000	140.039.467	99,95%	9	9	Lembaga	100,00%
2338.QGA.002	Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	25.355.726.000	24.698.177.505	97,41%	237	237	Lembaga	100,00%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	336.000.000.000	24.031.194.284	7,15%	4	2	Unit	50,00%
2338.RBQ.004	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	263.692.000.000	16.667.164.202	6,32%	8	4	Unit	50,00%
2338.RBQ.006	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	70.000.000.000	12.785.837.044	18,27%	7	0	Unit	0,00%
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan							
999	Cadangan			#DIV/0!			cadangan	#DIV/0!
2339.ACA.001	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.483.846.000	1.472.911.499	99,26%	60000	60000	Produk	100,00%
2339.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	3.197.410.000	3.178.315.873	99,40%	40	40	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2339.PCA.001	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	110.973.000	106.398.746	95,88%	6000	6000	Produk	100,00%
2339.QDC.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	336.000.000	255.868.935	76,15%	5000	5000	Orang	100,00%
2339.QDC.002	Nelayan yang difasilitasi pengembangannya	678.949.000	227.247.295	33,47%	700	700	Orang	100,00%

2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	738.960.000	397.204.000	53,75%	750	700	Orang	93,33%
2339.QDD.001	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	266.160.000	259.250.000	97,40%	2000	100	Kelompok Masyarakat	5,00%
2339.QDD.004	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (Korporasi)	236.460.000	134.601.313	56,92%	4	4	Kelompok Masyarakat	100,00%
2339.QEH.001	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	1.121.473.953.000	979.128.633.778	87,31%	66	100	Kelompok Masyarakat	151,52%
2339.QEH.005	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)	1.000.000.000	-	0,00%	3	0	Kelompok Masyarakat	0,00%
2339.QKA.003	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	320.572.000	234.469.926	73,14%	50000	50698	laporan	101,40%
2339.UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	2.894.873.000	523.232.343	18,07%	37	37	Provinsi	100,00%
032.03.HB	Program Dukungan Manajemen							
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan							
2341.ABR.001	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Perairan Darat	25.671.983.000	25.671.983.000	100,00%	155	155	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2341.ABR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	221.992.000	221.991.800	100,00%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2341.ABR.003	Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	260.858.000	250.013.525	95,84%	12	12	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2341.BGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk	10.689.000	9.395.153	87,90%	1	1	Lembaga	100,00%
2341.PBR.001	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	204.348.000	200.297.090	98,02%	12	12	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2341.PBR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	225.108.000	224.924.041	99,92%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2341.PBR.003	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	1.947.478.000	1.945.068.220	99,88%	11	11	Rekomendasi Kebijakan	100,00%
2341.QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	93.053.000	89.613.770	96,30%	10	10	Lembaga	100,00%
2341.QGA.004	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaannya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)	9.000.000.000	-	0,00%	3	0	Lembaga	0,00%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	41.061.000	36.380.638	88,60%	2720	3605	laporan	132,54%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen							
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap							
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8.310.700.000	7.634.008.255	91,86%	26	26	Unit	100,00%
2342.EBA.956	Layanan BMN	254.087.000	208.659.796	82,12%	1	1	Layanan	100,00%
2342.EBA.957	Layanan Hukum	176.360.000	175.890.947	99,73%	1	1	Layanan	100,00%
2342.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	416.123.000	404.127.893	97,12%	1	1	Layanan	100,00%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	93.789.000	86.204.703	91,91%	19	19	Layanan	100,00%
2342.EBA.962	Layanan Umum	94.056.000	92.947.516	98,82%	1	1	Layanan	100,00%

2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	674.210.000	668.208.723	99,11%	18	18	Layanan	100,00%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	401.468.739.000	378.796.105.308	94,35%	24	24	Layanan	100,00%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	15.118.619.000	9.029.287.468	59,72%	12	11	Unit	91,67%
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	7.678.148.000	4.000.659.466	52,10%	12	12	Unit	100,00%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	332.667.000	281.685.284	84,67%	20	20	Layanan	100,00%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.380.601.000	2.140.972.398	89,93%	27	27	Layanan	100,00%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	670.655.000	661.283.658	98,60%	51	51	Layanan	100,00%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.677.545.000	1.631.624.735	97,26%	49	41	Layanan	83,67%
2342.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	17.800.000	16.240.000	91,24%	1	1	Layanan	100,00%
	Subtotal	2.664.285.557.000	1.715.161.221.423	64,38%				
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*							
	Total							

F.4 Capaian Output Prioritas Nasional

NAMA SATKER	URAIAN RO	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSEN REALISASI	DESKRIPSI PROGRAM PRIORITAS
Sesditjen Perikanan Tangkap	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	800	1010	100	71.650.000	71592400	99.92	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	14000	14000	100	73.297.000	72908296	99.47	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	13745	18058	100	18.776.512.000	18489460186	98.47	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	13220	13220	100	303.297.741.000	175230947895	57.78	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	30	30	100	93.710.000	93679300	99.97	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	50	50	100	44.915.000	44653000	99.42	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	9	9	100	140.110.000	140039467	99.95	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Sesditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	200	200	100	24.146.200.000	24134552714	99.95	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Sesditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	2	0	75	34.481.750.000	23287722523	67.54	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

Sesditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	4	0	75.07	63.367.000.000	15947974826	25.17	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	7	0	75	70.000.000.000	12785837044	18.27	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Sesditjen Perikanan Tangkap	Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I	4	0	0.01	50.000.000	0	0	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Sesditjen Perikanan Tangkap	Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	40	40	100	3.197.410.000	3178315873	99.4	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Sesditjen Perikanan Tangkap	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	6000	6000	100	110.973.000	106398746	95.88	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Sesditjen Perikanan Tangkap	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	5000	5000	100	336.000.000	255868935	76.15	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	700	700	100	678.949.000	227247295	33.47	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	750	700	100	738.960.000	397204000	53.75	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	2000	100	20.1	266.160.000	259250000	97.4	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (Korporasi)	4	4	100	236.460.000	134601313	56.92	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	66	131	100	1.121.473.953.000	979321491518	87.32	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)	3	0	0.1	1.000.000.000	0	0	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	50000	50698	100	320.572.000	234469926	73.14	Swasembada Pangan
Sesditjen Perikanan Tangkap	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	37	37	100	2.894.873.000	523232343	18.07	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Sesditjen Perikanan Tangkap	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	12	12	100	204.348.000	200297090	98.02	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Sesditjen Perikanan Tangkap	Rekomendasi kebijakan pengelolaan	155	155	100	25.668.213.000	224924041	0.88	Reformasi Pengelolaan Sampah

	SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan							Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Sesditjen Perikanan Tangkap	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	11	11	100	1.947.478.000	1945068220	99.88	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Sesditjen Perikanan Tangkap	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	60.575.000	60514770	99.9	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Sesditjen Perikanan Tangkap	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang mengelola kelembagaanya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)	3	0	0.1	9.000.000.000	0	0	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Sesditjen Perikanan Tangkap	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	100	100	100	9.119.000	9117658	99.99	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Karangantu	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	80	80	100	769.000	610000	79.32	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Pekalongan	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	160	160	100	1.272.000	1262300	99.24	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Sungailiat	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	100	100	100	806.000	800000	99.26	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Tanjung Pandan	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	100	100	100	1.090.000	1072680	98.41	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppp Teluk Batang	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	60	399	100	1.369.000	1183000	86.41	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Pemangkat	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	3.119.000	3095000	99.23	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Pemangkat	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	120	120	100	1.750.000	1550000	88.57	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Kwandang	Laporan data logbook penangkapan ikan yang	100	300	100	1.112.000	1100000	98.92	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi

	dikumpulkan dan diverifikasi							dari Hulu ke Hilir
Pps Belawan	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	1	1	100	200.000.000	164140378	82.07	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
Pps Belawan	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	3.031.000	2992500	98.73	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Belawan	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	160	160	100	1.098.000	1050000	95.63	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Ternate	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	3.214.000	0	0	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Ternate	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	80	80	100	1.786.000	783000	43.84	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Prigi	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	100	206	100	1.142.000	1142000	100	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Brondong	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	1.000.000	1000000	100	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Brondong	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	150	150	100	680.000	680000	100	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Cilacap	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	1	1	100	117.149.000.000	233538008	0.2	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
Pps Cilacap	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	2.932.000	2900000	98.91	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Cilacap	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	200	200	100	3.063.000	2970000	96.96	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Bungus	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah	1	1	100	3.589.000	3523500	98.17	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi

	Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional							dari Hulu ke Hilir
Pps Bungus	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	100	100	100	1.224.000	1150000	93.95	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Nizam Zachman	Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	37	37	100	1.209.526.000	563624791	46.6	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Pps Kendari	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berbatasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	1	1	100	28.326.000.000	166206536	0.59	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
Pps Kendari	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	4.187.000	4183000	99.9	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Kendari	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	200	200	100	2.434.000	2302000	94.58	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Pelabuhan Ratu	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	160	160	100	1.605.000	440000	27.41	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Sibolga	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	160	160	100	2.957.000	2800000	94.69	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Tual	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	2.600.000	2599000	99.96	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Tual	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	50	227	100	2.785.000	2785000	100	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Kejawanan	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	1	1	100	56.350.000.000	411202282	0.73	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Ppn Kejawanan	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	160	160	100	2.528.000	1140000	45.09	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Ppn Pengembangan	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	1	1	100	245.168.250.000	332269479	0.14	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

Ppn Pengambengan	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	180	243	100	1.582.000	1553000	98.17	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Bitung	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	1	1	100	54.650.000.000	156392194	0.29	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
Pps Bitung	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	1	100	8.806.000	8806000	100	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pps Bitung	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	200	200	100	890.000	890000	100	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

F.5. Program Prioritas Presiden pada Ditjen Perikanan Tangkap

Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan garis pantai sepanjang 81 ribu km terpanjang kedua di dunia dan wilayah kepulauan seluas 1.904 ribu km², Indonesia berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang menyimpan 37% spesies ikan terumbu karang dan 76% spesies karang dunia. Sumber daya ini menjadikan Indonesia salah satu pemasok utama komoditas perikanan global, sekaligus penopang kebutuhan nasional, di mana 54% protein hewani masyarakat berasal dari ikan. Akan tetapi meski memiliki potensi sebagaimana telah disebutkan, kehidupan masyarakat nelayan dan pembudidaya masih menghadapi berbagai tantangan. Permukiman yang belum layak, keterbatasan sarana prasarana hingga akses teknologi kerap melekat pada masyarakat nelayan dan pembudidaya ditambah kerentanan terhadap bencana alam. Program Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya. Melalui pembangunan yang terarah, penguatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat, program ini diharapkan mampu melahirkan kampung nelayan dan kampung budi daya yang lebih mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima mandat:

1. mendorong kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUB, Poklahsar, Pokdakan dan Kelompok Petambak Garam) bergabung di dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan;
2. mendorong Koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi KDKMP.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Mineral, KKP melalui Ditjen Perikanan tangkap telah mencanangkan program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebanyak 100 lokasi di tahun 2025. Program KNMP ini bersinergi dengan KDKMP yang ditetapkan sebagai Kelompok Masyarakat Pengelola bantuan sarana dan prasarana di kawasan KNMP.

3. Pada Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan amanat dari Presiden RI dalam melaksanakan program prioritas dalam bentuk program Kampung Nelayan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Mineral sebanyak 100 lokasi di tahun 2025 yang tersebar di 30 Provinsi dan 93 Kabupaten/Kota dengan rincian Tahap I sebanyak 65 lokasi dan Tahap II sebanyak 35 lokasi. Intervensi program mencakup aspek fisik dan non fisik yang terintegrasi mulai dari pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan perikanan, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengembangan sarana rantai dingin, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan nelayan.

Pada aspek fisik, dilakukan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung perikanan melalui pembangunan tambatan perahu, fasilitas docking, shelter nelayan, revetment, kios nelayan, tempat pembuangan sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), SPBUN, serta bangunan kantor dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan penguatan sarana penangkapan ikan berupa penyediaan paket kapal perikanan sejumlah 239 unit, mesin kapal sejumlah 550 unit, dan alat penangkapan ikan sejumlah 14.700 unit. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil perikanan, program ini juga mencakup pengembangan sarana rantai dingin melalui pembangunan gudang beku sejumlah 54 unit, pabrik es sejumlah 62 unit, kendaraan berpendingin sejumlah 63 unit, serta penyediaan coolbox sejumlah 3.250 unit untuk menjaga mutu hasil tangkapan hingga ke tingkat pemasaran.

Pada aspek non fisik, program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian nelayan melalui kegiatan capacity building dan penguatan kewirausahaan, pengolahan hasil perikanan, pendampingan usaha, fasilitasi akses pemasaran, serta diversifikasi mata pencaharian nelayan. Penguatan kelembagaan nelayan dilakukan melalui pendirian dan pengembangan koperasi, baik koperasi unit bisnis maupun koperasi korporasi nelayan, sebagai sarana konsolidasi usaha dan peningkatan posisi tawar nelayan. Di samping itu, dilakukan fasilitasi sertifikasi, standardisasi, dan perizinan antara lain berupa SKN, HACCP, SSOP, GMP, KKPRL bagi kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, serta perizinan berusaha dengan kolaborasi lintas Eselon I lingkup KKP untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan daya saing produk perikanan.

Alokasi Anggaran

Selama periode berjalan serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Mineral, KKP melalui Ditjen Perikanan tangkap telah mencanangkan program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebanyak 100 lokasi di tahun 2025. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mendapatkan Alokas Belanja Tambahan (ABT) dari Menteri Keuangan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA.BUN) sebesar Rp1,340,576,083,000,-. Alokasi Belanja Tambahan tersebut telah disahkan melauai revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: S-718/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Agustus 2025, Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap KKP TA 2025. adapun perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Barang	-	1,340,576,083,000
Belanja Modal		
Jumlah	-	1,340,576,083,000

Dalam rangka mengakomodir pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih TA. 2025 sesuai dengan kebutuhan dilapangan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasi anggaran tambahan yang bersumber dari Relaksasi blokir efisiensi (Kode A), yang telah disahkan melauai revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: S-988/AG/AG.3/2025 tanggal 20 November 2025, Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap KKP TA 2025. adapun perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Barang	1,340,576,083,000	1,409,228,789,000
Belanja Modal		
Jumlah	1,340,576,083,000	1,409,228,789,000

Sehingga alokasi anggaran Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih TA. 2025 adalah sebesar Rp1,409,228,789,000 dan Efisiensi belanja / blokir sebesar Rp 1,467,100,000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp1,407,761,689,000,-.

Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih TA. 2025 adalah sebesar sebesar Rp1,139,677,044,643,- atau mencapai 80.96 persen dari alokasi anggaran Rp1,409,228,789,000,- dan Efisiensi belanja / blokir sebesar Rp 1,467,100,000,- sehingga dengan pagu efektif sebesar Rp1,407,761,689,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang	2,450,742,000	1,025,326,231	41.84
Belanja Jasa	70,557,459,000	48,114,810,721	68.19
Belanja Perjalanan Dinas	14,959,139,000	14,205,113,769	94.96
Belanja Untuk Diserahkan Kemasyarakatan atau Pemda	1,319,794,349,000	1,076,331,793,922	81.55
Total Belanja	1,407,761,689,000	1,139,677,044,643	80.96

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1,025,326,231,- atau mencapai 41.84% dari alokasi anggaran sebesar Rp.2,450,742,000,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja bahan (belanja ATK, konsumsi rapat, dll) dan Belanja barang Non Operasional lainnya.

Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp48,114,810,721,- atau mencapai 68.19% dari alokasi anggaran sebesar Rp70,557,459,000,-. Belanja tersebut terdiri dari Belanja jasa konsultan, Belanja belanja sewa, Belanja jasa profesi dan Belanja jasa lainnya. Adapun realisasi belanja jasa tersebut ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jasa konsultasi berupa konsultan pengawas dan perencana Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk 100 lokasi dengan nilai kontrak sebesar Rp13,890,401,000,-
2. Pekerjaan Jasa lainnya berupa:

- Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pembuatan Video Podcast dan Perluasan Publikasi Capaian Kinerja I Tahun Program Prioritas Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp1,190,000,000,-
 - Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat (TPPM) KNMP Tahun 2025 sebesar Rp1,666,665,000,-
 - Pekerjaan Paket Pembuatan Video Company Profile dan Web Series Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebesar Rp 1,190,142,000,-
 - Pelatihan Manajemen dan Teknis dalam rangka Capacity Building Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2025 sebesar Rp 2,099,565,000,-
 - Pendampingan Penguatan Kelembagaan, Pengelolaan Usaha, dan Keuangan Koperasi Produsen Sumber Binyeri Maju di Kalamo Biak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 269,785,500,-
 - Pengadaan Survey Sosial Ekonomi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana di Lokasi KNMP TA 2025 sebesar Rp 2,062,786,000,-
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Kampung Nelayan Merah Putih berbasis Kompetensi TA 2025 sebesar Rp 436,150,000,-
3. Penyiapan Pelaksanaan Pembangunan 1000 kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 sebesar Rp 20,132,904,300.

Realisasi belanja belanja terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3,084,947,892,- dari total nilai kontrak sebesar Rp70,557,459,000,-, hal ini disebabkan adanya keterlambatan penyampaian data pembayaran ke KPPN Jakarta VI. Berkaitan dengan hal tersebut dengan tagihan yang belum dibayar, akan dibayarkan sebagai tunggakan Tahun Anggaran 2025 atas beban DIPA Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme revisi DIPA.

Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp14,959,139,000,- atau mencapai 68.19% dari alokasi anggaran sebesar Rp14,205,113,769,- Belanja tersebut terdiri dari Belanja perjalanan biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Adapun realisasi belanja perjalanan dinas ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Fullboard Meeting Pembahasan Dokumen Pengadaan dan Kesiapan Pelaksanaan PBJ Untuk Pekerjaan Kegiatan Pembangunan KNMP Tahap II TA 2025 Rp400,000,000,-

2. Paket Fullboard Meeting Pembahasan Dokumen Pengadaan dan Kesiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahap II TA 2025 Rp239,400,000,-
3. Paket Fullboard Meeting Pembahasan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan KNMP Tahap II Tahun 2025 Rp107,100,000,-

Belanja Untuk Diserahkan Kemasyarakat atau Pemda

Realisasi Belanja Untuk Diserahkan Kemasyarakat atau Pemda sebesar Rp1,076,331,793,922,- atau mencapai 80.95% dari alokasi anggaran sebesar Rp1,319,794,349,000,-. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Peralatan Dan Mesin, Belanja Gedung Dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan. Adapun realisasi belanja pekerjaan Untuk Diserahkan Kemasyarakat atau Pemda dilaksanakan secara kontraktual dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp306,059,562,700,- atau mencapai 64.86% dari alokasi anggaran sebesar Rp471,910,376,000,-. Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda tersebut, pekerjaannya dilaksanakan secara kontraktual dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Alat Peanangkapan Ikan TA 2025, sebanyak 3 Paket untuk 119 lokasi dengan nilai sebesar Rp13,616,415,000,-
 - Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Cool Box, sebanyak 3 Paket untuk 65 lokasi dengan nilai sebesar Rp 8,117,875,000,-
 - Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Gudang Beku Portable, sebanyak 5 Paket untuk 54 lokasi dengan nilai sebesar Rp 139,821,308,000,-
 - Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Kapal Penangkap Ikan <5GT, sebanyak 4 Paket untuk 26 lokasi dengan nilai sebesar Rp17,702,795,000,-
 - Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Kendaraan berpendingin, sebanyak 2 Paket untuk 63 lokasi dengan nilai sebesar Rp44,360,000,000,-
 - Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Mesin Kapal Penangkap Ikan, sebanyak 6 Paket untuk 59 lokasi dengan nilai sebesar Rp11,370,979,700,-
 - Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Pabrik Es Portabel (Balok), sebanyak 3 Paket untuk 32 lokasi dengan nilai sebesar Rp 51,135,300,000,-

- Pengadaan Barang Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Pabrik Es Portabel (Selurry) sebanyak 5 Paket untuk 31 lokasi dengan nilai sebesar Rp66,333,762,000,-
- Pengadaan Barang Sarana Penunjang Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I Berupa Mebelair, Elektronik, Peralatan dan Fasilitas TA. 2025, sebanyak 4 Paket untuk 65 lokasi dengan nilai sebesar Rp 32,001,421,000,-

Realisasi belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp85,243,893,000,- dari total nilai kontrak sebesar Rp1,319,794,349,000,-, hal ini di sebabkan adanya perbedaan data karwas sakti dan span, sehingga terlambat diajukan melewati batas transaksi tgl 31 Des 2025 pukul 17.00. Berkaitan dengan hal tersebut dengan tagihan yang belum dibayar, akan dibayarkan sebagai tunggakan Tahun Anggaran 2025 atas beban DIPA Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme revisi DIPA.

2. Realisasi Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp344,180,075,943,- atau mencapai 91.23% dari alokasi anggaran sebesar Rp377,247,225,000,-. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda tersebut pekerjaanya dilaksanakan secara kontraktua untuk Pekerjaan konstruksi berupa Gedung dan Bangunan pada kampung nelayan merah putih, sebanyak 25 paket untuk 65 lokasi dengan nilai sebsesar Rp377,247,225,000,-. rincian terlampir
3. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp426,092,155,279,- atau mencapai 90,54% dari alokasi anggaran sebesar Rp470,636,748,000,-. Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda tersebut pekerjaanya dilaksanakan secara kontraktual sebanyak 68 Lokasi dari total 100 Lokasi dengan progres pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan konstruksi berupa Jalan, Irigasi Dan Jaringan pada kampung nelayan merah putih pada tahap pertama, sebanyak 25 Paket untuk 65 lokasi dengan nilai sebesar Rp422,367,903,730,-
Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap pertama di 65 lokasi direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan. Kontrak pembangunan konstruksi dimulai pada pertengahan bulan September dan berakhir 31 Desember 2025. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap pertama sampai dengan masa berakhirnya kontrak pada 31 Desember 2025 progres fisik konstruksi dengan nilai rata-rata nasional baru mencapai 70.00 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

(1) Terdapat beberapa lokasi yang membutuhkan perhatian untuk percepatan penyelesaian yaitu:

- Empat lokasi KNMP di Aceh dan 2 lokasi KNMP di Sumatera Barat yang terdampak musibah banjir Pulau Sumatera;
- Satu lokasi KNMP Supu, Halmahera Utara dikarenakan jalan akses utama terdapat jembatan putus disebabkan banjir bandang dan intensitas hujan tinggi di Galela Utara-Halmahera Utara;
- Satu Lokasi KNMP Ujung Said, Kabupaten Kapuas Hulu-Kalimantan Barat dikarenakan akses utama bahan material dari luar menggunakan transportasi melalui jalur Sungai Kapuas (waktu tempuh dari Pontianak-Kapuas Hulu + 2 minggu), atau transportasi darat + 18 jam (Pontianak-Jongkong) lanjut Jongkong-Ujung Said sekitar + 1 jam melalui sungai Kapuas.

(2) Kendala dan permasalahan

- Keterbatasan pasokan material di lokasi pembangunan;
- Kondisi cuaca yang didominasi oleh curah hujan tinggi seringkali menghambat aktivitas konstruksi;
- Ketersediaan tenaga kerja konstruksi berkualitas masih sangat terbatas;
- Kondisi lahan pembangunan tergolong kurang memadai, sehingga membutuhkan penanganan tambahan;
- Aksesibilitas lokasi pembangunan cukup sulit, sehingga menghambat mobilitas material;
- Masih ditemukan konflik horisontal di sekitar lokasi pembangunan

(3) Langkah-langkah yang sudah dilakukan:

- Penambahan tenaga kerjaPercepatan perubahan desain sesuai kondisi lapangan
- Koordinasi dengan pemangku kepentingan (TNI, POLRI, Kejagung)
- Pemanggilan para penyedia yang berpotensi tidak selesai sesuai target waktu penyelesaian.

Berkaitan hal tersebut diatas penyedia telah mengajukan permohonan pemberian kesempatan dan bersedia untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan serta sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Atas permohonan dari penyedia Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan KNMP Tahap I melalui mekanisme Pemberian Kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir masa

Kontrak (PMK No. 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan/RPATA).

- b. Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap dua sebanyak 35 lokasi dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak (Multi Year Contract/MYC). Kontrak Pembangunan tahap dua dimulai pada pertengahan bulan Desember 2025 ditargetkan selesai pada bulai Mei tahun 2026. dengan alokasi anggaran tahun jamak (Multi Year Contract/MYC) sebesar Rp427,731,871,000,- dengan nilai kontrak Release Multiyears TA. 2025 sebesar Rp21,386,593,550,-. Realisasi belanja pekerjaan konstruksi Pembangunan Kampung Merah Putih tahap dua TA.2025 adalah berupa Uang Muka pekerjaan atas belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3,724,251,550,-. atau mencapai 17.41 persen dari alokasi anggaran TA. 2025 sebesar Rp21,386,593,550,- sehingga terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi pada TA.2025 adalah sebesar Rp17,662,342,000 atau mencapai 4.13 persen dari alokasi anggaran tahun jamak (Multi Year Contract/MYC) sebesar Rp427,731,871,000,- hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi pada proses pembuatan Jaminan Uang Muka / Garansi Bank antara Bank penjamin dengan KPPN, sehingga penyampaian tagihan melewati batas waktu yang sudah di tentukan. Adapun nilai besaran Jaminan / Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap dua sebesar 5% dari nilai kontrak masing-masing lokasi.

Atas belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat yang sudah terealisasi pada TA 2025 telah dicatat sebagai persediaan dalam proses pada satker Ditjen Perikanan Tangkap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Termin I TA 2025 dan pembayaran termin II PT Nila Nasra Nina TA 2025

Nama Sub-sub Kelompok	Kuantitas	Nilai	Tanggal Buku	Keterangan
Peralatan dan mesin dalam proses	940	2.295.480.000	08/12/2025	PT NSG
Peralatan dan mesin dalam proses	5	11.821.500.000	31/12/2025	PT GNI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.720.351.864	03/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	10.908.576.136	03/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.462.294.684	05/12/2025	PT. NILA NASRA NINA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	4.419.947.316	05/12/2025	PT. NILA NASRA NINA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.677.040.504	08/12/2025	PT KARSA PRABALA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	6.649.028.180	08/12/2025	INDOPENTA BUMI PERMAI.
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.437.929.896	08/12/2025	PT KARSA PRABALA

Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	4.122.969.420	08/12/2025	INDOPENTA BUMI PERMAI.
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.377.450.128	09/12/2025	PT TOLERANSI ACEH
Tanah dan bangunan dalam proses	1	6.929.672.775	09/12/2025	PT VIOLA CIPTA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.626.058.432	09/12/2025	PT DUTA TUNGGAL JAYA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	7.875.575.094	09/12/2025	PT VIOLA CIPTA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	2.606.432.272	09/12/2025	PT TOLERANSI ACEH
Tanah dan bangunan dalam proses	1	8.836.161.586	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.618.710.260	10/12/2025	PT WIRA KARSA KONSTRUKSI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	5.360.104.424	10/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP
Tanah dan bangunan dalam proses	1	10.363.243.511	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	5.985.260.360	10/12/2025	PT. BUMI DELTA HATTEN
Tanah dan bangunan dalam proses	1	6.289.066.017	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	6.011.473.156	10/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.423.575.877	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	8.625.928.014	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.074.787.340	10/12/2025	PT WIRA KARSA KONSTRUKSI
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.785.826.440	10/12/2025	PT. BUMI DELTA HATTEN
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	6.778.590.923	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	6.442.916.444	10/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	7.312.740.783	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	7.235.955.978	10/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	12.204.978.488	10/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.623.522.368	10/12/2025	PT DUTA TUNGGAL JAYA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	5.618.777.348	11/12/2025	PT TIRAI MEGAH UTAMA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	2.530.186.580	11/12/2025	AISHA BANGUN RAYA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	3.324.963.852	11/12/2025	PT TIRAI MEGAH UTAMA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	6.131.295.420	11/12/2025	AISHA BANGUN RAYA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.598.571.712	12/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.066.047.892	12/12/2025	TIRTHA WANDHIRA UTAMA PT
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	6.219.719.488	12/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	4.972.535.708	12/12/2025	TIRTHA WANDHIRA UTAMA PT
Tanah dan bangunan dalam proses	1	11.430.208.364	15/12/2025	PT. NAURAH DINAMIKA NUSANTARA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	8.477.290.037	15/12/2025	PT. NAURAH DINAMIKA NUSANTARA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.363.604.996	16/12/2025	PT. NILA NASRA NINA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	15.942.116.340	16/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.530.415.252	16/12/2025	CV. CLARA BENEFICIA

Tanah dan bangunan dalam proses	1	2.190.552.738	16/12/2025	CV CENDANA INDAH
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.808.411.600	16/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.025.805.157	16/12/2025	ARTAMAKMUR PERMAI
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	3.922.158.204	16/12/2025	PT. NILA NASRA NINA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	3.188.646.749	16/12/2025	CV. CLARA BENEFICIA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	19.073.883.660	16/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	1.910.411.663	16/12/2025	CV CENDANA INDAH
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	9.483.784.800	16/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	7.157.256.443	16/12/2025	ARTAMAKMUR PERMAI
Peralatan dan mesin dalam proses	1	17.560.200.000	19/12/2025	DS SOLUTIONS INTERNATIONAL

2. Pemberian Kesempatan Pertama (Input BAST 31 Desember 2025)

Nama Sub-sub Kelompok	Kuantitas	Nilai	Tanggal Buku	Keterangan
Tanah dan bangunan dalam proses	1	6.314.228.026	31/12/2025	PT. NAURAH DINAMIKA NUSANTARA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.391.987.638	31/12/2025	PT WIRA KARSA KONSTRUKSI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	8.802.806.615	31/12/2025	PT KARSA PRABALA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	7.297.168.576	31/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP
Tanah dan bangunan dalam proses	1	5.985.260.360	31/12/2025	PT. BUMI DELTA HATTEN
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.555.570.249	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.473.530.320	31/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	805.381.026	31/12/2025	CV. CLARA BENEFICIA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	6.362.592.400	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.375.251.247	31/12/2025	TIRTHA WANDHIRA UTAMA PT
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.846.000.065	31/12/2025	AISHA BANGUN RAYA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	2.443.949.442	31/12/2025	PT TOLERANSI ACEH
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.605.917.964	31/12/2025	ARTAMAKMUR PERMAI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.017.610.869	31/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.506.770.551	31/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP
Tanah dan bangunan dalam proses	1	5.825.350.017	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	5.618.777.348	31/12/2025	PT TIRAI MEGAH UTAMA
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.326.327.666	31/12/2025	CENDANA INDAH CV
Tanah dan bangunan dalam proses	1	3.644.775.993	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.015.332.108	31/12/2025	TIRTHA WANDHIRA UTAMA PT
Tanah dan bangunan dalam proses	1	15.253.024.362	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.430.477.226	31/12/2025	PT. BUMI DELTA HATTEN
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.555.531.059	31/12/2025	PT DUTA TUNGGAL JAYA

Tanah dan bangunan dalam proses	1	4.290.026.707	31/12/2025	PT. VIOLA CIPTA MAHAKARYA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.617.977.440	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.513.633.016	31/12/2025	PT KARSA PRABALA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	1.382.812.519	31/12/2025	PT. BUMI DELTA HATTEN
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	3.495.430.640	31/12/2025	AISHA BANGUN RAYA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	7.188.708.878	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.157.221.024	31/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.785.826.440	31/12/2025	PT. BUMI DELTA HATTEN
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	6.357.558.218	31/12/2025	ARTAMAKMUR PERMAI
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	1.678.025.351	31/12/2025	CV. CLARA BENEFICIA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	14.800.643.460	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	10.155.397.680	31/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.042.103.957	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	3.324.963.852	31/12/2025	PT TIRAI MEGAH UTAMA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	7.862.017.600	31/12/2025	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	1.162.957.724	31/12/2025	CENDANA INDAH CV
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	6.638.232.660	31/12/2025	INDOPENTA BUMI PERMAI.
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	2.473.120.902	31/12/2025	PT TOLERANSI ACEH
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	4.649.826.718	31/12/2025	PT. NAURAH DINAMIKA NUSANTARA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	2.726.557.489	31/12/2025	PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	5.023.251.492	31/12/2025	TIRTHA WANDHIRA UTAMA PT
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	2.952.063.304	31/12/2025	PT DUTA TUNGGAL JAYA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	6.721.376.396	31/12/2025	PT. VIOLA CIPTA MAHAKARYA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	1.720.463.636	31/12/2025	TIRTHA WANDHIRA UTAMA PT
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	7.523.714.209	31/12/2025	PT RUKUN JAYA MADURA GROUP

3. BAST Termin III per 31 Desember 2025

Nama Sub-sub Kelompok	Kuantitas	Nilai	Tanggal Buku	Keterangan
Tanah dan bangunan dalam proses	1	1.920.399.503	31/12/2025	PT. NILA NASRA NINA
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	1.376.318.589	31/12/2025	PT. NILA NASRA NINA

4. Uang Muka KNMP 35 Lokasi

Nama Sub-sub Kelompok	Kuantitas	Nilai	Tanggal Buku	Keterangan
Jalan. irigasi. dan jaringan dalam proses	1	2.431.734.900	23/12/2025	MITRA AGUNG

Jalan, irigasi, dan jaringan dalam proses	1	737.322.650	23/12/2025	SONTA ABADI
Jalan, irigasi, dan jaringan dalam proses	1	555.194.000	23/12/2025	TOLPING JAYA

5. Tunggakan Ditjen PDSPKP

Nama Sub-sub Kelompok	Kuantitas	Nilai	Tanggal Buku	Keterangan
Peralatan dan mesin dalam proses	1	2.256.360.000	31/12/2025	PURA AGRO MANDIRI
Peralatan dan mesin dalam proses	1	18.204.000.000	31/12/2025	GLOBAL NIAGA INTERNUSA
Peralatan dan mesin dalam proses	1	16.539.000.000	31/12/2025	GLOBAL NIAGA INTERNUSA
Peralatan dan mesin dalam proses	1	18.157.713.000	31/12/2025	GLOBAL NIAGA INTERNUSA
Peralatan dan mesin dalam proses	1	3.443.220.000	31/12/2025	NAGA SENTOSA GEMILANG
Peralatan dan mesin dalam proses	1	26.373.600.000	31/12/2025	DS SOLUTIONS INTERNATIONAL

F.6. Pinjaman Hibah Luar Negeri

a. Loan Agence Française de Développement (AFD)

		LK PLN Eco Fishing Port
1.	Nama Pinjaman Luar Negeri	Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)
2.	Pemberi Pinjaman	Agence Française de Développement (AFD)
3.	Nama Proyek	Eco Fishing Port
4.	Loan ID	CID 1109 11
5.	No. Register	11 XVEVV3A
6.	Date Sign	23 Desember 2022
7.	Date Effective	5 July 2023
8.	Closing Date	22 Desember 2028
9.	Loan Amount	Rp1.647.209.322.379,- ekuivalen EUR 98.674.936,00
10.	Disbursement s.d 2024	Rp16.226.832.724,- ekuivalen EUR 967.143,06

11.	<i>Disbursement</i> pada Januari - Desember 2025	Rp 46.093.914.647,00,- ekuivalen EUR 1.800.000
12.	Belanja pada Januari - Desember 2025 (Rupiah)	
a.	Belanja Barang	Rp22.214.726.567,-
b.	Belanja Modal	Rp4.569.370.515,-
13.	Neraca (Rupiah)	
a.	Aset Lancar	0
b.	Aset Tetap	Rp6.149.669.779,-
c.	Aset Lainnya	-
d.	Kewajiban	-
14.	<i>Executing Agency</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai <i>Implementing Agency</i>)
15.	Pemeriksa	BPK

Pada tahun 2025 total anggaran Proyek Eco Fishing Port senilai Rp250.000.000.000,00 bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang dicantumkan dalam DIPA Satker Pusat selaku PMU dan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagai Project Implementation Unit (PIU) dengan pembagian porsi anggaran pada PMU senilai Rp49.675.000.000,00 dan anggaran PIU senilai Rp200.325.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (238720) nomor SP DIPA-032.03.1.238720/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang terdiri dari senilai Rp49.675.000.000,00. Namun terdapat terblokir efisiensi senilai Rp7.718.892.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan saat ini senilai Rp41.956.108.000,00.
- b. DIPA PPS Cilacap (518117) nomor SP DIPA-032.03.2.518117/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp117.149.000.000,00. Namun terdapat terblokir efisiensi senilai

Rp20.884.495.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan saat ini senilai Rp96.264.505.000,00.

- c. DIPA PPS Bitung (633707) nomor SP DIPA-032.03.2.633707/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp54.650.000.000,00. Namun terdapat terblokir efisiensi senilai Rp33.101.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan saat ini senilai Rp54.616.899.000,00.
- d. DIPA PPS Kendari (537695) nomor SP DIPA-032.03.2.537695/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp28.326.000.000,00. Namun terdapat blokir senilai Rp33.101.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan saat ini senilai Rp28.292.899.000,00.
- e. DIPA PPS Belawan (427655) nomor SP DIPA-032.03.2.427655/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp200.000.000,00. Namun terdapat blokir senilai Rp.33.102.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan saat ini senilai Rp166.898.000,00.

Total Pagu anggaran PLN untuk Proyek Eco Fishing Port TA. 2025 yang terblokir efisiensi anggaran sebesar Rp28.702.691.000,00.

Pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri tahun 2024 sebesar Rp1.381.694,00 atau EUR 78,27 telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor NTPN 822BB61QVDBKRVGP tanggal 16 Juni 2025 dan NTPN 532133CIFTKFL20F tanggal 18 Juni 2025. Pengembalian tersebut dicatat sebagai pengembalian rekening khusus Kemenkeu untuk Pinjaman No. CID 1109 01 nomor 601007991980 senilai EUR78,27 sesuai surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-5/PB.3/PB.34/2025 tanggal 10 Juli 2025.

Saldo RKBI per 31 Desember 2025 Rp26.277.076.864,50 Equivalen EUR 1.330.266,00. terdapat belanja barang tahun 2025 yang belum tercatat dalam RKBI di PMU dan PIU sebesar Rp322.787.238,00 dengan rincian pada PMU sebesar Rp287.057.927,00. dan pada PIU PPS Cilacap sebesar Rp3.622.900,00. PPS Bitung sebesar Rp32.106.411,00 Mekanisme penarikan PLN Proyek *Eco Fishing Port* TA 2025 dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL)/*Direct Payment* yang merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) kepada Pemberi PLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju dan Rekening Khusus (RK)/*Special Account* yang merupakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PLN

- f. Loan *Islamic Development Bank (IsDB)*

		LK PLN <i>Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I</i>
1.	Nama Pinjaman Luar Negeri	<i>Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I (IDN-1055)</i>
2.	Pemberi Pinjaman	<i>Islamic Development Bank (IsDB)</i>
3.	Nama Proyek	<i>Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I</i>
4.	Loan ID	IDN-1055
5.	No. Register	144HG51A
6.	Date Sign	8 Februari 2023
7.	Date Effective	18 Desember 2023
8.	Closing Date	26 Februari 2028
9.	Loan Amount	Rp1.690.000.000,00 <i>equivalent</i> EUR100,000,000
10.	Disbursement s.d 2024	Rp14.026.223.217,55 <i>equivalent</i> EUR832.147,63
11.	Disbursement pada tahun 2025	Rp27.493.193.670,41 <i>equivalent</i> EUR1.589.484,15
12.	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	
a.	Belanja Barang	Rp23.822.435.394,00
b.	Belanja Modal	Rp208.758.890,00
13.	Neraca (Rupiah)	
a.	Aset Lancar	-
b.	Aset Tetap	Rp853.861.347,00
c.	Aset Lainnya	-
d.	Kewajiban	Rp
14.	Executing Agency	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai <i>Implementing Agency</i>)
15.	Pemeriksa	BPKP

Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Executing Agency, dengan pelaksanaan teknis di bawah tanggung jawab Project Management Unit (PMU) dan dua Project Implementation Units (PIU) yaitu PPN Pengembangan dan PPN Kejawanan.

Sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 27: Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah yang ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-113/PB/2025 tanggal 7 Mei 2025, setiap pembiayaan berbasis syariah yang berasal dari IsDB wajib diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang diungkapkan meliputi jenis aset yang diperoleh, nilai aset, sumber pembiayaan, model akad syariah yang digunakan (dalam hal ini Ijarah), status kepemilikan (sudah/ belum BAST), tanggal batas penarikan (closing date), jadwal pembayaran, serta jangka waktu akad. Pengungkapan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana yang berasal dari mekanisme pembiayaan non-konvensional.

Dalam akad Ijarah, IsDB membeli barang atau membiayai pekerjaan konstruksi, kemudian menyewakannya kepada pemerintah selama jangka waktu tertentu. Pemerintah melakukan pembayaran cicilan sewa disertai margin keuntungan sesuai kesepakatan. Kepemilikan aset akan dialihkan secara bertahap kepada Pemerintah Republik Indonesia setelah masa sewa berakhir atau setelah dilakukan pembayaran penuh.

Pada tahun 2025 total anggaran Proyek *Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I* senilai Rp336.000.000.000,00 bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang dicantumkan dalam DIPA Satker Pusat selaku PMU dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagai *Project Implementation Unit (PIU)* dengan pembagian porsi anggaran pada PMU senilai Rp34.481.750.000,00 dan anggaran PIU senilai Rp301.518.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (238720) nomor SP DIPA-032.03.1.238720/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp34.481.750.000,00. Namun terdapat blokir anggaran sebesar Rp3.193.368.000,00 sehingga nilai pagu efektif senilai Rp31.288.382.000,00.
- b. DIPA PPN Pengembangan (633693) nomor SP DIPA-032.03.2.633693/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp245.168.250.000,00. Namun terdapat blokir anggaran sebesar Rp1.810.428.000,00 sehingga nilai pagu efektif senilai Rp243.357.822.000,00.
- c. DIPA PPN Kejawanan (622482) nomor SP DIPA-032.03.2.622482/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp56.350.000.000,00. Namun terdapat blokir anggaran sebesar Rp124.092.000,00 sehingga nilai pagu efektif senilai Rp56.225.908.000,00.

Penarikan PLN proyek *Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I (IDN-1055)* Semester 2 TA 2025 dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL)/*Direct Payment* yang merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) kepada pemberi pinjaman untuk dibayarkan kepada penyedia jasa atau pihak ketiga.

Kedua mekanisme penarikan dengan Rekening Khusus (RK)/*Special Account* yang merupakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi pinjaman. Rekening khusus Proyek atas nama rekening Reksus Kemenkeu utk Pinjaman IsDB IFPIFM NoIDN105 Nomor 601011991980 sesuai surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan Nomor S-59/PB/PB.3/2024 tanggal 5 Februari 2025.

g. Loan Asian Development Bank (ADB)

		LK PLN IFP-IFM Phase II - PRF
1.	Nama Pinjaman Luar Negeri	<i>Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase II - Project Readiness Financing</i>
2.	Pemberi Pinjaman	<i>Asian Development Bank (ADB)</i>
3.	Nama Proyek	<i>Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase II - Project Readiness Financing</i>
4.	<i>Loan ID</i>	6052-INO
5.	No. Register	18652GGA
6.	<i>Date Sign</i>	14 Desember 2023
7.	<i>Date Effective</i>	21 Februari 2024
8.	<i>Closing Date</i>	31 Agustus 2026
9.	<i>Loan Amount</i>	Rp154.770.589.680 (¥1.496.600.000)
10.	Disbursement s.d 2024	Rp0 (¥0)
11.	Disbursement pada tahun 2025	Rp11.369.972.551 (¥93.734.571)
12.	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	
a.	Belanja Barang	Rp9.013.475,705

b.	Belanja Modal	Rp3.772.361.339
13.	Neraca (Rupiah)	
a.	Aset Lancar	Rp0
b.	Aset Tetap	Rp3.772.361.339
c.	Aset Lainnya	Rp0
d.	Kewajiban	Rp0
14.	Executing Agency	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai <i>Implementing Agency</i>)
15.	Pemeriksa	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada TA 2025 total anggaran Proyek *IFP-IFM Phase II – PRF* yang telah disahkan dan tercantum pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DIPA-032.031.238720/2025 sebesar Rp70.000.000.000,00. dari jumlah tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp11.320.498.000,00 dan adanya kesalahan input penempatan anggaran sebesar Rp772.000.000,00 dengan nomer register 11XEVV3A (Loan AFD), sehingga pagu efektif Proyek IFP-IFM Phase II – PRF yang dapat digunakan sebesar Rp57.907.502.000,00. Penarikan PLN Proyek IFP-IFM Phase II - PRF dilakukan melalui mekanisme rekening khusus (*special account*) dan pembayaran langsung (*direct payment*). Rekening khusus proyek IFP-IFM Phase II - PRF telah disetujui Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-58/PB.3/PB.34/2024 tanggal 05 September 2024 perihal Pembukaan Rekening Khusus untuk Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman ADB *IFP IFM Phase II* No 6052 INO dengan nomor register 18652GGA. Rekening Khusus merupakan Rekening Pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PLN.

Sedangkan mekanisme Pembayaran Langsung (PL)/*Direct Payment* merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) kepada Pemberi PLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.

Sampai dengan bulan Desember telah diajukan tiga kali pengisian kas rekening khusus yakni *Initial Deposit* (WA0001) pada tanggal 14 Januari 2025 sebesar ¥5.723.948 setara Rp668.531.941, *Additional Advance* (WA0002) tanggal 28 Juli 2025 sebesar ¥60.716.453 setara Rp6.725.215.415, dan *replenishment* (WA0003) tanggal 15 Desember 2025 sebesar

¥27.409. 642 setara Rp2.932.382.175 sehingga total pengajuan rekening khusus ¥93.850.043 setara Rp11.382.303.725. Realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp12.785.837.044 dimana 70,50% adalah belanja barang dan 29,50% belanja modal.

h. Hibah Uang *Agence Française de Développement (AFD)*

		LK HLN <i>Eco Fishing Port</i>
1.	Nama Hibah Luar Negeri	<i>The Evidence-based and Sustainable Ocean Management in Indonesia</i>
2.	Pemberi Hibah	<i>Agence Française de Développement (AFD)</i>
3.	Nama Proyek	<i>Eco Fishing Port</i>
4.	<i>Grant ID</i>	CID 1099 01P
5.	No. Register	2X2TSXXA
6.	<i>Date Sign</i>	15 November 2024
7.	<i>Date Effective</i>	24 Desember 2024
8.	<i>Closing Date</i>	30 Juni 2028
9.	<i>Grant Amount</i>	EUR 3.550.000
10.	Disbursement s.d 2024	-
11.	Disbursement pada tahun 2025	EUR 500.000 <i>Equivalent</i> Rp9.535.650.000,00
12.	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	
a.	Belanja Barang	Rp1.015.067.507,00
b.	Belanja Modal	Rp0,00
13.	Neraca (Rupiah)	
a.	Aset Lancar	Rp0,00
b.	Aset Tetap	-
c.	Aset Lainnya	-
d.	Kewajiban	-
14.	Executing Agency	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai <i>Implementing Agency</i>)

15.	Pemeriksa	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
-----	-----------	--------------------------------

Pada Tahun Anggaran 2025, total Anggaran Hibah Terencana Proyek Eco Fishing Port yang telah disahkan dan tercantum dalam DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebesar Rp13.692.000.000. Dari jumlah tersebut, terdapat blokir anggaran sebesar Rp2.266.026.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan pada tahun 2025 adalah Rp11.425.974.000.

Penarikan HLN Proyek Eco Fishing Port TA 2025 dilakukan melalui mekanisme Rekening Khusus (RK)/Project Account yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-35/PB/PB.3/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Pemberitahuan atas Pembukaan Rekening Khusus untuk Kegiatan Hibah Terencana Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) dengan nomor loan CID 1099 01P dan nomor register hibah 2X2TSXXA.

Rekening Khusus merupakan Rekening Pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi HLN. Rincian anggaran berdasarkan jenis penarikannya adalah sebagai berikut:

Saldo Rekening Khusus Hibah Terencana Proyek Eco Fishing Port setelah penarikan First Advance adalah sebesar EUR 500.000 equivalent Rp9.535.650.000,- sesuai dengan surat permohonan penarikan First Advance Nomor B.1420/DJPT.4/HP.370/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dan menjadi saldo per 30 Juni 2025 yang kemudian saldo tersebut diperhitungkan sebagai realisasi pendapatan hibah luar negeri.

i. Hibah Jasa *Agence Française de Développement (AFD)*

		LK HLN <i>Eco Fishing Port</i>
1.	Nama Hibah Luar Negeri	<i>Technical Assistance on Gender Related Issues, and Design and Support on the Implementation of Gender Action Plan at Eco Fishing Ports Locations</i>
2.	Pemberi Hibah	<i>Agence Française de Développement (AFD)</i>
3.	Nama Proyek	<i>Eco Fishing Port</i>
4.	Grant ID	CZZ2922
5.	No. Register	2NKZCH9A
6.	Date Sign	26 September 2023; (Amandemen: 24 September 2024)

7.	Date Effective	26 September 2023
8.	Closing Date	31 Desember 2025
9.	Grant Amount	EUR 120.000
10.	Disbursement s.d 2024	EUR 72.000,00 (ekuivalen Rp1.211.904.000,00)
11.	Disbursement pada tahun 2025	EUR 48.000,00 (ekuivalen Rp941.664.000,00 (Kurs 1 EUR = Rp 19.618 sesuai tanggal penandatanganan BAST, 17 Desember 2025))
12.	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	
a.	Belanja Barang	-
b.	Belanja Modal	-
13.	Neraca (Rupiah)	
a.	Aset Lancar	-
b.	Aset Tetap	-
c.	Aset Lainnya	-
d.	Kewajiban	-
14.	Executing Agency	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai <i>Implementing Agency</i>)
15.	Pemeriksa	BPK

Hibah Langsung dalam bentuk jasa untuk mendukung pelaksanaan proyek *Eco Fishing Port* dengan nama hibah “*Technical Assistance on Gender Related Issues, and Design and Support on the Implementation of Gender Action Plan at Eco Fishing Ports Locations*” memiliki total nilai EUR 90.000,00 untuk kegiatan tahun 2023-2024 (sesuai dengan grant agreement tanggal 26 September 2023). Pada implementasi hibah tersebut dinilai perlu untuk melakukan addendum untuk penambahan waktu pelaksanaan kegiatan dan nilai hibah, maka pada telah ditandatangani amandemen pada 24 September 2024 dengan penambahan nilai hibah sebesar EUR 30.000,00 sehingga nilai total anggaran menjadi EUR 120.000,00 (ekuivalen Rp 2.023.168.200,00) dan perpanjangan waktu implementasi kegiatan hingga bulan Desember 2025. Amandemen ini telah disesuaikan berdasarkan durasi dan nilai pada sistem Kemenkeu (No.S-657/PR.8/2024). Pada Hibah langsung ini, AFD berperan sebagai donor, konsultan PT NIRAS sebagai *technical and financial*

partner, dan Ditjen Perikanan Tangkap sebagai *Beneficiary*. Proses pencatatan administrasi hibah langsung dilakukan melalui BAST, Pengesahan (SP3HLBJS), dan Pencatatan (MPHLBJS) di KPPN.

j. Hibah Uang Global Enviroment Facility (GEF)

		Global Enviroment Facility (GEF)
1.	Nama Hibah Luar Negeri	The Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717,718
2.	Pemberi Hibah	Global Enviroment Facility (GEF)
3.	Nama Proyek	The Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) 715, 717, 718 Components A,B and D
4.	<i>Grant ID</i>	# DS43
5.	No. Register	2QTS8A9A
6.	<i>Date Sign</i>	15 Desember 2019, revisi 15 November 2024
7.	<i>Date Effective</i>	1 Maret 2020
8.	<i>Closing Date</i>	30 Agustus 2024, menjadi 31 Desember 2026
9.	<i>Grant Amount</i>	IDR 109.648.255.374
10.	<i>Disbursement s.d 2024</i>	IDR 68.361.166.980 (USD
11.	<i>Disbursement pada tahun 2025</i>	IDR 25.580.241.887 (USD 1.548.883,43)
12.	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	
	a. Belanja Barang	IDR 25.443.105.000
	b. Belanja Modal	-
13.	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	-
	b. Aset Tetap	-
	c. Aset Lainnya	-
	d. Kewajiban	-
14.	<i>Executing Agency</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai <i>Implementing Agency</i>)
15.	Pemeriksa	BPK

k. Hibah *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

		LK PLN Sector Loan for IFP-IFM Phase I
--	--	--

1.	Nama Pinjaman Luar Negeri	<i>Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I</i>
2.	Pemberi Pinjaman	<i>Japan International Cooperation Agency (JICA)</i>
3.	Nama Proyek	<i>Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I</i>
4.	<i>Loan ID</i>	IP-588
5.	No. Register	1FGH9U54
6.	<i>Date Sign</i>	24 Desember 2024
7.	<i>Date Effective</i>	20 Mei 2025
8.	<i>Closing Date</i>	20 Mei 2033
9.	<i>Loan Amount</i>	JPY 15.545.000.000,00
10.	Disbursement s.d 20243	-
11.	Disbursement pada tahun 20254	JPY 0,00
12.	Belanja Tahun 20245 (Rupiah)	
a.	Belanja Barang	Rp0,00
b.	Belanja Modal	Rp0,00
13.	Neraca (Rupiah)	
a.	Aset Lancar	-
b.	Aset Tetap	-
c.	Aset Lainnya	-
d.	Kewajiban	-
14.	Executing Agency	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai <i>Implementing Agency</i>)
15.	Pemeriksa	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada pagu indikatif TA 2025 untuk Proyek *Sector Loan for IFP-IFM Phase I* TA 2025 hanya menganggarkan untuk jenis penarikan PL/Pembayaran langsung untuk kegiatan Jasa Konsultansi *Design and Supervision Consultant (DSC) for the Works Under Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase I*.

Mekanisme penarikan PLN Proyek *Sector Loan for IFP-IFM Phase I* TA 2025 dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL)/*Direct Payment* yang merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) kepada Pemberi PLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.

Saldo rekening khusus Proyek *Sector Loan for IFP-IFM Phase I* per 1 Januari 2025 senilai JPY 0,00 sesuai dengan catatan Rekening Khusus Bank Indonesia (RKBI) dari Kementerian Keuangan. Total pengisian ulang reksus pada tahun 2025 sebesar JPY 0,00. Sehingga total saldo yang tersedia pada tahun 2025 sebesar JPY 0,00.

I. Hibah FAO Representative for Indonesia and Timor Leste

1	Nama Hibah Luar Negeri	<i>Sustainable Management of Fisheries Marine Living Resources, and Their Habitats in the Bay of Bengal Region for the Benefit of Coastal States and Communities</i>
2	Pemberi Hibah	FAO Representative for Indonesia and Timor Leste
3	Nama Proyek	BOBLME Phase II
4	Grant ID	IA.15.01.2025
5	No. Register	2PSYT3SA
6	Date Signature	15 Januari 2025
7	Date Effective	15 Januari 2025
8	Closing Date	15 Januari 2030
9	Grant Amount	USD1.635.019
10	Disbursement s.d. 2024	Rp0
11	Disbursement pada tahun 2025	Rp0
12	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	Rp0
13	Bentuk Hibah	Barang/Jasa
14	Executing Agencies	<i>International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)</i>
15	Implementing Agency	FAO Regional Office for Asia and the Pacific (FAORAP)
16	Pemeriksa	BPK

Disbursement dan belanja masih Rp0 karena belum disepakatinya rencana kerja tahunan pada tahun 2025. Selain itu terdapat perbedaan nilai hibah antara yang disebutkan di *Implementing Arrangement* (USD1.635.019) dan telah didaftarkan ke Kementerian Keuangan dengan nilai hibah yang diinformasikan oleh *Executing Agencies* (IUCN (USD366.352) dan SEAFDEC (USD285.132)) untuk melaksanakan proyek di Indonesia. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku *National Project Coordinator* telah meminta penjelasan dari FAORAP, namun hingga saat ini FAORAP belum memberikan penjelasan.

F.7 Satuan Kerja (Satker) Inaktif

Nama Satker	Status Satker	Periode	Jumlah Data TDK		
			TDK Rupiah	TDK COA	TDK Detail
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	INAKTIF BERSALDO	2025-12	0	0	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	INAKTIF	2025-12	0	0	
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	INAKTIF BERSALDO	2025-12	0	0	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	INAKTIF BERSALDO	2025-12	0	0	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	INAKTIF BERSALDO	2025-12	0	0	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	INAKTIF	2025-12	0	0	
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	INAKTIF BERSALDO	2025-12	0	0	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	INAKTIF BERSALDO	2025-12	0	0	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	INAKTIF	2025-12	0	0	

Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdapat 9 satuan kerja inaktif pada TA 2025, yang disebabkan tidak adanya DIPA TA 2025 pada satuan kerja tersebut akibat dari efisiensi anggaran oleh Kementerian Keuangan. Terdapat 4 satuan kerja inaktif yang tidak memiliki asset dan terdapat 5 satuan kerja yang masih memiliki asset.

F.8 Tunggakan TA 2025

No	Jenis Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nama Supplier	Nilai Total Kontrak	Nilai Yang Tertunggak	Penyebab Keterlambatan	Progres
1	PABRIK ES PORTABLE BALOK	B.2869/DJPT.3/PL.430/X/2025	PURA AGRO MANDIRI	2.256.360.000	2.256.360.000	Ada perbedaan data karwas sakti dan span, sehingga	Telah diajukan revidi BPKP melalui surat nomor

						terlambat diajukan melewati batas transaksi tgl 31 Des 2025 pukul 17.00	KPA.97/DJPT/H P.320//2026 tanggal 23 Januari 2026 Dan telah diajukan Persetujuan Pembayaran Tunggakan melalui Mekanisme Revisi DIPA ke Dit. PA melalui surat nomor KPA.434/DJPT/K U.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026
2	COOL BOX	B.2870/DJPT. 6/PL.420/PPK /X/2025	NAGA SENTOSA GEMILAN G	5.738.700.000	3.443.220.000	Ada perbedaan data karwas sakti dan span, sehingga terlambat diajukan melewati batas transaksi tgl 31 Des 2025 pukul 17.00	Telah diajukan revidi BPKP melalui surat nomor KPA.97/DJPT/H P.320//2026 tanggal 23 Januari 2026 Dan telah diajukan Persetujuan Pembayaran Tunggakan melalui Mekanisme Revisi DIPA ke Dit. PA melalui surat nomor KPA.434/DJPT/K U.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026
3	PABRIK ES PORTABL E BALOK	B.2977/DJPT. 3/PL.430/X/20 25	GLOBAL NIAGA INTERNU SA	28.116.300.00 0	16.539.000.00 0	Ada perbedaan data karwas sakti dan span, sehingga terlambat diajukan melewati batas transaksi tgl 31 Des 2025 pukul 17.00	Telah diajukan revidi BPKP melalui surat nomor KPA.97/DJPT/H P.320//2026 tanggal 23 Januari 2026 Dan telah diajukan Persetujuan Pembayaran Tunggakan melalui Mekanisme Revisi DIPA ke Dit. PA melalui surat nomor KPA.434/DJPT/K U.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026
4	PABRIK ES PORTABL	B.2985/DJPT. 3/PL.430/X/20 25	GLOBAL NIAGA	30.025.500.00 0	18.204.000.00 0	Ada perbedaan data karwas sakti dan span,	Telah diajukan revidi BPKP melalui surat

	E SLURRY ICE		INTERNU SA			sehingga terlambat diajukan melewati batas transaksi tgl 31 Des 2025 pukul 17.00	nomor KPA.97/DJPT/H P.320/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 Dan telah diajukan Persetujuan Pembayaran Tunggakan melalui Mekanisme Revisi DIPA ke Dit. PA melalui surat nomor KPA.434/DJPT/K U.450/IV/2026 t anggal 10 April 2026
5	PABRIK ES PORTABL E SLURRY ICE	B.9287/DJPT. 6/PL.420/PPK /X/2025	DS SOLUTIO NS INTERNA TIONAL	26.373.600.00 0	26.373.600.00 0	Ada perbedaan data karwas sakti dan span, sehingga terlambat diajukan melewati batas transaksi tgl 31 Des 2025 pukul 17.00	Telah diajukan reviu BPKP melalui surat nomor KPA.97/DJPT/H P.320/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 Dan telah diajukan Persetujuan Pembayaran Tunggakan melalui Mekanisme Revisi DIPA ke Dit. PA melalui surat nomor KPA.434/DJPT/K U.450/IV/2026 t anggal 10 April 2026
6	GUDANG BEKU	B.9867/DJPT. 6/PL.430/PPK /X/2025	GLOBAL NIAGA INTERNU SA	31.127.508.00 0	18.157.713.00 0	Terdapat penolakan pada tgl 31 Des 2025 pukul 18.29 dengan catatan "Validasi Invoice gagal = Gagal saat mencari nomor shipment PO, hubungi CSO" sehingga belum sempat diajukan kembali	Telah diajukan reviu BPKP melalui surat nomor KPA.97/DJPT/H P.320/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 Dan telah diajukan Persetujuan Pembayaran Tunggakan melalui Mekanisme Revisi DIPA ke Dit. PA melalui surat nomor KPA.434/DJPT/K U.450/IV/2026 t anggal 10 April 2026

7	PENGAWASAN KONSTRUKSI	B.6573/DJPT.6/PI.420/PPK/IX/2025	PT ARDIANA DWI YASA CONSULTANT	198.508.000	79.403.200	Terdapat penolakan pada tgl 31 Des 2025 pukul 16.47, dengan catatan "tidak melampirkan SPTJM" sehingga belum sempat diajukan kembali	Telah diajukan reviu itjen melalui nota dinas no. B.144/DJPT.1/HP.350/I/2026 tgl 14 Januari 2026 Dan telah diajukan Persetujuan Pembayaran Tunggakan melalui Mekanisme Revisi DIPA ke Dit. PA melalui surat nomor KPA.434/DJPT/KU.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026
8	PEMBUATAN VIDEO	B.12486/DJPT.6/PI.420/PPK/X/2025	PT TRANS DIGITAL MEDIA	1.190.000.000	1.190.000.000	Lokasi yang banyak dan tersebar di beberapa Provinsi sehingga membutuhkan waktu untuk penyampaian data kontrak	Telah diajukan reviu itjen melalui nota dinas no. B.144/DJPT.1/HP.350/I/2026 tgl 14 Januari 2026 dan telah keluar LHR No. T.188/ITJ.2/HP.380/IV/2026
9	PEMBUATAN VIDEO	B.7464/DJPT.6/PI.420/X/2025	KOLASE PRODUCTION	1.190.142.000	1.190.142.000	Lokasi yang banyak dan tersebar di beberapa Provinsi sehingga membutuhkan waktu untuk penyampaian data kontrak	Telah diajukan reviu itjen melalui nota dinas no. B.144/DJPT.1/HP.350/I/2026 tgl 14 Januari 2026 dan telah keluar LHR No. T.188/ITJ.2/HP.380/IV/2026
10	ALAT TANGKAP	EP-01K84ZN8HG58NCFEGHE8BCP954	ASIATRONIC INDO MAKMUR	526.602.992	526.602.992	terlewat pengajuan spm disebabkan karena terblokirnya akun PPSPM saat itu sehingga pengajuan SPM terhenti/tidak bisa	Telah diajukan reviu itjen melalui nota dinas no. B.144/DJPT.1/HP.350/I/2026 tgl 14 Januari 2026 dan telah keluar LHR No. T.188/ITJ.2/HP.380/IV/2026

11	KONSULTAN PERENCANAAN	6866/DJPT.4/PL.430/PPK/XI/2025	SAMAGATA TRIPTAYASA	98.799.700	98.799.700	terlewat pengajuan smp disebabkan karena terblokirnya akun PPSPM saat itu sehingga OTP pengajuan SPM terhenti/tidak bisa	Telah diajukan revidi itjen melalui nota dinas no. B.144/DJPT.1/HP.350/I/2026 tgl 14 Januari 2026 dan telah keluar LHR No. T.188/ITJ.2/HP.380/IV/2026
----	-----------------------	--------------------------------	---------------------	------------	------------	--	---

Terdapat penolakan atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN Jakarta VI (175) pada pekerjaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun Anggaran 2025 karena melebihi tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, sehingga menimbulkan tunggakan senilai Rp88.058.840.892 pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Tunggakan terbesar terdapat pada pekerjaan pabrik es dan cool box yang berasal dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Atas tunggakan tersebut Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mengajukan Permohonan Reviu atas Tunggakan Pembayaran Kontraktual Tahun Anggaran 2025 kepada BPKP dengan surat nomor KPA.97/DJPT/HP.320/I/2026 tanggal 23 Januari 2025, akan tetapi sampai dengan masa penyusunan Laporan Keuangan Audited 2025 masih proses koordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait. Atas pekerjaan dengan nomor kontrak B.2869/DJPT.3/PL.430/X/2025 terdapat selisih senilai Rp270.000.000 antara nilai yang tercatat pada Laporan Keuangan dan nilai pengajuan permohonan revidi pada BPKP yang disebabkan oleh perbedaan antara data yang tercatat pada aplikasi SAKTI dan SPAN dengan dokumen pendukung (kontrak). Adapun atas pekerjaan pembuatan video dan konsultan perencanaan sudah terbit hasil revidi itjen dan surat pernyataan KPA, menunggu revisi DIPA agar dapat dibayarkan pada TA 2026.

F.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima (PYMHD)

Terhadap PYMHD atas kapal tidak beroperasi yang menjadi temuan BPK pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 54 kapal, terdapat 22 kapal yang tidak diketahui STBLKKnya dikarenakan kapal tersebut masuk kolam pelabuhan sejak operasional Tambat Labuh masih dikelola oleh PT. Perikanan Indonesia (sebelum 15 Oktober 2019) dan telah diperhitungkan potensinya sebesar Rp8.839.203.660,00. Terhadap 22 kapal tersebut diketahui kapal-kapal sudah dalam kondisi rusak/tidak layak melaut dan sudah mangkrak di kolam pelabuhan selama minimal lebih dari 5 tahun dan berpotensi tidak tertagih

Terdapat kendala dalam penyelesaian PYMHD yang sudah terakumulasi selama lebih dari satu tahun tersebut dikarenakan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh para pemilik kapal tidak sanggup untuk menyelesaikan kewajiban tambat labuh dan kebersihan kolam atas kapal tersebut yang sudah semakin besar sedangkan kapalnya sudah rusak dan tidak dapat dioperasikan. Selain itu juga, peraturan terkait saat ini yaitu Kepdirjen Perikanan Tangkap nomor 45 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kapal Tidak Beroperasi di Pelabuhan Perikanan yang saat ini menjadi juknis pengelolaan kapal tidak beroperasi di Pelabuhan Perikanan belum mengakomodir permasalahan ini secara keseluruhan dan memadai dikarenakan dalam juknis tersebut belum mengatur bagaimana tindak lanjut setelah kapal sudah dinyatakan mangkrak atau tidak beroperasi dalam kolam Pelabuhan.

Terhadap tindak lanjut atas 22 kapal dengan nilai potensi PYMHD senilai Rp8.839.203.660,00 belum pernah diajukan dan dilakukan revidi terhadap tindak lanjut dan perhitungan yang telah dilakukan PPS Nizam Zachman Jakarta sehingga belum ada validasi atas tindak lanjut dan perhitungan tersebut. Ada validasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan

F.10 Tindak Lanjut Temuan BPK

1. Laporan Hasil Pemeriksaan 72/LHP/XVII/12/2011, Pengadaan Kapal Pole Line Fiberglass 30 GT Tidak Sesuai Ketentuan sehingga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp3.394.450.292,00.

Hasil telaah

Perubahan/addendum kontrak tujuh rekanan dengan PT FGP yang disampaikan oleh PT FGP dan dimuat dalam LHP BPK sudah merupakan risiko dalam menerima pekerjaan kontrak tersebut, dan perubahan kontrak masih dalam rentang waktu 12 bulan sehingga perubahan kenaikan harga pasar seharusnya tidak terlalu signifikan.

Ditjen Perikanan Tangkap melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-156/MEN-KP/II/2023 mengusulkan penetapan status TPTD dengan alasan yang sah dengan melampirkan: a) Usulan TPKN DJPT Maluku Utara; b) Kepmen KP Nomor 97 tahun 2021 tentang Pembebasan Pertanggungjawaban atas Kasus Pengadaan 10 Unit Kapal Pole Line Fiberglass 30 GT pada DKP Prov. Maluku Utara; c) Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan 10 Unit Kapal Pole and Line Fiberglass 30 GT pada DKP Prov. Maluku Utara TA 2011 Nomor R.2390/ITJ/RC.320/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011

(https://drive.google.com/drive/folders/1vq1voK_mfGVG4iYMa5kTMgAZClu5ukqg?usp=drive_link)

2. Laporan Hasil Pemeriksaan 08/LHP/XVII/01/2012

Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat Senilai Rp6.819.922.516,00 Belum Diusulkan Penghapusannya (Satker Dit PUP/PPK)

Hasil Telaah

Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang BELUM DIHAPUSKAN yaitu pada Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan belum mengusulkan penghapusan senilai Rp109.380.000,00

Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang BELUM DIHAPUSKAN yaitu pada Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan belum mengusulkan penghapusan senilai Rp109.380.000,00. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1831/DJPT.1/PL.750/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal Permohonan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (https://drive.google.com/drive/folders/1GxG3K8h1VOfsXbJd2EyNS8ninyYfe41h?usp=drive_link).

3. Laporan Hasil Pemeriksaan 39/LHP/XVII/11/2013

Terdapat Tunggakan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pada Ditjen Perikanan Tangkap Per 30 Juni 2013 Sebesar Rp28.876.531.364,03 dan Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp34.560.777.416,13.

Hasil Telaah

Masih terdapat sisa setoran sebesar Rp30.495.557.152,95 (sisa belum disetor pada Semester II 2024 Rp32.195.465.481,95 – setoran tl Semester 1 Tahun 2025 Rp1.699.908.329,00)

Tindak lanjut : a) surat dari KPKNL Jakarta II nomor S-3560/KNL.0702/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang pemberitahuan piutang negara lunas dengan keringanan a.n PT. Hadidgo sebesar Rp1.630.391.355; b) bukti setor NTPN no. B86733CIFKS1MT7E tanggal 9 Desember 2024 a.n PT. Ocean Mitramas sebesar Rp9.247.491; c) bukti setor NTPN no.11D640NA054SFTEF tanggal 9 Desember 2024 a.n PT. Ocean Mitramas sebesar Rp8.116.800 total pelunasan SMT 2 2024 sebesar Rp1.647.755.646; d) Surat Direktur Perizinan dan Kenelayan kepada daftar terlampir Nomor B.184/DJPT.5/KU.320/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Penyelesaian Kekurangan Bayar Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
<https://drive.google.com/drive/folders/1bv0GsfPsMM2JEXivH0QDTsPUcyJTGv2-?usp=sharing>.

https://drive.google.com/file/d/1riuLR8RP8K2y1hm9P6SKTAPZ2qCu8aCL/view?usp=drive_link.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan 45/LHP/XVII/12/2013

Perputaran Dana BLM PUMP Tidak Sesuai Ketentuan.

Hasil Telaah

Review Eselon I pada SIPTL atas mekanisme status 4: Sementara status 2, jika disetujui oleh pimpinan, baru bisa diajukan status 4 dalam SIPTL.

Telah diusulkan status 4 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Penjelasan Program PUMP pada DJPT Nomor B.296/ITJ/HP.520/IX/2023 tanggal 29 September 2023; dan 2. Tindak Lanjut LHP BPK-RI Nomor 44/LHP/XVII/12/2013 dan Nomor 45/LHP/XVII/12/2013 terkait Program PUMP Nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 (<https://drive.google.com/file/d/1r68UNzma9qSN7Pjv TTnVhRZms3tm2jl/view?usp=sharing>).

5. Laporan Hasil Pemeriksaan 12/LHP/XVII/01/2013

Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) unit Kapal Purse Seine 10-30 GT pada Kabupaten Halmahera Timur diindikasikan Fiktif (kegiatan pengadaan kapal serta menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp795.224.527,00).

Hasil Telaah

Usulan Status : Belum Sesuai sudah diajukan permohonan status 4 namun belum ada keputusan diterima/ditolak.

Tindaklanjut : Ditjen Perikanan tangkap melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan B-797/MEN-KP/VIII/2022 mengajukan penetapan TPTD dengan alasan yang sah. dapat dijelaskan bahwa berdasarkan surat keterangan kepala dinas Halmahera timur terkait pekerjaan 2 (dua) unit kapal purse seine 10-30 GT yang diindikasikan fiktif ternyata tidak benar. Melalui Surat MKP kepada Anggota IV BPK-RI Nomor B.2171/MEN_KP/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 hal Penyampaian Perkembangan Tindak Lanjut 9 Rekomendasi (dengan lampiran : Hasil Reviu Itjen KKP Kepada Auditor Utama KN IV BPK RI Nomor T.454/ITJ/HP.380/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 hal Hasil Reviu Dokumen Tindak Lanjut atas Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan TA 2010 s.d. 2012 berupa Pengadaan 2 (dua) unit Kapal Purse Seine 10 - 30 GT di Kabupaten Halmahera Timur (halaman 45-47). Usulan Status : Belum Sesuai sudah diajukan permohonan status 4 namun belum ada keputusan diterima/ditolak (https://drive.google.com/drive/folders/1YNYSMJsFn_o8ZzwoomjG8Pc1DPOhrY5g?usp=drive_link).

6. Laporan Hasil Pemeriksaan 44/LHP/XVII/12/2013

a. Pengendalian Eksploitasi Sumber Daya Ikan Belum Optimal.

Hasil Telaah

Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada PP tersebut telah mengatur bahwa KBLI penangkapan ikan bersirip di laut utk kapal 5-30 Gt dengan daerah penangkapan <12 mill merupakan kewenangan Gubernur (Izin Daerah) namun memiliki persyaratan membayar PNPB. Namun regulasi pengenaan PNPB atas izin daerah tersebut belum didukung dengan perubahan atas PP 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, tim mengusulkan status TL belum sesuai rekomendasi

Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada PP tersebut telah mengatur bahwa KBLI penangkapan ikan bersirip di laut utk kapal 5-30 Gt dengan daerah penangkapan <12 mill merupakan kewenangan Gubernur (Izin Daerah) namun memiliki persyaratan membayar PNPB. Namun regulasi pengenaan PNPB atas izin daerah tersebut belum didukung dengan perubahan atas PP 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, tim mengusulkan status TL belum sesuai rekomendasi. Usulan Status IV atas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-579/MEN-KP/III/2023 tanggal 28 Maret 2024 (<https://drive.google.com/file/d/1m9N2-xENickHxcOkw8PzS49MbEvSgHs8/view?usp=sharing>).

b. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial PUMP dan Kapal Inkamina Tidak Mempertimbangkan Pengelolaan Perikanan secara Lestari.

surat permohonan penetapan status 4 atas rekomendasi berikut: BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memerintahkan Dirjen Perikanan Tangkap supaya memperbaiki pedoman teknis PUMP Perikanan Tangkap

sesuai dengan aspek kelestarian SDI, dilengkapi hasil reviu Itjen atas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap beserta dokumen pendukungnya.

Hasil Telaah

Berdasarkan dokumen yang dilampirkan, tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat dipertimbangkan menjadi status 4 (Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah) dengan kriteria tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis yaitu perubahan regulasi dan struktur organisasi dengan penjelasan bahwa: a) Program PUMP saat ini sudah tidak berjalan dan tidak dilanjutkan lagi oleh Ditjen PT; b) Terkait dana bergulir, saat ini pengurusannya dilakukan oleh LPUMKP yang diatur pada Permen KP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Permen KP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, sehingga perbaikan atas pedoman teknis Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara diusulkan status 2, menunggu persetujuan Anggota IV.

- i. Surat Ditjen PT kepada Auditor Keuangan Negara IV BPK-RI nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 tgl 21 Juni 2023 atas pedoman teknis program PUMP dinilai sudah tidak relevan untuk saat ini.
- ii. Hasil reviu Itjen KKP nomor B.296/ITJ/HP.520/IX/2023 tgl 29 September 2023 atas Penjelasan Program PUMP pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- iii. Permen KP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ortolab Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Bab I Pasal 2. LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- iv. Permen KP No.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen KP No 3 Tahun 2017;
- v. Surat MKP kepada Anggota IV BPK-RI Nomor B.2171/MEN-KP/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 hal Penyampaian Perkembangan TL 9 Rekomendasi, (PUMP-DJPT)

(https://drive.google.com/drive/folders/1naH9TwrlaxVNp681mTsth5RExzsELJBF?usp=drive_link)

7. Laporan Hasil Pemeriksaan 05/LHP/XVII/01/2014

- a. Tiga Puluh Dua Paket Kegiatan Pengadaan Barang Mengalami Keterlambatan Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp1.156.888.491,69.

Hasil Telaah

Belum ada permohonan keringanan piutang/pengajuan crash Program dari PT. Lion Fibre Glass kepada KPKNL dan belum ada keputusan dari KPKNL sebagai tindak lanjut atas rekomendasi penyetoran denda keterlambatan ke kas negara.

Proses Penyerahan Piutang PT. Lion Fibre Glass Nomor melalui KPKNL Riau : a) Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara dari DKP Prov Riau kepada an. PT. Lion Fibre Glass Nomor 900_SU_dkp-SEKR_IX_2022_0262 tanggal 28 September 2022 (3); b) Penerimaan Pengurusan Piutang PT. Lion Fibreglass No.. SP3N-4/PUPNC.03.01.2023 tgl 10 Feb 2023; c) Surat KPKNL Pekanbaru Nomor S-2050_KNL.0303_2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Panggilan Terakhir kepada PT. Lion Fibre Glas; d) Pemberitahuan CP Penyelesaian Piutang No. S.1163/KNL.0303/2024 tgl 7 Juni 2024; e) Permohonan mengikuti CP Weky Theny

tgl 8 Agustus 2024; f) Persetujuan Keringanan Utang An. PT. Lion Fibre Glass No. S-1842/KNL.0303/2024 tgl 9 Agustus 2024; g) Bukti Pelunasan CP sebesar Rp78.669.976 NTPN : EAA4F3CIFKJPNI OG tgl 01-10-2024; h) Pernyataan Piutang Negara Lunas No. SPPNL-10/PUPNC.03.01/2024 tgl. 30 September 2024; i) Pemberitahuan Piutang Negara Lunas Dengan Keringanan PT Lion Fibre Glass No. S-2335/KNL.0303/2024 tgl 2 Oktober 2024 (https://drive.google.com/drive/folders/1qnChsq7gL_niprbTe7FNiPS46OEF7IRq?usp=drive_link).

- b. Kelebihan Pembayaran atas Tiga Puluh Satu Paket Pengadaan Sebesar Rp2.666.351.040,50.

Hasil Telaah

Masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp109.000.000,00 (Rp2.666.351.040,50 - Rp2.357.351.040,50-Rp200.000.000,00)

Dokumen TL DKP Provinsi Riau (03) atas Telah ditindaklanjuti dengan tidak menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp126.000.000,00 melainkan dana tersebut telah digunakan untuk biaya umum berupa sea trial senilai Rp12.000.000,00 dengan BA Sea Trial No 018/BAST/KM/IX/2013 tanggal 16 September 2013 oleh PT Kurnia Marina dan biaya operasional 1 kali senilai Rp30.000.000 telah dilampirkan dengan tanda terima biaya fishing trial operasional KUB serta peralatan komunikasi/ VMS yang telah terpasang senilai Rp84.000.000,00 (Dokumen TL Terlampir); 1. SK MKP Nomor 49/MEN KP/KU.420/2022 tentang Pembebasan Pertanggungjawaban atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 30 GT TA 2013. tggil 29 November 2022; 2. Bukti screenshot Sikad No ID 10230530 (Saldo 0); 3. Kertas kerja (<https://drive.google.com/drive/folders/1n83DZ-bij-Abl1ztEOAOg8wdzXzv9-B7?usp=sharing>).

8. Laporan Hasil Pemeriksaan 02/LHP/XVII/01/2015,

Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Terbengkalai dan Jaminan Pelaksanaan / Uang Muka Belum Dapat Dicairkan.

Hasil Telaah

Rekomendasi atas temuan tersebut belum dapat dipertimbangkan menjadi status 4 (Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah) dengan penjelasan bahwa Direktur Utama PT FGP (a.n Syd) telah divonis penjara selama 6 tahun dan yang bersangkutan telah meninggal dunia saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (sebelum masa tahanan berakhir) atas kasus pengadaan kapal terkait temuan pada LHP BPK RI tersebut, namun belum ada dokumentasi upaya dari KKP untuk memastikan bahwa keluarga atau ahli waris terpidana (Direktur PT FGP) tidak sanggup membayar/memulihkan kerugian tersebut.

Setelah Piutang PT. F1 Perkasa diserahterimakan pengurusan piutangnya kepada KPKNL Jawa Timur dan terdapat permasalahan dengan telah diserahkan kepada APH, maka melalui surat No. S-545/WKN.10/KNL.04/2020 tgl 11 Mei 2020 KPKNL Jember menyampaikan informasi penyerahan piutangnya kepada DJPT bahwa penyerahan piutang telah dikembalikan kepada pihak penyerah piutang yakni DKP Prov Bali sesuai ketentuan PMK No.240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara dikarenakan penanganan piutang sedang dalam proses APH : a). Surat Pengembalian Penyerahan Piutang negara An. PT. F1 Perkasa Nomor SKPPN-01/WKN.10/KNL.04/2020 tgl 6 May 2020; Selanjutnya terhadap pengurusan pidana an Debitur PT.F1. Perkasa (Suyadi selaku Direktur) yang telah melaksanakan hukuman atas penyelesaian piutang berdasarkan Putusan MA-RI (Pengadilan Tinggi Bali) No. 5/PID.SUS.TPK/2018/PT DPS; b). Melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kebobrokan no. W20.PAS.PAS.1.PK.01.02 -443 tgl 14 Maret 2023 disampaikan bahwa, Suyadi telah

menjalankan Pidana sesuai Pasal 2 Ayat 1 JO. Pasal 18 dan UU RI No. 31 Tahun 1999 tgl 20 Juli 2017 dengan putusan nomor 2516K/PID.SUS/2018 tgl 3 Desember 2018 dengan masa pidana 6 tahun denda 200jt sub 6 bln kurungan/penjara uang pengganti Rp755.078.882,00 Pid. Penjara Selama 2 tahun tgl 21 Juli 2023 dan meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020 (Surat Keterangan Kematian saat menjalankan pidana uang pengganti Rp755.078.882,00 oleh dr.A.A. Gede Hartawan pada tgl 30 Desember 2020) (https://drive.google.com/drive/folders/1eaBB4tHbuPs7mOCTvdn-R2_OGrFhIQ-p?usp=sharing).

9. Laporan Hasil Pemeriksaan 08.A.B.C/LHP/XVII/05/2014

a. Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satker Inaktif Tidak Memadai

Hasil Telaah : Belum dapat dilakukan verifikasi atas penyelesaian rekomendasi pada 300 Satker inaktif karena belum terdapat kertas kerja rekapitulasi.

b. Aset Tetap Senilai Rp40.016.491.106,00 Tidak Diketahui Keberadaannya

Hasil Telaah : Telah ditindaklanjuti dengan: 1. KepmenKP No 133/KEPMENKP/SJ/PL.820/2019 tanggal 22 Februari 2019, KepmenKP No 1152/KEPMENKP/SJ/PL.820/2023 tanggal 19 Desember 2023, dan KepmenKP No 275/KEPMENKP/SJ/PL.750/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Penghapusan BMN di Lingkup KKP yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap ke Dinas KP Prov Jawa Barat, yang berisi "daftar BMN yang dihapuskan pada DKP Prov. Jawa Barat sebagai satker Dekon/TP DJPT KKP sebesar Rp18.306.582.791." 2. KepmenKP No 16/KEPMENKP/SJ/PL.750/2018 tanggal 23 Januari 2018 dan KepmenKP No 323/KEPMENKP/SJ/PL.750/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Penghapusan BMN di Lingkup KKP yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap pada Dinas KP Kalimantan Tengah, yang berisi "Daftar BMN yang dihapuskan pada DKP Prov. Kalimantan tengah sebagai satker Dekon/TP DJPT KKP sebesar Rp3.757.336.302,00." 3. KepmenKP No 377/KEPMENKP/SJ/PL.750/2022 dan KepmenKP No 356/KEPMENKP/SJ/PL.750/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Penghapusan BMN di Lingkup KKP yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap pada DKP Prov. Sulawesi Utara, yang berisi "daftar BMN yang dihapuskan pada DKP Prov. Sulawesi Utara sebagai Satker Dekon/TP DJPT KKP sebesar Rp845.843.621,00." 4. KepmenKP No 538/KEPMENKP/SJ/PL.750/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Penghapusan BMN di Lingkup KKP yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap pada DKP Prov. Papua, yang berisi "Daftar BMN yang dihapuskan pada DKP Prov. Papua sebagai satker Dekon/TP DJPT KKP sebesar Rp428.561.010,00." 5. KepmenKP No 440/KEPMENKP/SJ/PL.750/2020 tanggal 21 September 2020 dan KepmenKP No 676/KEPMENKP/SJ/PL.750/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Penghapusan BMN di Lingkup KKP yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap pada DKP Prov. Aceh, yang berisi "Daftar BMN yang dihapuskan pada DKP Prov. Aceh sebagai satker Dekon/TP DJPT KKP sebesar Rp11.112.440.000,00." 6. KepmenKP No 491/KEPMENKP/SJ/PL.820/2019 tanggal 10 Juli 2019, KepmenKP No 492/KEPMENKP/SJ/PL.750/2019 tanggal 10 Juli 2019 dan KepmenKP No 636/KEPMENKP/SJ/PL.750/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Penghapusan BMN di Lingkup KKP yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap pada DKP Prov. Nusa Tenggara Timur, yang berisi "Daftar BMN yang dihapuskan pada DKP Prov. NTT sebagai satker Dekon/TP DJPT KKP sebesar Rp7.864.110.350,00." 7. KepmenKP No 1227/KEPMENKP/SJ/PL.750/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Penghapusan BMN di Lingkup KKP yang dikelola Ditjen Perikanan Tangkap pada DKP Prov. Gorontalo, yang berisi "Daftar BMN yang dihapuskan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo sebagai satker Dekon/TP DJPT KKP sebesar Rp9.021.000,00." Namun belum ada dokumen TL untuk aset-aset yang dikelola

DJPB pada Satker DKP Provinsi Bali dan dikelola PSDKP pada Satker DKP Provinsi Maluku, DKP Provinsi Sulawesi Barat, dan DKP Provinsi Kalimantan Tengah

10. Laporan Hasil Pemeriksaan 4.A, 4.B, 4.C / LHP XVII/05/2015

- a. Piutang Bukan Pajak Senilai Rp27.072.772.925,00 Pada Neraca Kementerian Kelautan Dan Perikanan Per 31 Desember 2014 Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya;

Hasil Telaah : belum sesuai rekomendasi

- b. Aset Tetap Peralatan Mesin Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebesar Rp6.404.731.877,00 tidak Diketahui Keberadaannya

Hasil Telaah : Masih terdapat aset tetap yang belum dihapuskan senilai Rp412.902.320,00 untuk Prov DKI Jakarta dan Rp2.247.891.104,00 dengan rincian terlampir. Berdasarkan hasil analisa dokumen tindak lanjut diketahui masih terdapat aset tetap yang belum dihapuskan senilai Rp412.902.320,00 untuk Prov DKI Jakarta dan Rp2.247.891.104,00 dengan rincian terlampir. Dengan demikian tim menyimpulkan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi

- c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Senilai Rp29.621.702.605.00 Belum Efektif dan Berlarut-Larut

Hasil Telaah : Pada kertas kerja rekapitulasi tindak lanjut, masih terdapat penyelesaian 12 aset KDP yang belum dilampirkan dokumen pendukung

- d. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp1.732.314.671,90;

Hasil Telaah : KKP belum menyusun kertas kerja rekapitulasi penyetoran kelebihan pembayaran sebesar Rp1.417.028.44,82 ke kas negara dan bukti setornya

11. Laporan Hasil Pemeriksaan 04/LHP/XVII/01/2016

- a. Perum Perikanan Indonesia Memungut Jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Masing-Masing Sebesar Rp22.616.453.313,00 dan Rp267.809.096,00 atas Dermaga yang Dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hasil Telaah

Belum ada kajian/feasibility study oleh pihak independen sebelum penetapan pola kerjasama dan pengambil alihan aset.

DJPT Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut, bahwa DJPT, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal telah melakukan koordinasi progress penyelesaian temuan dengan melakukan rapat dan koordinasi tertulis baik secara internal dan eksternal dalam upaya penyelesaian temuan dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut: 1) Melaksanakan saran dari Inspektorat Jenderal KKP yang disampaikan melalui Nota dinas Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal PT nomor: 7.2/ITJ/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Masukkan atas Nota Dinas Dirjen Perikanan Tangkap tentang hasil identifikasi dan kaji ulang pungutan PNBP Tambat labuh di UPT Pelabuhan Perikanan (terlampir); 2) Menyampaikan Surat Dirjen Perikanan Tangkap kepada Dirut Perum PERINDO nomor: B.14362/DJPT/KU.420.S1/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI, bahwa berdasarkan poin 8 dan 9 isi dari surat tersebut meminta Perum PERINDO agar menghentikan penugasan kegiatan pelayanan jasa tambat labuh terhadap kedua dermaga tersebut dan selanjutnya pengelolaan tambat labuh dari kedua dermaga tersebut di ambil alih oleh KKP selaku Pengguna Barang dengan menarik PNBP berdasarkan PP 75/2015 mulai tanggal 15 Oktober 2019 (terlampir); 3) Berdasarkan

Surat Sesditjen Perikanan Tangkap kepada Kepala PPS NZ Jakarta dan PPN Pekalongan nomor: B.14660/DJPT/KU.420.S1/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas kegiatan pelayanan jasa tambat labuh, merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen PT kepada Dirut Perum PERINDO nomor: B.14362/DJPT/KU.420.S1/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 untuk segera melaksanakan pungutan jasa tambat labuh sesuai PP 75/2015 dan Perdirjen PT nomor: 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata cara pungutan PNPB diluar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan (terlampir); 4) Sebagai Tindakan atas Pemungutan Tambat labuh yang dilakukan oleh KKP, Ditjen Perikanan Tangkap di PPS NZ Jakarta dan PPN Pekalongan, maka berdasarkan hal tersebut dari AKN VII BPK RI mengundang Ditjen Perikanan Tangkap, KKP melalui surat nomor: 31/PDPTT/Perindo/12/2019 perihal undangan dan konfirmasi atas penugasan Perindo sesuai PP 9/2013. Sesuai dengan undangan tersebut maka disampaikan notulen rapat yang menjadi kesimpulan rapat di kedua belah pihak (KKP dan AKN VII BPK) (terlampir); Menindaklanjuti hasil pertemuan KKP dengan AKN VII BPK RI maka DJPT melakukan koordinasi dengan pihak Perum PERINDO baik dengan surat maupun rapat-rapat, antara lain: 1) Surat Dirjen PT kepada Dirut Perum PERINDO nomor: B.693/DJPT.0/PL.210.S1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal evaluasi dan koordinasi mengenai pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang dibangun diatas lahan milik Perum PERINDO (terlampir); 2) Surat Dirut Perum PERINDO kepada Dirjen PT nomor: S-446/Dir.A/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal usulan pengelolaan dan pengembangan aset-aset KKP di lahan Perum PERINDO, terhadap hal tersebut Perum PERINDO mengajukan 3 usulan pengelolaan dan pengembangan (terlampir); menindaklanjuti terkait penetapan kerjasama atau pengambilalihan pengelolaan aset seperti tambat labuh dan toll gate dimana agar dilakukan kajian secara independen sebagaimana kesimpulan dari dari AKN VII BPK RI, maka DJPT berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP (Inspektur II) melalui surat sebagai berikut: 1) Surat Sesditjen PT kepada Inspektur II nomor: B.3422/DJPT/KU.420.S1/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 (terlampir) 2) Nota Dinas Inspektur II kepada Sesditjen PT nomor: 2.23/ ITJ.2/PL.911/IV/2020 tanggal 23 April 2020 (terlampir).

- b. Penerbitan Grosse Akte, Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang Tidak Tertib Menimbulkan Lolosnya Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan Minimal Sebesar Rp6.294.967.757,00

Hasil Telaah

Rincian temuan sebesar Rp940.104.293,00 yang tidak dapat ditindaklanjuti diuraikan pada kertas kerja terlampir dengan alasan Kapal tidak terdaftar pada Database KKP (SIPEPI/SILAT/SIMKADA) dan Data Kementerian Perhubungan. Namun demikian belum ada penjelasan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang dilakukan DJPT atas kapal yang tidak terdaftar tersebut.

- c. Pemanfaatan Barang Milik Negara Atas Sebagian Tanah dan Bangunan Pada Pelabuhan Perikanan Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil Telaah

Penyelesaian hasil reviu adalah sebagai berikut. a. dari 30 pelabuhan perikanan, 26 pelabuhan perikanan telah menyelesaikan hasil reviu perjanjian penggunaan / pemanfaatan BMN atau sebesar 86,67%. Dengan demikian berdasarkan capaian persentase penyelesaian tersebut maka tim menyimpulkan status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

TL Semester I 2025: (DJPT) Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor

2906/DJPT.4/PI.140/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Reviu Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Tindak Lanjut LHP BPK : Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor 2906DJPT.4PI.140XII2024 tgg 16 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Reviu.

- d. Kurang Pungut Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Jasa Pemakaian Listrik, Jasa Pengadaan Air, dan Jasa Kebersihan Tahun 2013 s.d Semester I Tahun 2015 Minimal Sebesar Rp3.488.213.211,73

Hasil Telaah

Dengan demikian belum sesuai rekomendasi, masih terdapat kurang pungut PNBPN yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp958.060.475,73 dengan rincian: 1. Kurang pungut PNBPN Jasa Pemakaian Listrik pada PPN Sibolga senilai Rp249.911.030,00 dan PPS Kendari senilai Rp280.000,00 2. Kurang pungut PNBPN Jasa Pengadaan Air pada PPN Sibolga senilai Rp51.994.200,73 dan PPS Kendari senilai Rp30.475.000,00 3. Kurang pungut PNBPN Jasa Kebersihan pada PPS Nizam Zachman senilai Rp625.400.245,00. Kertas Kerja Rincian Setoran Terlampir.

12. Laporan Hasil Pemeriksaan 21A, 21B, 21C/LHP/XVII/05/2016

- a. Terdapat Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan pada 41 Satuan Kerja Sebesar Rp5.911.266.831,31

Hasil Telaah

Masih terdapat denda keterlambatan belum disetorkan ke kas negara senilai Rp88.573.000,00 PTL Semester I Tahun 2022. Sehingga sisa pada saat semester I tahun 2022 yang belum disetorkan sebesar Rp83.000.000,00 (Rp88.573.000,00 - (Rp2.000.000,00 + Rp3.573.000,00))

- b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa pada 124 Satuan Kerja Sebesar Rp11.225.179.926,84

Hasil Telaah

Belum ada bukti penyetoran sesuai nilai rekomendasi, dari rekapitulasi yang penyetoran dilampirkan oleh KKP, masih terdapat sisa atas kelebihan pembayaran yang belum disetor senilai Rp43.061.203,05 atas 15 pekerjaan, diantaranya pekerjaan pada Dinas KP Kabupaten Kolaka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkung Dawi-Dawi senilai Rp40.654.200 dan atas pekerjaan gd. balai pendidikan dan keterampilan sekaya senilai Rp2.407.000

- c. Terdapat Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan Pembangunan Pengerukan PPI Cikidang senilai Rp2.957.761.706,55

Hasil Telaah

Masih terdapat kekurangan penyetoran ke kas negara sebesar Rp2.757.761.706,55 (Rp2.957.761.706,55 - Rp200.000.000)

- d. Aset Tak Berwujud Belum Diamortisasi dan Hasil Kajian/Penelitian Belum Seluruhnya Dilakukan Penilaian

Hasil Telaah

satker DJPT belum menindaklanjuti rekomendasi (melakukan kajian atas seluruh hasil kajian/penelitian dan menghitung nilai perolehan atas hak paten yang telah mendapat sertifikat sebagai dasar pencatatan Aset Tak Berwujud (ATB)). (Catatan

Nilai ATB DJPT : Hak Cipta ?, Paten ?, Software ?, Lisensi ?, Hasil Kajian/Penelitian ? dan ATB lainnya ?)

13. Laporan Hasil Pemeriksaan 25/LHP/XVII/06/2017

- a. Praktek Tidak Sehat pada Pengadaan Barang/Jasa dan Indikasi Kekurangan Volume Pekerjaan pada Tujuh Paket Pekerjaan Di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Sebesar Rp2.545.754.028,00

Hasil Telaah

Rekomendasi atas temuan tersebut belum dapat dipertimbangkan menjadi status 1 (telah sesuai rekomendasi) atau status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti) dengan penjelasan bahwa terdapat sebagian nilai rekomendasi yang diajukan menjadi status 4 senilai Rp770.000.000,- (Rp108.500.000,00 + Rp661.500.000,00) dikarenakan CV Mitra Bahari Sejati sudah tidak beroperasi dan Direktur Utamanya telah meninggal dunia, namun belum ada dokumentasi upaya dari KKP untuk memastikan bahwa keluarga atau ahli waris tidak sanggup membayar kelebihan pembayaran tersebut

- b. Pembangunan Kapal Penangkap Ikan yang Dilaksanakan oleh PT PU dan PT RP Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil Telaah

Dari nilai rekomendasi senilai Rp2.874.955.000,00 sudah disetorkan senilai Rp2.643.225.010,00 masih terdapat senilai Rp231.729.990,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara

- c. Pelaksanaan Kegiatan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi pada Enam Paket Pengadaan sebesar Rp9.673.585.300,00

Hasil Telaah

diusulkan status belum sesuai dengan rekomendasi, karena masih terdapat kekurangan penyetoran dari CV Sumber Pratama sebesar Rp63.299.998,00 (Rp81.118.181,00-Rp17.818.183)

Terdapat setoran CV Sumber Pratama senilai Rp9.181.818 dengan rincian :

1. 24 Januari 2025 sebesar Rp2.000.000,00 NTPN AFE8648VVNO66NB1
2. 25 April 2025 sebesar Rp3.181.818,00 NTPN FAF7E6U8F7OB1TTC
3. 04 Juni 2025 sebesar Rp2.000.000,00 NTPN C3A0E7QLV2G1NH5G
4. 11 Juli 2025 sebesar Rp2.000.000,00 NTPN FF6BF7QLV2J74MT1

<https://portal-repo.kkp.go.id/s/TLHP?path=%2FPengadaan%20Kapal%20Perikanan%20dan%20Pembangunan%20Pelabuhan%20Perikanan%202015-2016%2FDJPT%2FCV%20Sumber%20Pratama>

- d. Pelaksanaan kegiatan pada Dua Paket Pekerjaan dengan Dana TP Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil Telaah

Antara Rekomendasi dengan Tindak Lanjut Berbeda Rekomendasi menyebutkan untuk melakukan pemutusan kontrak atas wanprestasi penyedia pekerjaan, namun pada dokumen TL menjelaskan bahwa Tidak dilakukan pemutusan kontrak oleh Dinas KP Pangandaran kepada PT. Damai, dikarenakan proyek pekerjaan tersebut dilaksanakan 100% dibuktikan dengan dokumen dukung sebagai berikut: 1. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (SPPK) Nomor 027/646/DKPK/IX/2015 tanggal 10 September 2015 perihal Pembangunan Fasilitas Penunjang PPI Cikidang dengan

nilai kontrak Rp2.890.597.000,00; 2. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor 027/1470/DKPK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 menjelaskan bahwa pihak kesatu sebagai Pejabat Pembuat Komite menyatakan pihak kedua sebagai Direktur PT. Damai telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan fasilitas penunjang PPI Cikidang dengan baik; dan 3. Foto dokumentasi cek fisik di lapangan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Penunjang PPI Cikidang yang terdiri dari rumah dinas pimpinan, kios, koperasi nelayan, mess, masjid, tempat wudu & KM/WC, balai pertemuan, kantor & sarana kantor kecamatan pangandaran, TPI, gudang & fasilitas kantor pangandaran.

(sudah lewat tahun anggaran), serta pekerjaan sudah selesai 100% dan sebagai alternatifnya telah disampaikan dokumen dukung : 1. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (SPPK) Nomor 027/646/DKPK/IX/2015 tanggal 10 September 2015 perihal Pembangunan Fasilitas Penunjang PPI Cikidang dengan nilai kontrak Rp2.890.597.000,00; 2. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor 027/1470/DKPK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 menjelaskan bahwa pihak kesatu sebagai Pejabat Pembuat Komite menyatakan pihak kedua sebagai Direktur PT. Damai telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan fasilitas penunjang PPI Cikidang dengan baik; dan 3. Foto dokumentasi cek fisik di lapangan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Penunjang PPI Cikidang yang terdiri dari rumah dinas pimpinan, kios, koperasi nelayan, mess, masjid, tempat wudu & KM/WC, balai pertemuan, kantor & sarana kantor kecamatan pangandaran, TPI, gudang & fasilitas kantor pangandaran.
https://drive.google.com/drive/folders/1o10Tdgg8nDVklNQ9kKiRHcOIRdJEoYbo?usp=drive_link.

- e. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan atas 45 Unit Kapal Perikanan Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp3.433.938.767,00

Hasil Telaah

Masih terdapat senilai Rp1.208.086.463,00 (Rp3.433.938.767,00-Rp2.225.852.304,00) yang belum disetorkan ke Kas Negara

Terdapat setoran CV Mega Karya Utama senilai Rp2.089.109 dengan rincian :

1. 05 Februari 2025 sebesar Rp1.089.109,00 NTPN A71457QLV24445EC
2. 28 Mei 2025 sebesar Rp1.000.000,00 NTPN 4A0092G502VF1SQL

<https://portal-repo.kkp.go.id/s/TLHP?path=%2FPengadaan%20Kapal%20Perikanan%20dan%20Pembangunan%20Pelabuhan%20Perikanan%202015-2016%2FDJPT%2FCV%20Sumber%20Pratama>.

- f. Kapal Bantuan Perikanan dari Ditjen Perikanan Tangkap Belum Dimanfaatkan Secara Optimal oleh Penerima Kapal

Hasil Telaah

Belum semua kapal sudah diupdate data SIUP dan SIPI nya. Hanya terdapat 30 dari 66 kapal yang sudah diupdate. Dari 30 tersebut, terdapat 9 kapal yang belum terbit SIUP dan SIPI nya. Selain itu masih terdapat 2 kapal yang baru terbit SIUP nya saja

- g. Indikasi Kerugian Negara atas Pemahalan Harga pada Lima Paket Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp6.579.694.259,20

Hasil Telaah

Masih terdapat kurang setor sebesar Rp1.373.181.817,00

14. Laporan Hasil Pemeriksaan 13A, B, C/LHP/XVII/05/2017

a. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas

Hasil Telaah

Dari nilai rekomendasi senilai Rp1.036.213.227,00, sudah disetorkan sebesar Rp936.354.921,00 sehingga masih terdapat Rp99.858.306,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Dengan demikian, Tim menyimpulkan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi

DKP Papua Satker 03 telah setor ke kas negara dengan rincian sebagai berikut: 1. NTPN No. 929382G4UBL5BH5H tanggal 28 November 2019 sebesar Rp4.490.000,00 2. NTPN No. 2E50C61QTLUMVHR8 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp6.851.400,00 3. NTPN No. CE3EA6TGV7O9MGM8 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp20.402.200,00 4. NTPN No. AAF0F0N9UMIU12FA tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp17.468.800,00 5. NTPN No. C8FCB6TG7C2COEM8 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp14.465.000,00 6. NTPN No. 0F1018N3DE1G6IFF tanggal 07 Januari 2020 sebesar Rp20.705.600,00 7. NTPN No. 969620N9UVJNM73U tanggal 08 September 2020 sebesar Rp2.000.000,00 8. NTPN No. 869141JNFCETHABN tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp3.500.000,00 >>>>> DKP Papua Satker 07 telah setor ke kas negara dengan rincian sebagai berikut: 1. NTPN No. D864455DED231667 tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp3.004.000,00 2. NTPN No. BD5F13CIENKKG1B3 tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp3.553.000,00 3. NTPN No. D11493CIENKKG1GD tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp1.203.000,00 4. NTPN No. B94240N9V86F8LN4 tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp4.000.000,00 5. NTPN No. 8DAC26U8E26RR387 tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp4.500.000,00 6. NTPN No. 1DC21JNF2OHD8ET tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp600.000,00 7. NTPN No. FCF546U8E2763NLR tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp533.000,00 8. NTPN No. C86D72G4UTB8320A tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp2.157.000,00 9. NTPN No. CF32C3CIENKKG2VT tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp2.182.000,00 10. NTPN No. FC11B7QLTSPIGQTK tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp6.000.000,00 11. NTPN No. 9CC1C2G4UTB832CG tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp7.046.000,00 >>>>> DKP Papua Satker 04 telah setor ke kas negara dengan rincian sebagai berikut: 1. NTPN No. 756041GN9M9LG7AO tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp2.374.000,00 2. NTPN No. 8A5C23D2T96LNLPO tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp9.500.000,00 3. NTPN No. 62F6155DDR2NC08T tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp4.287.000,00 4. NTPN No. 8AA262G4UKFU6ER0 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp8.000.000,00 5. NTPN No. B506E1JNFCH7RE7B tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp1.000.000,00 6. NTPN No. 41D773CIF1M0L8CR tanggal 03 Juni 2022 sebesar Rp6.900,00

b. Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil Telaah

Penyelesaian hasil revidi adalah sebagai berikut. a. dari 30 pelabuhan perikanan, 26 pelabuhan perikanan telah menyelesaikan hasil revidi perjanjian penggunaan / pemanfaatan BMN atau sebesar 86,67%. Bukti tindak lanjut dapat dilihat pada File TL

https://drive.google.com/file/d/1q2tG_7CKkkREMtRwz5zE24MxL9vBcSPc/view?usp=sharing Dengan demikian berdasarkan capaian persentase penyelesaian tersebut maka tim menyimpulkan status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

- Berdasarkan Surat Ditjen Anggaran nomor: S-1188/AG/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penyampaian Tanggapan atas kajian penggunaan tanah pada

Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sehubungan dengan surat tersebut tarif atas jasa penggunaan tanah dan bangunan direncanakan tetap diatur dalam PP Tarif KKP.

- TL Semester I 2025: (DJPT) Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2906/DJPT.4/Pl.140/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Reviu Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Tindak Lanjut LHP BPK (Lap Hasil Reviu Perjanjian PenggunaanPemanfaatan Tanah dan Bangunan di PP, 2906_Lap Hasil Reviu /Perjanjian PenggunaanPemanfaatan Tanah dan Bangunan di PP)
- c. Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebesar Rp209.227.547.845,00 Tidak Diyakini Kewajarannya (menarik dan menyettor denda keterlambatan senilai Rp17.305.339.119,1 ke Kas Negara)
 Hasil Telaah
 Masih terdapat senilai Rp13.840.208.374,10 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Sementara perhitungan ulang yang dilakukan Itjen KKP dengan merubah nilai temuan dan rekomendasi perlu dibahas lebih lanjut dengan melakukan perhitungan bersama dengan bukti pendukung yang valid dan sah.
- d. Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebesar Rp209.227.547.845,00 Tidak Diyakini Kewajarannya (menarik dan menyettor denda keterlambatan atas kontrak yang dibatalkan sebesar Rp6.963.714.497,7 ke Kas Negara)
 Hasil Telaah
 Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK yaitu belum disampaikan bukti penyettor denda keterlambatan atas kontrak yang dibatalkan sebesar Rp6.963.714.497,7 ke Kas Negara.
- e. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp4.734.129.626,71 (menarik dan menyettor denda keterlambatan sebesar Rp 4.477.231.221,26 ke Kas Negara)
 Hasil Telaah
 Denda keterlambatan yang belum disetor ke Kas Negara senilai Rp3.198.018.855,00 (Rp4.477.231.221,26 - Rp1.279.212.366,26) Dengan demikian, Tim menyimpulkan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi
- f. Kelebihan pembayaran sebesar Rp8.435.366.000,00 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.669.598.640,00 Atas Pekerjaan Sertifikasi Kapal Perikanan Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (menarik dan menyettor kelebihan pembayaran sebesar Rp8.435.366.000,00 ke Kas Negara)
 Hasil Telaah
 Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat penyettor atas kelebihan pembayaran sebesar Rp8.435.366.000,00 ke kas negara.
- g. Kelebihan pembayaran sebesar Rp8.435.366.000,00 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.669.598.640,00 Atas Pekerjaan Sertifikasi Kapal Perikanan

Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (menarik dan menyetor denda keterlambatan sebesar Rp1.669.598.640,00 ke Kas Negara)

Hasil Telaah

1. Belum terdapat penyetoran denda keterlambatan sebesar Rp1.669.598.640,00 ke kas negara 2. Tidak ada keterangan tertulis dari Itjen KKP atau PPK yang menjelaskan penyebab addendum kontrak pekerjaan tidak disampaikan kepada BPK ketika proses pelaksanaan pemeriksaan

- h. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Sebesar Untuk Belanja Jasa Konsultansi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Sebesar Rp95.171.600,00 (menarik dan menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp95.171.600,00 ke Kas Negara)

Hasil Telaah

Masih terdapat senilai Rp55.000.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara.

- i. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp7.339.564.437,04 (menarik dan menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp3.774.923.497,19 ke Kas Negara)

Hasil Telaah

Tidak lanjut belum sesuai karena masih terdapat Kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp225.977.621,54 (Rp3.774.923.497,19 - Rp3.548.945.876,65) . Dengan demikian, Tim menyimpulkan status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi

15. Laporan Hasil Pemeriksaan 5/LHP/XVII/01/2018

- a. Pengadaan Mesin Kapal Dalam Rangka Bantuan Sarana Penangkap Ikan TA 2016 di Direktorat KAPI Rawan Disalahgunakan dan Terdapat Potensi Kerugian Negara Senilai Rp2.925.573.200,00

Hasil Telaah

Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena masih terdapat sisa penyetoran ke Kas Negara atas potensi kerugian/kelebihan pembayaran senilai Rp879.890.000,00 dan Itjen belum melakukan revidu atas proses serah terima kapal dari galangan kepada koperasi penerima.

DJPT melalui surat dari Direktur KAPI nomor B.4208/DJPT.3/HP.520/XII/2022 menjelaskan bahwa terhadap mesin yang menjadi temuan, telah dilakukan pengiriman kepada koperasi lain dan penyetoran kepada kas negara. berdasarkan hal tersebut maka sudah tidak terdapat lagi potensi kerugian negara karena mesin sudah dimanfaatkan dengan melampirkan: 1. BAST Mesin Kapal Perikanan TA 2016 No 4882/TL.430/D2.KPB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018; 2. BAST mesin kapal perikanan tahun 2016 No 4883/TL.430/D2.KPB/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018; 3. BAST Mesin Kapal Perikanan TA 2016 No 980/TL.430/D2.BAST/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017; 4. BAST Mesin Kapal Perikanan TA 2016 No 979/TL.430/D2.BAST/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017; 5. BAST Mesin Kapal Perikanan TA 2016 No 978/TL.430/D2.BAST/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017; 6. Berita Acara Penarikan Mesin Kapal Perikanan No 9962/PL.110/D2.PPK/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 antara CV. Malindo Putra dengan Dit. KAPI dan kronologis penarikan 6 (enam) unit mesin merk Honda tipe BF 20D di galangan CV. Malindo Putra

- b. Kapal Bantuan Perikanan Dari Ditjen Perikanan Tangkap Belum Dimanfaatkan Secara Optimal oleh Penerima Kapal dan Belum Dilengkapi Dokumen Kapal

Hasil Telaah

Perlu penjelasan lebih lanjut

- Update Data Dokumen Kapal dan Perizinan Kapal TA 2016
 - surat tugas no 121/KP.440/D2.PDK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Laporan Penyelesaian Dokumen dan Perizinan Kapal Bantuan Perikanan TA. 2016 dan 2017 serta Monitoring dan Evaluasi Kapal Perikanan Bantuan TA. 2016, 2017, dan 2018 di Provinsi Jawa Timur (ST + Laporan penyelesaian Dokumen)
 - Update data Dokumen Kapal dan Dokumen Perizinan KM Nelayan 2016
- c. Dua Paket Pekerjaan Pembangunan Kapal Perikanan Belum Diserahkan Kepada Koperasi Penerima Bantuan Senilai Rp8.945.500.000,00 dan Bantuan Kapal Penangkap Ikan pada Kabupaten Pamekasan Mengalami Kerusakan Serta Belum Dilakukan Sea Trial

Hasil Telaah

Masih terdapat sisa kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp8.857.609.901 (Rp8.945.500.000-Rp86.900.000-Rp990.099)

- UPDATE Semester I Tahun 2023 >>>> Surat Penjelasan Inspektur II nomor R.144/ITJ.2/TU.140/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Penjelasan atas Pengadaan Kapal TA 2016 dan 2017 pada PT Yasa Ayu dan CV Karya Bahari
- TL Semester I 2024 >>>> DJPT : Ada setoran dari PT Yasa Ayu Abadi senilai Rp2.000.000 NTPN 217B17QLUP632KSC tanggal 7 Juni 2024. (catatan: bukti setor senilai Rp2.000.000 salah input, seharusnya diinput di LK 2016 yang merupakan jumlah denda keterlambatan pada PT Yasa Ayu Abadi) >>> Update TL Sem I 2024 (susulan) : 1. Perhitungan denda keterlambatan PT Yasa Ayu dan CV Karya Bahari; 2. Kronologi pengadaan Kapal 2016 PT Yasa Ayu Abadi untuk menjawab tindak lanjut kelebihan pembayaran senilai Rp869.000.000 yang telah disetor; 3. Setoran pencairan bank garansi CV Karya Bahari
- Telah ditindaklanjuti dengan : 1. Surat Nomor R.144/ITJ.2/TU.140/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Penjelasan atas Pengadaan Kapal TA 2016 dan 2017 pada PT Yasa Ayu dan CV Karya Bahari, 2. Kronologis Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Pengadaan Kapal Perikanan Tahun 2016 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 3. BAST Pekerjaan PT Yasa Ayu Abadi, 4. Bukti Setor atas Kelebihan Pembayaran PT Yasa Ayu, 5. BAST 6 Unit Kapal dari CV Karya Baharti, 6. BAST 7 unit kapal dari CV Karya Bahari
- TL Semester II 2024 >>> (DJPT) Untuk PT Yasa Ayu Abadi telah dilimpahkan ke KPKNL Bekasi dengan dokumen dukung sebagai berikut: 1. B.2492_ Surat Penyerahan PT Yasa Ayu Abadi ke KPKNL Bekasi; 2. SP3N - Yasa Ayu tgl 29 Agustus 2024; 3. Angsuran KPKNL Rp990.099 (PT Yasa Ayu) NTPN F046D7QLUPIL539Q.
- Dokumentasi fisik kapal yang di bangun oleh PT Yasa Ayu pada tahun 2016 (Perhitungan hak dan kewajiban karya bahari dan lampiran dan Foto Kapal 11 Unit Yasa Ayu)

16. Laporan Hasil Pemeriksaan 2/LHP/XVII/01/2018

Kebijakan Pelarangan Alat Penangkapan Ikan (API) Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya Permen Nomor 71 Tahun 2016 Belum Didukung dengan Sumberdaya dan Kelembagaan yang Memadai

Hasil Telaah

Belum sesuai rekomendasi. Dokumen tindak lanjut yang dilampirkan berupa renstra DJPT 2020-2024 yang masih menggunakan NTN sebagai salah satu indikator untuk mengukur IKMKP. Sedangkan pada LHP disebutkan bahwa NTN yang dijadikan indikator kinerja tidak dapat secara langsung untuk menilai kesejahteraan masyarakat nelayan, karena NTN hanya melihat kemampuan daya beli nelayan yang hanya merupakan salah satu komponen untuk menilai kesejahteraan masyarakat nelayan, sehingga BPK merekomendasikan agar DJPT lebih cermat dalam menentukan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan.

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang akan diukur dengan menggunakan dua variabel pokok yaitu ekonomi dan sosial. Salah satu indikator dimensi ekonomi yang digunakan mencakup Nilai Tukar Nelayan (NTN). Berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSRA) Ditjen Perikanan Tangkap - KKP Tahun 2020 - 2024, diketahui bahwa Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,75% per tahun. NTN di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 menjadi sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) (Renstra 2020-2024)

17. Laporan Hasil Pemeriksaan 14A,B,C/LHP/XVII/05/2018

- a. Pengelolaan PNPB Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp12.999.158.464,00 dan Penerimaan Negara dari Pendapatan Pajak Belum Disetor Sebesar Rp210.449.665,00

Hasil Telaah

masih terdapat TL yang belum disetor sebesar Rp7.241.537.990,00 (Rp12.881.636.4141,00-Rp5.640.098.424,00) dengan rincian sebagai berikut: a. piutang PT HOI yang telah dibayar s.d Smt I 2024 sebesar Rp4.370.667.522,00. TL pada smt I 2025 terdapat 4 dokumen pembayaran yang telah divalidasi ITJEN KKP sebanyak Rp995.288.402,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. NTPN 104112G4VQ41PO7M nilai Rp181.818.181,00 tanggal 18 Oktober 2024; 2. NTPN 05A3B6U8EV5VGS67 nilai Rp631.652.040,00 tanggal 19 Desember 2024; 3. NTPN 5313661QVD2RETG5 nilai Rp136.363.636,00 tanggal 21 Maret 2025; 4. NTPN 289C948VVO3HD8AO nilai Rp45.454.545,00 tanggal 5 Mei 2025; berdasarkan hal tersebut, masih terdapat TL yang belum di setor atas piutang PT.HOI senilai Rp6.493.265.740,00 (Rp11.859.221.664,00-4.370.667.522,00-Rp995.288.402,00); b. masih terdapat TL yang belum di setor atas piutang dir Perizinan dan Kepelabuhan Rp748.272.250,00; Dengan demikian, Tim menyimpulkan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi :

- DJPT: Telah setor ke kas negara sebagai berikut: 1. NTPN CDBAA0NA0E02LFMG senilai Rp9.090.909 tanggal 9 Juli 2025; 2. NTPN 9F1D355DFJ1NCHM1 senilai Rp9.090.909 tanggal 1 September 2025; dan 3. NTPN 9F1D355DFJ1NCHM1 senilai Rp90.909.090 tanggal 31 Oktober 2025.
- TL Semester I 2024 >>>> DJPT: Terdapat tambahan setoran ke kas negara sebesar Rp1.279.758.436,00 oleh PT.HOI dengan rincian sebagai berikut: 1) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 0428661QUQQ77112 tanggal 04 Juli 2023; 2) Rp18.181.818,00 dengan NTPN C16D16U8ELFFFFQR tanggal 02 Agustus 2023; 3) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 068377QLUG4RRTBO tanggal 01 September 2023; 4) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 268EB7QLUG5MM8S2 tanggal 29 September 2023; 5) Rp18.181.818,00 dengan NTPN

- D1D4348VV5V670NS tanggal 31 Oktober 2023; 6) Rp18.181.818,00 dengan NTPN B2B4F61QUR90TLMS tanggal 01 Desember 2023; 7) Rp18.181.818,00 dengan NTPN D0C943CIFJU2IUU7 tanggal 1 Februari 2023; 8) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 9EA747QLUOT07NEJ tanggal 1 Maret 2023; 9) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 54ECB61QV3R68BLM tanggal 1 April 2023; 10) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 938EE48VVEPDQP93 tanggal 2 Mei 2023; 11) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 494D37QLUP3RN0AK tanggal 31 Mei 2023; 12) Rp1.079.758.438,00 dengan NTPN 0A31048VVEQA41TQ tanggal 31 Mei 2023
- DJPT: Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 di awal Bulan Maret 2020, Komisaris PT. HOI melalui surat kepada Kepala KPKNL Cirebon meminta keringanan penagihan cicilan yang selama ini ditagih secara rutin setiap bulan per tanggal 11 yaitu atas temuan pemeriksaan BPK berupa penggunaan lahan di PPN Kejawanan yang belum tuntas (surat terlampir) DJPT/PPN Kejawanan: Rincian Bukti Setor yang disetor oleh PT. HOI ke Kas Negara adalah sbb: 11) Angsuran ke-11 NTPN: F55FF6U8DOSTUGPB Tgl bayar 14 Jan 2020 senilai Rp200.000.000,00 12) Angsuran ke-12 NTPN: 3212A7QLTJIAI62G Tgl Bayar 14 Feb 2020 senilai Rp200.000.000,00 13) Angsuran ke-13 NTPN: 5F4133CIEEPEIIPH Tgl bayar 17 Maret 2020 senilai Rp200.000.000,00 DJPT/Dit.PDK Menindaklanjuti selisih ukuran Gross Tonase (GT) atas pengukuran kapal perikanan oleh Ditjen Hubla pada kapal perikanan yang terdaftar di Ditjen Perikanan Tangkap yang berdasarkan temuan BPK mengakibatkan kurang pungut PHP sebesar Rp1.007.921.750,00, maka setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Ditjen Perikanan Tangkap hanya terdapat 7 (tujuh) pemilik Kapal Perikanan yang telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp244.205.500,00. Sedangkan sisa temuan sebesar Rp763.716.250,00 dan berdasarkan hasil verifikasi ulang untuk kapal perikanan tersebut telah sesuai dengan ukuran GT-nya. Dalam rangka menindaklanjuti sisa temuan tersebut Direktur. PDK telah menyampaikan surat kepada Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan nomor: B.135/DJPT/PL.430.D4/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Sinkronisasi Data Kapal Perikanan Hasil Ukur Ulang. Selanjutnya Direktur Perkapalan dan Kepelautan menindaklanjuti surat Direktur PDK melalui surat nomor: UM.002/103/8/DK/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Sinkronisasi Data Kapal Perikanan Hasil Ukur Ulang, dengan melampirkan daftar ukuran kapal perikanan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK tersebut.
 - TL Semester II 2024 >>> (DJPT) Terdapat tambahan setor dari PT. HOI sebesar Rp2.155.730.804,00 dengan bukti dukung (mengikuti Crash Program) sebagai berikut: 1. Bukti Setor Rp181.818.181 NTPN 104112G4VQ41PO7M tgg1 18 Oktober 2024; 2. Permohonan Mengikuti CP PT. HOI 19 Nov 2024; 3. B 2969 Surat Keterangan Crash Program PT. HOI 4 Des 2024; 4. S-3519 Persetujuan CP dari KPKNL 5 Des 2024; 5. Perhitungan CP PT. HOI; 6. Bukti Setor Crash Program NPTN 05A3B6U8EV5VGS67 tgl 19 Des 2024; 7. SPPNL-52 an. PT. HOI 19 Des 2024; 8. Kertas Kerja.>>>>> TL Semester I 2025: DJPT: 1. Bukti setor NTPN 5313661QVD2RETG5 tanggal 21 Maret 2025 senilai Rp136.363.636. 2. Bukti setor NTPN 289C948VVO3HD8AO tanggal 5 Mei 2025 senilai Rp45.454.545.
 - DJPT 1. NTPN no F55FF6U8DOSTUGPB tanggal 14 Januari 2020 senilai Rp200.000.000,00 2. NTPN no 3212A7QLTJIAI62G tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp200.000.000,00 3. NTPN no 5F4133CIEEPEIIPH tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp200.000.000,00 4. NTPN no 816F369DSPDB75AM tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp1.200.000,00 5. NTPN no 1E76D6PQFIUS6PK6 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp117.130.000,00 6. NTPN no 236226AFQL1VV0AM tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp17.875.500,00 7. NTPN no 6D0ED2TJO95GSJ9M tanggal 7 Agustus 2018 senilai Rp24.000.000,00 8. NTPN no 6C0DA6CT8HRP2816

- Setoran Ke Kas Negara Rp.200.000.000 dengan nomor NTPN: 93DED7QLTAQ786IR, tgl 16 Agustus 2019
- 2. Setoran Ke Kas Negara Rp.200.000.000 dengan nomor NTPN: 5109961QTLO9FRA3, tgl 12 September 2019.
- 3.Setoran Ke Khas Negara Rp.200.000.000 dengan nomor NTPN: B63382G4UBHPEMHN, tgl 14 Oktober 2019
- 4.Setoran Ke Khas Negara Rp.200.000.000 dengan nomor NTPN: BC80848VU0DLKM28, tgl 15 Juli 2019
- 5.Setoran Ke Khas Negara Rp.200.000.000 dengan nomor NTPN: 2E8F96U8DGJO489N, tgl 16 Desember 2019
- 6. Setoran Ke Khas Negara Rp.200.000.000 dengan nomor NTPN: 6FE7348VU0PLKOQT, tgl 18 Nopember 2019
- 7. Setoran Ke Khas Negara Rp.200.000.000 dengan nomor NTPN: B1F1A1DEL9N9S4Q2, tgl 8 Juli 2019 (untuk upload bukti agar menggunakan file: Bukti Setor PT. HOI yg dilegalisir 7 Halaman.pdf ...softcopy file yang lain agar dapat diabaikan)
- UPDATE TL: Validasi/Verifikasi bukti setor PT HOI PT. HOI telah menyetorkan ke kas negara sebesar:
- 1) Rp18.181.818,00 dengan NTPN A1A703CIF1AO5AT3 tanggal 25 Februari 2022.
- 2) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 5AD2A3CIEOUMFJLV tanggal 31 Desember 2021.
- 3) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 8D98B6U8E37MR3JT tanggal 13 Desember 2021.
- 4) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 559F96U8E352QAIF tanggal 25 November 2021.
- 5) Rp18.181.818,00 dengan NTPN E50170N9V919LV9A tanggal 21 Oktober 2021.
- 6) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 9B6052G4UU33R2QS tanggal 22 September 2021.
- 7) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 6DA1C48VUJ4CJU4U tanggal 5 Agustus 2021.
- 8) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 5F6043CIEOETAUAJ tanggal 2 Juli 2021.
- 9) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 68B120N9V8L2GG2K tanggal 11 Juni 2021.
- 10) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 1B3AD1JNF34B2US3 tanggal 7 Mei 2021.
- UPDATE TL Semester II 2022 >>>>>>>>: bukti setor PT HOI telah menyetorkan ke kas negara sebesar:
- 1) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 44F9C3C1F1GPQC3B tanggal 28 April 2022.
- 2) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 0674C48VUS3679CG tanggal 28 April 2022.
- 3) Rp18.181.818,00 dengan NTPN C179F6U8EBQBEBML tanggal 28 April 2022.
- 4) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 3523548VUCCORPCU tanggal 25 Juli 2022.
- 5) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 911D21JNFCKRKPE3 tanggal 25 Juli 2022.
- 6) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 1B6977QLU6NU09O8 tanggal 4 Agustus 2022.
- 7) Rp18.181.818,00 dengan NTPN EO4903CIF1V0HVIR tanggal 5 September 2022.
- 8) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 76D7B1JNFCT6G47L tanggal 4 Oktober 2022.
- 9) Rp18.181.818 dengan NTPN 9A4287QLU70P2K1Q tanggal 1 November 2022.>>>>> Matriks kertas kerja rekapitulasi setoran PT. HOI
- TL Semester I 2023 PPN Kejawatanan >>>>>>>>: bukti setor PT HOI telah menyetorkan ke kas negara sejumlah Rp127.272.726 masing-masing sebesar
- 1) Rp18.181.818,00 dengan NTPN FD9681JNFD31U6SR tanggal 2 Desember 2022.
- 2) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 6A4C18N3E9VG6L7V tanggal 4 Januari 2023.
- 3) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 5DAB648VV54BP0D8 tanggal 31 Januari 2023.
- 4) Rp18.181.818,00 dengan NTPN A8B1B8N3EA5C6URR tanggal 2 Maret 2023.
- 5) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 10DB96U8EL1F0IH1 tangqal 30 Maret 2023.
- 6) Rp18.181.818,00 dengan NTPN F52893CIFAT1FL7H

tanggal 4 Mei 2023. 7) Rp18.181.818,00 dengan NTPN 920BB3CIFB028PL7 tanggal 5 Juni 2023. >>>>> Matriks kertas kerja rekapitulasi setoran PT. HOI

- b. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah Belum Memadai (menyelesaikan sengketa Aset Tanah pada PPN Brondong)

Hasil Telaah

Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena: 1. Permasalahan sengketa tanah antara PPN Brondong dengan PT DPS belum selesai 2. 18 satker belum menyelesaikan proses hibah BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Rincian terlampir

TL Semester I tahun 2023: 14 Juni 2023_Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Terkait Aset pada LK KKP 2017 <<< SETJEN: telah dilakukan Audiensi atas Penyelesaian kasus sengketa tanah PPN Brondong di Kantor Bupati Lamongan pada tanggal 14 September 2022 yang dihadiri Pemda Lamongan, dan KKP. Laporan Hasil Audiensi atas Penyelesaian kasus sengketa tanah PPN Brondong (Lap. penyelesaian kasus sengketa tanah Pada satker PPN Brondong ok(LK 2017))

- c. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah Belum Memadai (sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada operator SIMAK)

Hasil Telaah

Status TL belum sesuai karena masih terdapat aset tetap tanah yang belum selesai proses pengamannya dan usulan penghapusan aset tetap dalam kondisi rusak berat belum selesai dilakukan. 1. Tindak Lanjut belum mencakup seluruh rekomendasi 2. Monitoring atas seluruh penyelesaian rekomendasi atas permasalahan aset, terutama untuk rekomendasi dalam LK tahun 2021

DJPT menindaklanjuti kekurangan TLHP dengan menyampaikan teguran tertulis Dirjen PT kpd Operator SIMAK BMN PPN Brondong dengan surat Nomor B.8238/DJPT/KU.420.S1/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018>>>>>2. Ditjen PSDKP menyampaikan Sertifikat Hak Pakai Tanah Pangkalan PSDKP Batam Nomor 00004.>>>>>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang diunggah dalam google drive, sesuai surat Inspektur Jenderal No B.III/ITJ/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.>>>>>>Tindak lanjut pengelolaan dan penata usahaan aset tanah Semester 1 2021>>>>>>Tindak lanjut pengelolaan dan penata usahaan aset tanah Semester II 2021>>>>>>Tindak Lanjut Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah Belum Memadai SMT 1 2022 (ST SPI Tanah kpd Operator 5.1(e dan f) Sengketa Aset Tanah pada PPN Brondong belum terselesaikan AT Tanah belum bersertifikat, SK PSP TANAH DJPT 5.1.c.1.c, Surat sanksi teguran tertulis Dirjen PT kpd Operator SIMAK BMN PPN Brondong Nomor B.8238/DJPT/KU.420.S1/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018,

- d. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Lainnya Belum Memadai (pelaksanaan hibah BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

Hasil Telaah

Penyelesaian pelaksanaan hibah BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah dilaksanakan sebanyak 101 Aset Tetap Lainnya dari 755 Aset Tetap Lainnya atau sebesar 13,38% Sedangkan Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu: a. DJPT sebanyak 98 Aset Tetap Lainnya dari 99 Aset Tetap Lainnya b. DJPB sebanyak 550 Aset Tetap Lainnya dari 554 Aset Tetap Lainnya c. PKRL sebanyak 6 Aset Tetap Lainnya dari 84 Aset Tetap Lainnya Bukti tindak lanjut dapat dilihat pada File TL <https://drive.google.com/file/d/1HEoMmSr204s3ojDwPfMiUSXHrsmnTVK1/view?us>

p=sharing Dengan demikian berdasarkan capaian persentase penyelesaian tersebut maka tim menyimpulkan status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

- e. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Lainnya Belum Memadai (Operator SIMAK BMN yang kurang cermat kurang cermat dalam mencatat dan melaporkan nilai Aset Tetap Lainnya)

Hasil Telaah

Penyelesaian upaya penelusuran, inventarisasi fisik, dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung Aset Tetap serta usulan penghapusan atas Aset Tetap dalam kondisi rusak berat telah dilaksanakan sebanyak 100 Aset Tetap Lainnya dari 147 Aset Tetap Lainnya atau sebesar 68,03% Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi yaitu a. Sekjen sebanyak 17 Aset Tetap Lainnya dari 27 Aset Tetap Lainnya b. DJPT sebanyak 12 Aset Tetap Lainnya dari 47 Aset Tetap Lainnya c. DJPB sebanyak 3 Aset Tetap Lainnya dari 33 Aset Tetap Lainnya d. PSDKP sebanyak 2 Aset Tetap Lainnya dari 14 Aset Tetap Lainnya e. PKRL 3 sebanyak Aset Tetap Lainnya dari 8 Aset Tetap Lainnya f. BPPSDM sebanyak 10 Aset Tetap Lainnya dari 15 Aset Tetap Lainnya Bukti tindak lanjut dapat dilihat pada File TL <https://drive.google.com/file/d/1HEoMmSr204s3ojDwPfmIUSXHrsmnTVK1/view?usp=sharing> Dengan demikian tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

- f. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Memadai (sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator SIMAK BMN yang kurang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.)

Hasil Telaah

Penyelesaian tindak lanjut pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 77%. Dengan demikian berdasarkan capaian persentase penyelesaian tersebut maka tim menyimpulkan status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

Surat Kadis KP Provinsi Jawa Barat kepada Petugas BMN Satker 03 Nomor: 700.04/5164/Keu, 26 Juli 2019 perihal Sanksi Teguran Tertulis atas pengelolaan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari DK dan TP belum terselesaikan. 2. Sura Kadis KP Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Petugas BMN Satker 03 Nomor: 680.1/032/II/Dislutkan/2019, 7 Oktober 2019 perihal Sanksi Teguran Tertulis atas pengelolaan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari DK dan TP belum terselesaikan.

- g. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Memadai (melakukan upaya penyelesaian pelaksanaan hibah BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

Hasil Telaah

1. Tindak Lanjut belum mencakup seluruh rekomendasi 2. Monitoring atas seluruh penyelesaian rekomendasi atas permasalahan aset, terutama untuk rekomendasi dalam LK tahun 2021

- h. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Peralatan dan Mesin Kurang Memadai (Operator SIMAK BMN yang kurang cermat dalam mencatat nilai Aset Tetap dan melakukan koordinasi)

Hasil Telaah

Penyelesaian tindak lanjut pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin: a. menyelesaikan upaya penelusuran, inventarisasi fisik, dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung Aset Tetap yang berada dalam tanggung jawab pengelolaannya, selesai 89% b. mengajukan usulan penghapusan atas Aset Tetap

dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme, selesai 88% c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator SIMAK BMN yang kurang cermat dalam mencatat nilai Aset Tetap dan melakukan koordinasi, selesai 100% Dengan demikian berdasarkan capaian persentase penyelesaian tersebut maka tim menyimpulkan status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

Surat Kepala PPN Karangantu Nomor: 825/PPNK/TU.210/VIII/2018, 15 Agustus 2018 perihal sanksi teguran tertulis kepada Operator SIMAK BMN PPN Karangantu. 2. Surat Kadis KP Provinsi Jawa Barat Nomor: 700.04/5151/Keu, 26 Juli 2019 kepada Dirjen PT perihal telah melakukan penulsuran dan inventarisasi fisik aset, melakukan penelusuran kembali, inventarisasi dan klasifikasi aset BMN yang belum selesai, dan menyampaikan usulan permohonan hibah/penghapusan BMN atas aset tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari DK dan TP. 3. Surat Kepala Dinas KP Prov.Jawa Barat Nomor : 700.04/5158/Keu tanggal 26 Juni 2019 perihal Sanksi Berupa Teguran Tertulis atas Pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari dana DK dan TP belum terselesaikan. 4. Surat Kepala PPN Kejawatanan Nomor: 134/PPNK/TU.110/II/2018, 23 Januari 2018 kepada Ditjen PT perihal usulan penghapusan barang inventaris PPN Kejawatanan TA 2018 (risalah lelang terlampir)

- i. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Peralatan dan Mesin Kurang Memadai (Aset Tetap dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme)

Hasil Telaah

Dokumen penghapusan aset lainnya dalam kondisi rusak berat pada satker PPN Ambon, PPS Nizam Zachman, dan Sekretariat DJPT belum ada

- j. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai (pelaksanaan hibah BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

Hasil Telaah

Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi yaitu: a. DJPT sebanyak 245 aset Gedung dan bangunan dari 522 aset Gedung dan bangunan, b. DJPB sebanyak 676 aset Gedung dan Bangunan dari 1088 aset Gedung dan Bangunan, c. PSDKP sebanyak 2 aset Gedung dan Bangunan dari 17 aset Gedung dan Bangunan

TL Semester I tahun 2023: (DJPT) 14 Juni 2023_Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Terkait Aset pada LK KKP 2017

- k. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Gedung dan Bangunan Kurang Memadai (sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator SIMAK BMN yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya)

Hasil Telaah

1. Tindak Lanjut belum mencakup seluruh rekomendasi 2. Monitoring atas seluruh penyelesaian rekomendasi atas permasalahan aset, terutama untuk rekomendasi dalam LK tahun 2021

- l. Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 Sebesar Rp25.006.940.200,00 Tidak Diyakini Kewajarannya (menarik dan menyetorkan ke kas negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut minimal sebesar Rp5.452.194.400,00)

Hasil Telaah

Belum dilengkapi dokumen penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara

Update TL semester I 2023 >>>> 1. PT Anang Craftindo : Rp588.574.400 (telah dilakukan pelimpahan ke KPKNL Purwokerto dan telah mendapat Pernyataan

PSBDT per 31 Mei 2023, progress terakhir PT AC tidak dapat ditagih sehingga PT AC dinyatakan Piutang Sementara Belum dapat Ditagih (PSBDT) sesuai surat nomor PSBDT-66/PUPNC.15.04/2023 tanggal 31 Mei 2023); 2. PT Indomalute Fiberboat Tabamarine: 435.420.000 (telah dilakukan pelimpahan piutang ke KPKNL Ternate sesuai surat SP3N no. SP3N-02/PUPNC.29.00/2023 tanggal 27 Maret 2023, namun sampai saat ini belum ada angsuran).

TL Semester I 2024 >>>> DJPT : Ditjen Perikanan Tangkap telah mengusulkan usulan penghapusan piutang bersyarat untuk PT Anang Craftindo dengan dokumen pendukung berupa Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan up Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perihal Usulan Penghapusan Bersyarat terhadap Piutang Negara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.-2265/MEN-KP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.

TL Semester I 2025 >>>> DJPT : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 340/KM.6/2024 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara C.Q. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Atas Nama PT Anang Craftindo Group senilai Rp588.574.400

- m. Pemanfaatan Barang Milik Negara oleh Pihak Lain atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tidak Sesuai Ketentuan (mereviu ulang setiap perjanjian dengan pihak III atas pemanfaatan BMN tersebut)

Hasil Telaah

Belum sesuai rekomendasi

18. Laporan Hasil Pemeriksaan 46/LHP/XVII/12/2018

Monitoring dan Evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 sd 2018 Belum Efektif

Hasil Telaah

Menteri KP telah menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan untuk membuat Nomor B-455/SJ/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 Perihal Monitoring dan Evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya. Selanjutnya Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal telah melakukan analisa monev terhadap bantuan kapal perikanan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal melalui Nota Dinas Nomor 1175/SJ.1/TU.210/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Analisa Monev terhadap bantuan kapal perikanan. Selain itu Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal telah melaksanakan rapat pembahasan mekanisme pelaksanaan monev terpadu termasuk bantuan pemerintah melalui Undangan Nomor 1371/SJ.1/TU.330/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Notulensi Rapat pelaksanaan monev terpadu. Hasil dari Rapat tersebut menyatakan bahwa Biro Perencanaan akan menyusun kajian terkait skema monev yang efektif atas program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya.

PermenKP no 40 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP 2. PermenKP no 19 tahun 2023 tentang penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan KKP

Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No 3/PER-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan sarana Penangkapan Ikan Pada Ditjen Perikanan Tangkap tanggal 27 Februari 2020 2. Laporan Monev Kapal Bantuan

19. Laporan Hasil Pemeriksaan 13a,b,c/LHP/XVII/05/2020

- a. PNPB Belum Dibayar Sebesar Rp675.600.000,00 (menyetorkannya ke Kas Negara Rp325.600.000,00)

Hasil Telaah

Belum dilengkapi dengan dokumen penyelesaian kekurangan PNPB sebesar Rp325.600.000,00 atas sewa peralatan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Dengan demikian, Tim menyimpulkan tindak lanjut belum sesuai rekomendasi

TL Semester II 2024 >>> (DJPT) : DJPT telah melakukan tindak lanjut berupa penyerahan piutang kepada KPKNL Jakarta II dengan dokumen dukung 1. Penyerahan pengurusan piutang nomor B.3115/PPNBR/KU.340/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021; 2. Penerimaan Pengurusan Piutang Negara nomor SP3N-167PUPNC.10.022021, November 2021; 3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dari KPKNL Jakarta II kepada PT. Imelsenna Hovercloud Indonesia tanggal 15 Februari 2023; 4. Pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang a.n. PT. Imelsenna Hovercloud Indonesia tanggal 4 April 2022

DJPT: Berdasarkan Surat Sedtitjen PT kepada Direktur Perdata, Ditjen AHU Nomor: B.17283/DJPT/KU.420.S1/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Permohonan Klarifikasi Keberadaan PT. Imelsenna Hovercloud Indonesia, maka telah dilakukan klarifikasi keberadaan/ eksisting perusahaan tersebut dan berdasarkan surat tanggapan Ditjen AHU nomor: AHU.2.UM.01.01-3622 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Permohonan Klarifikasi Keberadaan PT. Imelsenna Hovercloud Indonesia, bahwa keberadaan perusahaan tersebut masih terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM (terlampir)

- b. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib (Mengajukan usulan penambahan penjelasan terkait tarif pengembangan (development charges) yang tidak jelas pengertian dan penggunaannya pada Lampiran PP Nomor 75 Tahun 2015)

Hasil Telaah

Rekomendasi BPK adalah: Biro Hukum untuk mereviu secara menyeluruh dan revisi atas klausul perjanjian penggunaan sebagian tanah/bangunan di kawasan PPS dan PPN, dengan prioritas pada PPN Kejawatan khususnya klausul tarif dan hak kepemilikan bangunan di atas lahan pemerintah di akhir masa perjanjian. KKP telah melakukan review sebanyak 1.257 perjanjian (94,23%) dari total 1.334 dokumen perjanjian, sehingga masih terdapat perjanjian yang belum dilakukan reviu oleh biro hukum KKP dengan rincian sebagai berikut: 1) 1 perjanjian di PPS Cilacap; 2) 19 Perjanjian di PPN Palabuhanratu; dan 3) 57 Perjanjian di PPS Belawan Terkait revisi perjanjian dilakukan secara bertahap menunggu masa perjanjian sebelumnya selesai. Dengan demikian tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

TL Semester I 2025 >>> (DJPT) : 1. DJPT telah melakukan tindak lanjut berupa reviu secara menyeluruh dan revisi atas klausul perjanjian penggunaan sebagian tanah/bangunan di kawasan PPS dan PPN dan dibuatkan matriks atas hasil reviu tersebut yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Reviu Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Nomor 2906/DJPT.4/PI.140/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024; 2. Adapun beberapa usulan revisi yang belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah/bangunan di PPS dan PPN masih berlaku masa perjangiannya

TL Semester II 2023: 1. Undangan dan Laporan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengusahaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nomor

B.5115/DJPT.4/TU.330/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023; 2. Surat Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor 100/DJPT.1/HP.520/I/2024 yang melampirkan Surat Keterangan Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B.194/DJPT.1/HP.520/I/2024 yang menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pada Peraturan Pemerintah tersebut sudah tidak ada lagi pengaturan mengenai tarif pengembangan (development charges)

- c. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lainnya pada Empat Unit Kerja Eselon I Belum Sepenuhnya Tertib (melakukan penilaian sesuai dengan dokumen perolehan, dan mencatat sebagai Aset Tak Berwujud)

Hasil Telaah

Status 2 Kekurangan: Bukti hasil inventarisasi harga perolehan paten, hasil penilaian dan pencatatan paten sebagai aset tak berwujud di sistem akuntansi BBPI Semarang

Surat Dirjen PT No. R.17502/DJPT/KU.420.S1/IX/2020 Tgl 18 Sept 2020 Kpd Kepala Satker BBPI Semarang perihal Instruksi; 2. Surat Ka BBPI Semarang nomor B1832/BBPI/TU.210/XI/2023 tanggal 8 November 2023 kepada Auditor Utama KN IV BPK-RI 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ka BBPI Nomor B.1833/BBPI/KU.110/XI/2023 tgl 8 November 2023

- d. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lainnya pada Empat Unit Kerja Eselon I Belum Sepenuhnya Tertib (usulan penghapusan atas Aset Lain-Lain dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku)

Hasil Telaah

Rekomendasi BPK untuk satker DK-03 DKP Bali hasil verifikasi dari Itjen 23 dari 51 unit belum terdapat dokumen pendukungnya serta dokumen pendukung Penghapusan BMN BRPPUPP Palembang tidak relevan dengan rekomendasi LHP

Update 2 Juli 2023: 1. 21 November 2022_SK HIBAH BALI 2022 nomor 919/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2022 2. 6 Juli 2022_persetujuan penjualan BMN yang dikelola DJPT pada PPN Ternate sebanyak 1702 unit

- e. Pengelolaan PNBPN pada Empat Unit Kerja Eselon I Belum Sepenuhnya Tertib (mengkaji ulang tarif-tarif pada Lampiran PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang Berlaku pada KKP dan mengusulkan revisi perbaikannya)

Hasil Telaah

Tindak lanjut belum dilengkapi dengan: 1. Hasil Kajian tarif PNBPN dari Setjen, Ditjen PB, dan Ditjen PT 2. Usulan revisi atas hasil kajian tersebut

DJPT : Menindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (PP Nomor 85 Tahun 2021 - Lampiran)

20. Laporan Hasil Pemeriksaan 40/LHP/XVII/12/2021

Ditjen PT Belum Melakukan Sinkronisasi Database Kapal Perikanan dengan Database Kapal Ditjen Hubla Kemenhub, serta Pemilik Kapal BM Belum Mengajukan Permohonan Perubahan Buku Kapal Perikanan ke Ditjen PT

Hasil Telaah

diusulkan belum sesuai, karena hasil dari kegiatan sinkronisasi data kapal antara KKP dengan Kemenhub belum disampaikan.

Update TL Semester 1 2024 >>>> Rumusan kegiatan sinkronisasi data kapal perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan, 11-13 Desember 2023

Update TL Semester 1 2025 >>>> Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan nomor B.3428/DJPT.3/PI.210/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Sinkronisasi Data Kapal Perikanan.

Surat Direktur KAPI, Ditjen Perikanan Tangkap kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla Nomor B.4012/DJPT.3/TU.110/XI/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Database Kapal Perikanan.

21. Laporan Hasil Pemeriksaan 12/LHP/XVII/05/2021

a. Pengamanan, Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Tertib

1. telah ditindaklanjuti dengan Memorandum No 1034/SJ.4/TU.210/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 hal Hasil Reviu Secara Menyeluruh dan Revisi Atas Klausul Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah/Bangunan di Kawasan PPS dan PPN, Khususnya Klausul Tarif dan Hak Kepemilikan Bangunan di Atas Lahan Pemerintah di Akhir Masa Perjanjian (<https://portal-repo.kkp.go.id/s/TLHP?path=%2FLK%202021%2FSETJEN&openfile=5099587>).

2. Surat Kepala Pelabuhan PPN Ambon kepada Sekretaris DJPT Nomor B.1762/PPN.A/HP.360/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Upaya Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan PNBPN;

2. Surat Kepala Pelabuhan PPN Tual kepada DJPT Nomor B.2370/PPN.TL/HP.120/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

LK 2020 Kepala PPN Ambon dan Kepala PPN Tual untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan PNBPN

b. Penatausahaan PNBPN pada 17 Satker di Enam Eselon I Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Didukung dengan Sistem Pengendalian Intern yang Memadai

Hasil Telaah

Belum ada bukti atau laporan kegiatan peningkatan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan PNBPN.

22. Laporan Hasil Pemeriksaan 10/LHP/XVII/05/2022

a. SPI Pengelolaan PYMHD pada PPS Nizam Zachman Belum Memadai (kekurangan penagihan Pendapatan JPP TA 2019 dan 2020 beserta denda keterlambatan senilai Rp22.754.943.665,00, serta menagihkannya kepada pemilik/pengurus/nakhoda kapal)

b. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Melakukan penyusutan Aset Tetap senilai Rp2.666.599.500,00)

c. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Mengusulkan hibah atas Aset Tetap yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebanyak 29.056 NUP senilai Rp466.110.914.204,00 paling lambat selesai akhir Tahun 2022)

d. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Menetapkan

kejelasan kelanjutan pembangunan KDP sebanyak 11 NUP senilai Rp115.995.833.532,00 paling lambat akhir Tahun 2022)

- e. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Melakukan penyusutan Aset Tetap Renovasi senilai Rp4.370.729.481,00)
- f. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Melakukan inventarisasi keberadaan Aset Tetap senilai Rp7.684.404.466.930,00 dan Aset Lainnya senilai Rp51.943.331.929,00 dengan menggunakan geotagging)
- g. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Melengkapi informasi lokasi/alamat Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan sebanyak 3.572 NUP senilai Rp4.069.890.680.273,00 paling lambat selesai akhir Tahun 2022)
- h. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Melakukan reklasifikasi dan/atau mengusulkan penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebanyak 17.420 NUP senilai Rp111.959.320.818,00 yang dalam kondisi rusak berat paling lambat selesai akhir Tahun 2022)
- i. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Melakukan tindakan nyata paling lambat akhir Tahun 2022 untuk pengamanan Aset Tetap Tanah seluas 3.225.792 m2 senilai Rp392.718.279.000,00 melalui instansi terkait)
- j. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Melakukan perbaikan Data Master aset tetap terkait satuan unit aset tetap sebanyak 1.554 NUP senilai Rp630.081.226.686,00)
- k. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Menghapus Aset Lain-Lain yang berstatus rusak berat senilai Rp90.559.049.954,00 dari neraca paling lambat selesai akhir Tahun 2022)
- l. Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan (Menginput bukti kepemilikan yang sah atas Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin sebanyak 9.002 NUP senilai Rp6.372.241.337.926,00 paling lambat selesai akhir Tahun 2022 dan/atau mengusulkan alokasi anggaran untuk memproses sertifikasi tanah)
- m. Pengelolaan Dana Bergulir Mulai dari Proses Permohonan, Analisis, Pemberian Restrukturisasi, Pemberian Top Up Pinjaman, Pengikatan Jaminan, dan Penyimpanan Dokumen Jaminan pada BLU LPMUKP Tidak Memadai (1) menyusun database debitur yang valid; 2) melakukan rekonsiliasi perhitungan nilai pengurang jaminan; dan 3) mengadministrasikan dokumen pinjaman debitur secara lengkap dan terpusat)
- n. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Modal Kontraktual Senilai Rp264.721.663,10 (memproses sesuai ketentuan atas kelebihan pembayaran senilai Rp40.653.803,73 yaitu pada Satker PPS Cilacap senilai Rp17.225.061,73 (Rp5.516.980,73 + Rp11.708.081,00), PPN Pelabuhan Ratu senilai Rp16.223.550,00, PPN Pengambengan senilai Rp12.135.000,00, PPN Kejawanen senilai Rp7.205.192,00, dengan menyetorkan ke RKUN. Bukti setor yang telah divalidasi ltjen diserahkan kepada BPK)

23. Laporan Hasil Pemeriksaan 15/LHP/XVII/05/2023

- a. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan PNBP Jasa Tambat/Labuh Belum Memadai (Dirjen PT supaya mengembangkan sistem pengawasan yang dapat mendeteksi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal pada kolam tambat/labuh)

Hasil Telaah

Belum ada bukti bahwa DJPT telah mengembangkan sistem pengawasan yang dapat mendeteksi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal pada kolam tambat/labuh

- b. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan PNBP Jasa Tambat/Labuh Belum Memadai (Dirjen PT supaya berkoordinasi dengan Dirjen PSDKP dalam mempertimbangkan penggunaan data VMS dari Ditjen PSDKP sebagai dasar penentuan kedatangan dan keberangkatan kapal yang merupakan bentuk integrasi data antara SIJAKA dan Teman SPB dengan VMS)

Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Dirjen PT Nomor R.744/MEN-KP/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023 b. Surat Koordinasi dari Plt Dirjen PT Nomor B.425/DJPT/KU.420/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023 Kepada Dirjen PSDKP

Hasil Telaah

Belum sesuai dengan rekomendasi, karena: a. belum ada jawaban/balasan dari Dirjen PSDKP terkait koordinasi penggunaan data VMS, dan b. belum ada telaahan penggunaan data VMS sebagai dasar perhitungan kedatangan dan keberangkatan kapal sebagai bentuk integrasi data antara SIJAKA dan Teman SPB dengan VMS

- c. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan PNBP Jasa Tambat/Labuh Belum Memadai (Dirjen PT supaya merumuskan kebijakan yang mengatur ketentuan terkait penerbitan perizinan Kapal Pukat Cincin Grup Pelagis yang dioperasikan dengan dua kapal)

TL : Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Dirjen PT Nomor R.744/MEN-KP/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023 b. Surat Perintah Koordinasi dari Plt Dirjen PT Nomor B.426/DJPT/KU.420/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023 Kepada Direktur Perizinan dan Kenelayanan c. Tanda Terima Inmen Nomor R.744/MEN-KP/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023

Hasil Telaah

Belum ada kebijakan tertulis yang mengatur ketentuan terkait penerbitan perizinan Kapal dengan jenis alat tangkap spesifik yaitu Pukat Cincin Grup Pelagis yang dioperasikan dengan dua kapal

- d. Pengelolaan Pendapatan Perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap Belum Memadai dan Terdapat Kekurangan Penerimaan Senilai Rp290.803.170,00 (mengajukan revisi Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada KKP dengan menambahkan jenis izin Subsektor Pengangkutan Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan untuk kapal berbendera Indonesia)

TL : Usulan Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan Nomor B166/MEN-KP/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 dan Surat Permohonan Izin Prakarta Penyusunan Revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 dari Menteri Keuangan kepada Presiden RI Nomor S-523/MK.02/2023 tanggal 27 Juni 2023

Hasil Telaah

diusulkan status belum sesuai dengan rekomendasi. Telah ada surat usulan perubahan PP No 85 Tahun 2021 yang disampaikan kepada Presiden RI dan Menteri Keuangan dan disertai lampiran Rancangan PP namun rancangan revisi Peraturan yang diajukan belum ada memuat tentang jenis izin Subsektor Pengangkutan Ikan Segar/Beku ke Negara Tujuan untuk kapal berbendera Indonesia.

- e. Pengelolaan Pendapatan Perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap Belum Memadai dan Terdapat Kekurangan Penerimaan Senilai Rp290.803.170,00 (merumuskan kebijakan mengenai pengaturan perubahan SIKPI dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau peraturan turunannya)

TL : Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Dirjen PT Nomor.R.740/MEN-KP/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023 b. Surat Instruksi Plt Dirjen PT Nomor B.421/DJPT/KU.420/VII/2023 tanggal 2 Juli Kepada Ses DJPT dan Direktur Perizinan dan Kenelayanan >>> Tanda terima Sanksi Teguran PDK DJPT

Nota Dinas Dir Perizinan Nomor 751/DJPT.5/KU.420/VII/2023 Tgl 27 Juli 2023 dan bukti setor sebesar Rp287.248.170,00 NTPN : 6646F3CIFAQ8R60J tgl 11-04-2023 dan sebesar Rp3.555.000,00 NTPN : 775538N3EA8J9671 tgl 11-04-2023

Hasil Telaah

Dengan demikian, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena belum ada rumusan kebijakan mengenai pengaturan perubahan SIKPI dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau peraturan turunannya.

- f. Penatausahaan PNBPN atas Sewa BMN dan Penggunaan Sarana Prasarana pada Dua Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Dibayar Senilai Rp1.130.014.082,00 (Kepala PPS Kendari untuk: 1) menerbitkan tagihan PNBPN senilai Rp292.119.793,00 dan menagihkannya kepada penyewa/pelaku usaha supaya menyetorkannya ke RKUN; 2) melakukan konfirmasi kepada penyewa/pelaku usaha atas PNBPN senilai Rp97.545.611,00 yang berpotensi tidak tertagih dan selanjutnya memproses sesuai ketentuan yang berlaku)

TL : Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Dirjen PT Nomor.R.741/MEN-KP/VI/2023 Tanggal 15 Juni 2023 b. Surat Instruksi dari Plt Dirjen PT Nomor B.424/DJPT/KU.420/VII/2023 tanggal 2 Juli Kepada Kepala PPS Kendari c. Bukti setor PPS Kendari dan PP Untia (terdapat penyetoran denda keterlambatan PNBPN lebih besar dari yang tercatat pada temuan namun telah melalui perhitungan sesuai ketentuan, yaitu PT. BMJ dengan nilai TLHP: Denda Penggunaan Tanah Rp3.795.200; Denda Penggunaan Bangunan Rp2.145.000; Denda Pemeliharaan Prasarana Rp948.800, sedangkan nilai bukti bayar: Denda Penggunaan Tanah Rp5.692.800; Denda Penggunaan Bangunan Rp3.218.400; Denda Pemeliharaan Prasarana Rp1.423.200).

Hasil Telaah

Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada hasil konfirmasi atas PNBPN senilai Rp97.545.611,00 yang berpotensi tidak tertagih kepada penyewa/pelaku usaha, pemutusan kontrak/perjanjian dan usulan pelimpahan penagihan piutang ke PUPN apabila piutang tidak dapat ditagih.

- g. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Tertib (Menginstruksikan KPB satker terkait supaya: 1) memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang berada di bawah kewenangannya; 2) merekonsiliasi data Aset Tetap dan Aset Lainnya antara SAKTI dengan SIMAN)

TL : 1. Surat Perintah Dirjen kepada KPB Satker DKP Prov Papua Barat Nomor B.446/DJPT/KU.420/VII/2023 tgl 2 Juli 2023 untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang berada di bawah kewenangannya, dan merekonsiliasi data Aset Tetap dan Aset Lainnya

antara SAKTI dengan SIMAN; 2. Surat Perintah Dirjen kepada KPB Satker DKP Prov Sumatera Utara Nomor B.445/DJPT/KU.420/VII/2023 tgl 2 Juli 2023 untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang berada di bawah kewenangannya, dan merekonsiliasi data Aset Tetap dan Aset Lainnya antara SAKTI dengan SIMAN; 3. Surat Perintah Dirjen kepada KPB Satker Inaktif Nomor B.447/DJPT/KU.420/VII/2023 tgl 2 Juli 2023 untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang berada di bawah kewenangannya, dan merekonsiliasi data Aset Tetap dan Aset Lainnya antara SAKTI dengan SIMAN.

Hasil Telaah

belum ada dokumen hasil rekonsiliasi data Aset Tetap dan Aset Lainnya antara SAKTI dengan SIMAN dari KPB satker terkait dokumen yang diupload sama dengan semester sebelumnya

24. Laporan Hasil Pemeriksaan 3/LHP/XVII/02/2024

- a. Pelaksanaan Pemungutan PNBP PHP Pascaproduksi Belum Memadai (berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana pelabuhan pangkalan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan pemungutan PNBP PHP pascaproduksi)

TL : Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Kepada Ditjen Perikanan Tangkap Nomor R.992/MEN-KP/KP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan PNBP PHP Pascaproduksi Belum Memadai DJPT: Hasil Identifikasi Pemenuhan SDM Pendataan 2024 PNBP Pascaproduksi, Insruksi Dirjen PT kpd Direktur Perizinan dan Kenelayanan Nomor B.646/DJPT/HP.5 20NI/2024 tanggal 27 Juni 2024 untuk melakukan koordinassi dengan Pemprov untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan

Hasil Telaah

Diajukan status 2, karena belum terdapat bukti/dokumen/ hasil berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana pelabuhan pangkalan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan pemungutan PNBP PHP pascaproduksi

- b. Pelaksanaan Pemungutan PNBP PHP Pascaproduksi Belum Memadai (membangun integrasi data yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk verifikasi data hasil tangkapan yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam LPM dan acuan dalam melakukan evaluasi)

TL : Insruksi Dirjen PT kpd Direktur Perizinan dan Kenelayanan Nomor B.646/DJPT/HP.5 20NI/2024 tanggal 27 Juni 2024 untuk melakukan koordinassi dengan Pemprov untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan

- c. Pelaksanaan Pemungutan PNBP PHP Pascaproduksi Belum Memadai (melakukan inventarisasi dan perhitungan objek PNBP secara lengkap dan akurat sebagai dasar usulan estimasi PNBP SDA Perikanan; 2) meninjau regulasi terkait kriteria sarana dan prasarana pelabuhan pangkalan; 3) menyelesaikan penyusunan petunjuk teknis terkait kriteria profil risiko pelaku usaha perikanan; 4) menyelesaikan penyusunan petunjuk teknis terkait verifikasi atas nilai PNBP PHP pascaproduksi; 5) menyusun petunjuk teknis terkait monitoring dan evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan penarikan PNBP PHP Pascaproduksi)

TL : 1. proposal PNBP TA.2025 2. Dasar perhitungan target PNBP SDA Perikanan TA. 2025 3. Kajian Teknis tentang Pelabuhan Pangkalan PIT dan PNBP Pasca pada 296 Pelabuhan Perikanan 4. Rancangan kepmen Petunjuk Teknis Verifikasi Atas Penghitungan Mandiri (Self Assessment) Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi

Hasil Telaah

Tindak lanjut Belum Sesuai dengan rekomendasi karena rekomendasi 1) melakukan inventarisasi dan perhitungan objek PNBP secara lengkap dan akurat sebagai dasar usulan estimasi PNBP SDA Perikanan telah dilakukan dengan penyusunan proposal PNBP TA 2025; 2) meninjau regulasi terkait kriteria sarana dan prasarana pelabuhan pangkalan masih berupa kajian teknis dan belum meninjau regulasi terkait kriteria sarana dan prasarana secara keseluruhan; 3) menyelesaikan penyusunan petunjuk teknis terkait kriteria profil risiko pelaku usaha perikanan masih belum disahkan; 4) menyelesaikan penyusunan petunjuk teknis terkait verifikasi atas nilai PNBP PHP pascaproduksi masih belum disahkan; 5) menyusun petunjuk teknis terkait monitoring dan evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan penarikan PNBP PHP Pascaproduksi masih belum disahkan

- d. Aspek Strategi dan Regulasi untuk Mendukung Implementasi Kebijakan PIT Belum Memadai

Permen KP Nomor 53 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan SPBE Lingkup KKP 2. Permenkomdigi 6 Tahun 2025 3. Kajian Teknis Kepmen Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi 4. Draft Lampiran Pedoman Manajemen Aplikasi V 9.2

F.11 Tindak Lanjut Temuan Itjen

No	Satker	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi Tuntas Ditindaklanjuti	Sisa Rekomendasi Belum Tuntas	%
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	1	3	3	-	100,00%
2	DIT KAPI	2	7	7	-	100,00%
3	DIT PDK	1	5	5	-	100,00%
4	DIT PP	17	97	81	16	83,51%
5	DIT PPN	1	2	-	2	0,00%
6	DIT PSDI	3	45	42	3	93,33%
7	DKP Prov Riau	1	4	-	4	0,00%
8	PPN KEJAWANAN	1	3	3	-	100,00%
9	PPS BELAWAN	1	2	2	-	100,00%
10	PPS NIZAM ZACHMAN	1	24	23	1	95,83%
11	SEKRETARIAT DJPT	23	87	79	8	90,80%
	Grand Total	52	279	245	34	87,81%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : DITJEN PERIKANAN TANGKAP 03

Tgl Data : 10/05/26 7:25 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,273,494,061,000	1,130,545,512,488	(142,948,548,512)	88.78	3,569,732,159,000	1,053,010,386,957	(2,516,721,772,043)	29.5
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	1,200,478,382,000	1,026,499,638,986	(173,978,743,014)	85.51	3,500,000,000,000	951,819,466,723	(2,548,180,533,277)	27.19
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	73,015,679,000	104,045,873,502	31,030,194,502	142.50	69,732,159,000	101,190,920,234	31,458,761,234	145.11
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,273,494,061,000	1,130,545,512,488	(142,948,548,512)	88.78	3,569,732,159,000	1,053,010,386,957	(2,516,721,772,043)	29.5
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,664,335,557,000	1,727,261,946,882	(937,073,610,118)	64.83	984,561,316,000	860,627,463,236	(123,933,852,764)	87.41
1. Belanja Pegawai	247,371,621,000	242,049,672,937	(5,321,948,063)	97.85	230,159,600,000	229,794,101,063	(365,498,937)	99.84
2. Belanja Barang	1,871,462,328,000	1,456,594,809,717	(414,867,518,283)	77.83	686,991,796,000	574,745,291,645	(112,246,504,355)	83.66
3. Belanja Modal	545,501,608,000	28,617,464,228	(516,884,143,772)	5.25	67,409,920,000	56,088,070,528	(11,321,849,472)	83.2
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN TANGKAP 03

Tgl Data : 10/05/26 7:25 PM
Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,664,335,557,000	1,727,261,946,882	(937,073,610,118)	64.83	984,561,316,000	860,627,463,236	(123,933,852,764)	87.41
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/05/26 8:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	42,967,565,000	65,867,937,000	64,033,956,480	11,012,634	64,022,943,846	97.2	1,844,993,154
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,000,000	1,008,000	886,601	7,695	878,906	87.19	129,094
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,408,571,000	5,097,063,000	4,972,527,725	2,207,200	4,970,320,525	97.51	126,742,475
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,365,341,000	1,557,456,000	1,517,689,352	13,640	1,517,675,712	97.45	39,780,288
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	798,122,000	889,050,000	863,120,000	4,400,000	858,720,000	96.59	30,330,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,708,691,000	6,827,147,000	6,635,896,000	8,526,200	6,627,369,800	97.07	199,777,200
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	295,312,000	748,555,000	682,676,779	0	682,676,779	91.2	65,878,221
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,190,079,000	3,672,158,000	3,587,650,590	72,420	3,587,578,170	97.7	84,579,830
511129	Belanja Uang Makan PNS	9,400,795,000	9,726,359,000	9,185,845,000	175,000	9,185,670,000	94.44	540,689,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,376,554,000	1,387,813,000	1,355,650,000	5,560,350	1,350,089,650	97.28	37,723,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	69,512,030,000	95,774,546,000	92,835,898,527	31,975,139	92,803,923,388	96.9	2,970,622,612
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	11,599,556,000	22,071,270,000	21,645,883,800	32,798,296	21,613,085,504	97.92	458,184,496
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	615,000	1,564,000	424,470	1,045	423,425	27.07	1,140,575
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,074,424,000	1,502,381,000	1,482,015,440	640,720	1,481,374,720	98.6	21,006,280
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	353,213,000	465,735,000	453,405,102	0	453,405,102	97.35	12,329,898
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000	100	0
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,106,568,000	2,787,103,000	2,746,053,800	1,620,000	2,744,433,800	98.47	42,669,200
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,061,393,000	1,490,842,000	1,469,836,320	362,100	1,469,474,220	98.57	21,367,780
511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,722,336,000	4,484,459,000	4,291,707,000	296,000	4,291,411,000	95.7	193,048,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	14,000,000	164,807,000	154,530,000	0	154,530,000	93.76	10,277,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	19,932,105,000	32,984,661,000	32,260,355,932	35,718,161	32,224,637,771	97.7	760,023,229
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	899,588,000	1,216,842,000	954,649,000	0	954,649,000	78.45	262,193,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	545,060,000	928,860,000	694,532,000	0	694,532,000	74.77	234,328,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,444,648,000	2,145,702,000	1,649,181,000	0	1,649,181,000	76.86	496,521,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	88,851,011,000	87,372,292,000	86,504,446,318	405,550	86,504,040,768	99.01	868,251,232
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	27,043,259,000	29,094,420,000	28,867,890,010	0	28,867,890,010	99.22	226,529,990
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	115,894,270,000	116,466,712,000	115,372,336,328	405,550	115,371,930,778	99.06	1,094,781,222
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	206,783,053,000	247,371,621,000	242,117,771,787	68,098,850	242,049,672,937	97.85	5321948063
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	33,915,713,000	32,394,620,000	29,789,186,843	2,290,000	29,786,896,843	91.95	2,607,723,157

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/05/26 8:45 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	608,217,000	427,867,000	85,183,380	0	85,183,380	19.91	342,683,620
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	160,502,000	67,110,000	39,122,997	0	39,122,997	58.3	27,987,003
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,185,375,000	3,761,428,000	3,554,078,000	646,000	3,553,432,000	94.47	207,996,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,720,840,000	5,243,785,000	3,481,223,167	0	3,481,223,167	66.39	1,762,561,833
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	44,590,647,000	41,894,810,000	36,948,794,387	2,936,000	36,945,858,387	88.19	4,948,951,613
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	18,221,154,000	21,096,184,000	15,038,393,578	0	15,038,393,578	71.28	6,057,790,422
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,327,374,000	1,183,312,000	552,130,000	0	552,130,000	46.66	631,182,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,841,298,000	2,203,977,000	1,103,556,415	0	1,103,556,415	50.07	1,100,420,585
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	102,000,000	220,000,000	110,162,820	0	110,162,820	50.07	109,837,180
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	90,000,000	15,973,000	15,972,400	0	15,972,400	100	600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	26,581,826,000	24,719,446,000	16,820,215,213	0	16,820,215,213	68.04	7,899,230,787
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,407,645,000	5,402,385,000	3,422,964,002	0	3,422,964,002	63.36	1,979,420,998
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	80,400,000	151,127,000	97,291,200	0	97,291,200	64.38	53,835,800
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	24,000,000	27,118,000	27,113,150	0	27,113,150	99.98	4,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,512,045,000	5,580,630,000	3,547,368,352	0	3,547,368,352	63.57	2,033,261,648
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	21,323,303,000	16,436,428,000	16,334,361,583	93,857,315	16,240,504,268	98.81	195,923,732
522112	Belanja Langganan Telepon	1,382,966,000	1,074,373,000	1,030,582,321	39,794	1,030,542,527	95.92	43,830,473
522113	Belanja Langganan Air	3,417,876,000	2,915,735,000	2,865,998,972	0	2,865,998,972	98.29	49,736,028
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,328,032,000	4,529,462,000	4,500,144,024	2,742,255	4,497,401,769	99.29	32,060,231
522131	Belanja Jasa Konsultan	113,199,165,000	119,108,954,000	37,171,152,855	0	37,171,152,855	31.21	81,937,801,145
522141	Belanja Sewa	9,977,633,000	7,086,976,000	4,912,751,791	0	4,912,751,791	69.32	2,174,224,209
522151	Belanja Jasa Profesi	2,645,759,000	2,501,520,000	1,799,111,000	0	1,799,111,000	71.92	702,409,000
522162	Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	0	3,726,800,000	3,341,520,000	0	3,341,520,000	89.66	385,280,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	84,407,422,000	156,649,049,000	124,338,362,453	3,563,409	124,334,799,044	79.37	32,314,249,956
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	239,682,156,000	314,029,297,000	196,293,984,999	100,202,773	196,193,782,226	62.48	117,835,514,774
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,608,228,000	21,017,992,000	18,523,918,770	0	18,523,918,770	88.13	2,494,073,230
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,083,805,000	1,312,509,000	676,835,648	0	676,835,648	51.57	635,673,352
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,674,922,000	13,856,332,000	9,962,470,132	86,209	9,962,383,923	71.9	3,893,948,077
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,282,948,000	4,098,205,000	3,317,372,604	0	3,317,372,604	80.95	780,832,396
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,276,496,000	1,512,724,000	1,402,462,975	0	1,402,462,975	92.71	110,261,025
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	721,230,000	541,118,000	283,619,159	0	283,619,159	52.41	257,498,841
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2,056,245,000	2,675,217,000	2,037,524,640	0	2,037,524,640	76.16	637,692,360

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/05/26 8:45 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	24,966,000	24,965,000	0	24,965,000	100	1,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	34,703,874,000	45,044,563,000	36,234,668,928	86,209	36,234,582,719	80.44	8,809,980,281
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,244,169,000	55,611,355,000	42,251,151,214	11,334,980	42,239,816,234	75.96	13,371,538,766
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,529,770,000	1,389,712,000	704,360,895	0	704,360,895	50.68	685,351,105
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,461,706,000	10,228,055,000	7,566,581,945	0	7,566,581,945	73.98	2,661,473,055
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34,589,327,000	14,471,442,000	7,150,285,767	0	7,150,285,767	49.41	7,321,156,233
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	103,824,972,000	81,700,564,000	57,672,379,821	11,334,980	57,661,044,841	70.58	24,039,519,159
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,972,886,000	3,401,885,000	2,730,045,953	0	2,730,045,953	80.25	671,839,047
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	25,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,997,886,000	3,401,885,000	2,730,045,953	0	2,730,045,953	80.25	671,839,047
5251	Belanja Barang BLU							
525113	Belanja Jasa	201,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	201,000,000	0	0	0	0		0
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	39,033,480,000	507,207,160,000	336,189,680,804	0	336,189,680,804	66.28	171,017,479,196
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	650,000,000	377,247,225,000	344,180,075,943	0	344,180,075,943	91.23	33,067,149,057
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada	0	470,636,748,000	426,092,155,279	0	426,092,155,279	90.54	44,544,592,721
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	39,683,480,000	1,355,091,133,000	1,106,461,912,026	0	1,106,461,912,026	81.65	248,629,220,974
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	500,777,886,000	1,871,462,328,000	1,456,709,369,679	114,559,962	1,456,594,809,717	77.83	414867518283
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,005,425,000	48,256,954,000	24,376,089,622	0	24,376,089,622	50.51	23,880,864,378
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	459,000,000	456,545,000	456,544,090	0	456,544,090	100	910
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	43,464,425,000	48,713,499,000	24,832,633,712	0	24,832,633,712	50.98	23,880,865,288
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	501,890,000,000	490,260,373,000	1,407,478,000	0	1,407,478,000	0.29	488,852,895,000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	0	84,500,000	83,072,377	0	83,072,377	98.31	1,427,623
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,828,946,000	4,284,551,000	786,762,800	0	786,762,800	18.36	3,497,788,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	507,718,946,000	494,629,424,000	2,277,313,177	0	2,277,313,177	0.46	492,352,110,823
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	76,080,000	1,000,000,000	991,000,000	0	991,000,000	99.1	9,000,000
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan	0	59,500,000	58,830,400	0	58,830,400	98.87	669,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/05/26 8:45 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
534131	Belanja Modal Jaringan	180,000,000	0	0	0	0	0	0
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	489,185,000	699,185,000	387,882,000	0	387,882,000	55.48	311,303,000
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	180,000,000	70,000,000	69,804,939	0	69,804,939	99.72	195,061
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	585,000,000	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	1,510,265,000	2,158,685,000	1,507,517,339	0	1,507,517,339	69.83	651,167,661
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	552,693,636,000	545,501,608,000	28,617,464,228	0	28,617,464,228	5.25	516884143772
	JUMLAH BELANJA	1,260,254,575,000	2,664,335,557,000	1,727,444,605,694	182,658,812	1,727,261,946,882	64.83	937,073,610,118

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 10/05/26 8:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4215	Pendapatan Perikanan					
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan	25,725,748,000	31,172,208,000	0	31,172,208,000	121.17
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan	52,905,000	111,765,000	0	111,765,000	211.26
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1,174,699,729,000	995,215,665,986	0	995,215,665,986	84.72
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4215	1,200,478,382,000	1,026,499,638,986	0	1,026,499,638,986	85.51
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,317,157,636	0	2,317,157,636	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	39,364,064	0	39,364,064	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,508,991,000	18,145,445,105	0	18,145,445,105	517.11
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	100,105,550	0	100,105,550	0
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	39,547,522	0	39,547,522	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	12,609,865,000	9,837,521,737	0	9,837,521,737	78.01
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	16,118,856,000	30,479,141,614	0	30,479,141,614	189.09
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	17,000,000	15,540,000	0	15,540,000	91.41
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	17,000,000	15,540,000	0	15,540,000	91.41
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	56,771,743,000	73,157,106,604	0	73,157,106,604	128.86
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	108,080,000	77,080,000	0	77,080,000	71.32
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	56,879,823,000	73,234,186,604	0	73,234,186,604	128.75
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	5,500,000	0	5,500,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	39,760,092	0	39,760,092	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 03

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 10/05/26 8:45 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	45,260,092	0	45,260,092	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	38,231,457	0	38,231,457	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	38,231,457	0	38,231,457	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,037,807	0	20,037,807	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	150,681,521	0	150,681,521	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,794,407	0	35,794,407	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	27,000,000	0	27,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	233,513,735	0	233,513,735	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,273,494,061,000	1,130,545,512,488	0	1,130,545,512,488	88.78
	JUMLAH PENDAPATAN	1,273,494,061,000	1,130,545,512,488	0	1,130,545,512,488	88.78

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:45 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,727,261,946,882
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,130,545,512,488	0
3.0	421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	0	31,172,208,000
3.0	421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	0	111,765,000
3.0	421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	0	995,215,665,986
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,317,157,636
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	39,364,064
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,145,445,105
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	100,105,550
3.0	425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	39,547,522
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	9,837,521,737
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	15,540,000
3.0	425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	73,157,106,604
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	77,080,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	5,500,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	39,760,092
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	38,231,457
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,037,807
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	150,681,521
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,794,407
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	27,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	64,033,956,480	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	886,601	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,972,527,725	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,517,689,352	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	863,120,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,635,896,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	682,676,779	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,587,650,590	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	9,185,845,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,355,650,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	21,645,883,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	424,470	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,482,015,440	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	453,405,102	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	16,500,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:45 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,746,053,800	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,469,836,320	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	4,291,707,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	154,530,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	954,649,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	694,532,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	86,504,446,318	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	28,867,890,010	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	29,789,186,843	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	85,183,380	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,122,997	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,554,078,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,481,223,167	0
3.0	521211	Belanja Bahan	15,038,393,578	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	552,130,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,103,556,415	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	110,162,820	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	15,972,400	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,422,964,002	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	97,291,200	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	27,113,150	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	16,334,361,583	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,030,582,321	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,865,998,972	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,500,144,024	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	37,171,152,855	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,912,751,791	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,799,111,000	0
3.0	522162	Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain	3,341,520,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	124,338,362,453	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,523,918,770	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	676,835,648	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,962,470,132	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,317,372,604	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,402,462,975	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	283,619,159	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2,037,524,640	0
3.0	523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	24,965,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:45 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5,500,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,251,151,214	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	704,360,895	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,566,581,945	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,150,285,767	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,730,045,953	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	336,189,680,804	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	344,180,075,943	0
3.0	526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	426,092,155,279	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,376,089,622	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	456,544,090	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,407,478,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	83,072,377	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	786,762,800	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	991,000,000	0
3.0	534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	58,830,400	0
3.0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	387,882,000	0
3.0	534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	69,804,939	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	11,012,634
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7,695
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,207,200
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	13,640
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	4,400,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	8,526,200
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	72,420
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	175,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	5,560,350
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	32,798,296
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1,045
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	640,720
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	1,620,000
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	362,100
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	296,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	405,550
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,290,000
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	646,000
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	93,857,315

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:45 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	39,794
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	2,742,255
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	3,563,409
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	86,209
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	11,334,980
JUMLAH			2,857,990,118,182	2,857,990,118,182

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	444,068,949	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	21,172,817,728	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	22,278,134,649	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	7,406,240,303	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	22,093,648,747
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	7,086,137,026
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,244,451,236	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	22,325,754	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	15,785,867,000	0
0.0	117129	Persediaan Dalam Proses	668,122,387,754	0
0.0	131111	Tanah	3,619,813,948,424	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	790,297,101,650	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	822,890,971,980	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,640,816,757,786	0
0.0	134112	Irigasi	1,002,339,146,658	0
0.0	134113	Jaringan	206,919,079,499	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	5,851,234,674	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	13,829,611,210	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	29,329,639,808	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	642,149,851,537
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	158,626,020,184
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,023,179,147,850
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	853,016,344,218
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	76,737,956,305
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	18,545,000
0.0	138311	Properti Investasi	215,291,136,399	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	21,621,384,923
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	2,855,976,110	0
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	2,855,976,110
0.0	162151	Software	4,349,329,382	0
0.0	162161	Lisensi	198,000,000	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	789,767,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	474,974,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	719,527,816,579	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	163,767,332,445	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	13,763,716,400	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	114,798,248,571

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,297,148,007
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	198,000,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	13,665,376,400
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	205,393,435
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	89,676,634,146
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	264,032,299,381
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	12,578,758,621
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	2,788,590,136
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,701,818,841,882
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,130,545,512,488	0
0.0	313211	Transfer Keluar	9,130,723,710	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	12,807,591,295
0.0	391111	Ekuitas	0	5,883,172,592,765
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,755,996,906	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	494,546,750	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	195,526,637
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	38,387,742,179
3.0	421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	0	31,172,208,000
3.0	421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	0	111,765,000
3.0	421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	0	992,219,676,076
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,317,157,636
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	39,364,064
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,888,992,693
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	47,166,648
3.0	425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	39,547,522
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	12,447,717,467
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	15,540,000
3.0	425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	76,065,842,609
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	77,080,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	5,500,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	39,760,092
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	27,160,349
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,967,051
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,131,144
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	2,065,779,500

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	64,022,811,846	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	878,906	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,970,307,325	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,517,673,072	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	858,720,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	6,627,369,800	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	682,676,779	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,587,578,170	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	9,096,168,117	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,350,089,650	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	21,613,085,504	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	423,425	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,481,374,720	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	453,405,102	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	16,500,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,744,433,800	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,469,474,220	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	4,207,395,900	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	154,530,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	954,157,850	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	693,694,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	86,482,216,188	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	28,916,405,224	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	30,428,326,566	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	85,183,380	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,122,997	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,553,432,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,074,148,611	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,038,393,578	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	552,130,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,103,556,415	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	110,162,820	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	15,972,400	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	16,062,124,912	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,050,631,923	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,830,815,960	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,332,026,534	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	29,860,344,745	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Beban Sewa	4,912,751,791	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,799,111,000	0
3.0	522162	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain	3,341,520,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	135,826,442,486	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,523,918,770	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	676,835,648	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,963,568,249	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,317,372,604	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,427,427,975	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	283,619,159	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,037,524,640	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5,500,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42,080,723,434	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	704,360,895	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,435,471,945	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,281,395,767	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,659,131,333	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41,551,212,265	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20,414,477,884	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	117,085,644,947	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	40,004,597,742	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,298,559,583	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	2,462,298,092	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	72,717,375	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	9,900,000	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	7,015,625	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,177,731,889	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,887,679,482	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	74,328,116	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	31,858,150	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	20,588,668,513	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	76,666,722,300	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	11,676,028,542	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	884,672,250	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	85,891,200	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	314,860,384
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	1,419,303	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 5

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	2,841,696,229	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	9,457,200	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,262,023,538	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	11,340,000	0
JUMLAH			12,070,928,971,591	12,070,928,971,591

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM
Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM
Halaman : 1
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	444,068,949	306,932,062	137,136,887	44.68
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	21,172,817,728	20,895,800,631	277,017,097	1.33
Piutang Bukan Pajak	29,684,374,952	29,827,727,397	(143,352,445)	(0.48)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(29,179,785,773)	(29,407,169,181)	227,383,408	(0.77)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	504,589,179	420,558,216	84,030,963	19.98
Persediaan	686,175,031,744	44,913,827,294	641,261,204,450	1,427.76
JUMLAH ASET LANCAR	708,296,507,600	66,539,118,203	641,757,389,397	964.48
ASET TETAP				
Tanah	3,619,813,948,424	3,635,961,793,591	(16,147,845,167)	(0.44)
Peralatan dan Mesin	790,297,101,650	747,538,103,773	42,758,997,877	5.72
Gedung dan Bangunan	822,890,971,980	787,698,310,066	35,192,661,914	4.47
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,850,074,983,943	2,867,865,609,468	(17,790,625,525)	(0.62)
Aset Tetap Lainnya	19,680,845,884	23,821,507,884	(4,140,662,000)	(17.38)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29,329,639,808	143,588,893,165	(114,259,253,357)	(79.57)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,753,727,865,094)	(2,578,908,847,631)	(174,819,017,463)	6.78
JUMLAH ASET TETAP	5,378,359,626,595	5,627,565,370,316	(249,205,743,721)	(4.43)
Properti Investasi				
Properti Investasi	215,291,136,399	187,429,347,232	27,861,789,167	14.87
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(21,621,384,923)	(17,127,800,683)	(4,493,584,240)	26.24
JUMLAH Properti Investasi	193,669,751,476	170,301,546,549	23,368,204,927	13.72
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Jangka Panjang lainnya	2,855,976,110	2,855,976,110	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2,855,976,110)	(14,279,881)	(2,841,696,229)	19,900.00
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	0	2,841,696,229	(2,841,696,229)	(100.00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	2,841,696,229	(2,841,696,229)	(100.00)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	5,812,070,382	6,306,617,132	(494,546,750)	(7.84)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	719,527,816,579	5,472,213,465	714,055,603,114	13,048.75
Aset Lain-lain	177,531,048,845	154,494,387,263	23,036,661,582	14.91
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(132,958,772,978)	(134,937,729,356)	1,978,956,378	(1.47)
JUMLAH ASET LAINNYA	769,912,162,828	31,335,488,504	738,576,674,324	2,357.00
JUMLAH ASET	7,050,238,048,499	5,898,583,219,801	1,151,654,828,698	19.52
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	353,914,326,962	7,713,337,556	346,200,989,406	4,488.34

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM
Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Diterima Dimuka	15,367,348,757	7,695,289,480	7,672,059,277	99.70
Uang Muka dari KPPN	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	369,281,675,719	15,410,627,036	353,871,048,683	2,296.28
JUMLAH KEWAJIBAN	369,281,675,719	15,410,627,036	353,871,048,683	2,296.28
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,680,956,372,780	5,883,172,592,765	797,783,780,015	13.56
JUMLAH EKUITAS	6,680,956,372,780	5,883,172,592,765	797,783,780,015	13.56
JUMLAH EKUITAS	6,680,956,372,780	5,883,172,592,765	797,783,780,015	13.56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,050,238,048,499	5,898,583,219,801	1,151,654,828,698	19.52

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	1,023,503,649,076	954,494,968,076	69,008,681,000	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	96,609,047,288	92,533,670,275	4,075,377,013	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,120,112,696,364	1,047,028,638,351	73,084,058,013	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,120,112,696,364	1,047,028,638,351	73,084,058,013	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	241,901,369,598	230,018,070,782	11,883,298,816	-
Beban Persediaan	1,973,570,682	8,219,548,806	(6,245,978,124)	-
Beban Barang dan Jasa	254,016,198,118	294,028,620,691	(40,012,422,573)	-
Beban Pemeliharaan	36,351,410,511	43,793,249,955	(7,441,839,444)	-
Beban Perjalanan Dinas	60,161,083,374	162,445,383,793	(102,284,300,419)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	109,816,091,605	121,974,977,373	(12,158,885,768)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	230,084,155,402	230,972,040,573	(887,885,171)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,528,255,148	143,265,849	2,384,989,299	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	936,832,134,438	1,091,595,157,822	(154,763,023,384)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	183,280,561,926	(44,566,519,471)	227,847,081,397	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,094,498,162	(17,684,104,493)	18,778,602,655	-
Pendapatan Pelepasan Aset	2,356,521,700	2,212,203,768	144,317,932	-
Beban Pelepasan Aset	1,262,023,538	19,896,308,261	(18,634,284,723)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,125,797,787	60,400,384,127	(58,274,586,340)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,137,137,787	103,185,244,615	(101,048,106,828)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,340,000	42,784,860,488	(42,773,520,488)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,220,295,949	42,716,279,634	(39,495,983,685)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	186,500,857,875	(1,850,239,837)	188,351,097,712	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	186,500,857,875	(1,850,239,837)	188,351,097,712	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 10/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 10/05/26 8:44 PM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,883,172,592,765	5,802,866,832,042	80,305,760,723	1.38
SURPLUS/DEFISIT-LO	186,500,857,875	(1,850,239,837)	188,351,097,712	(10,179.82)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,055,017,018)	(36,181,455,622)	34,126,438,604	(94.32)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1	42,787,497,856	(42,787,497,855)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2,250,543,656)	(80,960,612,579)	78,710,068,923	(97.22)
LAIN-LAIN	195,526,637	1,991,659,101	(1,796,132,464)	(90.18)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	613,337,939,158	118,337,456,182	495,000,482,976	418.3
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	797,783,780,015	80,305,760,723	717,478,019,292	893.43
EKUITAS AKHIR	6,680,956,372,780	5,883,172,592,765	797,783,780,015	13.56

Keterangan :

FINAL